

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



PERUBAHAN RPJMD

Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, yakni perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2 Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;

- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
- (5) Pada saat Perubahan RPJMD ditetapkan, maka RKPD dan Renja PD Tahun 2021 - 2023 wajib mempedomani ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/62/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (3), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Mengacu pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan adanya bencana pandemic covid-19 yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target indikator-indikator makro perekonomian kedepan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, Indeks Gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disesuaikan.

Atas dasar tersebut diatas, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 3

Tanggal : 21 Mei 2021

Tentang : Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-10
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-17
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-21
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	II-1
2.1.2 Topografi.....	II-6
2.1.3 Klimatologi.....	II-6
2.1.4 Geologi.....	II-7
2.1.5 Hidrologi.....	II-8
2.1.6 Penggunaan Lahan.....	II-9
2.1.7 Demografi.....	II-10
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana.....	II-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi....	II-17
2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	II-21
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga.....	II-28
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-30
2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib.....	II-30
2.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan.....	II-88
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-111

2.4.1 Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.....	II-125
2.4.2 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).....	II-134
2.4.3 Analisis Daya Tampung dan Daya Dukung KLHS.....	II-139
2.4.4 Kerjasama Daerah.....	II-152
2.4.5 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-155
2.4.6 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II-177
BAB III GAMBARA KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3
3.1.2 Neraca Daerah.....	III-12
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-20
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-23
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-23
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-27
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-30
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-36
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH.....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-2
4.1.2 Aspek Pelayanan Umum.....	IV-3
4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-14
4.2 Isu Strategis.....	IV-15
4.2.1 Isu Strategis Internasional.....	IV-15
4.2.2 Isu Strategis Nasional.....	IV-20
4.2.3 Isu Strategis Regional.....	IV-29
4.2.4 Isu Strategis Lokal.....	IV-43
4.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.....	IV-54

4.2.6	Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.....	IV-77
4.2.7	Penetapan Isu Strategis.....	IV-81
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1	Visi.....	V-1
5.2	Misi.....	V-4
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-11
5.4	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati.....	V-24
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	II-5
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2020	II-11
Tabel 2.3	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Purwakarta	II-12
Tabel 2.4	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Purwakarta	II-13
Tabel 2.5	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Purwakarta	II-14
Tabel 2.6	Persebaran Kawasan Rawan Bencana Kegagalan Waduk Kabupaten Purwakarta	II-14
Tabel 2.7	Kawasan Rawan Bencana Banjir Dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	II-15
Tabel 2.8	Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan	II-15
Tabel 2.9	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013-2020	II-18
Tabel 2.10	Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-20
Tabel 2.11	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purwakarta, 2013 – 2020	II-21
Tabel 2.12	Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-22
Tabel 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-22

Tabel 2.14	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-23
Tabel 2.15	Kelulusan (AL) Untuk SD/MI, dan SMP, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-24
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A Sederajat, dan SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-25
Tabel 2.17	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-25
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-27
Tabel 2.19	Perkembangan IPM (Metode Baru) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-28
Tabel 2.20	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-29
Tabel 2.21	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.22	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019	II-32
Tabel 2.23	Hasil Pelaksanaan Pembangunan Di Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-34
Tabel 2.24	Perkembangan Data Pembangunan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-35
Tabel 2.25	Capaian Data Pembangunan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-37
Tabel 2.26	Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-39
Tabel 2.27	Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019	II-40

Tabel 2.28	Kondisi Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (Km)	II-41
Tabel 2.29	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (Km)	II-42
Tabel 2.30	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-43
Tabel 2.31	Kondisi Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019	II-44
Tabel 2.32	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019	II-44
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Bidang Kebinamargaan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-45
Tabel 2.34	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-46
Tabel 2.35	Tingkat Pencapaian Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2019	II-48
Tabel 2.36	Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2019	II-48
Tabel 2.37	Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2019	II-49
Tabel 2.38	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-50
Tabel 2.39	Banyaknya Kendaraan yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020	II-52
Tabel 2.40	Data Terminal di Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2020	II-53
Tabel 2.41	Banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2020	II-53

Tabel 2.42	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.43	Penanganan Sampah di Perkotaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2016	II-55
Tabel 2.44	Target Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-55
Tabel 2.45	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.46	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.47	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.48	Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020	II-60
Tabel 2.49	Perkembangan Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja Yang Terdaftar) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-62
Tabel 2.50	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2019	II-63
Tabel 2.51	Jumlah Koperasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.52	Data UMKM Binaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-65
Tabel 2.53	Jumlah Perijinan Dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-68

Tabel 2.54	Jumlah Izin dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-69
Tabel 2.55	Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019	II-74
Tabel 2.56	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-75
Tabel 2.57	Hasil Pembangunan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019	II-77
Tabel 2.58	Tabel Indikator Kinerja dari Frekuensi Pengendalian Pengamanan dan Penertiban Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.59	Hasil Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2019	II-78
Tabel 2.60	Hasil Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019	II-80
Tabel 2.61	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah: Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.62	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-86
Tabel 2.64	Data Hasil Pembangunan pada Bagian Kaharti Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-87

Tabel 2.65	Jumlah Perpustakaan/Layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-88
Tabel 2.66	Penanaman Komoditas Strategis dan Unggulan Pertanian	II-89
Tabel 2.67	Produksi Tanaman Pangan dan Sayuran serta Buah Buahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019	II-90
Tabel 2.68	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019	II-91
Tabel 2.69	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019	II-91
Tabel 2.70	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-92
Tabel 2.71	Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.72	Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-94
Tabel 2.73	Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-95
Tabel 2.74	Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-96
Tabel 2.75	Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Purwakarta 2013 – 2016	II-96
Tabel 2.76	Data Pertambangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-97
Tabel 2.77	Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-98
Tabel 2.78	Data Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-98
Tabel 2.79	Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Listrik Pedesaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016	II-98

Tabel 2.80	Data Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-100
Tabel 2.81	Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-104
Tabel 2.82	Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2013-2017	II-106
Tabel 2.83	Ekspor Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-107
Tabel 2.84	Banyaknya Unit Usaha Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut Kelompok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017	II-108
Tabel 2.85	Capaian Perkembangan jumlah Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	II-109
Tabel 2.86	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 – 2017	II-111
Tabel 2.87	Tabel Capaian Indikator Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2017	II-112
Tabel 2.88	Capaian Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018	II-126
Tabel 2.89	Capaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta	II-137
Tabel 2.90	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta	II-142
Tabel 2.91	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	II-142
Tabel 2.92	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-144
Tabel 2.93	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-151

Tabel 2.94	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017	II-151
Tabel 2.95	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-155
Tabel 2.96	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-161
Tabel 2.97	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-161
Tabel 2.98	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-165
Tabel 2.99	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-170
Tabel 2.100	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-172
Tabel 2.101	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-172
Tabel 2.102	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-173
Tabel 2.103	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-174
Tabel 2.104	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-176
Tabel 2.105	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	II-178
Tabel 2.106	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	II-178
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan APBD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	III-10
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Purwakarta	III-14

Tabel 3.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kabupaten Purwakarta	III-23
Tabel 3.4	Defisit Riil Anggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2019	III-24
Tabel 3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2019	III-25
Tabel 3.6	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019	III-26
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi APBD Tahun 2013-2023 Kabupaten Purwakarta	III-32
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-37
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023 Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta	III-37
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-40
Tabel 4.1	Telaahan RPJMD Daerah Lain	IV-39
Tabel 4.2	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial	IV-56
Tabel 4.3	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi	IV-60
Tabel 4.4	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan	IV-63
Tabel 4.5	Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan	IV-71
Tabel 4.6	Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta	IV-77
Tabel 5.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	V-17

Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	V-18
Tabel 5.3	Keterkaitan Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati	V-26
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Purwakarta	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VI-7
Tabel 6.3	Keterkaitan Janji Kepala Daerah Dengan Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VI-10
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	VI-15
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta	VII-6
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD	I-10
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-20
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta	II-3
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-16
Gambar 2.4	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Kg)	II-92
Gambar 2.5	Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Kg)	II-93
Gambar 2.6	Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Ekor)	II-94
Gambar 2.7	Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Ton)	II-105
Gambar 3.1	Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Kab. Purwakarta Tahun 2013–2019	III-6
Gambar 3.2	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2019	III-8
Gambar 3.3	Proporsi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Total Pembiayaan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2019	III-9

Gambar 4.1	Visi, Misi, Arahana Presiden dan 7 Agenda Pembangunan	IV-27
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab.Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kab.Purwakarta Tahun 2013-2023	V-16
Gambar 6.1	Tema Pembangunan 5 (Lima) Tahunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	VI-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan

berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Periode Tahun 2013-2018 pada Bulan Maret 2018, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih untuk Periode Tahun 2018–2023, Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 September 2018.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam kurun waktu enam bulan setelah pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus sudah menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2018–2023. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, uji publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, RPJMD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah

terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.

2. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
5. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
6. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan alat atau instrumen pengendalian dan evaluasi bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 khususnya pada Tahap Ke IV Rencana Pembangunan Lima Tahunan. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Ke IV dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 ditekankan pada:

1. Penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Daerah Terhadap Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Barat;

3. Mempertahankan dan Mengembangkan Komoditi Unggulan Spesifik Lokal; dan
4. Mewujudkan Kawasan-Kawasan Bisnis Berskala Nasional.

Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan Teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Pendekatan Partisipatif dalam Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:

1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan Politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam Rancangan RPJMD, melalui tahapan :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian

sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
dan

3. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam Penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan **bottom up** dan **top down**, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan, yang meliputi:

a. Pendekatan Holistic-Tematik, Integratif dan Spasial.

1. Pendekatan Holistic Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan Anggaran Belanja Money Follow Programme

Mengacu pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 tanpa merubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, program dan target kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan dinamis. Apalagi dengan adanya bencana pandemic covid-19 yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan dampak yang luas terhadap tatanan kehidupan baik aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target indikator-indikator makro perekonomian kedepan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, Indeks Gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa salah satu dasar Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila “terjadi perubahan yang mendasar” yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

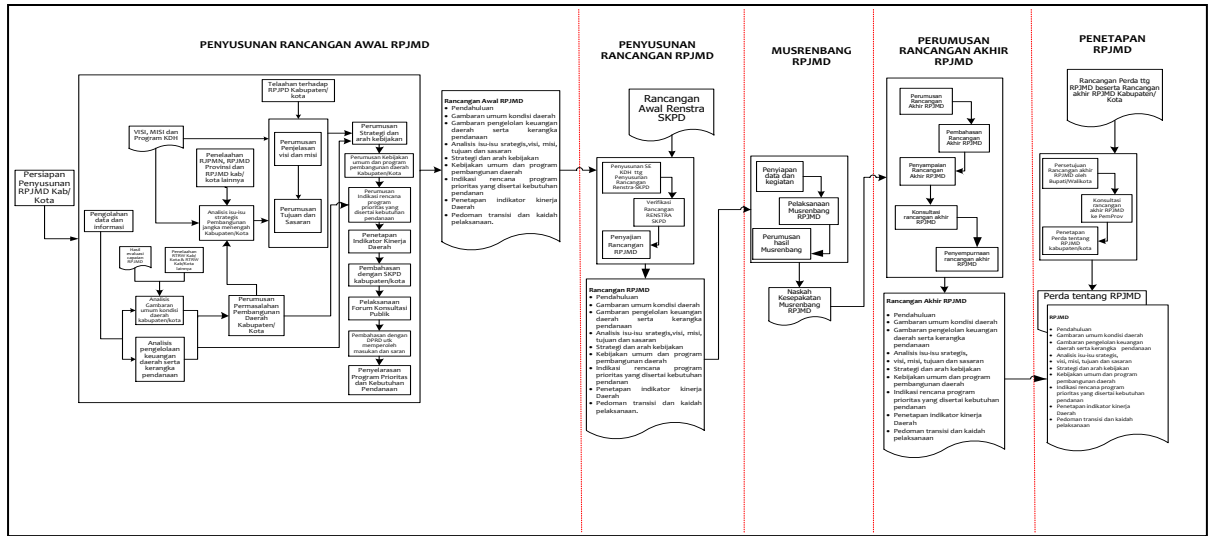
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disesuaikan.

Sedangkan tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berlaku mutatis mutandis sebagaimana tahapan penyusunan RPJMD, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan perubahan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
 - b. Konsultasi Publik;
 - c. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala daerah dengan DPRD;
 - d. Konsultasi ke Gubernur;
3. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD;

Adapun tahapan proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 236);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 1).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPJMD.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan RTRW Kabupaten Purwakarta

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Purwakarta Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta

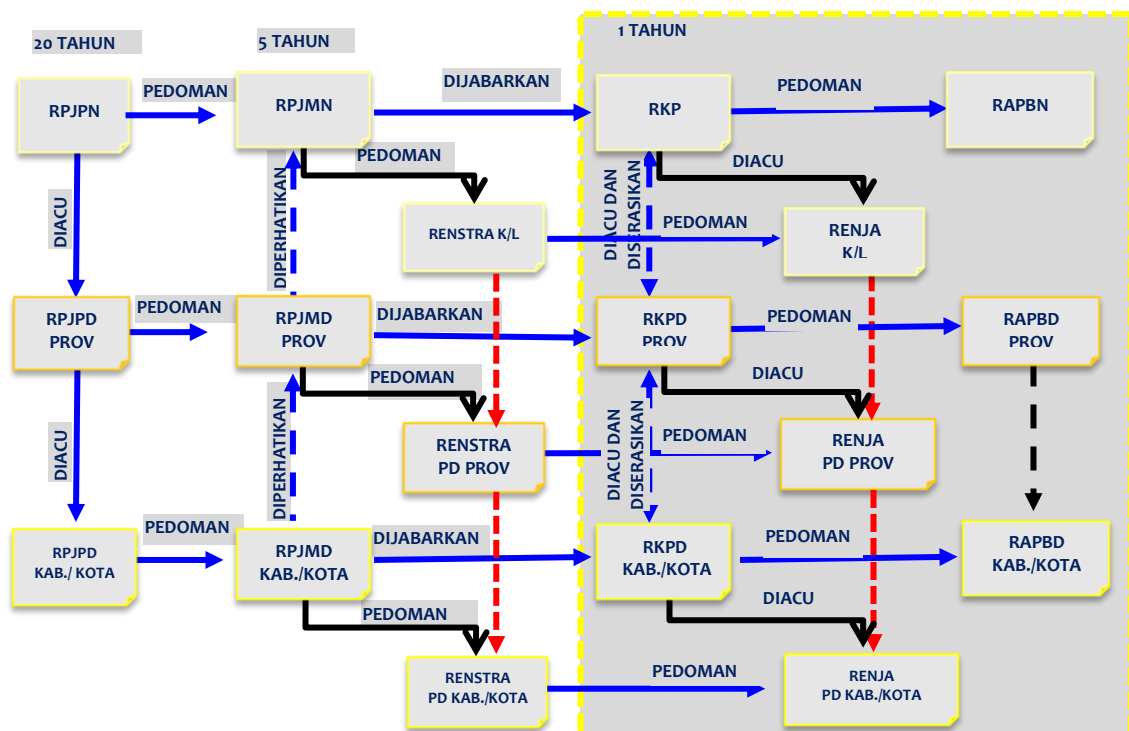
Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (Dalam Renstra PD).

Untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan tersebut meliputi visi, misi, tujuan, isu strategis, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pemangku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain keterkaitan dan keselarasan tersebut, RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 juga harus menjadi pedoman dan selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan rencana tahunan RKPD

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya



Sumber : Bappelitbangda

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
2. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta;
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
6. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
7. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;

8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Dokumen RPJMD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, Bab ini memuat hasil RPJMD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's).

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah. Selanjutnya Misi dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya ditetapkan Program Pembangunan Daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan di Kabupaten Purwakarta, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2023.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

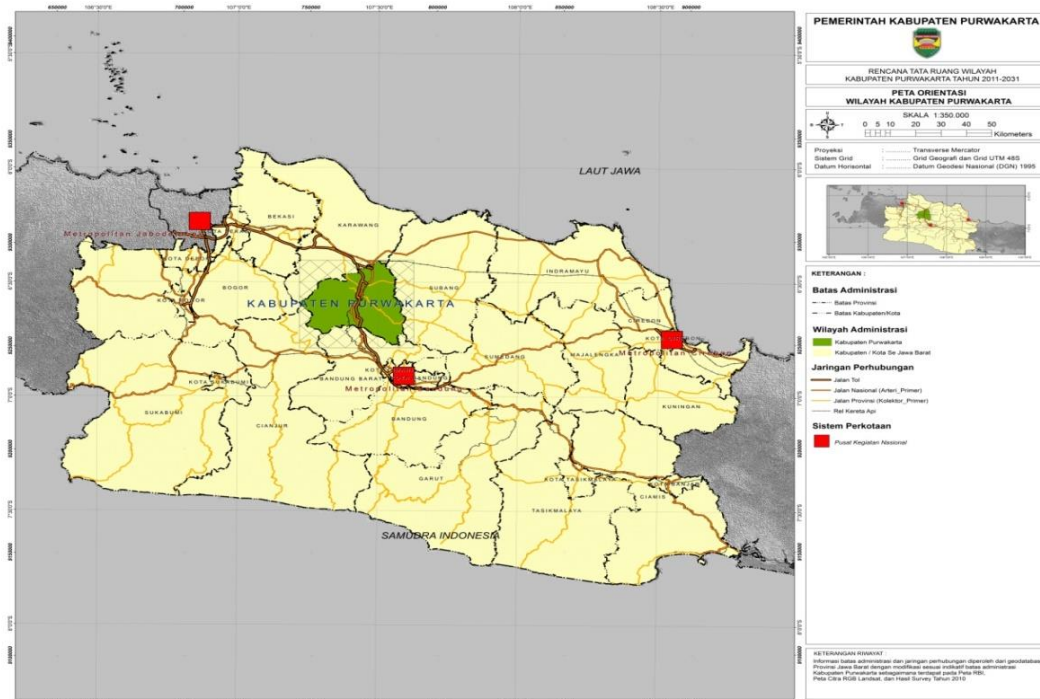
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Peta orientasi Kabupaten Purwakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

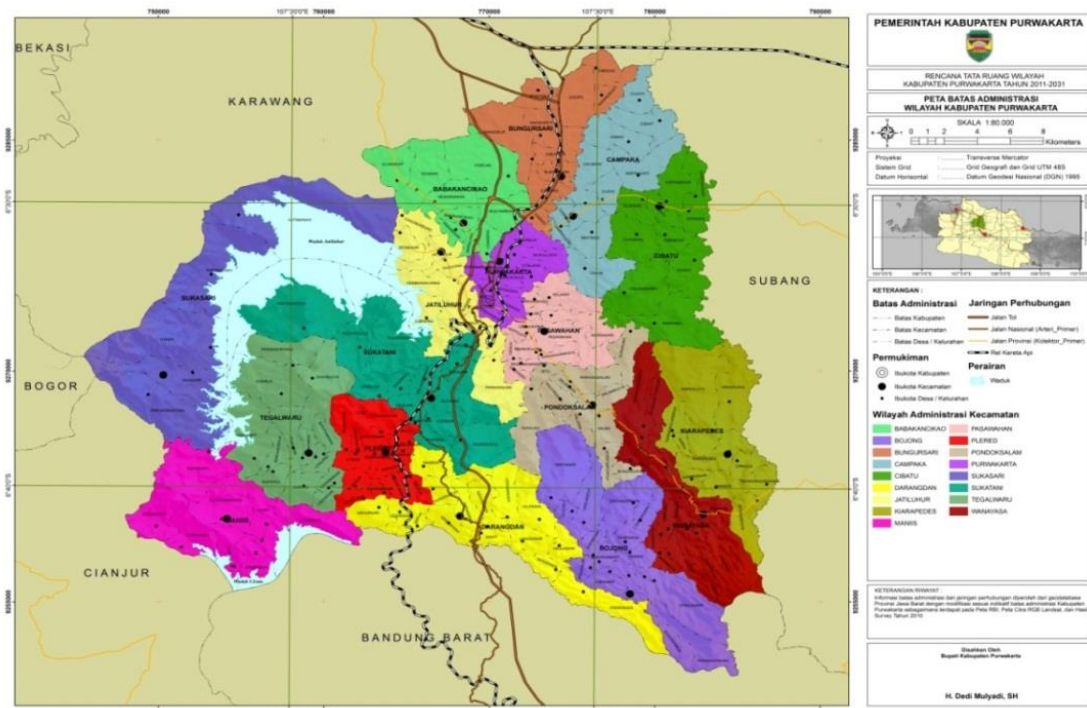
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 hektar (971,72 km²) atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 505 dusun, 1.125 Rukun Warga (RW), dan 3.498 Rukun Tetangga (RT).

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m

- a. Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100-2.036 m dpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
- b. Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500-1.100 m dpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.
- c. Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35-499 m dpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta



Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang unik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan,

tenggara dan barat, mendatar di tengah dan utara. Di Purwakarta juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai salah satu tenaga pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik untuk daerah Jawa Bali.

Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas ke Jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional-internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.

Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat ditanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.

Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih

dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi antar sektor pembangunan daerah lainnya. Luas Wilayah dan jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/ KELURAHAN
	Km ²	%	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	56,50	5,81	10
17. Bungursari	54,66	5,63	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu seluas 95,43 km² atau 9,82%, sedangkan Kecamatan Purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 24,83 km² atau 2,56%. Untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16

desa, sedangkan Kecamatan Babakancikao merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 9 desa.

2.1.2 Topografi

Berdasarkan data BPS Kab. Purwakarta,[2] wilayah Kab. Purwakarta berdasarkan relief buminya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Wilayah Pegunungan. Wilayah ini terletak di tenggara dengan ketinggian 1.100 sd 2.036 M DPL, meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
2. Wilayah Perbukitan dan Danau. Wilayah ini terletak di barat laut dengan ketinggian 500 sd 1.000 M DPL, meliputi 33,8% dari total luas wilayah.
3. Wilayah Daratan. Wilayah ini terletak di utara dengan ketinggian 35 sd 499 M DPL, meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

2.1.3 Klimatologi

Purwakarta beriklim panas yang terbagi atas zona panas dan zona sedang, berkisar antara 22°-32° C pada siang hari 17°-26° C pada malam hari. secara agroklimat, Purwakarta berada di daerah lembab permanen (1-4 bulan basah/tahun dengan curah hujan 100 mm/bulan). jumlah bulan kering rata-rata 1-3 bulan/tahun. Curah hujan antara 1.413 mm - 4.501 mm/tahun, dengan curah hujan rata-rata 3.039 mm/tahun. curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember. Kondisi ini biasa terjadi di Kecamatan Wanayasa (4.501 mm). Hari hujan paling banyak adalah 148 hari. Mengenai resevoir atau resapan air, Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa sumbe mata air yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan air. Diantaranya terdapat di Gunung Sanggabuana, Gunung parang, serta Pasir Katungandak di wilayah Kecamatan Wanayasa dan Pasir Madang di Kecamatan Campaka. Selain itu, zona air tanah dari ukuran sedang

sampai dangkal terdapat di wilayah Sungai Cikao di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Plered dan Kecamatan Campaka. Untuk zona air tanah ukuran dalam, terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Wanayasa. Untuk air genangan antara lain adalah Bendungan Ir. H. Djuanda dan sebagian area Bendungan Cirata.

2.1.4 Geologi

Kondisi geologi daerah Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klastik, berupa batu gamping (kapur), batu lempung, batu pasir dan batuan vulkanik seperti tuf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglomerat dan napal. Untuk jenis batuan beku terobosan meliputi andesit, diorite, vetrofir, basal dan gabro. Batuan ini umumnya bertebaran di bagian barat daya wilayah Kabupaten Purwakarta. Jenis Batuan napal atau batu pasir kuarsam merupakan batuan yang tertua di wilayah Kabupaten Purwakarta yang sebarannya terdapat di tepi Bendungan Jatiluhur (Bendungan Ir. H Djuanda).

Sedangkan batu lempung yang usianya lebih muda (miosen) tersebar di sekitar wilayah barat laut dan bagian timur Kabupaten Purwakarta berikut endapan bekas gunung api tua yang berasal dari gunung Burangrang dan Gunung Sunda, yaitu berupa tuf, lava andesit basaltis, breksi vulkanik dan lahar. Pada bagian permukaan batuan itu terdapat endapan hasil erupsi gunung api muda yang meliputi batu pasir, lahar, lapili, breksi lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan laca scoria.

Berdasarkan kondisi dan jenis batuan di atas, maka di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat kandungan geologi berupa batu kali batu andesit, batu gamping (kapur), tanah lempung, pasir, pasir kuarsa, pasir batu (sirtu), tras, fosfat, barit dan batu gips. Sebagian besar jenis tanah adalah tanah latosol dan sebagian kecil adalah tanah aluvial, andosol, grumosol, litosol, podsolik dan regosol. Berdasarkan potensi yang dipaparkan di atas telah mendorong munculnya kegiatan pertambangan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta berada pada cekungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan kemiringan 0-40% dan DAS Cilamaya. Hal itu sangat berpengaruh pada hidrologi dan sistem drainase daerah Purwakarta. Pada cekungan itu dibangun Bendungan Ir. H. Djuanda di Jatiluhur (7.757 ha.) dan Cirata (1.182 ha.), yang berfungsi sebagai "flow control", irigasi, pembangkit tenaga listrik, juga sebagai sumber air minum DKI Jakarta. Luas kedua bendungan tersebut setara dengan 9,19% luas wilayah Kabupaten Purwakarta. Pembangunan bendungan tersebut dimungkinkan oleh keberadaan sejumlah sungai.

2.1.5 Hidrologi

Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup, sungai-sungai di Kabupaten Purwakarta adalah (1) Sungai Cilamaya yang merupakan Induk Sungai (orde 1 di DAS) dengan panjang 62 Km, lebar rata-rata 30 m, dan debit air 366 m³/detik. Sungai Cilamaya ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu antara lain: Sungai Ciracas, Sungai Cijambe, Sungai Cisaat, Sungai Cibongas, Sungai Cilandak, dll. (2) Sungai Cikao, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang sungai 45 Km, lebar 40 m. Sungai Cikao terdiri dari beberapa sungai orde 2 DAS, yaitu antara lain: Sungai Cigintung, Sungai Cigadung, Sungai Cikembang, Sungai Cicadas, Sungai Cigajah, Sungai Cisitu, Sungai Cibingbin, Sungai Cigorogoy, Sungai Ciledug, Sungai Citajur, Sungai Cigalugur, Sungai Cinangka, dll. (3) Sungai Cilangkap, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 16 Km, lebar 4 m. Sungai ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu Sungai Cioray dan Sungai Cijalu. (4) Sungai Ciampel yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 14 Km dan lebar sungai 4 m. Sungai Ciampel ini mempunyai orde 2 di DAS, yaitu Sungai Cikapuk, Sungai Sumurbeunying, Sungai Cilabuh, Sungai Ciwaru dan Sungai Cikantong.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Secara umum intensitas pemanfaatan lahan Kabupaten Purwakarta didominasi oleh permukiman dan perumahan, hal ini menunjukkan sebagian besar wilayah ini telah bersifat urban. Penggunaan lahan untuk kegiatan perumahan dan permukiman termasuk penggunaan yang paling dominan dalam pemanfaatan lahan terbangun kegiatannya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

- Perumahan/permukiman yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang lazim disebut perkampungan. Perumahan penduduk secara individual ini tersebar, dari bentuk, ukuran kapling, sempadan bangunan maupun lokasinya. Penempatan perumahan individual relatif kurang ada kesamaan. sehingga terkesan tidak teratur.
- Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara masal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas yang umumnya disebut kompleks perumahan.

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus merapat, Orientasi akses perumahan penduduk umumnya memanfaatkan jaringan jalan utama kota. Perumahan di kawasan pusat kota relatif banyak terkelompok pada kawasan 'dalam' dengan jaringan jalan penghubung atau jalan lingkungan yang relatif sempit dan berupa gang, serta kepadatannya sudah relatif tinggi.

Kondisi orientasi akses yang tetap memanfaatkan jalan utama kota sebagai akses pergerakan lokal memudahkan timbulnya kemacetan lalu lintas di jalan utama. Sedangkan kompleks perumahan pada umumnya pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan.

Sebaran perumahan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, sebagian besar berada di Kecamatan Purwakarta dan penyebarannya cukup besar seperti di Kelurahan Nagrikaler, Kelurahan Munjuljaya, Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Tegalmunjul dan Desa Citalang. Pembangunan dan pengembangan perumahan di Kecamatan Purwakarta masih terus berlangsung sampai saat ini, baik yang di kerjakan oleh pengembang besar maupun yang berskala kecil.

2.1.7 Demografi

Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Purwakarta tercermin dari jumlah Penduduk Purwakarta. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai sebanyak 852.521 jiwa. Sedangkan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2019 mencapai sebanyak 950.100 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Purwakarta tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -0,35 persen.

Data jumlah penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada perbedaan, hal ini dikarenakan tidak samanya indikator yang digunakan, misalnya BPS tidak menghitung penduduk yang tidak berada di Kabupaten Purwakarta minimal selama 6 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menghitung penduduk tersebut selama masih mempunyai KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga. Dalam Dokumen RKPD ini kami menggunakan data dari BPS, dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk dari BPS menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berbagai indikator makro pembangunan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional/pusat.

Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2020, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
		2017	2018	2019	2020	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
1	Jatiluhur	69,324	70,166	69,94	73,95	1,29	2,22	2,22	1,73
2	Sukasari	14,654	14,631	15,9	17,26	-0,08	1,35	1,35	1,73
3	Maniis	34,021	34,311	33,09	36,05	0,92	1,31	1,31	1,41
4	Tegalwaru	45,888	45,964	50,37	53,18	0,24	1,4	1,4	1,82
5	Plered	77,549	78,361	79,35	83,43	1,11	2,57	2,57	1,56
6	Sukatani	68,88	69,514	72,71	76,91	0,98	2,3	2,3	1,84
7	Darangdan	63,92	64,356	68,39	70,89	0,75	1,33	1,33	1,68
8	Bojong	47,602	47,93	49,25	53,00	0,75	1,04	1,04	1,65
9	Wanayasa	41,956	42,303	41,65	43,30	0,89	0,77	0,77	1,04
10	Kiarapedes	23,409	23,249	27,6	28,39	-0,58	0,21	0,21	1,81
11	Pasawahan	44,023	44,392	47,66	49,46	0,91	1,07	1,07	1,95
12	Pondoksalam	27,397	27,47	30	30,73	0,34	0,64	0,64	1,51
13	Purwakarta	189,057	191,776	174,74	179,23	1,52	1,33	1,33	0,78
14	Babakancikao	56,406	57,494	55,98	59,91	2,02	1,84	1,84	3,76
15	Campaka	47,967	48,681	45,91	50,34	1,57	1,74	1,74	0,57
16	Cibatu	28,685	28,756	31,2	31,27	0,34	0,63	0,63	1,43
17	Bungursari	62,599	64,06	56,36	60,57	2,44	1,12	1,12	1,62
JUMLAH		943,34	953,41	950,10	997,87	1,14	1,07	1,35	1,54

Sumber : BPS, Purwakarta Dalam Angka 2021

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana (KRB) pada daerah Purwakarta berdasarkan data yang didapatkan dari RTRW Kabupaten Purwakarta dan Badan Geologi Kementerian ESDM yaitu gerakan tanah, gempa bumi, banjir dan kegagalan waduk. Paragraf di bawah akan menjelaskan ke-empat KRB tersebut.

Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang cukup memiliki potensi bencana gempa yang cukup besar. Hal ini dikarenakan terdapatnya

sesar aktif pada bagian selatan terdapat Sesar Cimandiri dan Lembang di bagian utara yaitu Sesar Baribis. Hal ini membuat hampir 78% berada pada Kawasan Rawan Bencana Menengah dengan intensitas VII-VIII MMI. Sisanya adalah KRB Tinggi pada Kecamatan Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes.

Tabel 2.3
Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Kabupaten Purwakarta

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempabumi dengan intensitas VII-VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>).	71.617,23	Seluruh Kecamatan	77,96
Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempa bumi kuat dengan skala intensitas lebih dari VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>).	20.249,63	Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes	22,04

Sumber: Badan Geologi

Kawasan rawan bencana gerakan tanah pada Kabupaten Purwakarta didominasi lebih dari setengah wilayahnya adalah KRB menengah yang hampir tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan dengan potensi gerakan tanah tinggi hanya kurang dari 10% dan beberapa berada pada bagian Selatan hingga bagian tengah, Tenggara dan Barat. Sedangkan Kawasan dengan kerentanan rendah sampai sangat rendah memiliki persentase masing-masing 27,45% dan 12,66%. Kawasan ini cukup banyak tersebar di bagian utara Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.4
Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah
Kabupaten Purwakarta

Kelas	Keterangan	Luas (Ha)	Kecamatan	Persentase (%)
Sangat Rendah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.	11.670,28	Babakancikao, Bungursari, Campaka, Cibat, Purwakarta, Tegalwaru, Maniis	12,66
Rendah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali.	25310,29	Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Pondoksalam	27,45
Menengah	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.	47677,32	Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Campaka dan Bungursari	51,70
Tinggi	Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat	7559,46	Sukasari, Tegalwaru, Sukatani, Maniis, Plered Darangdan, Pasawahan, Pondoksalam, Bojong, Wanayasa	8,20

Sumber: Badan Geologi

Selanjutnya adalah Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Kegagalan Waduk. KRB Banjir terdapat pada Kecamatan Babakancikao, Sukasari dan Jatiluhur yang memiliki total luas 690,17 Ha. Sedangkan KRB Kegagalan Waduk terpusat pada 2 lokasi, yaitu pada Waduk Jatiluhur meliputi kecamatan Sukasari, Babakancikao, Jatiluhur dan pada Waduk Cirata meliputi kecamatan Manis, Darangdan, Plered, Tegalwaru. Kedua lokasi tersebut memiliki luas 3.747,18 Ha.

Tabel 2.5
Persebaran Kawasan Rawan Bencana Banjir
Kabupaten Purwakarta

Kelas Unsur	Luas (Ha)	Kecamatan
Sangat Tinggi	72,21	Babakancikao dan Jatiluhur
Tinggi	266,36	Sukasari, Babakancikao dan Jatiluhur
Menengah	351,60	Sukasari, Babakancikao dan Jatiluhur

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Tabel 2.6
Persebaran Kawasan Rawan Bencana
Kegagalan Waduk Kabupaten Purwakarta

Kelas Unsur	Luas (Ha)	Kecamatan
Sedang	2259,17	Sukasari, Babakancikao, Jatiluhur, Tegalwaru, Maniis, Plered, Darangdan
Tinggi	1488,02	Sukasari, Babakancikao, Jatiluhur, Tegalwaru, Maniis, Plered, Darangdan

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir pada permukiman perkotaan mencapai 123,5 Ha dengan persebaran pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Babakanckao dan Jatiluhur. Kawasan dengan potensi

sangat tinggi mencapai 3,9 Ha dan berada hanya pada Babakancikao. Sedangkan pada Kecamatan Jatiluhur dominan dengan potensi bencana banjir menengah. Berikut merupakan tabel dan gambar yang menjelaskan antara kawasan permukiman perkotaan dengan rawan bencana banjir.

Tabel 2.7
Kawasan Rawan Bencana Banjir
Dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan

Kecamatan	Kelas	Luas (Ha)
Babakancikao	Menengah	42,863173
Babakancikao	Sangat Tinggi	3,914049
Babakancikao	Tinggi	21,624621
Jatiluhur	Menengah	50,725791
Jatiluhur	Tinggi	4,364611

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Tabel 2.8
Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan Peruntukkan
Permukiman Perkotaan

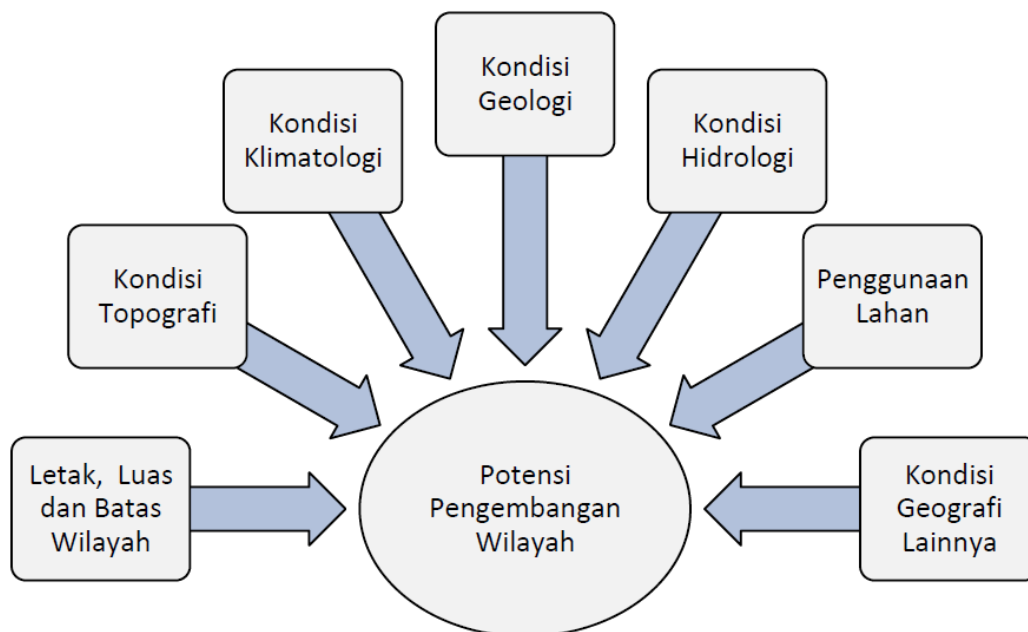
Kecamatan	Kelas	Luas (Ha)
Babakancikao	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1218,998400
Bojong	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	238,488460
Bungursari	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1391,025600
Campaka	Kawasan Rawan Bencana Menengah	292,289090
Cibatu	Kawasan Rawan Bencana Menengah	117,518920
Darangdan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	25,276698
Darangdan	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	522,027860
Jatiluhur	Kawasan Rawan Bencana Menengah	959,190100
Kiarapedes	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	40,836198
Maniis	Kawasan Rawan Bencana Menengah	112,294550
Maniis	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	5,335957
Pasawahan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	542,988790
Plered	Kawasan Rawan Bencana Menengah	302,468970
Pondoksalam	Kawasan Rawan Bencana Menengah	109,986170
Purwakarta	Kawasan Rawan Bencana Menengah	1583,489300

Kecamatan	Kelas	Luas (Ha)
Sukasari	Kawasan Rawan Bencana Menengah	12,141346
Sukatani	Kawasan Rawan Bencana Menengah	395,611030
Tegalwaru	Kawasan Rawan Bencana Menengah	148,682990
Wanayasa	Kawasan Rawan Bencana Menengah	36,621561
Wanayasa	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	198,792000

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Secara umum, gambaran kerangka pemikiran potensi pengembangan Kawasan budidaya kabuoaten purwakarta dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut “harga berlaku” dan PDRB berdasarkan “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010. PDRB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2013-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013-2020

NO	PDRB	TAHUN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Atas dasar harga berlaku (milyar)	40.609,1 5	45.496,5 8	50.116,7 1	54.575,7 1	58.529,9 5	63.072,8 3	67.571,8 7	67 176,2 0
2	Atas dasar harga konstan 2010 (milyar)	34.216,4 2	36.177,3 2	37.899,0 2	40.169,9 0	42.239,3 0	44.344,2 7	46.287,9 8	45 332,6 5
3	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010	7,15	5,73	4,76	5,99	5,15	4,98	4,38	-2,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Data Diolah)

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sektor perekonomian baik daerah, nasional bahkan global, dimana banyak para pelaku usaha industry mengalami keterpurukan dalam menjalankan usahanya akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan sehingga hal ini menurunkan daya beli masyarakat pada beberapa sektor industry, seperti pariwisata, otomotif, manufaktur, perhotelan, travel, perdagangan, transportasi dll. Hal ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang harus menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang

semakin meluas yang dapat mengancam keselamatan nyawa banyak seseorang.

b. Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintahan. Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/ jasa yang dikonsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/ kewajiban serta nilai kontrak/ transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan indeks harga konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (*demand*) dengan penyediaan (*supply*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta inflasi tahun 2019 mencapai angka 2.63 persen, atau turun dari tahun 2018 yang mencapai angka 2.65 persen. Berikut adalah Tabel Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2020:

Tabel 2.10
Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No	Tahun	Jumlah (%)
1	2013	9,32
2	2014	8,51
3	2015	4,16
4	2016	6,16
5	2017	3,69
6.	2018	3,1
7.	2019	3,19
8.	2020	1,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

c. Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Purwakarta tahun 2019 adalah Rp.367.273. Angka ini meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp.378.287. Sedangkan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah sebanyak 80.170 orang atau sebesar 8,27% dari penduduk Kabupaten Purwakarta. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 71.860 orang. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dari keterpurukan pada sektor perekonomian, sehingga meningkatkan permasalahan sosial masyarakat.

Adapun garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk
Miskin di Kabupaten Purwakarta, 2013 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	217.270	83.600	9,28
2014	281.524	80.300	8,80
2015	296.477	83.940	9,14
2016	312.499	83.550	8,98
2017	325.607	85.250	9,06
2018	352.061	75.940	7,99
2019	367.273	71.860	7,48
2020	378.287	80.170	8,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Purwakarta

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak usia Dini merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019 yang terus bergerak naik dari 22,62% pada tahun 2013 dan mencapai sebesar 67,09% di tahun 2019. Berikut adalah Tabel Pendidikan Anak usia Dini di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.12
Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

Uraian	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKK Pendidikan Anak Usia Dini	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64	61,23	67,09

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang terus bergerak naik dari angka 11,22 pada tahun 2013 kemudian mencapai sebesar 12,10 di tahun 2019. Berikut adalah Tabel Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,22	11,33	11,44	11,82	11,89	12,09	12,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata Rata Lama Sekolah (RLS), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan

formal. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 capaian Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar 7,11 tahun dan meningkat perlahan sebesar 7,92 tahun pada tahun 2019. Masih besarnya proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah mempunyai kontribusi sebagai penyebab relatif lambatnya kemajuan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta. Berikut adalah Tabel Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

Indeks	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,11	7,17	7,35	7,42	7,74	8,71	7,92

Sumber: Disdukcapil, Disdik dan BPS Kabupaten Purwakarta

e. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan atau dalam hal ini Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019 untuk SD/MI secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2013-2019, Angka Kelulusan (AL) untuk SD/MI di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2014 telah mencapai sebesar 100,00%, sedangkan Angka Kelulusan (AL) untuk SMP di Kabupaten Purwakarta tahun 2015 sudah mencapai 100%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Angka Kelulusan (AL) untuk SD/MI, dan SMP, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.15
Kelulusan (AL) Untuk SD/MI, dan SMP,
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP(%)	98,99	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

f. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019 untuk SD/MI/Paket A Sederajat secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A sederajat di Kabupaten Purwakarta telah mencapai sebesar 98,35% dan pada Tahun 2019 mencapai sebesar 99,53%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 sebesar 96,93% dan tahun 2019 sebesar 99.72%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs Sederajat, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

g. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019 untuk SD/MI/Paket A Sederajat secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A sederajat di Kabupaten Purwakarta telah mencapai sebesar 98,35% dan pada Tahun 2019 mencapai sebesar 99,53%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013 sebesar 96,93% dan tahun 2019 sebesar 99.72%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Angka

Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs Sederajat, di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk
SD/MI/Paket A Sederajat, dan SMP/MTs Sederajat
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A Sederajat	98,35	99,34	99,48	99,50	99,51	99,52	99,53
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70	99,72	99,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

h. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Kebijakan Pembangunan dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat. Pencapaian hasil pembangunan Bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017, dapat dilihat dan diukur dari capaian kinerja pada Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Derajat Kesehatan masyarakat ini dihitung dari tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

NO.	URAIAN	TAHUN							KETERANGAN
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Jumlah Kasus Kematian								
	a. Neonatal	95	108	107	95	45	57	54	Penyebab Kematian: Asfiksia, TN, Bawaan, BBLR, Cacat

NO.	URAIAN	TAHUN							KETERANGAN
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									Pneumonia, Masalah Laktasi dan Lain-Lain.
	b. Bayi	123	138	130	115	52		72	Penyebab Kematian: ISPA, Diare, Pneumonia, dan Lain-Lain.
2.	Jumlah Kasus Kematian ibu	18	28	30	25	9	32	23	Penyebab Kematian: Pendarahan, PEB, Ekslamsia, Infeksi, Partus Lama dan Lain-Lain

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian neonatal dan ibu dalam kurin waktu lima tahun mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang positif dari dampak pelayanan yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat diantaranya adalah dengan dilakukannya penyuluhan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan status gizi masyarakat (ibu hamil dan bayi); peningkatan kesehatan anak serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

i. Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2013 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar 69,95 tahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 70,71 tahun 2019. Berikut adalah Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

Indeks		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (Tahun)	AHH	69,95	69,96	70,26	70,34	70,42	70,61	70,71

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta

j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (United National Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (princial means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan, (UNDP, 1995). Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih baik dari pada teori-teori prmbangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan-peningkatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan

oleh tim ekonomi dan pembangunan. Tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang di kualifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup (AHH). Pengetahuan dikualifikasikan dalam kemampuan baca tulis/Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Bersekolah (RLS). Daya beli dikuantifikasikan dalam kemampuan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Perkembangan IPM Kabupaten Purwakarta 2013-2019 menunjukkan trend yang meningkat, pencapaian IPM Kabupaten Purwakarta tahun 2019 telah mencapai 70,67. Dalam kurun waktu tersebut, dapat dikatakan bahwa pada seluruh komponen IPM terjadi peningkatan. Berikut adalah Tabel Perkembangan Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2019.

Tabel 2.19
Perkembangan IPM (Metode Baru) di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2019

Indeks	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IPM	67,09	67,32	67,84	68,56	69,28	69,98	70,67

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa. Pembangunan Bidang Seni, Budaya Dan Olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina pada tahun 2019 sebanyak 10 kelompok, sedangkan target untuk tahun 2019 yaitu sebanyak 20 kelompok, artinya bahwa target kinerja untuk indikator kinerja tersebut belum tercapai. Sedangkan jumlah event pagelaran seni budaya yang diikuti dan diselenggarakan sampai dengan pada tahun 2019 sebanyak 5 event dari target 4 event atau sebesar 125%. Sedangkan untuk indikator kinerja persentase seni dan budaya yang dibina dan dilestarikan pada tahun 2019 baru mencapai 50% dari target 80% atau 62,50%, seperti terlihat pada Tabel 2.21 di bawah ini.

Berikut adalah Tabel Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.20
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2019

No	Capaian Pembangunan	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	-	3	3	4	4	18	5
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Buah)	4	4	5	5	6	6	6
3.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Buah)	11	11	12	13	14	8	44

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Purwakarta

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2013-2018, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Purwakarta mencapai sekitar 30 buah. Sementara jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2018 mencapai sekitar 30 buah dengan kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan mencapai sebanyak 76 kali.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Pelayanan umum di sektor pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kabupaten purwakarta ditujukan untuk menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM terutama lebih difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terhadap bidang pendidikan. Relatif baiknya capaian kinerja pada Urusan Pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan dalam rentang waktu 2013-2018. Data IKK Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun (%)					Trend (+/-)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64	23,02
2	IKK Penduduk Yang Berusia Dibawah 15 Tahun Melek Huruf	96,50	97,17	97,27	99,55	99,57	0,02
3.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Sederajat	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53	0,03
4.	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Sederajat	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70	0,01
5.	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Sederajat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts Sederajat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
8	IKK Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100	100	100	100	100
9	IKK Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A Sederajat ke SMP/Mts Sederajat	100	99,98	100	100	100	100
10	IKK Angka Melanjutkan dari SMP/Mts Sederajat ke SMA/SMK/MA Sederajat	100	99,53	99,54	100	100	100

No.	Uraian	Tahun (%)					Trend (+/-)
		2013	2014	2015	2016	2017	
11.	IKK Guru-Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV	79,60	89,62	91,05	92,27	92,27	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Adapun capaian kinerja pada urusan pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan dalam rentang waktu 2018-2019. Untuk lebih jelasnya mengenai data Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.20 di bawah ini.

Dengan melihat Tabel 2.20, berdasarkan data tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan bahwa dari 12 indikator kinerja kunci urusan pendidikan masih terdapat 3 indikator yang belum memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.20 dari 12 indikator yang ada atau 25%. Jika disandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2018 pada urusan pendidikan di Kabupaten Purwakarta maka pada tahun 2019 tercatat IKK pendidikan Angka Partisipasi Kasar PAUD meningkat 5,86 point; IKK penduduk yang berusia dibawah 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) tidak mengalami peningkatan, tetapi sudah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD tahun 2019; IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A sederajat meningkat 0,01 point, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD tahun 2019 dengan alasan terdapat anak dari Kabupaten Purwakarta yang bersekolah di luar Purwakarta di daerah perbatasan; IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ paket B sederajat belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD 2019 yang ditargetkan sebesar 100% dengan alasan terdapat anak dari Kabupaten Purwakarta yang bersekolah di luar Purwakarta di daerah perbatasan; IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI sederajat, SMP/ MTs sederajat, masih terkoreksi pada 0,0 point, IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs tetap bertahan pada persentase 100%; angka melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs sudah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen

RPJMD 2019 yang ditargetkan sebesar 100,00%; Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal sebesar 12,16 point dibandingkan dengan tahun 2018; IKK guru-guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D.IV tetap 95,32%, masih di bawah target RPJMD Tahun 2019 sebesar 96%, yang menjadi alasan belum tercapainya target adanya guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi, sedang mengikuti beasiswa S1 dan Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar 97,75% atau meningkat 0,70 point dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 97,05% dan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 97,00. Pada prinsipnya, dari seluruh IKK urusan pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.

Tabel 2.22
Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Urusan Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2018	TARGET RPJMD TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	ALASAN TARGET TIDAK TERCAPAI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61,23	52,00	67,09	
2.	Penduduk Yang Berusia Di bawah 15 Tahun Yang Melek Huruf	99,56	99,56	99,56	
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	99,52	100,00	99,53	Terdapat anak dari Kabupaten Purwakarta yang bersekolah di luar Purwakarta di daerah perbatasan
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	99,72	100,00	99,72	Terdapat anak dari Kabupaten Purwakarta yang bersekolah di luar Purwakarta di daerah perbatasan
5.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	0,00	0,00	0,00	
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	0,00	0,00	0,00	
7.	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	100,00	100,00	100,00	
8.	Angka Kelulusan (AL) SMP	100,00	100,00	100,00	
10.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal	82,88	84,00	95,40	
11.	Guru-Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D.IV	95,32	96,00	95,32	Guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi, sedang mengikuti beasiswa S1

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2018	TARGET RPJMD TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	ALASAN TARGET TIDAK TERCAPAI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12.	Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	97,05	97,00	97,75	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2019-2020.

Berdasarkan data tahun 2019, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dapat dikatakan bahwa indikator kinerja kunci urusan pendidikan memenuhi target RPJMD tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.23. Jika disandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2018 pada urusan pendidikan di Kabupaten Purwakarta maka pada tahun 2019 tercatat IKK pendidikan anak usia dini meningkat 5,86 point; IKK penduduk yang berusia dibawah 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) tidak mengalami peningkatan; IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A sederajat mengalami peningkatan sebesar 0,16 point; sedangkan yang lainnya tetap sama.

b. Kesehatan

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasana kesehatan yang baik dan tersebar di setiap kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2019, di Kabupaten Purwakarta terdapat 1 unit rumah sakit negeri (daerah), 1 unit rumah sakit negeri (TNI), 8 unit rumah sakit umum swasta, 1 unit rumah sakit ibu dan anak swasta, 20 unit Puskesmas dan telah terakreditasi, 6 unit Puskesmas DTP, 12 unit PONED, 49 unit Puskesmas pembantu, 120 Poliklinik kesehatan, dan 1.030 Posyandu yang tersebar di kecamatan, 19 unit Poskesdes yang diimbangi juga dengan peningkatan jumlah tenaga medis dan keperawatan.

Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2019 telah membangun 6 unit Puskesmas Rawat Inap (DPT/Dengan Tempat Perawatan) yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kecamatan

Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Maniis dan Kecamatan Darangdan. Selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri 12 unit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang berlokasi di Kecamatan Pesawahan, Kecamatan Campaka, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Maniis. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2019.

Tabel 2.23
Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Di Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit					
	a. Rumah Sakit Negeri (Daerah)	1	1	1	0	0
	b. Rumah Sakit Negeri (TNI)	1	1	1	1	1
	c. Rumah Sakit Umum Swasta	5	5	5	5	5
	d. Rumah Sakit Khusus Swasta	1	1	1	1	1
	e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta	4	4	3	3	3
	f. Rumah Bersalin	14	14	15	15	15
2.	Jumlah Puskesmas					
	a. Jumlah Puskesmas	20	20	20	20	20
	b. Jumlah Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP)	4	4	5	5	5
	c. Jumlah Puskesmas Pembantu	44	44	44	44	44
	d. Jumlah Klinik Kesehatan	79	79	77	77	77
	e. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	0	0	0	5	5
	f. Jumlah Poned	12	12	12	12	12
	g. Jumlah Posyandu	992	1000	1,010	1,014	1,014
	h. Jumlah Poskesdes	19	19	19	19	19
3.	Persentasi Imunisasi					
	a. BCG	95,0	98,46	93,01	96,66	52,52
	b. DPT (DPT 3)	97,1	96,1	100,3	100,85	49,04
	c. Polio (Polio 4)	91,8	96,14	100,65	98,38	47,55
	d. Campak	91,6	94,61	99,82	101,09	48,42
4.	Permohonan Register Obat dan Makanan (PIRT)	98	272	266	291	73
5.	Operasi Pengawasan Obat dan Makanan (Survei ke PIRT)	98	272	266	291	73
6.	Penemuan dan Penanganan Balita Gizi Buruk	70	85	69	100	43
7.	Penemuan dan Penanganan Penderita TBC	113,68	84,25	84	83,64	75,52
8.	Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	282	236	518	772	78
9.	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Jamkesmas (JKN)	68,052	142,878	137,562	138,058	42,281
10.	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Program Jampi	21.928	25.357	27.980	138.879	13.571

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
11.	Jumlah Tenaga Kesehatan					
	a. Tenaga Medis (dr. drg)	73	72	63	65	62
	b. Tenaga Keperawatan (Perawat, Perawat Gigi)	201	237	230	221	203
	c. Bidan	317	340	336	344	333
	d. Sanitarian	14	25	33	27	20
	e. Kesehatan Masyarakat	2	18	29	26	33
	f. Nutrisionist/Gizi	20	26	25	24	22
	g. Apoteker	4	10	16	13	10
	h. Farmasi	20	23	23	24	23
	i. Analis Kesehatan	23	28	27	28	30
	j. Perekam Medis	1	1	1	1	1
12.	Jumlah Persalinan dengan Bantuan Tenaga Kesehatan	21.366	22.775	19.205	10.102	9.592
13.	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan Pertama (K1)	100,03	101,05	104,08	106,2	53,64
14.	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan 4 kali (K4)	92,20	95,05	99,62	99,67	48,82
15.	Persentase Stimulasi Deteksi Intervei Dini Tumbuh Kembang Anak Balita (%)	59,20	56,71	54,53	61,89	52,48
16.	Cakupan Pemberian Vitamin A (%)	97,70	98,89	96,92	96,13	97,8
17.	Cakupan Penjangkaran Anak Sekolah (%)	94,64	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Cakupan Pemeriksaan Lansia (%)	50,50	7,19	88,87	101,75	13,99
19.	Jumlah Kasus Kematian					
	a. Neonatal	95	108	107	95	45
	b. Bayi	123	138	130	115	52
20.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	18	28	30	25	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.24
Perkembangan Data Pembangunan Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

NO.	URAIAN	TARGET DALAM RPJMD TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	ALASAN TARGET TIDAK TERCAPAI
1.	Jumlah Rumah Sakit			
	a. Rumah Sakit Negeri (Daerah)	-	1	
	b. Rumah Sakit Negeri (TNI)	-	0	
	c. Rumah Sakit Umum Swasta	-	8	
	d. Rumah Sakit Khusus Swasta	-	0	
	e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta	-	1	
	f. Rumah Sakit Besalin	-	0	
	Jumlah Puskesmas	22	20	
	Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP)		6	
	Jumlah Puskesmas Pembantu		49	
	Jumlah Klinik Kesehatan		120	
	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	20	20	
	Jumlah Poned		12	
	Jumlah Posyandu		1.030	
	Jumlah Poskesdes		19	

NO.	URAIAN	TARGET DALAM RPJMD TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	ALASAN TARGET TIDAK TERCAPAI
2.	Persentase Imunisasi			
	a. BCG	100,00	102,14	
	b. DPT	97,30	99,94	
	c. Polio	97,69	98,92	
	d. Campak	98,18	99,28	
3.	Permohonan Registrasi Obat dan Makanan	100,00	85	
4.	Operasi Pengawasan Obat dan Makanan	4	85	
5.	Penemuan dan Penanganan Balita Gizi Buruk		100%	
6.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC		88,77%	
7.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		100%	
8.	Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Program Jamkesmas		344.543	
9.	Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan Program Jampi		1.072	
10.	Jumlah Tenaga Kesehatan			
	a. Tenaga Medis		71	
	b. Tenaga Keperawatan		680	
11.	Jumlah persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan		18.792	
12.	Persentase Ibu yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan K1 (%)	95,00%	102,3	
13.	Persentase Ibu yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan K4 (%)	92,00%	100,5	
14.	Persentase Stimulasi Deteksi Interpersi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita (%)	80,00	66,70	
15.	Cakupan Pemberian Vitamin A (%)	90%	98,50	
16.	Cakupan Penjaringan Anak Sekolah (%)		103,5	
17.	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Lansia (%)		13,14	
18.	Jumlah kasus kematian			
	a. Neonatal		54	
	b. Bayi		72	
19.	Jumlah kasus kematian ibu		23	
20.	Perkembangan Angka Harapan Hidup		70,71	Data Olahan BPS

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2020

Tabel 2.25
Capaian Data Pembangunan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019

NO.	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Penurunan Kasus Kematian Bayi	124	72	172,00
2.	Penurunan kasus kematian neonatal	75	24	313,00
3.	Penurunan kasus Kematian Ibu	16	54	29,60
4.	Persentase Penemuan dan Penanganan Balita Gizi Buruk	1.2	1	83,33
5.	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100
6.	Persentase persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan	88,72	101	113,9
7.	Persentase ibu yang mendapatkan pelayanan kehamilan dan kunjungan KN1	95	102,3	107,7
8.	Persentase ibu yang mendapatkan pelayanan kehamilan dan kunjungan KN4	92	100,5	109,2
9.	Persentase stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak balita	80	66,7	83,4
10.	Cakupan pemberian vitamin A	90	101,5	112,8
11.	Cakupan penjangkaran anak sekolah	80	100	125
12.	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100
13.	Persentase registrasi obat dan makanan yang diproses	100	100	100
14.	Frekuensi pengawasan obat dan makanan	4	4	100
15.	Jumlah Puskesmas dengan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terstandar	20	20	100
16.	Jumlah Puskesmas PONED dengan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terstandar	12	12	100
17.	Jumlah Puskesmas dengan perawatan (DTP) dengan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terstandar	6	6	100
18.	Jumlah Poskesdes dengan tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terstandar	13	19	146,2
19.	Tingkat kinerja Puskesmas berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) dengan kategori baik	90	90	100
20.	Cakupan pelayanan kemitraan kesehatan	100	100	100
21.	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100	100	100
22.	Terakreditasi Laboratorium Kesehatan	1	1	100
23.	Persentase Penduduk Yang	100	102,1	102,1

NO.	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN
	Diimunisasi BCG			
24.	Persentase Penduduk Yang Diimunisasi DPT	97,3	99,9	102,7
25.	Persentase Penduduk Yang Diimunisasi Polio	97,69	98,9	101,3
26.	Persentase Penduduk Yang Diimunisasi Campak	98,18	99,3	101,1
27.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	80	88,8	111
28.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
29.	Cakupan Desa/ Kelurahan dengan imunisasi dasar lengkap/ <i>Universal Coverage Immunization</i> (UCI)	100	99,5	99,5
30.	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/ masalah kesehatan yang tertangani	100	100	100
31.	Cakupan sarana sanitasi dasar (air bersih, rumah sehat, jamban keluarga dan SPAL)	85	76,5	90
32.	Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat	80	65,3	81,7
33.	Peningkatan Jumlah Posyandu	1038	1030	99,2
34.	Persentase Posyandu yang mencapai purnama dan mandiri	55	59,2	107,7
35.	Cakupan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat	80	76,5	95,7
36.	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100	100	100
37.	Persentase masyarakat yang memanfaatkan program jaminan kesehatan	60	47,9	79,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2020

c. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Bidang Pekerjaan Umum merupakan prioritas utama, dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dalam pendistribusian barang dan jasa. Sebagai daerah yang terus berkembang, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur

wilayah yang baik seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kebijakan dalam Urusan Pekerjaan Umum yang terdapat dalam RPJM 2013-2018 diantaranya: membangun mengembangkan dan memperbaiki ruas-ruas jalan strategis; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana air bersih komunal dan perpipaan; meningkatkan dan merevitalisasi fungsi jaringan irigasi dan keadaan air alami berbasiskan partisipasi masyarakat melalui program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (ppsip); membangun dan memperbaiki jalan lingkungan; dan membangun dan memperbaiki sistem drainase lingkungan.

Capaian Urusan Pekerjaan Umum Sub Bidang Jalan, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2019 sepanjang 728,924 km, yang terdiri tipe perkerasan Jalan Hotmix sepanjang 571,714 km atau 78,43%, Jalan Beton sepanjang 135,825 km atau 18,63% dan Jalan Batu/Kerikil sepanjang 21,385 km atau 2,93%. Komposisi jenis permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.26
Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

NO.	TIPE PERMUKAAN	PANJANG (KM)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jalan Aspal (<i>hotmix</i>)	479,433	511,992	533,499	504,577
2.	Jalan Aspal (Lapen)	125,761	99,901	72,236	85,783
3.	Jalan Beton	46,135	55,970	66,332	79,614
4.	Jalan Batu/Kerikil	71,771	55,405	52,482	57,330
5.	Jalan Tanah	1,900	4,345	4,375	1,620
JUMLAH		725,000	727,550	728,924	728,924

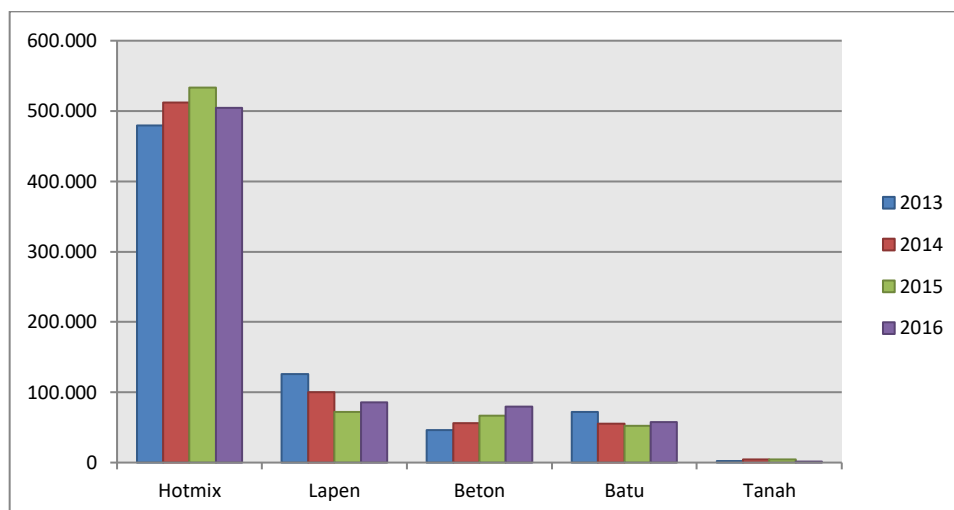
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.27
Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019

NO.	TIPE PERMUKAAN	PANJANG JALAN (Km)			
		2018		2019	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Jalan Aspal (Hotmix)	555,364	76,19	571,714	78,43
2.	Jalan Aspal (Lapen)	10,715	1,47	-	
3.	Jalan Beton	134,71	18,48	135,825	18,63
4.	Jalan Batu/Kerikil	28,135	3,86	21,385	2,93
JUMLAH		728,924	100,00	728,924	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Grafik 2.1
Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

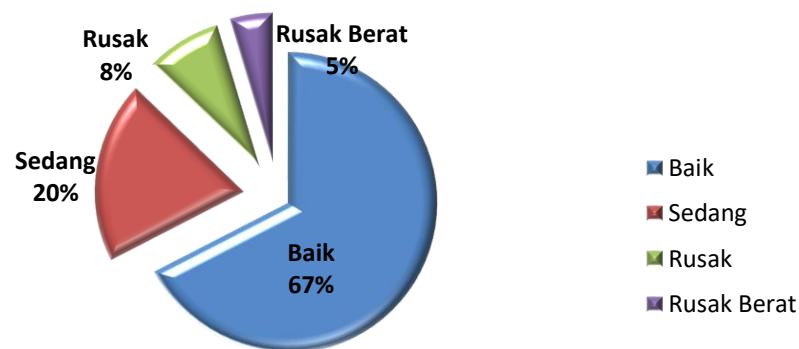
Kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir 2016 dalam kondisi baik sepanjang 491,868 km atau 67,48 %, kondisi sedang sepanjang 143,219 km atau 19,65 %, kondisi rusak sepanjang 60,192 km atau 8,26 %, dan kondisi rusak berat sepanjang 33,645 km atau 4,62 %. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan sebesar 11,71%, kondisi sedang naik 7,43%, Kondisi rusak turun 19,81% dan kondisi rusak berat bekurang sebesar 55,92%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi jalan kabupaten terus lebih baik. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.28
Kondisi Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016 (Km)

No.	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016
1.	Baik	440,295	456,628	467,532	491,868
2.	Sedang	133,313	141,640	146,878	143,219
3.	Rusak	75,062	84,997	90,167	60,192
4.	Rusak Berat	76,330	44,285	24,346	33,645
Jumlah		725,000	727,550	728,924	728,924

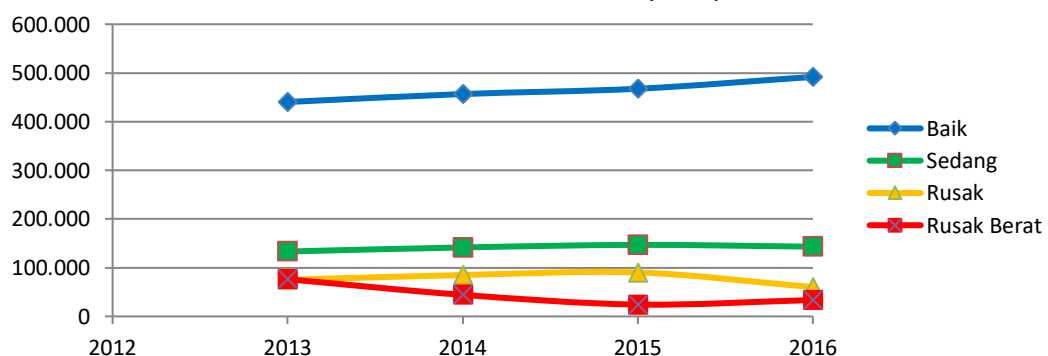
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Grafik 2.2
Kondisi Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta
Sampai Dengan Tahun 2016



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Grafik 2.3
Kondisi Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016 (Km)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

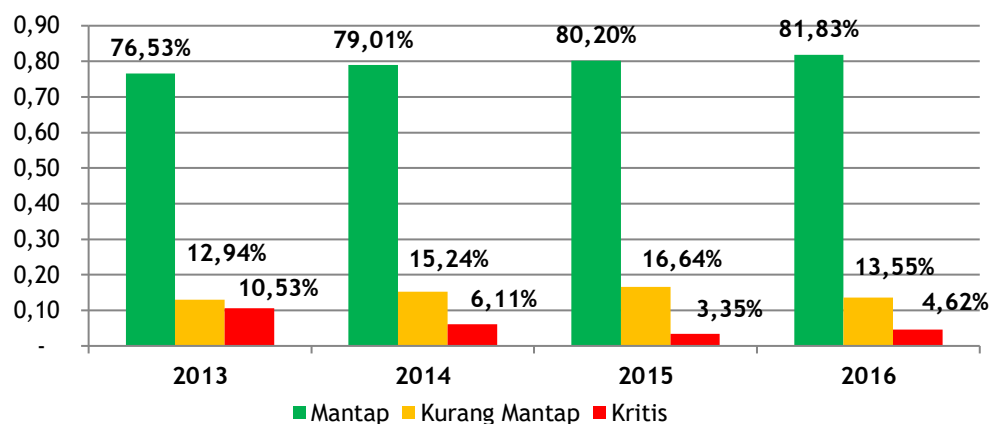
Data tingkat kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (Km)

No.	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016
1.	Mantap	554,837	572,803	583,504	596,482
2.	Kurang Mantap	93,833	110,462	121,074	98,797
3.	Kritis	76,330	44,285	24,346	33,645
Jumlah		725,000	725,000	727,550	728,924

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Grafik 2.4
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 (%)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Sistem irigasi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Irigasi Teknis, Semi Teknis dan Pedesaan. Sistem Irigasi Teknis secara umum menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 Ha. Irigasi teknis terdiri dari tiga daerah irigasi, yaitu:

- Daerah Irigasi Solokangede 1.553 Ha,
- Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 Ha,
- Daerah Irigasi Cisomang 2.117 Ha.

Untuk daerah Irigasi Pedesaan (Semi Teknis dan Sederhana) seluas 10.788 ha. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Perum Jasa Tirta II dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Dalam upaya perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan

beberapa kegiatan di Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten, yaitu dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi. Hasil kegiatan fisik bidang keirigasian selama kurun waktu tahun 2013-2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

NO.	JENIS	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1.	Saluran (m)	1.446,20	1.446,20	674,90	110,00
2.	Rehabilitasi Lining (m)	30,00	816,50	1.115,00	0
3.	Talang PVC Rangka Baja	86,70	0	2,00	0
4.	Tembok Penahan Tanah (TPT)	86,30	241,95	386,10	0
5.	Rehabilitasi Bendung (Buah)	2,00	2,00	2,00	0
6.	<i>Free Intake</i>	0	1,00	0	0
7.	Terjunan	1,00	3,00	0	0
8.	Bangunan Pengambilan	2,00	0	3,00	0
9.	Bangunan Bagi	0	1,00	2,00	0
10.	Pintu Air	0	2,00	0	0
11.	Pasangan Bronjong	0	18,00	0	0
12.	Normalisasi Saluran	30,00	0	1.218,60	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Kebutuhan air bersih atau air minum merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, komersial maupun untuk kebutuhan lainnya. Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) yang ada di Kabupaten Purwakarta terdiri dari sistem perpipaan dan non-perpipaan. Cakupan layanan administrasi air minum sistem perpipaan perkotaan sebesar 20,85 % meliputi Kota Purwakarta, Plered, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan. Sedangkan cakupan layanan untuk sistem non-perpipaan dengan sumber air yang digunakan berasal dari sumur dangkal atau mata air yang terlindungi sebanyak 39 % atau 443.676 jiwa dan yang tidak terlindungi sebanyak 61 % atau 451.911 jiwa.

Apabila dilihat dari kondisinya, jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 499,477 km atau 68,52%, kondisi sedang

sepanjang 140,482 km atau 19,27%, kondisi rusak sepanjang 83,015 km atau 11,39%, dan kondisi rusak berat sepanjang 5,950 km atau 0,82%. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Kondisi Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2019

NO.	TIPE PERMUKAAN	PANJANG JALAN (Km)			
		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Baik	494,667	67,86	499,477	68,52
2.	Sedang	118,385	16,24	140,482	19,27
3.	Rusak	97,657	13,40	83,015	11,39
4.	Rusak Berat	18,215	2,50	5,95	0,82
JUMLAH		728,924	100,00	728,924	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi mantap di Kabupaten Purwakarta tahun 2019 sepanjang 639,959 km atau 87,80%. Bila dibandingkan dengan kondisi jalan mantap pada tahun 2018 yang panjangnya 613.052 km, maka mengalami peningkatan sepanjang 26.907 km atau 4,39%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi Jalan Kabupaten terus lebih baik. Data tingkat kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019

NO.	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (Km)			
		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Mantap	613,052	84,10	639,959	87,8
2.	Kurang Mantap	97,657	13,40	83,015	11,39
3.	Kritis	18,215	2,50	5,95	0,82
JUMLAH		728,924	100,00	728,924	100,00

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta

Data capaian kinerja Bidang Kebinamargaan dan Pengairan di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Bidang Kebinamargaan
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Panjang Ruas Jalan Baru (Km)	0,95 Km
2.	Jumlah Jembatan Baru (Titik)	1 Titik
3.	Panjang Jalan Aspal/Beton Rusak yang Rusak Berat yang Direhabilitasi (Km)	19,736 Km
4.	Panjang Jalan Aspal/Beton Kondisi Sedang dan Baik yang Ditangani (Km) Pemeliharaan Periodik + Rutin	101,85 Km
5.	Jembatan Rusak yang Diperbaiki (Titik)	8 Titik
6.	Panjang Saluran Dainase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	83,66%
7.	Jumlah Gorong-Gorong yang Diperbaiki (unit)	4 Unit
8.	Penanganan Jalan dan Jembatan Rusak oleh Bencana Alam	4 Lokasi
9.	Jumlah Alat Berat dalam Kondisi Baik	15 Unit
10.	Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (Km)	34,4 Km
11.	Luas Sawah Beririgasi (Ha)	5.264,55 Ha
12.	Bangunan Air Dalam Kondisi Baik (unit)	34 Unit
13.	Panjang Jalan Kabupaten yang Ditingkatkan (Km)	19,736 Km
14.	Jumlah Perkumpulan P3A (Kelompok)	366

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kab.Purwakarta

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, selain mengerjakan Bidang Kebinamargaan, Perangkat Daerah ini mengerjakan juga Bidang Pengairan khususnya irigasi. Sistem irigasi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Irigasi Teknis, Semi Teknis dan Pedesaan. Sistem Irigasi Teknis secara umum menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat dengan luasan 1.000 Ha sampai dengan 3.000 ha. Irigasi teknis terdiri dari tiga daerah irigasi, yaitu Daerah Irigasi Solokan Gede 1.553 Ha, Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 Ha, dan Daerah Irigasi Cisomang 2.117 Ha.

Untuk daerah Irigasi Pedesaan (Semi Teknis dan Sederhana) seluas 10.788 ha. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Perum Jasa Tirta II dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Capaian kinerja bidang pengairan khususnya irigasi pada tahun 2019, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Di Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	4 Km
2.	Rehabilitasi Bendung	1
3.	Bangunan Box Bagi	4
4.	Free Intake	1
5.	Krib Bronjong	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kab. Purwakarta

d. Perumahan

Kebutuhan hunian yang layak di Kabupaten Purwakarta semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan para pengembang kawasan perumahan, namun jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri ternyata masih sangat besar. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan diantaranya adalah ketidakstabilan makro ekonomi yang mempengaruhi harga bahan-bahan bangunan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan sebagian kelompok masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan rumah tangga, kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun semakin tersebar luas dan padat. Agar derajat kesehatan dan tingkat produktifitas penduduk yang tinggal di dalamnya tidak terganggu, kawasan permukiman tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana dasar yang memadai. Kenyataannya ketersediaan sarana prasarana dasar di banyak lokasi permukiman dapat dikatakan masih minim. Jumlah fasilitas dan utilitas yang ada belum sebanding dengan penduduk yang harus dilayani. Sementara fasilitas dan utilitas yang ada terus mengalami degradasi seiring dengan perjalanan waktu.

Untuk menghadapi realitas diatas, pemerintah daerah merasa perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan

lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya meningkatkan dan/atau merangsang tumbuhnya intensitas pembangunan rumah sederhana sehat, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas dan utilitas lingkungan permukiman, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman.

e. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purwakarta memasuki babak baru setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Fokus utama pembangunan bidang penataan ruang pasca penetapan Perda tersebut lebih diarahkan kepada penyusunan rencana detail dan pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci tata ruang terdiri atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten, dan Ketentuan/Peraturan Zonasi. Jumlah total rencana rinci tata ruang yang harus disusun dan ditetapkan sebagai peraturan daerah adalah sebanyak 27 rencana rinci, terdiri dari 15 rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, dan 12 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Sampai tahun 2019, jumlah rencana rinci tata ruang yang telah disusun sebanyak 15 rencana rinci, terdiri dari 10 rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan 5 rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Tingkat pencapaian penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang adalah 55,55%. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Tingkat Pencapaian Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2019

No.	Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Yang Damanatkan RTRW	Jumlah Yang Telah Disusun	Persentase (%)
1.	RTR Kawasan Perkotaan	15	10	66,7
2.	RTR Kawasan Strategis Kabupaten	12	5	41,7
Jumlah		27	15	55,55

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Adapun perkembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan sampai tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36
Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2019

No.	RDTR	Dokumen	Perda
1.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwakarta	Sudah	Belum
2.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wanayasa	Sudah	Belum
3.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Plered	Sudah	Belum
4.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Babakancikao	Sudah	Belum
5.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bojong	Sudah	Belum
6.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pondoksalam	Sudah	Belum
7.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Campaka	Sudah	Belum
8.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pasawahan	Sudah	Belum
9.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bungursari	Sudah	Belum
10.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sukatani	Sudah	Belum

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Sedangkan perkembangan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.37
Perkembangan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2019

No.	RTR KSK	Dokumen	Perda
1.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perkotaan Cibatu	Sudah	Belum
2.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perkotaan Sawit - Darangdan	Sudah	Belum
3.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sadang	Sudah	Belum
4.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Tenggara Kabupaten Purwakarta	Sudah	Belum
5.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Jatiluhur	Sudah	Belum

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

f. Perencanaan Pembangunan

Arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Urusan Perencanaan Pembangunan diantaranya adalah meningkatkan kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah; menerapkan mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah; dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data capaian target makrolindikator makro pembangunan, terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan Tahun 2017 mencapai sebesar 69,16 point; tersedianya sebanyak 424.802 angkatan kerja. terbukanya jumlah kesempatan kerja sebesar 90,94% kesempatan kerja dari 42.066 pencari kerja (data IPM). Peningkatan capaian makro lainnya sampai dengan Tahun 2017 antara lain meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi sebesar 7,45 Tahun; meningkatnya Angka Melek Huruf

(AMH) menjadi sebesar 96,20%, meningkatkan capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi sebesar 67,50%. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pembangunan Manusia	67,09	67,32	67,84	68,56	69,28	69,98	70,67
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7.11	7,17	7.35	7.42	7.74	7,75	7,92
3.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	11,2	11,33	11,44	11,82	11,89	12,09	12,10
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,95	69,96	70,26	70,34	70,42	70,61	70,80
5.	Jumlah Penduduk (Orang)	898.001	910.007	921.598	932.701	943.337	953.414	950.060
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,42	1,33	1,27	1,27	1,14	1,07	1,48
7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7,15	5,72	4,75	4,77	5,12	5,00	4,38
8.	PDRB ADHB Tahun 2000 (Milyar)	40.609,16	45.496,58	50.166,71	54.575,71	58.529,95	63.072,83	67.571,87
9.	PDRB ADHK Tahun 2000 (Milyar)	34.116,42	36.177,32	37.899,02	40.169,90	42.239,30	44.344,27	44.344,27
10.	PDRB ADH Berlaku Per Kapita (Rp)	45.221.731	49.807.575	54.434.482	58.513.618	62.045.642	66.154.713	71.123.792
11.	PDRB ADH Konstan Per Kapita (Rp)	37.991.517	39.605.275	41.123.158	43.068.357	44.776.469	46.511.033	48.721.112
12.	Angkatan Kerja	391.226	407.360	412.842	426.356	432.117	438.981	450.203
13.	Kesempatan Kerja (%)	90,39	96,38	96,65	97,22	97,43	97,65	97,97

NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.	Pencari Kerja	21.087	19.950	41.299	39.370	10.324	24.642	15.588
15.	Gini Ratio	0,3910	0,3691	0,3521	0,3561	0,3892	0,3191	0,2940
16	Inflasi (%) per on year	6,80	5,65	4,16	2,64	4,74	2,65	2,63

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta 2020

g. Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, pelayanan transportasi umum yang terbatas, serta budaya tertib berlalu-lintas yang masih rendah. Hal tersebut disinyalir menjadi faktor penyebab utama kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas. Sasaran pembangunan bidang perhubungan ditujukan pada tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas melalui pengembangan sistem pengaturan dan pengamanan lalulintas kendaraan dan pengembangan pelayanan angkutan umum. Pengujian kendaraan menjadi salah satu faktor penentu bagi peningkatan keselamatan berlalu lintas. Kendaraan yang sudah diuji dan layak jalan, dapat memperkecil kemungkinan adanya kecelakaan lalu lintas. Adapun banyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan di Kabupaten Purwakarta tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Banyaknya Kendaraan yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020

No.	Jenis Pelayanan	Tahun (Unit)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Bus									
1.	Bus Besar	127	290	226	127	3	2	4	2

No.	Jenis Pelayanan	Tahun (Unit)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Bus Sedang	120	156	166	167	73	131	136	84
3.	Mini Bus (Bus Kecil)	48	43	38	55	24	30	27	7
4.	Angkutan Kota	823	962	846	868	424	685	627	151
5.	Angkutan Perkotaa	823	1016	971	876	395	602	635	192
Mobil Barang									
1.	Truck/Bak Terbuka	2.955	3452	3.088	2.928	1.242	1.988	2.195	1.113
2.	Pick Up	3.647	6.034	7.133	7.040	3.360	5.972	6.169	2.865
3.	Box/Bak Tertutup	795	1.303	1.687	1.871	728	1.341	1.462	808
4.	Tanki	50	73	51	43	10	15	11	18
5.	Tracktor	12	14	15	15	5	4	3	16
6.	Kereta Gandengan	1	2	0	0	0	0	0	6
7.	Kereta Tempelan	12	15	15	19	6	4	2	9
8.	Bland Van	24	46	79	119	74	160	133	79
9.	Ambulance	3	4	3	4	2	3	3	2
10.	Derek	3	2	2	1	0	0	0	
11.	Bestel Wagon	48	37	29	55	8	15	9	3
Kendaraan Khusus									
1.	Kendaraan Bermotor TNI	0	6	0	0	0	0	0	0
2.	Kendaraan Bermotor POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Alat Berat (Forklift, Crane, Buldozer, Mesin Gilas, Loader)	2	0	0	1	0	0	10	8
4.	Penyandang Cacat	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		9.493	13.455	14.349	14.189	6354	10.952	11.471	5.384

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Ketersediaan terminal sebagai salah satu simpul sistem transportasi, dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dalam arus lalu lintas kendaraan suatu daerah. Adapun data terminal di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40
Data Terminal di Kabupaten Purwakarta
Sampai Dengan Tahun 2020

NO.	NAMA TERMINAL	LOKASI KECAMATAN	LUAS (M2)	TIPE
1.	Ciganea	Kec. Jatiluhur	1,500 M2	C
2.	Simpang/Gembong	Kec. Purwakarta	2.000 M2	C
3.	Wanayasa	Kec. Wanayasa	1.800 M2	C
4.	Plered/Citeko	Kec. Darangdan	1.500 M2	C

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Faktor lain yang dapat menentukan keselamatan berlalu-lintas adalah tersedianya berbagai fasilitas atau perlengkapan keselamatan di jalan raya. Di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2020, banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41
Banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya
di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2020

NO.	JENIS	S/D TAHUN 2020)
1.	Rambu Peringatan	78
2.	Rambu Perintah	61
3.	Rambu Petunjuk	100
4.	Rambu Larangan	176
5.	Apill	36
6.	Zebra Cross	4.865,31
7.	Marka Garis	53.136,87
8.	Guard Rail	538
9.	Halte	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

h. Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sasara pembangunan bidang lingkungan hidup

pada tahun 2013-2017 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas ruang dan fasilitas publik, dan terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat.

Tabel 2.42
Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Urusan Lingkungan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp,00)					TARGET AKHIR RPJMD 2013-2018
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Meningkatnya aparatur yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah aparatur yang bersertifikat		16	16	16	16	78
2.	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditiatsi		-	1	1	1	2
3.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen LH yang disusun		4	4	4	4	20
4.	Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (%)		35	40	45	50	55
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang LH	Waktu penyelesaian rekomendasi dan izin LH		72	69	66	63	60
6.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jenis kualitas lingkungan yang sipantau		2	2	2	2	3
7.	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan	Prosentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan (%)		65	70	75	80	85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada Sub Bidang Persampahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Penanganan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016

No.	Jenis	Satuan	Jumlah
1.	Volume produksi sampah rata-rata	m ³ /hari	3.398,52
2.	Volume sampah yang dapat diangkut ke TPA oleh DKP	m ³ /hari	500
3.	Volume sampah yang dapat diangkut ke TPA oleh masing-masing kelurahan	m ³ /hari	114

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.44
Target Capaian Kinerja Urusan Lingkungan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2019
1	Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah aparatur yang bersertifikat	18
2	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi	2
3	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen LH yang disusun	-
4	Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (%)	10%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang LH	Waktu penyelesaian rekomendasi dan izin LH	60 Hari
6	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jenis kualitas lingkungan yang dipantau	2
7	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan	Prosentase pengaduan dan sengketa	85%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN
			2019
		lingkungan hidup yang diselesaikan (%)	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan (dasar) yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau diseluruh desa seta kelurahan, yang dijabarkan pada Program Penatan Administrasi Kependudukan. Adapun capaian jenis pelayanan pada Unusan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain terlihat dari peningkatan besaran jumlah cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta. Tingginya capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan Tahun 2017 sebagian besar didukung oleh kebijakan kepala daerah dalam bentuk kegiatan intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan secara gratis dan *Gempungan di Buruan Urang Lembur* antara lain meliputi kegiatan pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Gratis. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.45
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Dokumen Kartu Tanda Penduduk Yang	417.280	513.260	610.906	665.575	689.205
2	Diterbitkan	136.905	173.389	240.427	230.808	250.584
3	Jumlah Dokumen Kartu Keluarga Yang Diterbitkan	16.998	22.723	28.688	45.505	17.157

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
4	Jumlah Dokumen Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	10	27	17	51	205
5	Jumlah Dokumen Angka Kematian Yang Diterbitkan	53	52	54	48	102
6	Jumlah Dokumen Akta Perceraian Yang Diterbitkan	5	1	2	1	2
7	Jumlah Dokumen Perceraian Yang Diterbitkan	232	650	591	623	333
8	Jumlah Dokumen SKTT Yang Diterbitkan	242	75	80	64	42
9	Jumlah Dokumen KIK WNA Yang Diterbitkan	0	1.688	3.635	6.011	4.482
	Jumlah Dokumen SK Pindah Datang Yang Diterbitkan					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Purwakarta

j. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak**

Kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu dan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarus gender dan anak dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; serta melanjutkan penyusunan data dan statistik gender. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.46
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak di Kabupaten
Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Partisipasi PNS Perempuan Pemkab Per Angkatan Kerja Perempuan (%)	0	0	0	9,3	10,7
2	Jumlah KDRT Yang Dilaporkan (Kasus)	0	0	3	5	5
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0	0	0	46.161	43.325
4	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan (Kasus)	0	0	3	5	5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta dlarahkan untuk meningkatkan kwalilas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, serta administrasi kependudukan.

Kegiatan ini didukung dengan penyelenggaraan advokasi, konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi (KE) bagi masyarakat, keluarga Pasangan Usia Subur PUS) serta remaja yang membutuhkan. Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan Tahun 2017 sebagian besar didukung oleh kebijakan kepala daerah dalam bentuk kegiatan Gempungan antara lain meliputi peningkatkan kualitas hidup perempuan diadakan kegiatan pelayanan KB (UD dan implant dengan bekerjasama dengan instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan, serta ikut berpartisipasi pada kegiatan PKK KB-Kes.

Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.47
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Fertility Rate (TFR) (Point)	0	0	178.355	174.822	177.358
2	Rasio Akseptor KB (%) / PUS	124.312	135.573	146.778	152.287	169.242
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	0	74.78	94.7	79.1	88.2
4	Capaian Akseptor KB Jenis IUD	9.690	10.322	12.277	14.370	17.873
5	Capaian Akseptor KB Jenis Implant	5.323	5.465	6.188	6.906	8.812
6	Capaian Akseptor KB Jenis Suntik	62.903	68.917	75.331	77.427	94.905
7	Capaian Akseptor KB Jenis Pil	41.508	45.703	47.595	46.922	58.354
8	Capaian Akseptor KB Jenis Lainnya	4.888	5.166	5.752	622	8.039

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

1. Sosial

Kebijakan Pembangunan Sosial di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS; meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS/PPKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar; meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; menjamin

ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS/PPKS lainnya.

Selanjutnya pelayanan kesehatan diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan yaitu Anak Bermasalah Sosial, Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Wanita Tuna Susila, Lansia Terlantar, Pengemis, Lansia Korban Kekerasan, Gelandangan, Penyandang Cacat, Waria, Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis, Bekas Warga Binaan LK, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin, Jumlah Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Masyarakat Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Bermasalah, Orang dengan HIV/ AIDS dan Keluarga Rentan. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020:

Tabel 2.48
Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020

No.	URAIAN	TAHUN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Anak Balita Terlantar	62	3	3	35	25	31	20	17
2.	Anak Terlantar	527	751	751	199	199	2.065	162	152
3.	Anak Berhadapan dengan Hukum	40	34	34	34	33	15	44	45
4.	Anak Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Anak Jalanan	62	59	74	76	76	32	92	89
6.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.478	1.480	1.480	3.098	2.964	1.167	1.382	1.425
7.	Wanita Korban Tindak Kekerasan	1	-	3	4	2	7	154	156
8.	Wanita Tuna Susila	215	14	16	13	23	44	30	28
9.	Lansia Terlantar	1.987	1.778	1.778	960	618	615	455	389

No.	URAIAN	TAHUN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Pengemis	1.495	13	13	11	11	10	132	113
11.	Lansia Korban Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Gelandangan	389	1	1	1	3	3	92	87
13.	Penyandang Cacat	1.689	1.425	1.425	1.520	4.035	1.125	432	432
14.	Waria	12	-	-	43	31	31	31	31
15.	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Bekas Warga Binaan LK	181	136	136	110	111	105	205	198
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	52	3	3	21	2	20	41	32
18.	Keluarga Fakir Miskin	27.653	34.314	34.314	46.241	-	43	16.855	17.627
19.	Jumlah Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni	3.093	9.326	9.326	9.326	8.175	8.015	7.652	7.652
20.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5.227	296	206	104	67	22	3	3
21.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Masyarakat Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Korban Bencana Alam	99	209	209	95	82	112	6	17
24.	Korban Bencana Sosial	122	111	111	149	129	131	24	22
25.	Pekerja Migran Bermasalah	2	10	17	15	14	3	12	12
26.	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	4	21	6	6
27.	Keluarga Rentan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		44.386	49.873	49.900	62.057	16.604	13.617	27.830	28.533

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta

m. Ketenagakerjaan

Permasalahan klasik yang menjadi issue strategis urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta yaitu relatif belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta relatif masih adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh tingginya tingkat *turn over* pegawai di perusahaan. Oleh karena itu perlu mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan

ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif, maka program dan kegiatan diarahkan pada tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan bermartabat menuju masyarakat Purwakarta yang produktif dan sejahtera.

Iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta yang perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan angkatan kerja sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja, maka pemilihan kebijakan output program kegiatan pembangunannya diarahkan pada meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja, akselerasi pertumbuhan lapangan kerja, dan memberikan perlindungan bagi para pekerja.

Berikut ini data perkembangan jumlah pengangguran (Pencari Kerja yang terdaftar) mulai tahun 2013-2019 berdasarkan pada tingkat pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49
Perkembangan Jumlah Pengangguran
(Pencari Kerja Yang Terdaftar) di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2019

No.	Tingkat Pendidikan	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD dan sederajat	1.992	1.628	1.295	921	743	824	871
2.	SLTP	5.852	5.484	5.188	4.692	1.530	3.646	3.068
3.	SLTA	11.677	11.562	12.911	12.681	5.360	14.847	10.519
4.	Diploma	486	482	375	437	138	432	300
5.	Sarjana	1.104	794	602	593	208	785	830
		2.011	19.950	20.371	19.324	7.969	20.534	15.588

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Sebagaimana dapat lihat dari data tabel di atas, bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2019 sebanyak 15.588 orang yang terdiri dari 871 orang yang berpendidikan SD dan Sederajat, 3.068 orang SLTP, 10.519 orang SLTA, 300 orang Diploma, dan 830 orang berpendidikan Sarjana. Karakteristik penduduk yang bekerja di sektor industri dan perusahaan swasta masih menduduki peringkat

teratas, dibanding sektor informal lainnya. Jenis pekerjaan sektor buruh industri/karyawan menjadi sektor yang sangat diminati, akan tetapi tidak menjadikannya menjadi satu-satunya prioritas pilihan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja dan/ atau angkatan kerja.

Jumlah kesempatan kerja yang ada pada tahun 2019 sebanyak 10.047 orang, sedangkan pencari kerja sebanyak 15.588 orang. Perkembangan jumlah tenaga kerja Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2019, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.50
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2019

No.	URAIAN	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja	1.507	1.444	1.481	1.045	1.035	BPS	BPS
2.	Kesempatan Kerja	1.432	879	1.557	1.099	510	8.291	10.047
3.	Pencari Kerja (IPM)	21.111	19.950	20.371	19.324	7.969	20.534	15.588

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Purwakarta

n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purwakarta banyak memberikan kontribusi terhadap sektor industri pengolahan dan perdagangan, sehingga peranannya dipandang sebagai salah satu sektor yang banyak mempengaruhi aspek pendapatan regional bruto masyarakat Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.51
Jumlah Koperasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)				Jumlah
		Aktif	%	Tidak Aktif	%	Total
1.	2013	438	51,96	405	48,04	826
2.	2014	470	54,60	391	45,40	861
3.	2015	473	53,99	403	46,01	876
4.	2016	480	54,29	404	45,71	884
5.	2017	484	54,50	404	49,50	888

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,54%. Data UMKM binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52
Data UMKM Binaan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
I. Industri						
1.	Jumlah UMKM (Unit)	685	689	864	1.039	1.039
2.	Nilai Usaha (Rp,00)	160.000.000.000	177.570.000.000	177.825.000.000	255.000.000.000	255.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1.340	1.340	1.665	1.990	1.990
II. Perdagangan						
1.	Jumlah UMKM (Unit)	535	585	710	835	835
2.	Nilai Usaha (Rp,00)	75.000.000.000	81.485.000.000	81.640.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1.165	1.365	1.540	1.715	1.715
III. Aneka Jasa						
1.	Jumlah UMKM (Unit)	222	229	304	379	379
2.	Nilai Usaha (Rp,00)	50.000.000.000	68.441.000.000	68.526.000.000	85.000.000.000	85.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	940	3.890	3.965	4.040	4.040
Jumlah Total UMKM (Unit)		1.442	1.503	1.878	375	375
Nilai Total Usaha (Rp,00)		285.000.000.000	327.496.000.000	327.991.000.000	495.000.000.000	495.000.000.000
Jumlah Total Tenaga Kerja (Orang)		3.445	6.595	7.170	7.745	7.745

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai total usaha tahun 2017 bahwa terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2013, yaitu bertambah sebesar 73,68%, jumlah total tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 124,82% bila dibandingkan dengan tahun 2013.

o. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal luar negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3).

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan nonperijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan nonperijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 1 ayat 10). Tujuan penyelenggaraan penanamam modal, antara lain untuk (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 3 ayat 2) adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan ini pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2):

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. Menjamin hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Adapun kebijakan daerah terkait Penanaman Modal adalah meningkatkan pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN, serta menyediakan regulasi kebijakan dan sarana prasarana pelayanan publik terkait pelayanan perijinan dan non perijinan yang ramah, cepat mudah diakses dan refresentatif. DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melaksanakan pemberian pelayanan di

bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jumlah pelayanan Perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP dari tahun 2013 – 2016 atau sebelum diberlakukannya OSS (*Online Single Submission*) sebanyak 38 izin, sedangkan setelah diberlakukannya OSS meningkat menjadi 85 izin atau bertambah 47 izin. Sampai dengan Tahun 2019 telah dikeluarkan perizinan dan non-perizinan sebanyak 36.229 izin dengan jumlah retribusi sebesar Rp.110.015.792.618. Data jumlah Izin dan realisasi retribusi Perizinan dan non perizinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53
Jumlah Perijinan Dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

NO.	TAHUN	JUMLAH PERIZINAN/ NON-PERIZINAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp.)
1.	2013	8.131	20.479.418.668
2.	2014	6.252	27.325.963.850
3.	2015	5.785	20.310.131.550
4.	2016	5.975	12.519.702.750
5.	2017	4.074	10.321.647.400
7.	2018	2.613	10.096.167.300
8.	2019	2.705	8.962.761.100
JUMLAH		35,535	110.015.792.618

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Purwakarta

Tabel 2.54
Jumlah Izin dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2019

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sebelum OSS :								
1	IMB	865	741	768	815			
2	IZIN PRINSIP	47	46	59	82			
3	IZIN LOKASI	71	57	62	49			
4	SP3F	29	26	25	13			
5	SKFPL/IPPT	45	27	41	17			
6	SITU	768	824	763	752			
7	SIUP	993	1	874	882			
8	TDP	1.248	1.261	1.144	1.174			
9	IUI	-	-	-	-			
10	TDG	10	14	10	21			
11	TDI	67	61	54	43			
12	IPP	-	1	-	-			
13	SIPK	288	121	19	-			
14	SIUJK	29	87	78	77			
15	STPW	3	5	5	6			
16	HO	355	381	339	374			
17	REKLAME	357	318	324	294			
18	SIPA (ABT)	65	56	9	434			
19	SIPAM	2	2	2	-			
20	IPLP	31	17	15	17			
21	IPLC	18	11	26	18			
22	SIUP-KP	24	9	-	-			
23	IP	2	1	1	-			
24	IUKS/IUKU/TPS (B3)	13	52	3	43			
25	SIUP-KJA	1.597	120	85	-			
26	TRAYEK	243	232	233	203			
27	SIPAANGKUTAN/ IUA	751	584	643	434			
28	IPRS	1	-	-	-			
29	IPRB	13	1	2	-			
30	IBP/IBAK	48	28	28	23			
31	IZIN APOTEK	18	15	17	29			
32	IPLPS	2	1	4	4			
33	SIBBW /SIBJK	-	-	1	-			
34	SIUK	90	106	125	147			
35	PKDTB	28	27	23	20			
36	REKOM KATERING	-	-	-	-			
37	IZIN LABORATORIUM	2	2	1	1			

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
38	IQRS	8	1	2	6			
Sesudah OSS :								
1	IZIN PENGGUNAAN :					-	416	275
	a. IP TOKO					-	-	-
	b. IP KIOS					-	-	-
	c.IP LOS					-	-	-
2	IZIN PENGGUNAAN PELATARAN					-	-	-
3	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI &/ SEMINAR DAGANG					-	-	-
4	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)					3	6	-
5	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)					17	7	4
6	SURAT KETERANGAN PENELITIAN					-	-	-
7	IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)					1	1	-
8	IZIN OPTIKAL					-	-	2
9	IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL					-	-	-
10	IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH					-	-	1
11	IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN/SIP					-	-	1.090
12	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS)					-	1	1
13	IZIN OPERASIONAL KLINIK					27	24	20
14	IZIN APOTEK					29	24	16
15	IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS					1	1	1
16	IZIN TOKO OBAT					-	-	3
17	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN					-	-	1

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP- IRT)					-	-	153
19	SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL					-		
20	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA (LHSJB)					-	-	8
21	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM)					-	-	19
22	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM					-	-	-
23	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM					-	-	-
24	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM					-	-	-
25	IZIN TRAYEK					178	122	117
26	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK					-	-	-
27	IZIN PENYELENGGARAAN & PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR					-	-	-
28	IZIN PKDTB					15	56	56
29	P.SIUP / SIUP					713	409	7
30	P.IUI					-	18	6
31	P. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI					-	-	-
32	P. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)					-	-	-
33	P.IUKI PERLUASAN					-	-	-
34	P. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) / SIUK					154	93	32
35	P.IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (ILPKS)					-	7	2

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
36	P.IZIN USAHA LEBAHA PENEMPATAN TK SWASTA					2	-	-
37	P.IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (IMRS)					-	1	-
38	P. IPAO / IUA					302	116	47
39	P.IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM					-	-	6
40	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)					749	600	679
41	IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME					238	162	132
42	KETERANGAN RENCANA KABUPATEN					-	-	129
43	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG					-	-	-
44	IZIN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERUMAHAN					-	-	-
45	IZIN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN					-	-	-
46	IZIN PEGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)					31	30	33
47	PENGESAHAN SITEPLAN							
48	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP)					9	2	3
49	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)					27	13	17
50	IPLB3 PENGHASIL					41	38	34
51	IPLB3 USAHA JASA					-	-	-
52	IZIN PENGELOLAAN SAMPAH					-	-	-
53	IZIN LINGKUNGAN					-	1	5
54	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER					-	-	-
55	IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK					-	-	-
56	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN					-	-	-

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
57	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING					-	-	-
58	IZIN USAHA PENGECEK OBAT HEWAN					-	-	-
59	IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN					-	-	-
60	IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING					-	-	-
61	IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN					-	-	-
62	IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN					-	-	-
63	IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT					-	-	2
64	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT					-	-	1
65	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL					-	-	-
66	P. IUJK					57	38	52
67	P. IZIN LOKASI					43	42	25
68	P. IZIN USAHA HORTIKULTURA					-	-	-
69	P. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN					-	-	-
70	P. IZIN USAHA PERKEBUNAN					-	-	-
71	P. IZIN USAHA PETERNAKAN					-	-	1
72	P. IZIN USAHA PERIKANAN					-	-	-
73	IJIN GANGGUAN (IG)					276	-	
74	SP3F					4	11	
75	SITU					11	-	
76	TDP					1.014	668	
77	TDI					52	1	
78	IUTS					-	71	
79	SIUPPT					1	-	

NO.	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
80	IP PMDN / SPIPISE					27	12	
81	IU PMDN / SPIPISE					7	5	
82	SIUP KAD					1	-	
83	SIUP KAT					2	1	
84	IJIN PRINSIP					42	31	
85	IZIN SEKOLAH MENGENEMUDI					-	1	
JUMLAH		8,131	5.236	5.785	5.978	4.074	3.029	2.980

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Purwakarta

Banyaknya perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh DPMPSTP Kabupaten Purwakarta, memperlihatkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta cukup menarik bagi para investor untuk berinvestasi menanamkan modalnya baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Adapun data realisasi penanaman modal investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2013-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.55
Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019

TAHUN	REALISASI INVESTASI		TOTAL	LAJU PERTUMBUHAN (%)
	PMA	PMDN		
2013	33.644.947.419.000	2.359.670.690.064	36.004.618.109.064	3,32
2014	34.708.436.375.600	2.610.480.483.655	37.318.916.859.255	3,65
2015	40.684.116.200.000	3.062.266.800.000	43.746.383.000.000	17,22
2016	44.546.174.462.500	3.681.576.100.000	48.227.750.562.500	10,24
2017	45.705.081.068.800	4.501.092.600.000	50.206.173.668.800	4,10
2018	51.713.011.499.955	4.845.329.400.000	56.558.340.899.955	12,65
2019	56.949.244.259.475	5.835.841.400.000	62.785.085.659.475	11,01
JUMLAH	307.951.011.285.330	26.896.257.473.719	334.847.268.759.049	9,81

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

p. Kebudayaan

Budaya dalam sebuah bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa suatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa tidak terbatas pada keberagaman keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia yang sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Dengan demikian kebudayaan khas Indonesia disertai dengan karakter yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Kebudayaan juga merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil. Kebijakan Pembangunan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk mendorong peningkatan nilai tambah budaya, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya yang positif.

Berkut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.56
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Capaian Kerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya (Kali)	-	3	3	4	4	18	41
2	Jumlah Kelompok Seni Budaya yang Dibina (Buah)	-	3	3	4	4	57	110
3	Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Buah)	-	4	4	6	7	8	44

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

q. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olah raga dilakukan melalui dua fokus prioritas. Pertama, peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui: 1) Peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan. 2) Revitalisasi gerakan Pramuka, 3) Pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewiraswastaan, dan kreativitas pemuda. 4) Penyadaran pemuda. 5) Pemberdayaan Pemuda, 6) Pengembangan kepemimpinan pemuda, 7) Pengembangan kewirausahaan pemuda, 8). Pengembangan kepeloporan/ kreativitas pemuda. Kedua: 1) Peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan, 2) Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan, 3) Pemberdayaan organisasi kepemudaan, 4) Peningkatan peran serta masyarakat, dan 5) Pengembangan penghargaan kepemudaan. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta pada Urusan Kepemudaan dan Olah raga diarahkan kepada pembinan para pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama; terbinanya kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) dan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS); terbinanya atlet dikalangan pelajar, terbinanya kelompok/ klub olahraga masyarakat; dan tersedianya sarana olahraga masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta, sepanjang tahun 2013-2016 tercatat memiliki 192 buah lapangan sepakbola, 69 buah lapangan basket, 266 lapangan volley, 224 buah lapangan bulu tangkis, 7 buah lapangan tenis lapang, 249 buah lapangan tenis meja, 7 buah kolam renang dan lain-lain sebanyak 68 lapangan yang tersebar di 17 kecamatan. Total jumlah sarana prasarana keolahragaan di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.105 unit.

Tabel 2.57
Hasil Pembangunan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019

NO	JENIS	TAHUN	
		2018	2019
1.	Jumlah pembinaan kepemudaan (kegiatan)	2 kegiatan	8 kegiatan
2.	Jumlah kegiatan pembinaan/ kompetisi olahraga (kegiatan)	2 kegiatan	9 kegiatan
3.	Jumlah prasarana olahraga yang direvitalisasi/dibangun (unit)	7 unit	2 unit
4.	Cabang olahraga yang sarana disiapkan (buah)	8 buah	9 buah
5.	Jumlah organisasi kepemudaan	51 organisasi	51 organisasi

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa terjadi peningkatan jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan dari 2 kegiatan pada tahun 2018 menjadi 8 kegiatan di tahun 2019. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2019, khusus untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga, menangani 3 program yang terdiri dari 26 kegiatan.

r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempyunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja dari Frekuensi Pengendalian

Pengamanan dan Penertiban Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.58
Tabel Indikator Kinerja dari Frekuensi Pengendalian
Pengamanan dan Penertiban Penegakan Peraturan pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan pengendalian pengamanan dan Penertiban Penegakan Perda	Frekuensi Pengendalian, Penanganan dan Penertiban Penegakan Perda	127	147	54	79	99

Sumber: Satpol PP kabupaten Purwakarta

Tabel 2.59
Hasil Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2019

NO.	JENIS	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Jumlah Anggota Satpol PP	241	103
2.	Jumlah Anggota Satlinmas	2.880	2880
3.	Jumlah Anggota Satlinmas K3	-	-
4.	Jenis pelatihan penanganan Kantribmas	1	4
5.	Frekuensi pengamanan kantribmas	251	10
6.	Frekuensi pengendalian Kantribmas	16	45
7.	Frekuensi penertiban Kantribmas	236	65
8.	Penertiban Pekerja Seks Komersial	9	4
9.	Penertiban Gelandangan	2	4
10.	Penertiban Pengemis	-	4
11.	Penertiban Anak Jalanan	-	4
12.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	48	67
13.	Jumlah Pelanggaran Perda (disertakan rinciannya)		45

Sumber : Satpol PP Kabupaten Purwakarta

Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam; meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan; memelihara kantramtibmas dan mencegah tindak kriminal;

meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; pemuktahiran data pemilih; perbaikan proses politik: penyempurmaan dan penguatan kelembagan demokrasi; pembinaan politik bagi ormas dan LSM; dan pengembangan budaya politik.

Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan muspida, penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala/ permasalahan di atas.

Adapun data hasil kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta hingga tahun 2019 tercatat bahwa jumlah Forum Masyarakat untuk ketertiban dan keamanan sebanyak 3 forum, 3 lembaga swadaya masyarakat, 9 partai politik, 3 organisasi kemasyarakatan. Sedangkan data capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 tercatat telah melaksanakan 4 kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, diantaranya:

1. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem).
2. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
3. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
4. Kegiatan Pelatihan Kader Bangsa.

Tabel 2.60
Hasil Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2019

NO.	JENIS	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Jumlah Forum Masyarakat untuk ketertiban dan keamanan	3	4
2.	Jumlah LSM/ Ormas dan Yayasan	6	167
3.	Jumlah Partai Politik	9	16
4.	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan	4	4
5.	Prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam :		
	- Pilkada (%)	79	79,42
	- Pileg (%)	79	84,15
	- Pilpres (%)	79	84,38

Sumber : Kantor Kesbangpol

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam tataran makro, ada dua hal yang merupakan pekerjaan rumah bagi urusan ini, yaitu Pertama, menentukan arah kebijakan prioritas bidang pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antar daerah dan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah antar kabupaten/kota, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan pembangunan tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan berbagai strategi pembangunan. Kedua, merupakan arah kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dengan membentuk pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas, mendorong terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, serta memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada

upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah: meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.61

Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah: Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda) Yang Telah Diterbitkan	18	5	11	10	3
2.	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perbup) Yang Telah Diterbitkan	114	154	185	228	143
3.	Jumlah Produk Hukum Daerah (Kepbup) Yang Telah Diterbitkan	937	974	1170	995	490
4.	Nota Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama	3	30	42	37	15
5.	Penyaluran Raskin					
	1) PTS-PM (KK)	48.354	48.354	48.354	48.354	46.582
	2) Alokasi (Kg/RTS-M/Bln)	725.310	725.310	725.310	725.310	698.730
	3) Beras yang disalurkan (kg)	8.703.720	8.703.720	8.703.720	8.703.720	8.384.760
6	Jumlah Temuan Dari Inspektorat	771	757	807	671	95
7.	Jumlah Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat	606	718	694	320	-
8.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat	68	69	69	69	69
9.	TP TGR	5	7	8	7	-
10.	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	3	-	-	3	-
11.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Berdasar					

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Golongan I, II, III, Dan IV)					
	1) Laki-laki golongan I	220	208	185	152	129
	2) Laki-laki golongan 2	1440	1393	1.339	1.257	1.202
	3) Laki-laki golongan 3	1.696	1.774	1.830	1.785	1.562
	4) Laki-laki golongan 4	1.447	1.431	1.386	1.315	1.098
	5) Perempuan golongan I	5	6	8	7	7
	6) Perempuan golongan II	944	773	716	614	615
	7) Perempuan golongan III	1.869	1.993	2.191	2.264	2.029
	8) Perempuan golongan IV	1.764	1.770	1.716	1.666	1.516
12.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Berdasarkan Eselon II, III, IV, Dan V)					
	1) Eselon II	29	30	30	28	34
	2) Eselon III	153	157	157	158	175
	3) Eselon IV	635	649	655	638	678
	4) Eselon V	56	57	59	55	-

Sumber: Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Purwakarta

t. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan masih menjadi persoalan nasional, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya meruakan bagian dari hak azazi manusia manusai yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketahanan pangan adalah kondisi tepenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Penyelenggaraan pangan menurut UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberika manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Urusan ketahanan pangan tidak ditangani oleh Badan atau Dinas secara khusus, akan tetapi dilaksanakan oleh beberapa Dinas yaitu Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan

dan Perikanan serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Kebijakan daerah dalam urusan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketersediaan, akses dan penganeekaragaman pangan masyarakat. Kebijakan ini mendapat dukungan program peningkatan ketahanan pangan dan program penyelenggaraan urusan ketahanan pangan daerah.

Adapun capaian urusan ketahanan pangan adalah ketersediaan Energi per Kapita Kabupaten Purwakarta tahun 2017 diperoleh sebesar 2.679 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,3 g/kap/hari sedangkan pencapaian ketersediaan pangan idealnya sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan 65 g/kap/hari berdasarkan WNPG X 2012, sehingga pencapaian ketersediaan Energi Protein Per Kapita pada tahun 2017 sebesar 112%. Apabila capaian tahun 2017 ini dibandingkan dengan target tahun 2016 dan target akhir RPJMD maka capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan.

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa secara empiris memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang pembangunan. Ditinjau dari segi kewilayahan, desa merupakan wilayah pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Secara sosiologis desa berperan strategis sebagai unit sosial dan budaya yang menjadi wadah berlangsungnya sosialisasi, internalisasi dan institusional nilai-nilai sosial dan budaya yang akan membangun mentalitas penduduk desa pada khususnya. Penanganan dan pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh pemerintah daerah adalah upaya pencapaian pembangunan dalam rangka menumbuh kembangkan dan mewujudkan pembangunan masyarakat dan desa yang memiliki kemampuan serta budaya guna memberikan kontribusinya terhadap proses pembangunan di desa. Pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada upaya partisipasi masyarakat dalam

memangun kembali karakter budaya dan tradisi adat istiadat setempat yang menjadi ciri khas kearifan lokal suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat sifatnya membangun kesadaran dan memberdayakan kemampuan serta ketrampilan masyarakat dan desa. Kebijakan pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan; menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan; meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017.

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Buah)	192	192	192	192	192
2.	Jumlah Posyandu	992	1.006	1.010	1.014	1.014
3.	Jumlah Poskedes	19	19	19	19	19

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa SETDA dan Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta

v. Kearsipan

Arsip merupakan aset yang paling berharga dan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel ditempuh kebijakan operasional manajemen kearsipan. Kebijakan Pembangunan Urusan Kearsipan di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya untuk pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan; Pembangunan Database Informasi Kearsipan; Pembangunan Sarana dan Prasarana; Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip; serta Pemeliharaan Arsip.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mengalami peningkatan dalam pelaksanaan urusan dibidang kearsipan yang berkaitan dengan hal penataan dan pengelolaan dokumen kearsipan termasuk penataan dokumen arsip aktif dan non aktif, penyelamatan dokumen arsip dan pembinaan pengelolaan kearsipan. Berikut adalah Tabel Capaian Kinerja Urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Capaian kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Arsip Terdaftar	960	2.184	1.263	3.207	1.096	1.309	1.359
2	Arsip/Dokumen Terselamatkan	650	1.810	1.263	1.510	419	1.445	1.645

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta

w. Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada upaya meningkatkan penyediaan informasi pembangunan, keterbukaan informasi publik serta peningkatan sarana komunikasi dan infomatika yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat. Dalam pelaksanaan komunikasi dan penyampaian informasi publik pada masa kini harus dituntut serba cepat, akurat dan mudah diakses oleh semua pihak, mengingat perkembangan komunikasi dan informasi public pada masa kini berkembang sangat pesat dan dinamis, oleh karena diperlukan teknologi dan informasi yang unggul dan terkini serta media sarana komunikasi yang efektif dan cepat dalam penyampaian informasi publik tersebut. Kebijakan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan penyebaran informasi pembangunan. Keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat Kurang baik bahkan dapat menimbulkan ekses yang negalit bukan hanya bagi daerah itu sendi melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk urusan Informasi dan Komunikasi pada Bagian Kaharti Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64
Data Hasil Pembangunan pada Bagian Kaharti
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

No	Jenis	Satuan	Target RPJMD	Realisasi
1	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama yang Telah Ditandatangani	buah	11	38
2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Berkelanjutan	%	70	70
3	Penanganan Gangguan Jaringan IT	titik	52	30
4	Layanan Informasi Publik	%	80	80

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

x. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain ditandai oleh (1) meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan; (2) tersedianya unit perpustakaan keliling; (3) promosi budaya baca melalui media cetak dan elektronik; (4) berkembangnya unit perpustakaan desa di 17 kecamatan; (5) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya layanan perpustakaan dalam pembangunan. Pengelolaan urusan perpustakaan di daerah lebih menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, penyediaan bahan pustaka atau koleksi buku yang beraneka ragam, pembinaan perpustakaan sekolah dan luar sekolah/masyarakat dan peningkatan minat baca anak sekolah dan masyarakat.

Kebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan budayabaca dikalangan pelajar dan masyarakat serta membina lembaga-lembaga/ unit-unit perpustakaan yang ada di sekolah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan/penambahan buku/sumber bacaan dan pembinaan unit-unit perpustakaan di sekolah dan masyarakat.

Berikut adalah Tabel Jumlah Perpustakaan/layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 2.65
Jumlah Perpustakaan/Layanan Baca Binaan dan
Titik Layanan Pusling di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Capaian Kinerja						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perpustakaan Desa	153	153	153	153	153	153	153
2	Perpustakaan SD	4	7	9	11	15	78	83
3	Perpustakaan SMP	6	8	8	8	9	63	70
4	Perpustakaan Pontren	26	26	26	26	26	26	24
5	Perpustakaan Mesjid	20	20	20	20	20	20	20
6	Taman Bacaan Masyarakat	3	3	3	3	3	19	21
7	Perpustakaan Lapas	1	1	1	1	1	1	1
8	Perpustakaan Keliling	93	96	96	96	84	156	156

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta

2.3.2 Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian di Kabupaten Purwakarta ditangani oleh dua OPD, yaitu Dinas Pangan dan Pertanian); dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Kebijakan umum urusan pertanian adalah meningkatnya produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Arah kebijakan pembangunan pertanian periode Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yang dirumuskan dalam “Sembilan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa”, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pertanian dan kehutanan adalah: Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan. Peningkatan kemampuan aparat dan kelompok tani dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui Diklat dan Bimtek yang diikuti penyuluh dan kelompok tani. Hasil dari kegiatan tersebut berupa penerapan teknologi pertanian oleh 697 kelompok tani yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan penanaman/ pengembangan komoditas strategis dan unggulan terdiri dari tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Luas penanaman padi sawah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan makanan pokok yang berasal dari padi terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan untuk luas penanaman manggis, teh, cengkeh dan pala mengalami fluktuasi. Luas tanam ubi kayu cenderung menurun karena jatuhnya harga jual dan penurunan kualitas. Perkembangan penanaman per komoditas tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.66
Penanaman Komoditas Strategis dan Unggulan Pertanian

Komoditas	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Padi sawah (Ha)	35.754	36.851	36.207	44.324	23.390	42.904	41.529
Manggis (pohon)	-	1.157	2.640	1.746	157	303	4500
Teh (Ha)	-	15,6	157,5	100	52,1	75	4
Cengkeh (Ha)	-	8,39	9,37	3	2,3	20	15
Ubi kayu (Ha)	-	3.683	2.121	2.423	1.137	1.390	300
Pala (Ha)	-	5,08	19,7	6	12,3	20	350

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian

Pengembangan pertanian organik yang dikembangkan seluas 145 Ha. untuk pengembangan usaha tani diberikan bantuan kepada kelompok tani. Sedangkan promosi produk pertanian dan kehutanan setiap tahunnya dengan mengikuti Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan se-Dunia serta mengikuti Pekan Nasional (Pertanian) yang diadakan setiap 5 tahun.

Dari segi sarana dan prasarana, dikembangkan irigasi pertanian berupa Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jaringan irigasi desa sebanyak 201 unit yang tersebar di 17 kecamatan. Produksi pertanian berupa tanaman pangan (padi dan palawija) serta sayuran dan buah buahan mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena produksi pertanian sangat bergantung pada iklim dan curah hujan. Gambaran produksi sejak Tahun 2013 – 2019 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Produksi Tanaman Pangan dan Sayuran serta Buah Buahan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019

Jenis Pangan	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Padi (ton)	225.197	238.927	234.089	271.896	262.700	265.699	251.627
Palawija (ton)	128.325	104.265	71.850	69.579	43.066	40.609	30.484
Sayuran dan buah-buahan (ton)	166.164	213.124	265.997	164.903	75.175	174.866	182.632

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

Produksi tanaman perkebunan utama terdiri dari teh, cengkeh dan pala. Produksi teh tahun 2019 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan produksi cengkeh dan pala relatif meningkat. Produksi komoditas perkebunan sejak tahun 2013 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019

Komoditas	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teh (ton)	5.584	5.522,94	5.482	6.070,86	5.112	5.862,93	4.955
Cengkeh (ton)	431	446,74	465	411,63	334	485,56	483
Pala (ton)	36	32,81	36	42,56	35	46,78	48

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

Ketersediaan pangan berupa makanan pokok, sayuran dan buah – buahan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.69
Ketersediaan Pangan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2019

Jenis Pangan	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beras (ton)	148.817	155.302	149.816	169.130	164.818	170.340,084	130.970
Umbi – umbian (ton)	113.478	97.980	66.902	61.207	40.187	32.747	23.568
Sayuran dan buah-buahan (ton)	166.164	213.124	265.997	164.903	75.175,4	174.866,7	182.632,8

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian

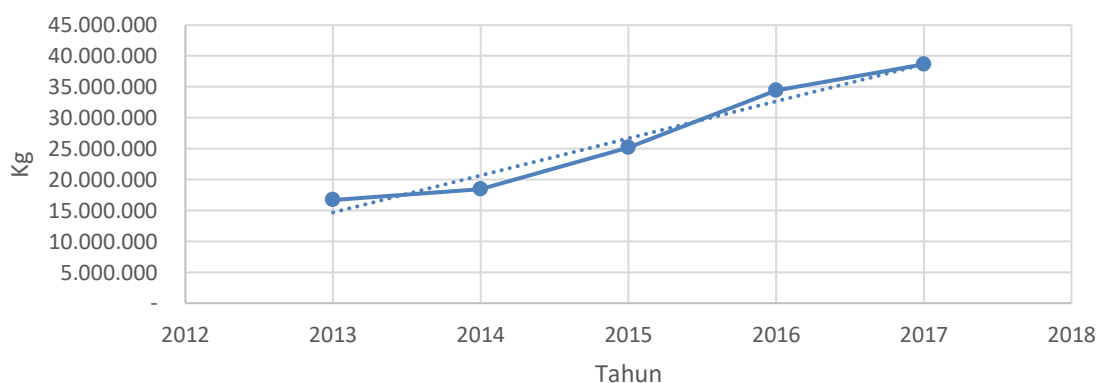
Besarnya produksi pertanian, sangat tergantung pada angka produktivitas yaitu angka produksi pertanian per satuan luas (kuintal /hektar). Untuk tahun 2016 produktivitas komoditas pertanian utama yaitu padi sawah sebesar 62,98 ku/ha, padi lading sebesar 37,83 ku/ha, jagung sebesar 53,58 ku/ha dan ubi kayu sebesar 210,03 ku/ha. Sedangkan untuk produktivitas komoditas perkebunan yaitu teh 1.533 ku/ha, cengkeh 384 ku/ha dan pala 502 ku/ha. Data produksi daging berdasarkan jenis ternak Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70
Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Jenis Ternak	Produksi (Kg)				
		2013	2014	2015	2016	2017 *)
1.	Sapi Potong	890.102	933.273	939.309	847.115	350,366
2.	Kerbau	16.493	18.521	7.546	3.430	1,419
3.	Kambing	106.916	79.493	164.764	92.339	38,191
4.	Domba	312.190	115.028	20.438	22.903	9,473
5.	Ayam Buras	1.016.040	1.074.914	1.132.785	813.502	336,464
6.	Ayam Ras Pedaging	21.121	15.984.014	22.439.995	31.767.076	13,138,851
7.	Ayam Ras Petelur	14.145.147	21.476	69.324	36.571	15,126
8.	Itik	194.090	203.784	379.752	857.044	298,765
	Jumlah	16.702.060	18.430.504	25.100.357	34.439.980	14,188,655

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2017) Data sampai dengan triwulan I*

Gambar 2.4
Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017 (dalam Kg)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat trend produksi daging secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 semester I mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2016 produksi daging ruminansia seperti daging sapi, kerbau, kambing dan domba mengalami penurunan sebagai dampak beredarnya daging sapi beku dengan harga yang lebih murah di pasar tradisional dan supermarket di Kabupaten Purwakarta.

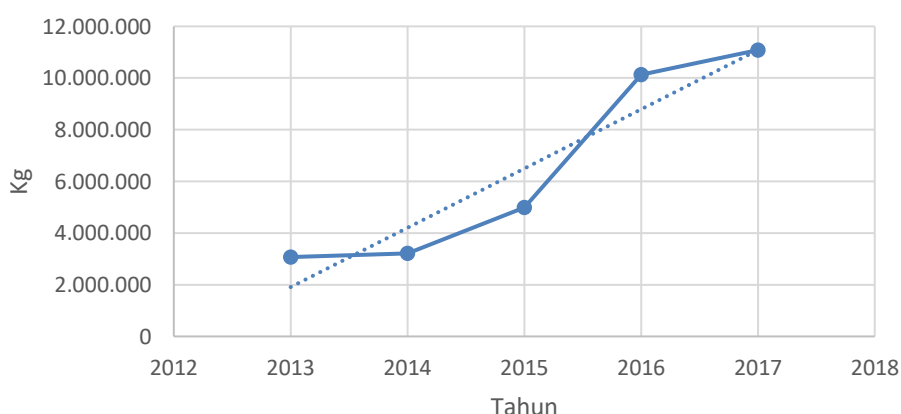
Peningkatan produksi terbesar dicapai oleh komoditi ayam ras pedaging dan itik karena daging ayam pedaging dan itik harganya lebih terjangkau, sehingga masyarakat beralih mengkonsumsi daging ayam pedaging dan itik dibanding daging ruminansia yang jauh lebih mahal. Untuk data produksi hasil ternak di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71
Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Produksi				
		2013	2014	2015	2016	2017 *)
1.	Telur Ayam Buras (Kg)	673.193	712.202	750.545	538.999	225.641
2.	Telur Ayam Ras Petelur (Kg)	371.938	374.393	1.208.540	637.539	266.893
3.	Telur Itik (Kg)	2.025.975	2.127.273	3.964.172	8.946.561	3.163.768
	JUMLAH	3.071.106	3.213.868	4.990.467	10.123.099	3.656.302

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta 2017*) Data sampai dengan triwulan I

Gambar 2.5
Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2017 (dalam Kg)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi hasil peternakan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 semester I mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2016 produksi telur ayam

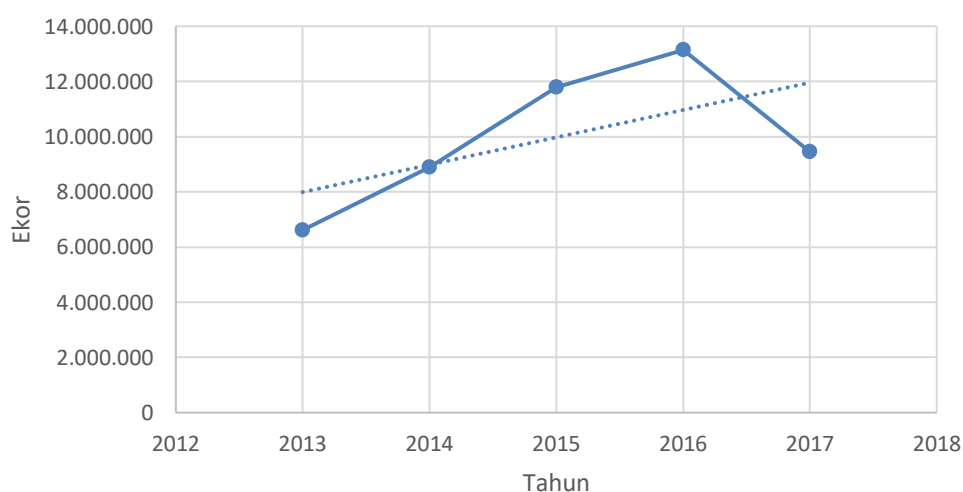
buras dan produksi ayam ras petelur mengalami penurunan sebesar 28,19% dibandingkan tahun 2015, sedangkan produksi telur itik meningkat besar 125,69%. Data populasi ternak Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.72
Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Ternak	Produksi (Kg)				
		2013	2014	2015	2016	2017 *)
1.	Sapi Potong	11.465	11.591	11.617	11.728	6.807
2.	Sapi Perah	18	18	-	-	-
3.	Kerbau	10.772	11.331	11.733	12.352	6.671
4.	Domba	1.623.715	2.193.502	2.971.152	4.034.777	2.075.432
5.	Kambing	122.469	148.901	161.698	201.881	102.564
6.	Kuda	111	116	118	120	63
7.	Ayam Buras	1.161.292	1.223.813	1.340.271	878.873	626.127
8.	Ayam Ras Petelur	40.732	30.000	55.670	69.361	37.384
9.	Ayam Ras Pedaging	3.317.562	4.657.525	6.538.699	6.593.416	3.476.952
10.	Itik	325.357	606.303	696.521	13.368.337	3.112.676
	JUMLAH	6.613.493	8.883.100	11.787.479	13.170.844	9.444.676

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta

Gambar 2.6
Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017
(dalam Ekor)



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Dari grafik di atas terlihat bahwa trend populasi peternakan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, akan tetapi populasi ternak untuk tahun 2017 diprediksi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016.

b. Kehutanan

Dalam sektor kehutanan kebijakan prioritas pembangunan RPJMD dalam Pengembangan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata juga memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata berbasis hutan dan air di Kecamatan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru dan Sukatani, serta penataan kawasan Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan menjadi stakeholder terkait untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan tersebut. Urusan Kehutanan menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta sampai Tahun 2016. Karena sejak tahun 2017 urusan Kehutanan dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data produksi hasil hutan kayu Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016

No.	Asal / Jenis Kayu	Volume (M ³) 2013	Volume (M ³) 2014	Volume (M ³) 2015	Volume (M ³) 2016
I.	Hutan Rakyat				
1.	Jati	0,45	1.863,594	1.047	3.849
2.	Mahoni	3.070,750	64,83	1.623	3.441
3.	Rimba Campuran	2.834,35	284,76	7.420	8.920
4.	Albazia/Sengon	24.007,5	2.277,1	15.041	14.875
	Jumlah I.	29.913,200	4.490,284	25.131	31.085
II.	Hutan Negara (Perum Perhutani KPH Purwakarta)				
1.	Jati	4.712,128	4.249,496	1.022	1.000
2.	Mahoni	1.489,33	879,81	410	677
3.	<i>Accacia mangium</i>	1.366,97	1.880,12	501	774
4.	Rimba Campuran	104,8	467,620	285	199
	Jumlah II.	7.673,228	7.477,046	2.219	2.651
	JUMLAH TOTAL	37.586,278	11.972,33	27.350	33.736

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Selain produksi hasil hutan kayu juga dikembangkan komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu, antara lain jamur kayu, madu, dan sarang burung walet. Data komoditi produktif potensi hasil hutan bukan kayu Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74
Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

No.	Komoditi	Produksi 2013	Produksi 2014	Produksi 2015	Produksi 2016
1.	Jamur (Kg)	242.610	7.055	2.800	72.343
2.	Madu (Liter)	13,30	13,30	12	16
3.	Sarang Burung Walet (Kg)	42,30	35,75	31	30,25

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan pembuatan bangunan konservasi tanah sejak tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75
Rehabilitasi Lahan Kritis
di Kabupaten Purwakarta 2013 – 2016

Kegiatan	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	940	1.119,14	670	490
Bangunan Konservasi Tanah (unit)	50	0	11	115

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral adalah upaya yang ditujukan untuk pengelolaan sumber dan pemanfaatan bahan dasar yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan itu sendiri, yaitu energi, bahan tambang, dan air tanah. Selain itu, pembangunan urusan ini mempunyai fungsi tambahan yang tidak kalah penting, yaitu memitigasi bencana alam. Sebagaimana diketahui, bencana alam adalah fenomena yang sulit dihindari namun dapat diminimalisir dampaknya. Selaras

dengan hal tersebut, fokus utama pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah meningkatkan rasio elektrifikasi serta pengendalian pemanfaatan bahan tambang dan air tanah.

Sasaran pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana, dengan langkah-langkah strategis berupa optimalisasi pengendalian pemanfaatan bahan tambang, air tanah dan daerah rawan bencana. Sedangkan arah kebijakannya adalah dengan mengembangkan basis data dan pengkajian geologi tata lingkungan/SDA, mengintensifkan pemantauan kegiatan pemanfaatan bahan tambang dan air tanah, mengintensifkan penertiban kegiatan pemanfaatan lahan tambang dan air tanah tidak berijin. Data perkembangan pertambangan dan data Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.76
Data Pertambangan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2016

No.	Jenis	Satuan	Tahun/ (Jumlah)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kerusakan lingkungan eks lokasi tambang	Lokasi	-	-	-	-	
2.	Penertiban Tambang tidak Berijin	Lokasi/ m ²	17/80.000	9/109.000	8/144.000	-	
3.	Total area penambangan	Ha	10.148,26	635,68	475,03	342,3	
4.	Penambangan liar/ tak berijin	m ²	139.000	109.000	144.000	-	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

Tabel 2.77
Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis	Tahun /Jumlah (Kwh)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Sosial	7.765.110	10.930.908	7.786.807	8.176.147
2.	Rumah Tangga	173.386.618	217.115.864	197.052.511	206.905.137
3.	Bisnis	38.045.221	53.161.400	41.637.353	43.719.221
4.	Industri	520.359.576	782.598.998	782.598.998	821.728.948
5.	Pemerintah	6.423.837	9.679.266	8.786.807	9.226.147
6.	Multiguna	6.777.957	10.543.632	11.453.720	12.026.406
Jumlah		752.794.319	1.084.030.068	1.049.316.196	1.101.782.006

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

Data pemanfaatan air tanah di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78
Data Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

No.	Jenis	Satuan	Tahun/ (Jumlah)			
			2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ijin SIPA (ABT)	Ijin/Titik Sumur	26	98/161	121/198	121/198
2.	Jumlah ijin SIPAM	Ijin	7	5	6	6

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

Sementara itu, capaian kinerja urusan energi sumber daya mineral bidang kelistrikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Listrik Pedesaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2016

No.	Tahun	KK Miskin Yang Belum Berlistrik	Realisasi KK Miskin Berlistrik
1.	2013	9.025	8.401
2.	2014	12.041	11.252
3.	2015	4.339	2.814
4.	2016	4.621	4.325
Jumlah		30.026	26.792

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta

d. Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 23 lokasi, baik berupa wisata alam, minat khusus maupun budaya.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta difokuskan pada pengembangan, penataan dan pemasaran/ promosi pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran/ promosi pariwisata di wilayah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui kegiatan penghargaan aplikasi sapta pesona usaha jasa pariwisata, pengembangan duta wisata, event pameran produk wisata, pemutahiran data pariwisata, pengadaan sarana atraksi Situ Wanayasa, serta pementasan kreasi seni luar daerah. Kabupaten Purwakarta mempunyai berbagai potensi bidang pariwisata, antara lain: wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus, yang diperkaya dengan seni dan budaya pertunjukan, antara lain tari buncis, calung, pencak silat, wayang golek, kasidah, jaipong dan degung. Data potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Purwakarta hingga tahun 2013-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.80
Data Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
1	Purwakarta	Air Mancur Taman Sri Baduga (Situ Buleud)	Pariwisata Alam	Situ/Alam,Taman Kota, Arena Joging
		Pabrik kain songket	Pariwisata Buatan	Kerajinan/Cinderamata
		Gedung Negara	Pariwisata Budaya	Bangunan Sejarah
		Gedung Karesidenan	Pariwisata Budaya	Bangunan Sejarah
		Makam Baing Yusuf	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Mesjid Agung	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Rumah Kuno Citalang	Pariwisata Budaya	Bangunan Kuno
		Sanggar Seni	Pariwisata Budaya	Kesenian Daerah; Atraksi Wisata
		Taman Surawisesa	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
		Taman Maya Datar	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
		Taman Panca Warna	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
		Diorama Bale Panyawangan	Museum Digital	Wisata Edukasi
		Taman Cita Resmi	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
		Taman Pembaharuan	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
		Taman Pancaniti	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
		Bale Indung Rahayu	Museum Digital	Wisata Edukasi
		Galeri Wayang	Museum Digital	Wisata Edukasi
		Pusat Bisnis dan Rekreasi (Trans Studio Mini)	Pariwisata Buatan	Pusat Bisnis dan Rekreasi
		Kawasan Wisata Alam dan <i>Waterpark</i>	Pariwisata Buatan	Wisata Air/Kolam Renang
		Pasanggrahan Padjajaran (Alun-Alun Kian Santang)	Pariwisata Buatan	Taman Bertema/Taman Kota
2	Jatiluhur	Pariwisata Jatiluhur	Pariwisata Alam	Danau/PLTA
		Bumi Satelit Indosat	Pariwisata Buatan	Teknologi; Satelit komunikasi
		Agro Wisata Ubrug	Pariwisata Alam	Perikanan

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
		Makam Wali Kuning	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Grama Tirta Jatiluhur	Pariwisata Buatan	Wisata Air/Kolam Renang
		Mata Air Cisaladah	Pariwisata Alam	Wisata Air/Kolam Renang
		Nearbo Forest	Pariwisata Buatan	Wisata Edukasi
		Sarana Wisata Tirta dan Kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata	Pariwisata Buatan	Wisata Air/Kolam Renang
3	Sukasari	Makam Mbah Panyingkiran	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Makam Mbah Guha Pangatikan	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Makam Mbah Kota Kembang	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Parang Gombong	Pariwisata Alam	Pemandangan Alam
		Curug Tilu	Pariwisata Alam	Wisata Air
		Waduk Jatiluhur	Pariwisata Buatan	Danau
		Taman Wisata Alam Sukasari	Pariwisata Alam	Wisata Alam
4	Campaka	Situ Cikumpay	Pariwisata Alam	Situ/Perkebunan
		Makam Panembahan Gunung Jatiwangi	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Makam Cakrabuana	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Wisata Kampung Air Cibayawak	Pariwisata Buatan	Wisata Air
		Agrowisata Campaka	Pariwisata Buatan	Agrowisata
5	Cibatu	Makam Mbah Cakrayuda	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Makam Mbah Parung	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Taman Wisata Pendidikan Kampung Kahuripan	Pariwisata Alam dan Buatan	Wisata Edukasi
6	Bungursari	Situ Kamojing	Pariwisata Alam	Situ
		Bukit Indah Purwakarta	Pariwisata Buatan	Kota Industri
		Kawasan Wisata Alam dan Waterpark	Pariwisata Alam	Wisata Alam
		Kuya Maranggi Water Park	Pariwisata Buatan	Kolam Renang

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
7	Babakan Cikao	Makam Ibu Cikao	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Kampung Sadang	Pariwisata Budaya	Wisata Alam dan Budaya
8	Plered	Sentra Keramik Plered	Pariwisata Budaya	Kerajinan Cenderamata
		Makam Mbah Sumadhita Anggatuda	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Makam Balung Tunggal	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Makam Dalem Kuwa	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Makam Mama Sempur	Pariwisata Budaya	Ziarah Religius
		Curug Gandasoli	Pariwisata Alam	Air Terjun
		Kampung Budaya Andir	Pariwisata Budaya	Wisata Budaya
		Makam Dalem Gandasoli	Pariwisata Budaya	Wisata Ziarah
		Workshop Litbang Keramik	Pariwisata Budaya	Wisata edukasi dan cendramata
9	Tegalwaru	Panorama Galumpit	Pariwisata Alam	Panorama alam; rekreasi air
		Gunung Parang	Pariwisata Alam	Gunung/Alam ; Panjat Tebing
		Waduk Jatiluhur	Pariwisata Alam	Danau/PLTA
		Gunung Bongkok	Parawisata Alam	Gunung/Alam ; Mendaki
10	Sukatani	Gunung Lembu	Parawisata Alam	Gunung/Alam ; Mendaki
		Gunung Cupu	Pariwisata Alam	Gunung/Alam; Mendaki
		Pusat Penjualan Makanan Khas	Pariwisata Budaya	Cenderamata/kerajinan
		Waduk Jatiluhur	Pariwisata Alam	Danau/PLTA
11	Maniis	Waduk Cirata	Pariwisata Alam	Danau/PLTA
		Agro Wisata Maniis	Pariwisata Alam	Agro wisata/Alam; Jaring terbungkus
12	Darangdan	Makam Cotak	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Kawasan Kota Hijau	Pariwisata Budaya	Wisata Kota berinfrastruktur hijau
		Kawasan Agro Wisata Darangdan	Pariwisata Budaya	Agro Wisata
		Adventure Point Alam Sari Wates	Pariwisata Budaya	Wisata buatan
13	Wanayasa	Situ Wanayasa	Pariwisata Alam	Situ/panorama alam
		Curug Cipurut	Pariwisata Alam	Air Terjun/panorama
		Agro Wisata Manggis	Pariwisata Alam	Agro Wisata; Perkebunan Manggis

No	Kecamatan	Nama Obyek/ Kawasan Wisata	Jenis/Klasifikasi	Daya Tarik
		Makam Dalem Santri	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Giri Tirta Kahuripan	Pariwisata Buatan	Agro Wisata dan Rekreasi
		Goa Jepang	Pariwisata Buatan	Wisata Sejarah
		River Tubing	Pariwisata Alam	Wisata Air
		Kolam Tjek Tse Long	Pariwisata Buatan	Wisata Air/kolam Renang
		Kawasan Kota Hijau	Pariwisata Buatan	Wisata Kota berinfrastruktur hijau
14	Kiarapedess	Makam Serpong	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Makam Eyang Parta Kusuma	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Agro Wisata Golden Melon	Pariwisata Alam	Agro wisata; Perkebunan Manggis
		Air Panas Ciracas	Pariwisata Alam	Sumber Air Panas/ Panorama
		Guha Garacina	Pariwisata Alam	Guha/sejarah
		Pasir Panyawangan	Pariwisata Alam	Pemandangan
		Curug Pamoyanan	Pariwisata Alam	Air Terjun
		Leuwi Cidomas	Pariwisata Alam	Wisata Air
		Saung Manglid	Pariwisata Alam	Perkebunan, Agro Wisata
15	Bojong	Agro Wisata Perkebunan Teh	Pariwisata Alam	Perkebunan Teh; Agro Wisata/Alam
		Kampung Cikeris	Pariwisata Budaya	Desa wisata
		Kolam Jaya Tirta Abadi	Pariwisata Buatan	Wisata Air /Kolam Renang
		Kolam Renang Cihanjavar	Pariwisata Buatan	Wisata Air /Kolam Renang
		Wisata Pedesaan Lembur Kahuripan	Pariwisata Budaya	Wisata Edukasi
		Taman Batu Mata Air Cijanun	Pariwisata Alam Dan Buatan	Wisata air
		Panenjoan	Wisata Alam	Pemandangan/Panorama Alam
		Makam Eyang Pandita	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Kawasan Kota Hijau	Pariwisata Buatan	Wisata Kota berinfrastruktur hijau
16	Pondoksalam	Makam Mbah Garda	Pariwisata Budaya	Ziarah religius
		Ranca Darah	Pariwisata Alam	Perkemahan
		Agropolitan Pondoksalam	Pariwisata Buatan	Agrowisata

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

e. Kelautan dan Perikanan

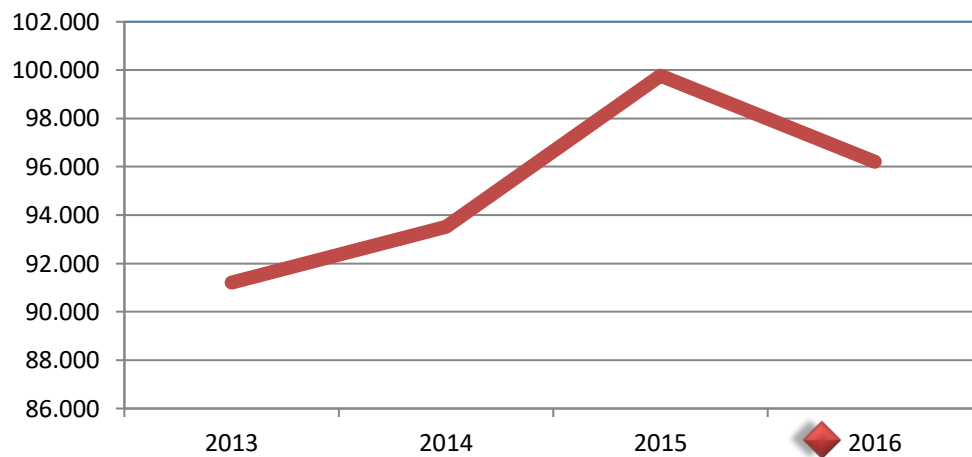
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 1 ayat 2, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pasal 2 mengemukakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Pasal 6 menerangkan bahwa pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Data produksi perikanan Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut dan grafik berikut ini:

Tabel 2.81
Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Ikan	Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Mas	37.336,18	38.147,02	41.620,77	43.411,20	35.700,4
2.	Nila	34.472,39	35.782,91	37.853,56	35.226,80	29.885,7
3.	Gurame	6,10	7,5	6,93	11,00	5,85
4.	Tawes	0,62	0,89	14,35	12,70	6,35
5.	Sepat Siam	4,40	6,43	7,87	6,00	3,25
6.	Lele	303,29	320,62	318,14	323,35	157,95
7.	Patin	11.239,79	11.321,94	10.210,76	9.851,55	8.182,32
8.	Bawal	7.779,10	7.905,02	9.636,93	7.212,75	7.025,4
9.	Ikan Lainnya	68,96	31,35	102,85	159,95	81,7
	JUMLAH	112.265,82	93.523,37	99.772,16	96.215,30	80.960,87

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta 2017*) Data sampai dengan triwulan I

Gambar 2.7
Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017
(dalam Ton)



Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat produksi perikanan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2017 semester I di Kabupaten Purwakarta cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 mengalami penurunan produksi sebesar 3,56%. Khusus untuk produksi ikan gurame mengalami peningkatan sebesar 58,735, ikan mas 4,30% dan ikan lele 1,64%.

f. Perdagangan

Kewenangan Pemerintah untuk Urusan Perdagangan di Kabupaten Purwakarta menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah di bidang perdagangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan perdagangan adalah meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatnya perlindungan konsumen, dengan indikator sasaran sebagai berikut: Terciptanya pasar tradisional yang modern sebanyak 4 unit; Terbangunnya kantor

pengelola/pelayanan pasar tradisional yang representatif sebanyak 3 unit; Terbentuknya Peraturan (regulasi) tentang Penataan dan pemetaan lokasi Pasar Modern sebanyak 1 aturan; Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif untuk Pedagang Kaki Lima dan Asongan di 1 lokasi; Pengawasan barang/ jasa terhadap 300 pelaku usaha; dan Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen.

Dalam bidang perdagangan, pasar merupakan salah satu tempat dimana pertukaran terjadi, sehingga roda perekonomian meningkat. Pasar di Kabupaten Purwakarta dikelompokkan kedalam tiga jenis pasar, yaitu Pasar Modern (*hypermarket, departemen store, super market dan mini market*), Pasar Tradisional (pasar milik pemerintah kabupaten maupun yang dikelola oleh pihak swasta) dan Pasar Desa (pasar milik pemerintah desa). Data jumlah pasar di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.82
Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta
sampai dengan Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pasar	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1.	Pasar Modern	5	5	8	14	15
2.	Mini Market	90	100	100	112	115
3.	Pasar Tradisional	5	5	5	5	5
4.	Pasar Desa	12	12	12	12	12
	JUMLAH	112	122	125	143	147

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, 2017*) Data sampai dengan triwulan I

Sementara itu, berdasarkan data ekspor Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, terlihat ekspor pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, begitu juga untuk nilai ekspor cenderung meningkat, dengan negara tujuan ekspor sebanyak 80 negara. Hal ini seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.83
Ekspor Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pasar	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Eksportir (perusahaan)	55	56	56	60	63
2	Nilai Ekspor (USD)	664.209.800	686.786.440	681.500.420	749.650.462	383.546.371
3	Negara Tujuan Ekspor (negara)	114	114	114	78	80
4	Jumlah Komoditas (jenis)	26	42	42	48	50

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta 2017) Data sampai dengan triwulan I*

g. Industri

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan: Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau poenguasaan Industri oleh satu Kelompok atau Perseorangan yang merugikan masyarakat; Membuka kesempatan berusaha dan peluasan kesempatan kerja; Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Industri khususnya industri kecil dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: Industri Agro dan Hasil Hutan (IAHH), Industri Kimia, *Pulp* dan Kertas (IKPK) serta Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA). Banyaknya unit usaha tenaga kerja

industri kecil menurut kelompok di Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84
Banyaknya Unit Usaha Tenaga Kerja Industri Kecil Menurut Kelompok di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Industri Kecil	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
I.	IAHH					
1.	Unit Usaha (UU)	2.516	2.516	2.528	2.506	2.528
2.	Tenaga Kerja (TK)	8.722	8.722	8.789	8.762	8.789
II.	ILMEA					
1.	Unit Usaha (UU)	761	761	769	696	769
2.	Tenaga Kerja (TK)	9.299	9.299	9.303	9.303	9.311
III.	IKPK					
1.	Unit Usaha (UU)	631	631	638	638	640
2.	Tenaga Kerja (TK)	3.213	3.213	3.243	3.240	3.243
Jumlah Unit Usaha		3.908	3.908	3.935	3.840	3.937
Jumlah Tenaga Kerja		21.234	21.234	21.335	21.305	21.343

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta 2017*) Data sampai dengan triwulan I

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah industri kecil di Kabupaten Purwakarta tahun 2017 semester I sebanyak 3.937 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 21.343 orang.

h. Transmigrasi

Kebijakan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada pembinaan, penyuluhan dan penempatan transmigran serta pembinaan pasca transmigrasi. Transmigrasi regional dilaksanakan melalui rekrutmen dan pembekalan calon transmigran dan penajagan kerjasama transmigrasi regional antar daerah. Transmigrasi tidak lagi hanya merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan suatu wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

Dalam pengelolaan urusan bidang ketransmigrasian menitikberatkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penjajagan daerah transmigrasi dan kerjasama antar daerah serta perekrutan dan pembekalan bagi calon transmigran. Capaian pembangunan di bidang transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2013 sampai dengan 2019 telah melaksanakan penjajagan dan kerjasama transmigrasi antar daerah sebanyak 8 daerah atau lokasi transmigrasi, sedangkan jumlah kepala keluarga yang telah diberangkatkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 67 KK dan 253 jiwa.

Adapun Lokasi atau tujuan para transmigran yang paling banyak adalah Pulau Kalimantan kemudian Pulau Sulawesi dan Sumatera, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.85
Capaian Perkembangan jumlah Transmigrasi dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Jumlah Transmigrasi						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	UPT Hyangbana Kabupaten Kelingan, Kalimantan Tengah	-	20 KK/ 82 Orang	-	-	-	-	-
2.	UPT Sebruga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	-	5 KK/ 23 Orang	-	-	-	-	-
3.	UPT Buaya Cecer Mas SP.10 Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan	-	3 KK/ 10 Orang	-	-	-	3 KK/ 13 Jiwa	-
4.	UPT Tumbang Jatuh SP.1 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah	10 KK/ 36 Orang	-	-	-	-	-	-
5.	Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	-	4 KK/ 6 Orang	-	-	-	-	-
6.	Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah	-	-	5 KK/ 20 Orang	-	-	-	-
7.	Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah	-	-	-	4 KK/ 15 Orang	-	-	-

No.	Uraian	Jumlah Transmigrasi						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara	-	-	-	9 KK/ 32 Orang	-	-	4 KK/ 16 Orang
	Jumlah	10 KK/ 36 Orang	32 KK/ 121 Orang	5 KK/ 20 Orang	13 KK/ 47 Orang	-	3 KK/ 13 Jiwa	4 KK/ 16 Orang

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Kondisi daya saing dapat digambarkan melalui Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan. Data Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2016 dan Tahun 2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2016-2017 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 911.551 pada Tahun 2016 menjadi Rp. 1.102.997 di tahun 2017:

Tabel 2.86
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 – 2017

JENIS PENGELUARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	Rp	%	Rp	%
Padi- Padian	66.322	7,28	56.591	5.13
Umbi-Umbian	4.407	0,48	5.540	0.50
Ikan	24.115	2,65	35.756	3.24
Daging	25.543	2,80	33.335	3.02
Telur dan Susu	30.859	3,39	30.445	2.76
Sayur-Sayuran	26.358	2,89	38.699	3.51
Kacang-Kacangan	11.614	1,27	13.345	1,21
Buah-Buahan	20.130	2,21	26.893	2,44
Minyak dan Lemak	10.788	1,18	11.336	1.03
Bahan Minuman	15.701	1,72	17.176	1.56
Bumbu-Bumbuan	11.479	1,26	12.110	1.09
Konsumsi Lainnya	14.279	1,57	16.145	1.46
Makanan dan Minuman Jadi	155.560	17,07	219.477	19.90
Tembakau dan Sirih	75.600	8,29	84.769	7.68
Jumlah Makanan	492.754	54,06	601.617	54.54
Perumahan dan Fasilitas Rumah	222.589	24,42	239.798	21.74
Barang dan Jasa	103.416	11,35	100.424	9.10
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	29.558	3,24	35.476	3.22
Barang-Barang Yang Tahan Lama	41.517	4,55	74.203	6.73
Pajak dan Asuransi	13.518	1,48	28.121	2.55
Keperluan Pesta dan Upacara	8.199	0,90	23.358	2.12

JENIS PENGELUARAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	Rp	%	Rp	%
Jumlah Bukan Makanan	418.797	45,94	501.380	45.46
Total	911.551	100	1.102.997	100

Sumber : BPS Kab. Purwakarta

Berikut adalah Tabel Capaian Indikator Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2017:

Tabel 2.87
Tabel Capaian Indikator Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar	40.609	45.491	50.141	54.358	58.886
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Milyar	34.216	36.172	37.892	47.107	52.137
3	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Milyar	45.222	49.990	54.407	58.700	63.177
4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	Milyar	38.103	39.750	41.116	47.144	50.627
5	Laju Inflasi	%	9,32	08,51	4,16	6,16	3,58
6	Penduduk Miskin	RTS-PM KK	48.354	48.354	48.354	48.354	46.582
7	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	%	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64
8	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,22	11,33	11,44	11,82	11,89
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	%	7,11	7,17	7,35	7,42	7,74
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,29	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	%	98,99	99,75	100,00	100,00	100,00
12	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	untuk SD/MI/Paket A Sederajat						
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Sederajat	%	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70
14	Bayi	Bayi	123,00	138,00	130,00	115,00	52,00
15	Jumlah Kasus Kematian ibu	Ibu	18,00	28,00	30,00	25,00	9,00
16	Angka Harapan Hidup (AHH)	Pertahun	69,95	69,96	70,26	70,34	70,42
17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,09	67,32	67,84	68,56	69,28
18	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	-	3,00	3,00	4,00	4,00
19	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
20	Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Buah	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	IKK Pendidikan Anak Usia Dini	%	22,62	35,76	37,64	38,13	45,64
2	IKK Penduduk Yang Berusia Dibawah 15 Tahun Melek Huruf	%	96,50	97,17	97,27	99,55	99,57
3	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Sederajat	%	98,35	99,34	99,48	99,50	99,53
4	IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Sederajat	%	96,93	99,18	99,50	99,69	99,70
5	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Sederajat	%	-	-	-	-	-
6	IKK Angka Putus Sekolah (APS)	%	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	SMP/MTs Sederajat						
7	IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	IKK Angka Kelulusan (AL) SMP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	IKK Angka Melanjutkan dari SD/MI/Paket A Sederajat ke SMP/MTs Sederajat	%	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00
10	IKK Angka Melanjutkan dari SMP/Mts Sederajat ke SMA/SMK/MA Sederajat	%	100,00	99,53	99,54	100,00	100,00
11	IKK Guru-Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV	%	79,60	89,62	91,05	92,27	92,27
12	Jumlah Rumah Sakit						
	a. Rumah Sakit Negeri (Daerah)	Buah	1,00	1,00	1,00	-	-
	b. Rumah Sakit Negeri (TNI)	Buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	c. Rumah Sakit Umum Swasta	Buah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	d. Rumah Sakit Khusus Swasta	Buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta	Buah	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
	f. Rumah Bersalin	Buah	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
13	Jumlah Puskesmas						
	a. Jumlah Puskesmas	Buah	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	b. Jumlah Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP)	Buah	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	c. Jumlah Puskesmas Pembantu	Buah	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	d. Jumlah Klinik Kesehatan	Buah	79,00	79,00	77,00	77,00	77,00
	e. Jumlah Puskesmas yang	Buah	-	-	-	5,00	5,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Terakreditasi						
	f. Jumlah Poned	Buah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	g. Jumlah Posyandu	Buah	992,00	1.000,00	1.010,00	1.014,00	1.014,00
	h. Jumlah Poskesdes	Buah	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
14	Persentasi Imunisasi						
	a. BCG	%	95,00	98,46	93,01	96,66	52,52
	b. DPT (DPT 3)	%	97,10	96,10	100,30	100,85	49,04
	c. Polio (Polio 4)	%	91,80	96,14	100,65	98,38	47,55
	d. Campak	%	91,60	94,61	99,82	101,09	48,42
15	Permohonan Register Obat dan Makanan (PIRT)	Kali	98,00	272,00	266,00	291,00	73,00
16	Operasi Pengawasan Obat dan Makanan (Survei ke PIRT)	Kali	98,00	272,00	266,00	291,00	73,00
17	Penemuan dan Penanganan Balita Gizi Buruk	Kasus	70,00	85,00	69,00	100,00	43,00
18	Penemuan dan Penanganan Penderita TBC	Kasus	113,68	84,25	84	83,64	75,52
19	Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	Kasus	282	236	518	772	78
20	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Jamkesmas (JKN)	Orang	68,052	142,878	137,562	138,058	42,281
21	Jumlah Masyarakat Yang Memanfaatkan Program Jampi	Orang	21.928	25.357	27.980	138.879	13.571
22	Jumlah Tenaga Kesehatan						
	Tenaga Medis (dr. drg)	Orang	73,00	72,00	63,00	65,00	62,00
	Tenaga Keperawatan (Perawat, Perawat Gigi)	Orang	201,00	237,00	230,00	221,00	203,00
	Bidan	Orang	317,00	340,00	336,00	344,00	333,00
	Sanitarian	Orang	14,00	25,00	33,00	27,00	20,00
	Kesehatan Masyarakat	Orang	2,00	18,00	29,00	26,00	33,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Nutrisionist / Gizi	Orang	20,00	26,00	25,00	24,00	22,00
	Apoteker	Orang	4,00	10,00	16,00	13,00	10,00
	Farmasi	Orang	20,00	23,00	23,00	24,00	23,00
	Analisis Kesehatan	Orang	23,00	28,00	27,00	28,00	30,00
	Perekam Medis	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Jumlah Persalinan dengan Bantuan Tenaga Kesehatan	Kali	21.366,00	22.775,00	19.205,00	10.102,00	9.592,00
24	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan Pertama (K1)	%	100,03	101,05	104,08	106,20	53,64
25	Persentase Ibu Yang Mendapatkan Pelayanan Kehamilan dan Kunjungan 4 kali (K4)	%	92,20	95,05	99,62	99,67	48,82
26	Persentase Stimulasi Deteksi Intervei Dini Tumbuh Kembang Anak Balita	%	59,20	56,71	54,53	61,89	52,48
27	Cakupan Pemberian Vitamin A	%	97,70	98,89	96,92	96,13	97,80
28	Cakupan Penjangkaran Anak Sekolah	%	94,64	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Cakupan Pemeriksaa n Lansia	%	50,50	7,19	88,87	101,75	13,99
30	Jumlah Kasus Kematian						
	a. Neonatal	Orang	95,00	108,00	107,00	95,00	45,00
	b. Bayi	Bayi	123,00	138,00	130,00	115,00	52,00
31	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Ibu	18,00	28,00	30,00	25,00	9,00
32	Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten						
	Jalan Aspal (hotmix)	Km	479,43	511,99	533,50	504,58	-
	Jalan Aspal (Lapen)	Km	125,76	99,90	72,24	85,78	-
	Jalan Beton	Km	46,14	55,97	66,33	79,61	-
	Batu/Kerikil	Km	71,77	55,41	52,48	57,33	-
	Jalan Tanah	Km	1,90	4,35	4,38	1,62	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
33	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta						
	Baik	Km	440,30	456,63	467,53	491,87	-
	Sedang	Km	133,31	141,64	146,88	143,22	-
	Rusak	Km	75,06	85,00	90,17	60,19	-
	Rusak Berat	Km	76,33	44,29	24,35	33,65	-
34	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten						
	Mantap	Km	554,84	572,80	583,50	596,48	-
	Kurang Mantap	Km	93,83	110,46	121,07	98,80	-
	Kritis	Km	76,33	44,29	24,35	33,65	-
35	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi						
	Saluran	M	1.446,20	1.446,20	674,90	110,00	-
	Rehabilitasi Lining	M	30,00	816,50	1.115,00	-	-
	Talang PVC Rangka Baja	M	86,70	-	2,00	-	-
	Tembok Penahan Tanah (TPT)	M	86,30	241,95	386,10	-	-
	Rehabilitasi Bendung	Buah	2,00	2,00	2,00	-	-
	Free Intake	M	-	1,00	-	-	-
	Terjunan	M	1,00	3,00	-	-	-
	Bangunan Pengambilan	M	2,00	-	3,00	-	-
	Bangunan Bagi	M	-	1,00	2,00	-	-
	Pintu Air	M	-	2,00	-	-	-
	Pasangan Bronjong	M	-	18,00	-	-	-
	Normalisasi Saluran	M	30,00	-	1.218,60	-	-
36	Banyaknya Kendaraan yang Diuji	Kendaraan	9.493	13.455	14.349	14.189	6354
37	Lingkungan Hidup						
	Meningkatnya aparaturnya yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	%	16,00	16,00	16,00	16,00	78,00
	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	%	-	1,00	1,00	1,00	2,00
	Meningkatnya	%	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati						
	Meningkatkan pengamanaan sumber mata air	%	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang LH	%	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00
	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	%	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
	Meningkatnya penataan dan penegakan hukum lingkungan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
38	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil						
	Jumlah Dokumen Kartu Tanda Penduduk Yang Diterbitkan	Dokumen	417.280,00	513.260,00	610.906,00	665.575,00	689.205,00
	Jumlah Dokumen Kartu Keluarga Yang Diterbitkan	Dokumen	136.905,00	173.389,00	240.427,00	230.808,00	250.584,00
	Jumlah Dokumen Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	Dokumen	16.998,00	22.723,00	28.688,00	45.505,00	17.157,00
	Jumlah Dokumen Angka Kematian Yang Diterbitkan	Dokumen	10,00	27,00	17,00	51,00	205,00
	Jumlah Dokumen Akta Perceraian Yang Diterbitkan	Dokumen	53,00	52,00	54,00	48,00	102,00
	Jumlah Dokumen Perceraian Yang Diterbitkan	Dokumen	5,00	1,00	2,00	1,00	2,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Dokumen SKTT Yang Diterbitkan	Dokumen	232,00	650,00	591,00	623,00	333,00
	Jumlah Dokumen KIK WNA Yang Diterbitkan	Dokumen	242,00	75,00	80,00	64,00	42,00
	Jumlah Dokumen SK Pindah Datang Yang Diterbitkan	Dokumen	-	1.688,00	3.635,00	6.011,00	4.482,00
39	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak						
	Presentase Partisipasi PNS Perempuan Pemkab Per Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	-	-	-	9,30	10,70
	Jumlah KDRT Yang Dilaporkan (Kasus)	Kasus	-	-	3,00	5,00	5,00
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	-	-	-	46.161,00	43.325,00
	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan (Kasus)	Kasus	-	-	3,00	5,00	5,00
40	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana						
	Total Fertility Rate (TFR) (Point)	Poin	-	-	178.355,00	174.822,00	177.358,00
	Rasio Akseptor KB (%) / PUS	%	124.312,00	135.573,00	146.778,00	152.287,00	169.242,00
	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	%	-	74.78	3,92	3,29	3,67
	Capaian Akseptor KB Jenis IUD	Jenis	9.690,00	10.322,00	12.277,00	14.370,00	17.873,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Implant	Jenis	5.323,00	5.465,00	6.188,00	6.906,00	8.812,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Suntik	Jenis	62.903,00	68.917,00	75.331,00	77.427,00	94.905,00
	Capaian Akseptor KB Jenis Pil	Jenis	41.508,00	45.703,00	47.595,00	46.922,00	58.354,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Capaian Akseptor KB Jenis Lainnya	Jenis	4.888,00	5.166,00	5.752,00	6.622,00	8.039,00
41	Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
	Anak Balita Terlantar	Anak	62,00	3,00	3,00	35,00	-
	Anak Terlantar	Anak	527,00	751,00	751,00	199,00	-
	Anak Berhadapan dengan Hukum	Anak	40,00	34,00	34,00	34,00	-
	Anak Bermasalah Sosial Psikologis	Anak	-	-	-	-	-
	Anak Jalanan	Anak	62,00	59,00	74,00	76,00	-
	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Wanita	1.478,00	1.480,00	1.480,00	3.098,00	-
	Wanita Korban Tindak Kekerasan	Wanita	1,00	-	3,00	4,00	-
	Wanita Tuna Susila	Wanita	215,00	14,00	16,00	13,00	-
	Lansia Terlantar	Orang	1.987,00	1.778,00	1.778,00	960,00	-
	Pengemis	Orang	1.495,00	13,00	13,00	11,00	-
	Lansia Korban Kekerasan	Orang	-	-	-	-	-
	Gelandangan	Orang	389,00	1,00	1,00	1,00	-
	Penyandang Cacat	Orang	1.689,00	1.425,00	1.425,00	1.520,00	-
	Waria	Orang	12,00	-	-	43,00	-
	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	Orang	-	-	-	-	-
	Bekas Warga Binaan LK	Orang	181,00	136,00	136,00	110,00	-
	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	52,00	3,00	3,00	21,00	-
	Keluarga Fakir Miskin	Keluarga	27.653,00	34.314,00	34.314,00	46.241,00	-
	Jumlah Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	3.093,00	9.326,00	9.326,00	9.326,00	-
	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga	5.227,00	296,00	206,00	104,00	-
	Komunitas Adat Terpencil		-	-	-	-	-
	Masyarakat Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana	KK	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Korban Bencana Alam	Orang	99,00	209,00	209,00	95,00	-
	Korban Bencana Sosial	Orang	122,00	111,00	111,00	149,00	-
	Pekerja Migran Bermasalah	Orang	2,00	10,00	17,00	15,00	-
	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	-	-	-	-	-
	Keluarga Rentan	Orang	-	-	-	-	-
42	Jumlah Pengangguran						
	SD dan sederajat	Orang	1.992,00	1.628,00	1.295,00	921,00	743,00
	SLTP	Orang	5.852,00	5.484,00	5.188,00	4.692,00	1.530,00
	SLTA	Orang	11.677,00	11.562,00	12.911,00	12.681,00	5.360,00
	Akademi	Orang	486,00	482,00	375,00	437,00	138,00
	Universitas	Orang	1.104,00	794,00	602,00	593,00	208,00
43	Jumlah Tenaga Kerja						
	Angkatan Kerja		1.507,00	1.444,00	1.481,00	1.045,00	1.035,00
	Kesempatan Kerja		1.432,00	879,00	1.557,00	1.099,00	510,00
	Pencari Kerja (IPM)		21.111,00	19.950,00	20.371,00	19.324,00	7.969,00
44	Jumlah Izin dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta	Perijinan	8131	6252	5785	5978	2365
45	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta						
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Buah	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	Jumlah Posyandu	Buah	992,00	1.006,00	1.010,00	1.014,00	1.014,00
	Jumlah Poskedes	Buah	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
46	Jumlah Perpustakaan/layanan Baca Binaan dan Titik Layanan Pusling di Kabupaten Purwakarta						
	Perpustakaan Desa	Buah	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
	Perpustakaan SD	Buah	4,00	7,00	9,00	11,00	15,00
	Perpustakaan SMP	Buah	6,00	8,00	8,00	8,00	9,00
	Perpustakaan Pontren	Buah	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Perpustakaan Mesjid	Buah	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Taman Bacaan Masyarakat	Buah	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Perpustakaan Lapas	Buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Perpustakaan Keliling	Buah	93,00	96,00	96,00	96,00	84,00
47	Penanaman Komoditas Strategis dan Unggulan Pertani						
	Padi sawah (Ha)	Ha	35.754	36.851	36.207	44.324	23.390
	Manggis (pohon)	Pohon	-	1.157	2.640	1.746	157
	Teh (Ha)	Ha	-	15,6	157,5	100	52,1
	Cengkeh (Ha)	Ha	-	8,39	9,37	3	2,3
	Ubi kayu (Ha)	Ha	-	3.683	2.121	2.423	1.137
	Pala (Ha)	Ha	-	5,08	19,7	6	12,3
48	Produksi Tanaman Pangan dan Sayuran serta buah buahan di Kabupaten Purwakarta						
	Padi	Ton	225.197,00	238.927,00	234.089,00	271.896,00	-
	Palawija	Ton	128.325,00	104.265,00	71.850,00	69.579,00	-
	Sayuran dan buah-buahan	Ton	166.164,00	213.124,00	265.997,00	164.903,00	-
49	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Purwakarta						
	Teh	Ton	5.584,00	5.522,94	5.482,00	6.070,86	-
	Cengkeh	Ton	431,00	446,74	465,00	411,63	-
	Pala	Ton	36,00	32,81	36,00	42,56	-
50	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Purwakarta						
	Beras	Ton	148.817,00	155.302,00	149.816,00	169.130,00	-
	Umbi – umbian	Ton	113.478,00	97.980,00	66.902,00	61.207,00	-
	Sayuran dan buah-buahan	Ton	166.164,00	213.124,00	265.997,00	164.903,00	-
51	Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak						
	Sapi Potong	Ekor	890.102,00	933.273,00	939.309,00	847.115,00	350,37
	Kerbau	Ekor	16.493,00	18.521,00	7.546,00	3.430,00	1,42
	Kambing	Ekor	106.916,00	79.493,00	164.764,00	92.339,00	38,19
	Domba	Ekor	312.190,00	115.028,00	20.438,00	22.903,00	9,47
	Ayam Buras	Ekor	1.016.040,00	1.074.914,00	1.132.785,00	813.502,00	336,46
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	21.121,00	15.984.014,00	22.439.995,00	31.767.076,00	13,138,851
	Ayam Ras Petelur	Ekor	14.145.147,00	21.476,00	69.324,00	36.571,00	15,13
	Itik	Ekor	194.090,00	203.784,00	379.752,00	857.044,00	298,77
52	Produksi Hasil Ternak Kabupaten Purwakarta						
	Telur Ayam Buras	Kg	673.193	712.202	750.545	538.999	225.641
	Telur Ayam Ras Petelur	Kg	371.938	374.393	1.208.540	637.539	266.893
	Telur Itik	Kg	2.025.975	2.127.273	3.964.172	8.946.561	3.163.768
53	Populasi Ternak Kabupaten Purwakarta Tahun						
	Sapi Potong	Ekor	11.465,00	11.591,00	11.617,00	11.728,00	6.807,00
	Sapi Perah	Ekor	18,00	18,00	-	-	-
	Kerbau	Ekor	10.772,00	11.331,00	11.733,00	12.352,00	6.671,00

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Domba	Ekor	1.623.715,00	2.193.502,00	2.971.152,00	4.034.777,00	2.075.432,00
	Kambing	Ekor	122.469,00	148.901,00	161.698,00	201.881,00	102.564,00
	Kuda	Ekor	111,00	116,00	118,00	120,00	63,00
	Ayam Buras	Ekor	1.161.292,00	1.223.813,00	1.340.271,00	878.873,00	626.127,00
	Ayam Ras Petelur	Ekor	40.732,00	30.000,00	55.670,00	69.361,00	37.384,00
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.317.562,00	4.657.525,00	6.538.699,00	6.593.416,00	3.476.952,00
	Itik	Ekor	325.357,00	606.303,00	696.521,00	13.368.337,00	3.112.676,00
51	Komoditi Produktif Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu						
	Jamur	Kg	242.610,00	7.055,00	2.800,00	72.343,00	-
	Madu	Liter	13,30	13,30	12,00	16,00	-
	Sarang Burung Walet	Kg	42,30	35,75	31,00	30,25	-
52	Rehabilitasi Lahan Kritis						
	Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	940,00	1.119,14	670,00	490,00	-
	Bangunan konservasi tanah	Unit	50,00	-	11,00	115,00	-
53	Data Pertambangan di Kabupaten Purwakarta						
	Kerusakan lingkungan eks lokasi tambang	Lokasi	-	-	-	-	-
	Penertiban Tambang tidak Berijin	Lokasi/ M2	17/80.000	9/109.000	8/144.000	-	-
	Total area penambang an	Ha	10.148,26	635,68	475,03	342,30	-
	Penambang an liar/tak berijin	M2	139.000,00	109.000,00	144.000,00	-	-
54	Kecukupan Energi di Kabupaten Purwakarta						
	Sosial		7.765.110,00	10.930.908,00	7.786.807,00	8.176.147,00	-
	Rumah Tangga		173.386.618,00	217.115.864,00	197.052.511,00	206.905.137,00	-
	Bisnis		38.045.221,00	53.161.400,00	41.637.353,00	43.719.221,00	-
	Industri		520.359.576,00	782.598.998,00	782.598.998,00	821.728.948,00	-
	Pemerintah		6.423.837,00	9.679.266,00	8.786.807,00	9.226.147,00	-
	Multiguna		6.777.957,00	10.543.632,00	11.453.720,00	12.026.406,00	-
55	Data Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta						
	Jumlah ijin SIPA (ABT)	Ijin/ Titik sumur	26,00	98/161	121/198	121/198	-
	Jumlah ijin SIPAM	Ijin	7,00	5,00	6,00	6,00	-

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
56	Produksi Perikanan Kabupaten Purwakarta						
	Mas	Ekor	37.336,18	38.147,02	41.620,77	43.411,20	35.700,40
	Nila	Ekor	34.472,39	35.782,91	37.853,56	35.226,80	29.885,70
	Gurame	Ekor	6,10	7,50	6,93	11,00	5,85
	Tawes	Ekor	0,62	0,89	14,35	12,70	6,35
	Sepat Siam	Ekor	4,40	6,43	7,87	6,00	3,25
	Lele	Ekor	303,29	320,62	318,14	323,35	157,95
	Patin	Ekor	11.239,79	11.321,94	10.210,76	9.851,55	8.182,32
	Bawal	Ekor	7.779,10	7.905,02	9.636,93	7.212,75	7.025,40
	Ikan Lainnya	Ekor	68,96	31,35	102,85	159,95	81,70
57	Jumlah Pasar di Kabupaten Purwakarta	Buah					
	Pasar Modern	Buah	5,00	5,00	8,00	14,00	15,00
	Mini Market	Buah	90,00	100,00	100,00	112,00	115,00
	Pasar Tradisional	Buah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Pasar Desa	Buah	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
58	Ekspor Kabupaten Purwakarta						
	Eksportir	Perusahaan	55,00	56,00	56,00	60,00	63,00
	Nilai Ekspor	\$	664.209.800,00	686.786.440,00	681.500.420,00	749.650.462,00	383.546.371,00
	Negara Tujuan Ekspor	Negara	114,00	114,00	114,00	78,00	80,00

2.4.1 PENCAPAIAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013-2018

Pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan RPJMD 2013 - 2018 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Dari 37 sasaran (awalnya berjumlah 40 sasaran, 3 sasaran dengan 7 indikator kinerja sasaran berpindah wewenangannya ke Provinsi Jawa Barat) telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018 lalu, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Purwakarta. 37 sasaran tersebut memiliki 103 indikator sasaran yang terdiri dari 17 sasaran dengan 49 indikator kinerja sasaran untuk Misi I, 9 sasaran dengan 29 indikator kinerja sasaran untuk Misi II dan 11 sasaran dengan 25 indikator kinerja sasaran untuk Misi III.

Pada tahun anggaran 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 40 sasaran dengan menggunakan 110 indikator kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 103 indikator kinerja sasaran yang diukur, sebanyak 88 indikator kinerja sasaran (80,00%) mencapai atau melebihi target, sebanyak 15 indikator kinerja sasaran (13,64%) tidak mencapai target serta 7 indikator (6,36%) wewenangannya dialihkan ke Provinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut dimana Capaian Misi 1 memberikan kontribusi sebesar 81,63% indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target. Misi 2 memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 93,10% indikator kinerja sasaran yang mencapai target bahkan melebihi target, sedangkan pada Misi 3 memberikan kontribusi yaitu sebesar 84,00% indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target.

Tabel 2.88
Capaian Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Misi 1. Mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas, berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat					
	Sasaran 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat					
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.00	7.81	97.63	Tidak Tercapai
2	Angka Melek Huruf	Persen	97.64	99.55	101.96	Tercapai
	Sasaran 2. Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat					
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	39,500	75,013	189.91	Tercapai
4	Jumlah anggota perpustakaan per tahun	Orang	8,000	11,844	148.05	Tercapai
5	Jumlah titik layanan perpustakaan keliling	Titik	103	156	151.46	Tercapai
6	Jumlah perpustakaan binaan	Unit	215	367	170.70	Tercapai
7	Jumlah buku perpustakaan	Buku	38,000	38,000	100.00	Tercapai
	Sasaran 3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan berkembangnya nilai-nilai tradisi dan budaya					
8	Jumlah kelompok seni budaya lokal yang dibina	Kelompok	6	30	500.00	Tercapai
9	jumlah event pagelaran seni budaya yang diikuti dan diselenggarakan	Event	5	75	1500.00	Tercapai
	Sasaran 4. Berkembangnya potensi generasi muda dan prestasi keolahragaan					
10	Jumlah pembinaan kepemudaan	Kegiatan	15	57	380.00	Tercapai
11	Jumlah kegiatan pembinaan/kompetensi olahraga	Kegiatan	13	63	484.62	Tercapai
12	Prasarana olahraga yang direvitalisasi/ dibangun	Buah	7	24	342.86	Tercapai
13	Cabang Olahraga yang sarannya disediakan	Buah	35	57	162.86	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
14	Jumlah kematian bayi	Kasus	35	57	162.86	Tercapai
15	Jumlah kematian ibu	Kasus	16	32	200.00	Tercapai
16	Persentase bayi dan balita gizi buruk	Persen	0.012	0.012	100.00	Tercapai
	Sasaran 6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial					
17	Jumlah penyandang penyakit sosial yang dibina	Orang	382	722	189.01	Tercapai
	Sasaran 7. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja					
18	Indeks pemberdayaan gender	Angka	23	72.5	315.22	Tercapai
19	Indeks Pembangunan gender	Angka	25	87.75	351.00	Tercapai
20	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	10	2	20.00	Tercapai
	Sasaran 8. Meningkatkan keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk					
21	Cakupan sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	63.8	79.84	125.14	Tercapai
	Sasaran 9. Meningkatkan kualitas dan iklim ketenagakerjaan					
22	Banyaknya pelatihan yang diselenggarakan	Kegiatan	8	91	1137.50	Tercapai
23	Peningkatan kesempatan kerja yang tersedia	Persen	78.6	90.56	115.22	Tercapai
24	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	15	63	420.00	Tercapai
25	Penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha	Persen	100	100	100.00	Tercapai
	Sasaran 10. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat					
26	Ketersediaan energi protein per kapita	Persen	100	96	96.00	Tidak Tercapai
27	Penganekaragaman konsumsi pangan	Skor PPH	100	87.4	87.40	Tidak Tercapai
	Sasaran 11. Meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan					
28	Produksi padi	Ton	226.424	265.700	117.35	Tercapai
29	Produksi palawija	Ton	133,294	40,609.00	30.47	Tidak Tercapai
30	Produksi perkebunan (teh dan cengkeh)	Ton	5,501	6,348.49	115.41	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
31	Produksi holtikultura (sayuran dan buah-buahan)	Ton	160,927	174,866.7	108.66	Tercapai
	Sasaran 12. Meningkatnya produksi pangan hasil peternakan dan perikanan					
32	Peningkatan produksi peternakan	Persen	5	6.14	122.80	Tercapai
33	Peningkatan produksi perikanan	Persen	2	-7.53	-376.50	Tidak Tercapai
	Sasaran 13. Meningkatnya fungsi ekologi dan ekonomi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan					
34	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	1.002	0	100	Wewenang Beralih ke Provinsi Jawa Barat
35	Produksi hasil hutan (kayu)	M3	4.504	0	100	
	Sasaran 14. Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN					
36	Peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Persen	3	12.65	421.67	Tercapai
37	Peningkatan proses pengolahan pelayanan administrasi perijinan	Persen	95	96.33	101.40	Tercapai
38	Berperan serta pada kegiatan pameran investasi dalam negeri	Even	20	19	95.00	Tidak Tercapai
	Sasaran 15. Terwujudnya koperasi yang sehat dan UMKM yang tangguh					
39	Koperasi yang memenuhi kriteria koperasi sehat	Persen	25	54.00	216.00	Tercapai
40	Jumlah pelaku UMKM terbina menjadi wiraswasta yang profesional	Orang	150	205	136.67	Tercapai
	Sasaran 16. Terwujudnya industri kecil dan menengah yang produktif, memiliki mutu produk kompetitif dan mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat					
41	Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan kredit perbankan dan non perbankan	UMKM	380	461	121.32	Tercapai
42	Jumlah industri kecil yang memiliki SNI, P-IRT, dan GKM	Unit	230	312	135.65	Tercapai
43	Luas lahan kawasan IKM yang disediakan Pemda	Ha	6	1.2	20.00	Tidak Tercapai
44	Lokasi Sarana/ Prasarana Promosi/ Penjualan Produk Industri Kecil	Titik	5	3	60.00	Tidak Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran 17. Meningkatnya daya saing komoditas perdagangan serta meningkatkan perlindungan konsumen					
45	Jumlah pasar tradisional yang modern	Unit	9	9	100.00	Tercapai
46	Terbangunnya kantor pengelola/pelayanan pasar tradisional yang refresentatif	Unit	6	6	100.00	Tercapai
47	Terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern	Buah	1	1	100.00	Tercapai
48	Tertatanya sarana dan prasarana yang refresentatif untuk penataan pedagang kaki lima dan asongan	Lokasi	1	1	100.00	Tercapai
49	Pengawasan barang/jasa terhadap pelaku usaha	Pelaku usaha	300	550	183.33	Tercapai
50	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Persen	100	80	80.00	Tidak Tercapai
	Sasaran 18. Meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan					
51	Jumlah wisatawan asing dan domestik	Orang	700,000	2,260,698	322.96	Tercapai
B	Misi 2. Pengembangan struktur wilayah dan tata ruang yang berorientasi pada keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara dan matahari					
	Sasaran 19. Tersedianya jaringan jalan yang mendukung kemudahan interaksi antar kawasan dan antar daerah					
52	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Orang	77.50	84.10	108.52	Tercapai
53	Persentase daerah terisolir	Persen	1.56	0.00	100.00	Tercapai
	Sasaran 20. Tersedianya sistem transportasi yang mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas					
54	Rasio kelengkapan pengatur dan pengaman lalu lintas	Persen	456.3	574	125.79	Tercapai
55	Persentase angkutan umum laik jalan	Persen	80.00	80.39	100.49	Tercapai
56	Rasio terminal	(M2/Unit)	2.12	4	188.68	Tercapai
	Sasaran 21. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat					
57	Rasio elektrifikasi masyarakat	Persen	100.00	0	0.00	Wewenang Beralih ke Provinsi Jawa Barat
58	Jenis potensi energi daerah yang termanfaatkan	Jenis	7	0	0.00	
	Sasaran 22. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat					

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
59	Persentase desa rawan air bersih	Persen	5.23	1.04	19.89	Tercapai
60	Persentase mata air yang diamankan	Persen	55	60	109.09	Tercapai
Sasaran 23. Terpenuhinya kebutuhan air areal persawahan						
61	Rasio luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	6.9	30.06	435.65	Tercapai
Sasaran 24. Meningkatnya kualitas ruang dan fasilitas publik						
62	Jumlah RTH, fasilitas publik dan ornamen kota yang dibangun/direvitalisasi	Titik	5	10	200.00	Tercapai
63	Persentase RTH yang terpelihara	Persen	100	100	100.00	Tercapai
64	Persentase ornamen kota yang terpelihara	Persen	100	100	100.00	Tercapai
Sasaran 25. Meningkatnya pelayanan sarana prasarana lingkungan						
65	Rasio lampu hias yang terpasang	Persen	2.00	2	100.00	Tercapai
66	Persentase RW yang jalan lingkungannya di bangun/ diperbaiki	Persen/RW	8.00	11	137.50	Tercapai
67	Persentase daerah genangan yang tertangani	Persen	10.00	15	150.00	Tercapai
68	Jumlah unit pengelolaan limbah komunal yang dibangun (unit)	Unit	2	0	0.00	Tidak Tercapai
69	Persentase panggilan kebutuhan penyedotan tinja yang terpakai (%)	Persen	100	100	100.00	Tercapai
70	Persentase Volume sampah yang terangkat menuju TPA (%)	Persen	30	73.03	243.43	Tercapai
71	Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	70	71.68	102.40	Tercapai
72	Rasio ketersediaan TPU milik Pemda	Persen	7.6	1.6	21.05	Tidak Tercapai
73	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	Kelompok	192	192	100.00	Tercapai
Sasaran 26. Tersediaanya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat						
74	Rasio rumah layak huni	Persen	94.04	99.67	105.99	Tercapai
Sasaran 27. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup						

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
75	Jenis layanan pengujian Lingkungan Hidup yang Terakreditasi	Jenis	2	5	250.00	Tercapai
76	Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup	Hari	60	60	100.00	Tercapai
77	Jenis kualitas lingkungan yang dipantau	Jenis	3	4	133.33	Tercapai
78	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	26	96	369.23	Tercapai
79	Persentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Persen	85.00	100	117.65	Tercapai
	Sasaran 28. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang daerah					
80	Lama proses pengesahan rencana tapak/penertiban rekomendasi IMB	Hari	9	1	100.00	Tercapai
81	Persentase pemegang izin pemanfaatan ruang yang dipantau	Persen	60.00	100	166.67	Tercapai
82	Persentase pengaduan dan sengketa pemanfaatan ruang yang diselesaikan	Persen	100	100	100.00	Tercapai
	Sasaran 29. Meningkatnya pengelolaan bahan tambang dan air tanah serta daerah rawan bencana					
83	Persentase kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah berijin yang di tinjau dan di bina	Persen	100	0	0.00	Wewenang Beralih ke Provinsi Jawa Barat
84	Sistem Informasi Geologi Tata Lingkungan/SDA	Unit	1	0	0.00	
85	Persentase kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air tanah tidak berijin yang ditertibkan	Persen	75.00	0	0.00	
C	Misi 3. Mengembangkan struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik berbasis perdesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat					
	Sasaran 30. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dasar kependudukan					
86	Cakupan penerbitan KK	Persen	100.00	100	100.00	Tercapai
87	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	90.00	78.03	86.70	Tidak Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
88	Cakupan penerbitan KTP	Persen	100.00	98.03	98.03	Tidak Tercapai
89	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	70.00	74	105.71	Tercapai
90	Sistem informasi kependudukan	Paket	1	1	100.00	Tercapai
Sasaran 31. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan						
91	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan daerah	Persen	95	95	100.00	Tercapai
92	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang tepat waktu	Dokumen	8	8	100.00	Tercapai
93	Ketersediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Perangkat Lunak	1	2	200.00	Tercapai
94	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	100	93	93.00	Tidak Tercapai
Sasaran 32. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah secara aman dan tertib						
95	Jumlah dokumen arsip yang dapat diselamatkan	Box	1000	1,500	150.00	Tercapai
Sasaran 33. Meningkatnya sistem komunikasi dan informasi pembangunan daerah						
96	Jumlah Aplikasi layanan Public yang dapat diakses secara online	Unit	59	59	100.00	Tercapai
97	OPD yang melaksanakan layanan berbasis elektronik	OPD	46	18	39.13	Tidak Tercapai
Sasaran 34. Optimalisasi tata kelola pertanahan						
98	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persen	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Sasaran 35. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel						
99	Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Persen	15	18.26	121.73	Tercapai
100	Jumlah persentase capaian temuan hasil pemeriksaan	Orang	97	97.7	100.72	Tercapai
101	Persentase inventarisasi aset daerah	Persen	90	90	100.00	Tercapai
102	Jumlah Asset Daerah yang Tersertifikasi	Unit	20	48	240.00	Tercapai

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD 2018	REALISASI S.D 2018	TINGKAT PENCAPAIAN (%)	EVALUASI CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran 36. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan					
103	Jumlah standar pelayanan minimal (SPM) di setiap OPD	SPM	15	17	113.33	Tercapai
104	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	Orang	150	163	108.67	Tercapai
105	Jumlah MoU/ Perjanjian kerjasama yang ditandatangani pimpinan daerah	Buah	14	37	264.29	Tercapai
	Sasaran 37. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan					
106	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	Kelompok	680	1,583	232.79	Tercapai
	Sasaran 38. Meningkatnya sistem peraturan perundang-undangan					
107	Fasilitasi penetapan Perda dan Perbup	Persen	100	105.79	105.79	Tercapai
	Sasaran 39. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat					
108	Forum partisipasi masyarakat dalam Sishankamrata	Forum	6	13	216.67	Tercapai
109	Frekuensi pengendalian, pengamanan dan penertiban penegakan Perda	Kegiatan	120	312	260.00	Tercapai
	Sasaran 40. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat					
110	Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	76.00	79.00	103.95	Tercapai

2.4.2 PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- a) Mengakhiri kelaparan dan extreme poverty;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi public yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain).

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDG's adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru dengan sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan

degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni **pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance**. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya pencapaian SDG's di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh.

Membangun infrstruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan

SDG's antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

Pelaksanaan SDGs Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah. Penyajian berdasarkan 45 indikator SDGs dengan data yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 2.89
Capaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN (%)	TAHUN
1	Penduduk Miskin dengan Garis \$ 1,90 per hari	%	2,19	2015
2	Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional)	%	9,14	2015
3	Balita Dengan Tinggi Badan Pendek dan Sangat Pendek	%	33,9	2013
4	Balita Dengan Berat Badan Kurus dan Sangat Kurus	%	7,1	2013
5	Produktivitas Tanaman Pangan	(t/ha)	5,50	2014
6	Angka Kematian di bawah 5 Tahun	per1000 kelahiran hidup	6,40	2015
7	Angka Kematian Nasional	per1000 kelahiran hidup	4,68	2014
8	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	70,26	2014
9	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	per 100.000 penduduk	83	2015
10	Penduduk dengan Kebiasaan merokok diatas usia 15 tahun	%	37,51	2015
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	2015
12	Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar	%	99,09	2015
13	Penduduk Usia 25-64 tahun dengan Pendidikan Menengah Atas	%	24,70	2015
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	11,33	2015
15	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 dengan Pendidikan Tersier	%	19,28	2015
16	Gap T10B40 Partisipasi Murni SMA	%	12,16	2015
17	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	%	31,22	2015
18	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	%	7,84	2015
19	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tersier	%	7,84	2015
20	Angka Melek Huruf Usia 15-24	%	99,64	2015
21	Tingkat Kesuburan wanita	kelahiran per 1000 wanita usia 15-19 tahun	60	2010
22	Tingkat partisipasi angkatan Kerja Wanita	%	45,75	2015
23	Proporsi perempuan dalam parlemen	%	24,44	2015

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN (%)	TAHUN
24	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	%	53,28	2015
25	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	%	55,32	2015
26	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	%	100	2015
27	PDRB per Kapita (Harga Konstan 2000)	Juta Rupiah	56	2015
28	Tingkat Pengangguran dengan Kriteria Jam Kerja < 35	%	7,95	2015
29	Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Tidak Sekolah dan Tidak Pelatihan	%	28,03	2015
30	Penduduk Usia 5-14 tahun Yang Termasuk Kedalam Kategori Pekerja Anak	%	2,70	2015
31	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang	% dari total panjang Jalan	84,29	2015
32	Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir	%	48,00	2015
33	Rasio Gini		0,35	2015
34	Rasio Palma		1,43	2015
35	Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% Terbawah	%	19,42	2015
36	Rumah Tangga Yang Memenuhi Spesifikasi Rumah Sederhana Sehat	%	71,23	2015
37	Rumah Tangga Kota Dengan Jaringan Air Ledeng	%	30,69	2015
38	Rumah Tangga Dengan Perilaku Memilah Sampah	%	19,99	2015
39	Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga	t CO2/kapita	0,48	2015
40	Proporsi Luas Area Hutan Terhadap Luas Daratan	%	61,20	2015
41	Area Konnservasi yang Dilindungi	% Luas Wilayah	1,45	2015
42	Persentase Lahan Kritis (Kriteria+Sangat Kritis) terhadap Luas Wilayah	%	3,6	2004
43	Kejadian Pembunuhan	per 100.000 Penduduk	0,65	2015
44	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana / Crime Rate	per 100.000 Penduduk	1,059	2015
45	Anak Dibawah 15 Tahun Yang Sudah Memiliki Akte Kelahiran	%	69,43	2015

Sumber: Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat, 2018

2.4.3 ANALISIS DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG KLHS

Keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perlu diperhatikan pula hubungan antar wilayah, untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah tertentu, sehingga dapat dipenuhi dengan penyediaan dari wilayah lainnya (prinsip ekspor-impor). Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia yang diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam *Millenium Ecosystem Assessment – United Nation*. Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem

(Hein *et al.* 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu, seperti tercantum dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 mengenai Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ketersediaan baik kuantitas dan kualitas jasa ekosistem akan berpengaruh dan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai panduan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

2.4.3.1 Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”*. Salah satu hasil kajian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut. Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada data terkait jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem penyedia air bersih yaitu 57,48%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan satuan ekoregion yang mendominasi Kabupaten Purwakarta yaitu Dataran Fluvio Vulkanik.

Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lokasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi.

Tabel 2.90
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis
Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Penyedia Pangan	0,81	0,002	387,48	1,082	3.536,74	9,877	4.239,97	11,841	4.412,92	12,324
Penyedia Air Bersih	-	-	6544,68	7,407	65.881,57	74,564	15.928,53	18,027	0,86	0,0009
Pendukung Biodiversita	-	-	46,59	1,599	173,20	5,946	1.131,70	38,856	1.561,00	53,596

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

2.4.3.2 Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”* Salah satu hasil kajian daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berbasis Jasa Ekosistem

Jenis Jasa Ekosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pengaturan Iklim	298.08	0,29	14409.11	15,23	4125.34	6,10	54371.78	57,92	32029.40	19,97
Pengaturan tataaliran air dan banjir	8994.72	7,89	7869.19	6,32	11493.36	8,95	49791.42	62,11	19887.93	19,79
Pencegahan Dan perlindungan dari bencana	17154.30	14,92	501.23	0,67	21997.31	22,01	64767.02	60,07	7233.09	7,09
Pemeliharaan kualitas udara	9097.11	7,98	15994.32	14,87	26114.	21,88	42332.06	35,27	20009.1	17,84

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada Tabel jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yaitu 19,79%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan kawasan non terbangun yang meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau yang masih cukup besar. Keberadaan hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau akan mampu menginfiltrasi air ke dalam tanah sehingga larian air (*run off*) akan semakin kecil sehingga siklus hidrologi dalam kondisi yang stabil.

2.4.3.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan juga dapat diukur dan didekati dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan asumsi semakin tinggi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya dukungnya juga semakin meningkat. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal:

1. Membantu perumusan kebijakan;
2. Membantu dalam mendesain program lingkungan; dan
3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa

depan. Dalam perhitungannya, masing-masing parameter diberikan bobot yang berbeda. Pemberian bobot berbeda dari ketiga indeks kualitas berdasarkan dampak serius dari kelangkaan yang meliputi Indeks Kualitas Air dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan dengan bobot 40%.

Berdasarkan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, pengukuran masing-masing parameter IKLHD Kabupaten Purwakarta ialah sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Purwakarta dilakukan di 10 (sepuluh) titik pemantauan pada dua periode yaitu bulan Juli dan Oktober Tahun 2017. Hasil pengukuran kualitas udara tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.92
Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Lokasi	Lama Pengukuran	Tanggal Pengukuran	SO ² (µg/Nm ³)	NO ² (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	18/07/2017	2	8
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	18/07/2017	< 1,4	12
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	14/08/2017	15	16
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	14/08/2017	2	37
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	23/08/2017	6	14
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	23/08/2017	15	39
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	3/10/2017	< 1,4	17
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	3/10/2017	< 1,4	43
Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta	24 Jam	26/10/2017	26	16

Lokasi	Lama Pengukuran	Tanggal Pengukuran	SO ² (µg/Nm ³)	NO ² (µg/Nm ³)
Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta	24 Jam	26/10/2017	24	48

Keterangan: Berdasarkan Hasil Sampling Passive Sampler

Tanda (-) menunjukkan parameter tersebut tidak dianalisa Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada periode waktu pengukuran bulan Agustus tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di kawasan Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Sedangkan pada periode bulan Oktober tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di lokasi Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Atas dasar hasil perhitungan tersebut, maka dihitung Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purwakarta. Parameter uji kualitas udara ambien jalan raya yang diukur mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Parameter yang diukur dengan menggunakan passive sampler yang tersebar di wilayah kota dan wilayah yang berpotensi sumber pencemar lebih tinggi dengan rentang waktu pengukuran dimulai dari bulan Juli – Oktober 2017 terdiri dari parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), Sulfur Dioksida (SO₂), dilakukan dengan waktu pengukuran 24 Jam.

Berdasarkan hasil pengamatan semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PP RI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Terlihat semua parameter SO₂, NO₂ yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PPRI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan debu dari lalu lintas pada daerah titik sampling. Keberadaan konsentrasi dari parameter yang terukur di lokasi ini lebih disebabkan oleh aktifitas jalan raya yang pada saat ini bila melihat data faktual terjadi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor serta penambahan ruas jalan

alternatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, dan aktifitas mobilisasi kendaraan angkut industri dimana pesatnya perkembangan industry baru ditambah dengan berubahnya pola penggunaan energy bagi kalangan industri dari penggunaan bahan bakar minyak berubah menjadi bahan bakar batubara, kadar dari parameter tersebut merupakan disversi dari kegiatan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga parameter yang terjadi di jalan akan menyebarkan dalam radius yang cukup luas, hal ini juga diiringi oleh keadaan iklim setempat.

Tindakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan untuk dapat meminimalkan dampak tersebut antara lain melakukan pengawasan dan pembinaan secara simultan terhadap pelaku industry khususnya mengenai pengelolaan pencemaran udara serta melakukan kegiatan operasi KIR untuk kendaraan bermotor khusus niaga. Sedangkan untuk wilayah perkotaan pemerintah daerah telah menambah dan merevitalisasi ruang terbuka hijau dengan menambah jenis tanaman yang dapat menyerap sumber polutan yang ada.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air dihitung berdasarkan analisis air sungai untuk parameter TSS, DO, dan COD. Pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Purwakarta terhadap aliran sungai selama tahun 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 5 Sungai sebagai berikut:

1) Sungai Cikao

Diantara parameter yang diukur hanya parameter khususnya Zat Terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cikao umumnya masih memenuhi

kriteria mutu air kelas I PP. 82 tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l .

2) Sungai Citarum

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Citarum dilakukan pada lokasi sebelum dan sesudah PT. Indo Bharat Rayon. Diantara parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya algae dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Citarum umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l

3) Sungai Ciherang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Ciherang dilakukan pada lokasi sekitar wilayah Kecamatan Bungursari. Diantara parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut, COD dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen.

Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alge dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Parameter COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut di atas di sungai Ciherang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter COD berada di atas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l COD sebesar 10 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

4) Sungai Cilamaya

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cilamaya yang melintas di Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi sesudah PT. San Fu. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut, COD, BOD dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alge dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara

dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun kedasar laut sebagai endapan organik. Nilai BOD yang tinggi mencerminkan tingginya kegiatan mikroorganisme di dalam air akibat pencemaran baik limbah penduduk, industri maupun sumber pencemaran lainnya yang masuk ke badan air, Sedangkan parameter COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cilamaya umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter BOD dan COD berada diatas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l, COD sebesar 10 mg/l, bod sebesar 2 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

5) Sungai Cikembang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cikembang yang melintas I Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi kampung Cikembang. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut dan Klorida yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. parameter tersebut diatas di sungai Cikembang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut

sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l. Di Kabupaten Purwakarta terdapat sekitar 2 Waduk, 18 embung. Waduk Juanda atau Jatiluhur, waduk Cirata merupakan waduk utama di Kabupaten Purwakarta. Secara administratif waduk Juanda berada di Kecamatan Jatiluhur, Sukatani dan Sukasari dan merupakan waduk terbesar. Utamanya kedua waduk tersebut dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan cakupan distribusi Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan sumber laporan analisis kualitas air sungai periode Januari – Desember 2017 Perum Jasa Tirta II, menyatakan hasil pantau kualitas air pada bulan Januari – Desember 2017 dengan melihat data seri waduk Ir. H. Djuanda ada parameter yang melebihi baku mutu lingkungan dan bila dianalisa dengan menggunakan metode pengujian yang ada keadaan atau status Ir. H. Djuanda ada indikasi parameter parameter yang diatas nilai baku mutu yang ditetapkan dan diupayakan ada tindakan yang lebih komprehensif lintas sektor. Sedangkan kondisi danau, waduk , situ, embung lainnya yang berada di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Alasan dilakukan pengukuran terhadap sungai dan danau, situ tersebut dikarenakan sebagai fungsi badan air penerima dari segala kegiatan yang potensial misalnya sebagai penerima outfall dari segala kegiatan antara lain industri, permukiman dan lain-lain . Gambaran tersebut menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha ekonomi yang masih kecil dimana untuk setiap buangan limbah cairnya masih ada yang tidak mengolahnya ataupun tindakan pengolahannya masih belum optimal, sedangkan untuk tekanan yang menimbulkan keadaan sungai tersebut tercemar adalah dari banyaknya permukiman disekitar bantaran sungai tersebut bila dilihat dari cakupan sarana air bersih untuk fasilitas tempat buang air besar dari lingkup kecamatan masih didominasi dilakukan secara sendiri - sendiri langsung membuang buangan rumah tangga kedalam badan air penerima.

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, adapun Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.93
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Luas Wilayah	Luas tutupan Hutan (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan	Indeks tutupan Hutan
971,72 km ² .	681,86 km ²	70,17%	85

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap masing-masing indeks sehingga didapatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Lahan	IKLHD
70,56	52,15	85	69,23

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah 69,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kategori **CUKUP**. Nilai IKLH mencerminkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang

dilakukan oleh pemerintah dan tekanan lingkungan hidup oleh penduduk. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan pemerintah cukup baik sehingga nilai IKLH Kabupaten Purwakarta juga Cukup. Selain itu, nilai IKLH ini juga dapat mencerminkan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi.

2.4.4 KERJASAMA DAERAH

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari kerjasama daerah Metropolitan Bodebekkarpur. Wilayah Metropolitan Bodebekkarpur meliputi:

1. Pada Tahun 2010 mencakup 82 kecamatan, yaitu: 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok yakni Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos; 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor yakni Kecamatan Tanahsareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Bogor Timur; 12 (dua belas) kecamatan di Kota Bekasi yakni Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Mustikajaya; 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal,

Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Jonggol; 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Cikarang Utara; 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Klari, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Kecamatan Cikampek; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Plered, dan Kecamatan Babakancikao;

2. Pada Tahun 2015 mencakup 83 kecamatan, yaitu: 82 (delapan puluh dua) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Sukatani;
3. Pada Tahun 2020 mencakup 105 kecamatan, yaitu: 83 (delapan puluh tiga) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bekasi yakni Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Pebayuran; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Cariu; 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Ciampel, Kecamatan

Pangkalan, Kecamatan Talagasari, dan Kecamatan Lemahabang; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Pondok Salam, dan Kecamatan Sukasari;

4. Pada Tahun 2025 mencakup 112 kecamatan, yaitu: 105 (seratus lima) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Banyusari; 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Purwakarta yakni Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, dan Kecamatan Tegalwaru;
5. Pada Tahun 2030 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
6. Pada Tahun 2035 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
7. Pada Tahun 2040 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025;
8. Pada Tahun 2045 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025; dan
9. Pada Tahun 2050 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.

2.4.5 CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

a. SPM Bidang Pendidikan

Capaian dari SPM bidang Pendidikan Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.95
Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	1	Permukiman	1	100%
		SMP	1	Permukiman	1	100%
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	408	Sekolah	275	67%
		SMP	108	Sekolah	77	72%
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan	SMP	108	Sekolah	12	11%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.					
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD	408	Sekolah	134	33%
		SMP	108	Sekolah	42	39%
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	408	Sekolah	350	86%
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	SMP	108	Sekolah	96	89%
7	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	408	Sekolah	393	96%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi	SMP	108	Sekolah	88	81%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.					
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	108	Sekolah	55	51%
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	408	Sekolah	341	84%
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	108	Sekolah	72	67%
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		1	Kab/Kota	1	100%
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan		1	Kab/Kota	1	100%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.					
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	SD	408	Sekolah	252	62%
		SMP	108	Sekolah	81	75%
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SD	408	Sekolah	248	61%
16	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SMP	108	Sekolah	37	34%
17	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar	SD	408	Sekolah	203	50%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	dan poster/carta IPA					
18	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	SD	408	Sekolah	186	46%
		SMP	108	Sekolah	45	42%
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	SD	408	Sekolah	321	79%
		SMP	108	Sekolah	74	69%
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	SD	408	Sekolah	408	100%
	Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu Kelas 3 : 24 Jam per minggu Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu	SMP	108	Sekolah	108	100%
21	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	408	Sekolah	408	100%
		SMP	108	Sekolah	108	100%
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun	SD	408	Sekolah	397	97%
		SMP	108	Sekolah	101	93%

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal:	Jenjang	Target	Satuan	Realisasi SPM	Tingkat Capaian (%)
	berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.					
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	408	Sekolah	395	97%
		SMP	108	Sekolah	100	92%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	SD	408	Sekolah	329	81%
		SMP	108	Sekolah	24	23%
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar	SD	408	Sekolah	394	97%
		SMP	108	Sekolah	99	92%
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	SD	408	Sekolah	405	99%
		SMP	108	Sekolah	107	99%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	SD	408	Sekolah	404	99%
		SMP	108	Sekolah	104	97%

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

Tabel 2.96
Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI TAHUN 2019
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP, MTs)	100 %	95,06
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2,61
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	59,74

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2020

b. SPM Bidang Kesehatan

Capaian dari SPM bidang Kesehatan Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.97
Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	R	19.218	97,74	100	- sistem pencatatan belum terintegrasi dengan fasyankes swasta
	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	19.662			

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	R	18.518	98,66	100	Kepercayaan masyarakat untuk melahirkan oleh bidan/nakes belum menyeluruh
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	S	18.769			
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	R	18.576	103,92	100	Pemantauan BBL sudah optimal
	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	S	17.875			
IV	Pelayanan Kesehatan Balita					
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	33600	47,55	100	Sasaran tidak datang ke sarana/ posyandu terutama anak diatas 1 tahun
	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	70657			
V	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	R	33.173	86,74	100	Sasaran tidak di tempat saat pelaksanaan Belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun	S	38.243			

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	waktu satu tahun ajaran					
VI	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
6	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1463	1,05	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang, dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	139178			
VII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	R	35.896	42,00	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	S	85.459			
VIII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	14.607	6,18	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	S	236.408			
IX	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)					

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	5.130	2,17	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	S	236.408			
X	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
10	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1.730	118,25	100	Adanya ODG lanjutan yang ditemukan tahun lalu masih dalam pengobatan
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	1.463			
XI	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)					
11	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1.179	93,57	100	Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang
	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	S	1.260			
XII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
12	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	R	8.467	83,30	100	Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	S	10.165			

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

Tabel 2.98
Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	R	19.578	100,5	100	Perlu adanya validasi data terkait data capaian
	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	19.483			lebih dari 100%, apakah karena adanya pendatang atau adanya data sasaran yang belum tercatat
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	R	18.792	101,0	100	Perlu adanya validasi data terkait data capaian
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di	S	18.598			lebih dari 100%,

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun					apakah karena adanya pendatang atau adanya data sasaran yang belum tercatat
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
3	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	R	18.982	107,2	100	- Pemantauan BBL sudah optimal
	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	S	17.712			
IV	Pelayanan Kesehatan Balita					
4	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	62.593	71,3	100	- Sasaran tidak datang ke sarana/posyandu terutama anak diatas 1 tahun
	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	87.728			

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
V	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
5	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	R	41.258	100	100	
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	S	41.258			
VI	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
6	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	148.993	23,0	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	646.554			
VII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
7	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	R	11.809	13,1	100	Skrining tidak maksimal, SDM kurang

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun					, dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	S	89.851			
VIII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
8	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	22.461	9,4	100	- Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal
	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	S	237.931			
IX	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)					
9	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	9.147	74,5	100	- Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	S	12.284			peralatan kurang maksimal
X	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
10	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1.346	99,9	100	Masih adanya ODG yang belum tertangani karena kurangnya dukungan keluarga
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	S	1348			
XI	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)					
11	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	R	1.827	88,8	100	- Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang
	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	S	2.058			
XII	Data SPM Sasaran - Pelayanan Kesehatan					

NO	URAIAN	R/S	JUMLAH	%	Target (%)	Masalah
	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
12	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	R	11.963	48,9	100	- Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang
	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	S	24.466			

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2020

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Capaian dari SPM bidang Pekerjaan Umum Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.99
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL INDIKATOR		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	74,03
2	Penyediaan air minum	2	Persentase penduduk yang mendapatkan Akses air minum yang aman	81,77	27,39
3	Penyediaan sanitasi	3	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60	76,56
		4	Persentase penduduk yang terlayani sistem	50	50
				50	50

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
			Jaringan drainase skala kota sehingga tidak Terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun		
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	100	78,96
5	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	6	Persentase berkurangnya luasan permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	10	57,95
6	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	7	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa konstruksi tingkat Kabupaten/kota pada sistem Informasi pembina jasa Konstruksi (sipjaki)	60	0
7	Izin Usaha Jasa konstruksi	8	Persentase tersedianya Layanan izin usaha jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu penerbitan paling Lama 10 (sepuluh) hari kerja Setelah persyaratan lengkap	60	0
8	Informasi Penataan Ruang	9	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	95
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	10	Persentase tersedianya luasan RTH publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan Perkotaan	50	96,70

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

Tabel 2.100
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	REALISASI	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	1 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	26.78	
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	2 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75.56	Akumulasi Dari Tahun Tahun Sebelumnya

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2020

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Capaian dari SPM bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.101
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	35,8
		2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	50
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang idukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	100	30

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

Tabel 2.102
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	REALISASI	KET
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak huni	100	Dengan Asumsi 1KK Sama Dengan 1 Unit Rumah (Data Berdasarkan Dari Dinas Pemadam Kebakaran)
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	0	Tidak Ada Warga/Rumah Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2020

e. SPM Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Pencapaian SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat lebih mengacu kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah guna menciptakan Purwakarta yang lebih aman, tertib dan tenteram.

1) Kontribusi Pemerintahan Daerah

Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Wilayah Kabupaten Purwakarta berupa: pembangunan gedung kantor, pembangunan pos jaga operasional, pengadaan Pakaian Dinas Lapangan, pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan 2, pengadaan perlengkapan keamanan personil dan tersedianya anggaran kegiatan dan Tunjangan Beban Kerja/ Prestasi Kerja.

2) Kontribusi Swasta/Masyarakat

Tersedianya petugas keamanan (Satpam) pada perusahaan dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada masing-masing Desa/ Kelurahan yang dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Satpol. PP.

f. SPM Bidang Sosial

Capaian dari SPM bidang Sosial Tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.103
Capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
1	Pelayanan Jaminan Sosial dan Pelayanan Sosial	1	Persentase masyarakat Purwakarta yang menerima pelayanan Kebutuhan untuk disabilitas, ODGJ dan PMKS/PPKS Lainnya	100	85
2	Perlindungan Sosial	2	Persentase masyarakat Purwakarta yang menerima layanan disabilitas atas penghidupan yang layak	100	90
3	Pemberdayaan Sosial	3	Persentase masyarakat purwakarta yang termasuk dalam kaum disabilitas yang	100	90

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)
		INDIKATOR			
			dibantu dalam peningkatan keterampilannya guna meningkatkan taraf hidupnya.		
4	Pelayanan PMKS/PPKS	4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah dalam meningkatkan kualitas hidupnya guna mengurangi kesenjangan sosial	100	75
		5	Persentase masyarakat Purwakarta yang dibantu dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan PMKS/PPKS	100	75
5	Pengaduan Terhadap Kekerasan kepada Perempuan dan Anak	6	Persentase masyarakat purwakarta yang mengalami kekerasan terutama perempuan dan anak dalam kehidupan sosial	100	80
		7	Persentase masyarakat Purwakarta yang masuk kedalam Konseling dan <i>trauma healing</i> kepada anak korban kekerasan	100	80
7	Pelayanan Kesehatan terhadap perempuan dan anak	8	Persentase masyarakat Purwakarta (Perempuan dan Anak yang menjalani Visum karena korban kekerasan	100	20
8	Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	9	Persentase pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bila kasus sampai ke ranah hukum	100	30
9	Pendampingan Pasca Rehab	10	Persentase pendampingan terhadap korban kekerasan pasca rehab baik itu kekerasan fisik, narkoba atau narapidana untuk perempuan dan anak	100	20
10	Pemberdayaan Terhadap Perempuan Kepala Keluarga	11	Persentase Perempuan kepala keluarga yang dibina dan dibimbing dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya	100	95
11	P2WKSS	12	Persentase Meningkatnya Wawasan Perempuan Keluarga Binaan	100	95
12	Pembinaan Organisasi Perempuan	13	Persentase wanita di Purwakarta yang menduduki Legislatif, bekerja di Pemerintahan dan sektor swasta	100	83
13	Pembinaan Usia Produktif	14	Persentasi wanita di Purwakarta usia 18 s/d 60 yaitu usia produktif untuk meningkatkan keterampilan guna meningkatkan taraf hidupnya	100	83

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2019

Tabel 2.104
Capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2019	50,00	33,24	66,48
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2019	47,00	24,69	52,53
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2019	60,00	26,60	44,33
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2019	50,00	28,00	56,00
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2019	80,00	60	75,00
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Purwakarta %						56,96

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, 2020

2.4.6 KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa Perusahaan Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Perkreditan. Sebagian dari APBD Kabupaten Purwakarta dialokasi untuk penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah atau BUMD tersebut. Adapun target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2019 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.105
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Bersumber dari BUMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.122.389.600	4.875.656.519	95,18
1	PDAM	100.000.000	150.000.000	150,00
2	Bank Jabar Banten	4.794.389.600	4.625.091.141	96,47
3	PT. LKM Mekar Asih	28.000.000	0	0,00
4	PD. BPR Raharja Wanayasa	200.000.000	100.565.378	50,28

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

Tabel 2.106
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Bersumber dari BUMD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.525.000.000	5.110.516.233	95,18
1	PDAM	250.000.000	0	0
2	Bank Jabar Banten	5.000.000.000	4.578.993.887	91,58
3	PT. LKM Mekar Asih	15.000.000	17.370.226	115,80
4	PD. BPR Raharja Wanayasa	260.000.000	514.152.120	197,75

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis keuangan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat digunakan analisis keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh adalah pengelolaan keuangan daerah yang

dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya diusulkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dari Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama-sama untuk menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan daerah akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum.
- 3) Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mengupayakan berbagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil PAD, peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan asset daerah, peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD, peningkatan profesionalisme SDM pengelola Pendapatan Daerah, pengembangan sarana prasarana pengelolaan Pendapatan Daerah dan perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan. Sementara itu pengelolaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil dilakukan melalui 3 (tiga) kebijakan, yaitu pengelolaan DAU untuk membiayai Belanja Pegawai dan Urusan Wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan

umum; peningkatan DAK melalui penyusunan program unggulan strategis daerah dan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Sumber Penerimaan Daerah (Kabupaten), terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diukur dari kontribusi masing-masing unsur pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013–2019 mengalami peningkatan dari sebesar Rp1.371.139.969.587,00 pada Tahun

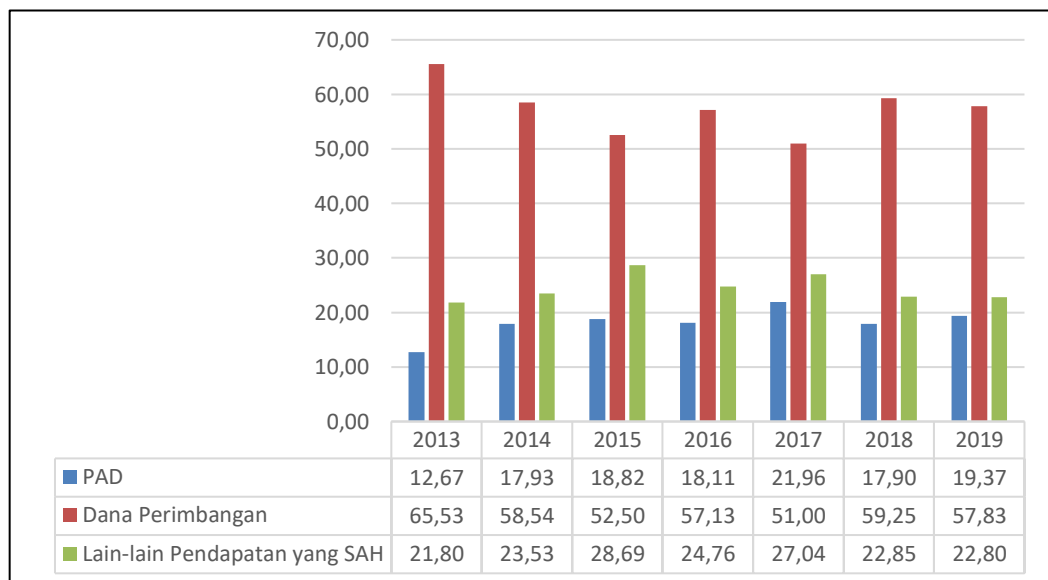
2013 menjadi sebesar Rp2.169.865.594.847,00 pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 8,17%. Komponen Pendapatan Daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013 sd 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp.173.764.159.823,00 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.420.353.733.502,00 pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 19,01%.
- b) Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta cenderung meningkat dari sebesar Rp.898.515.275.234,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp.1.254.756.529.989,00 pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 5,89%.
- c) Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Kabupaten Purwakarta cenderung meningkat dari sebesar Rp.298.860.534.530,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp.494.755.331.356,00 pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 10,53%.

Dilihat dari proporsinya, Perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013 – 2019 masih bertumpu pada Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, baik Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi sebesar 57,00%. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 24,57% dan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah hanya sebesar 18,43%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Purwakarta masih dalam kategori rendah, artinya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi. Berikut ini disajikan Grafik Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2013–2019.

Gambar 3.1
Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah Terhadap Total Pendapatan Daerah di
Kab.Purwakarta Tahun 2013–2019



Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta

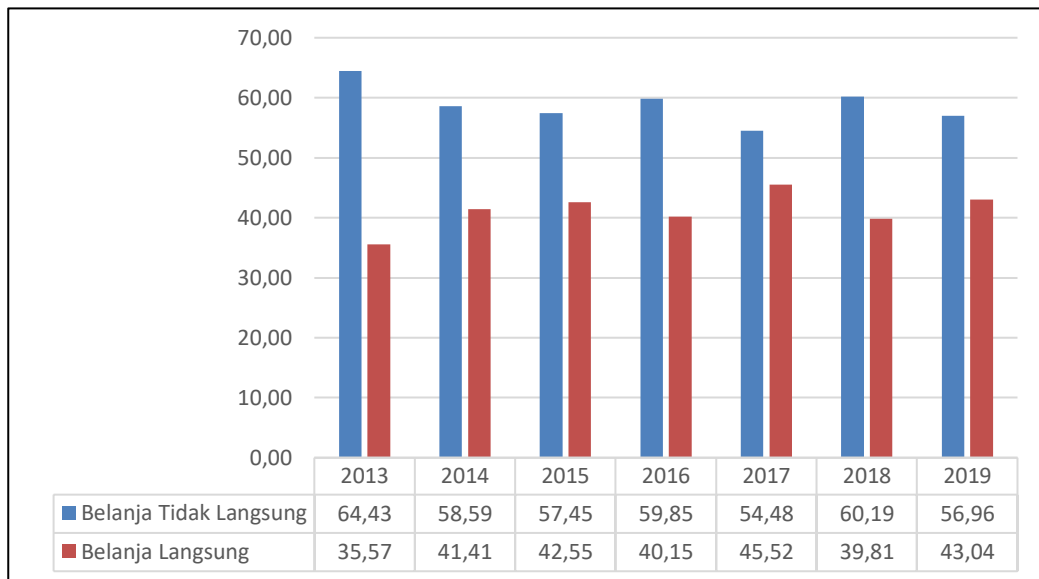
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013–2019 menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, yaitu dari sebesar Rp.1.378.994.209.607,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp.2.280.992.249.903,00 pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 9,12%. Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp.888.520.160.292,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp.1.299.276.559.424,00 pada Tahun 2019 dengan rata-

rata pertumbuhan mencapai sebesar 6,65%, dimana sebagian besar dipergunakan untuk Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp.490.474.049.315,00 pada Tahun 2013 menjadi sebesar Rp.981.715.690.479,00 pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,92%.

Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta lebih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu Tahun 2013–2019 secara umum berfluktuasi dari sebesar 64,43% pada Tahun 2013, kemudian menurun pada Tahun 2014 mencapai sebesar 58,59%. Pada Tahun 2015 proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai sebesar 57,45% dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2016 yaitu sebesar 59,85% dan menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 54,48%. Kemudian pada Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 60,19% dan menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 56,96%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk belanja pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga. Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.2
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Terhadap Total Belanja Daerah
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2019

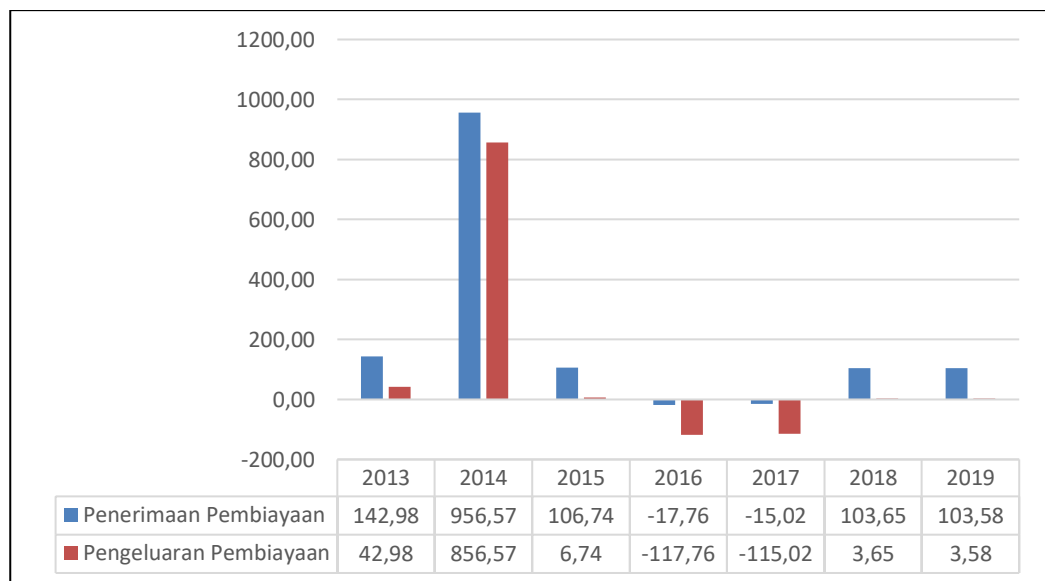


Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2013 – 2019 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yaitu dari sebesar Rp.43.511.237.674,00 di Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.155.198.141.688,00 di Tahun 2019. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Purwakarta sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun yang lalu. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta tergolong fluktuatif dimana pada Tahun 2013 mencapai sebesar Rp.13.080.280.014,00 dan di Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.5.361.122.260,00 dimana penggunaannya secara umum untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Dilihat perkembangannya setiap tahun, pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya menyisakan SILPA dalam jumlah yang tergolong besar yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah untuk

penyelenggaraan pembangunan tahun berikutnya. Perkembangan Proporsi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap total Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.3
Proporsi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Total Pembiayaan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2019



Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta

Sedangkan Perkembangan rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2013–2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Uraian			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1			PENDAPATAN	1.371.139.969.587	1.599.303.021.481	1.759.356.611.741	1.883.533.939.269	2.151.598.579.948	2.060.667.874.221	2.169.865.594.847	8,17
1	1		Pendapatan Asli Daerah	173.764.159.823	286.797.722.805	331.073.426.247	341.116.103.330	472.480.560.976	368.851.052.594	420.353.733.502	19,01
1	1	1	Pajak Daerah	98.455.068.941	162.459.499.090	184.745.870.520	203.685.892.137	222.161.931.097	222.378.228.930	244.826.953.244	18,04
1	1	2	Retribusi Daerah	27.904.064.672	38.635.807.656	32.020.538.321	24.111.253.110	22.574.628.435	22.846.985.708	21.438.760.660	-2,45
1	1	3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.564.174.780	5.269.781.428	4.225.737.486	5.000.890.759	5.356.910.109	5.483.249.287	5.349.792.210	0,05
1	1	4	Lain-lain PAD Yang Sah	41.840.851.430	80.432.634.631	110.081.279.920	108.318.067.324	222.387.091.335	118.142.588.669	148.738.227.388	35,30
1	2		Dana Perimbangan	898.515.275.234	936.214.866.948	923.601.621.411	1.076.034.722.218	1.097.350.002.986	1.220.987.188.561	1.254.756.529.989	5,89
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	120.215.154.234	108.572.324.948	71.531.807.411	101.114.908.215	106.413.113.159	100.684.485.641	99.635.172.668	-0,61
1	2	2	Dana Alokasi Umum	722.162.721.000	786.592.072.000	808.114.494.000	857.566.481.000	850.227.151.000	854.419.670.000	889.747.462.000	3,59
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	56.137.400.000	41.050.470.000	43.955.320.000	117.353.333.003	140.709.738.827	265.883.032.920	265.373.895.321	42,64
1	3		Lain-lain Pendapatan Daerah	298.860.534.530	376.290.431.728	504.681.564.083	466.383.113.721	581.768.015.986	470.829.633.066	494.755.331.356	10,53
1	3	1	Hibah	958.463.600	8.781.702.871	812.837.700	1.018.431.596	1.061.119.891	-	116.030.301.446	
1	3	2	Dana Darurat	-	-	-	-	-			
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.520.160.470	119.442.801.647	143.494.478.212	137.011.123.698	145.832.795.775	164.863.254.726	174.278.767.841	13,41
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.016.739.500	192.934.091.000	283.077.767.000	299.330.075.427	315.199.337.970	285.770.340.687	-	-5,04
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	53.365.170.960	55.131.836.210	77.296.481.171	29.023.483.000	119.674.762.350	20.196.037.653	37.047.507.069	48,95
1	3	6	Pendapatan Lainnya							167.398.755.000	

No.			Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2			Belanja	1.378.994.209.607	1.541.016.179.823	1.803.281.187.378	1.794.157.784.624	2.023.895.829.777	1.920.109.639.035	2.280.992.249.903	9,12
2	1		Belanja Tidak Langsung	888.520.160.292	902.862.469.208	1.035.908.139.150	1.073.733.530.769	1.102.540.891.877	1.155.700.608.050	1.299.276.559.424	6,65
2	1	1	Belanja Pegawai	716.658.341.842	780.091.948.658	826.640.334.738	814.934.581.584	808.002.586.389	841.357.382.023	946.283.109.940	4,86
2	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-			
2	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-			
2	1	4	Belanja Hibah	135.115.412.030	86.326.783.100	49.721.218.000	18.646.696.500	32.833.600.000	40.440.157.377	34.902.023.800	-9,24
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5.899.475.000	4.426.590.000	3.320.275.000	4.085.807.635	2.016.125.055	2.028.403.150	1.088.787.422	-20,55
2	1	6	Belanja Bagi Hasil	24.609.176.945	29.685.190.000	4.791.079.622	-	-	-	48.663.409.140	
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	6.237.754.475	2.331.957.450	151.420.089.590	236.066.445.050	259.616.124.133	271.674.665.500	268.159.229.122	1.066,65
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	-	-	15.142.200	-	72.456.300	200.000.000	180.000.000	
2	2		Belanja Langsung	490.474.049.315	638.153.710.615	767.373.048.228	720.424.253.855	921.354.937.900	764.409.030.985	981.715.690.479	13,92
2	2	1	Belanja Pegawai	55.251.382.247	78.886.589.748	116.970.634.280	97.378.761.631	127.605.960.378	136.816.081.622	62.968.890.784	9,76
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	203.460.334.896	229.027.667.694	292.512.031.074	338.249.368.206	377.160.071.862	399.429.232.237	589.458.089.594	20,15
2	2	3	Belanja Modal	231.762.332.172	330.239.453.173	357.890.382.874	284.796.124.018	416.588.905.660	228.163.717.126	329.288.710.101	12,63
3			Pembiayaan	30.430.957.660	2.369.383.218	56.824.673.751	(72.630.929.869)	(111.491.276.243)	14.787.656.502	149.837.019.428	471,96
3	1		Penerimaan Pembiayaan	43.511.237.674	22.664.817.640	60.656.224.876	12.900.098.114	16.745.224.776	15.327.997.002	155.198.141.688	162,47
3	2		Pengeluaran Pembiayaan	13.080.280.014	20.295.434.422	3.831.551.125	85.531.027.983	128.236.501.019	540.340.500	5.361.122.260	491,47

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah memberikan informasi penting kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, pemberi pinjaman, investor dan masyarakat luas lainnya) tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah ini terdiri atas:

1. **Aset** memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak lain.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3. **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan.

Berikut adalah tabel rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019:

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
di Kabupaten Purwakarta

URAIAN	Reff	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata Pertumbuh an (%)
ASET	5.1.1								
ASET LANCAR	5.1.1.1								
Kas di Kas Daerah	5.1.1.1.1	21.796.242.275,00	51.777.924.550,00	1.551.449.581,00	3.469.866.716,00	2.409.430.645,00	140.934.605.207,00	17.587.753.927,00	965,90
Kas di pemegang kas									
Kas di bendahara pengeluaran	5.1.1.1.2	1.335.154.253,00	128.451.590,00	154.491.509,00	19.102.906,00	116.829.266,00	750.502.470,00	54.751.819,00	133,92
Kas di bendahara penerimaan							765.786.623,00		100,00
Kas di BLUD	5.1.1.1.3	287.845.484,00	8.717.219.041,00	2.156.432.194,00	70.879.647,00	50.447.294,00	37.889.046,00	4.227.185.263,00	2.293,25
Kas Dana JKN	5.1.1.1.4	-	4.124.846.480,00	8.841.072.270,00	13.203.719.616,00	12.150.291.262,00	12.234.961.793,00	12.463.323.288,00	31,65
Kas di BOS						1.522.140.006,00	673.399.714,00	4.407.114.847,00	249,35
Kas Lainnya	5.1.1.1.5	-	-	1.212.008.693,00	1.972.674.968,00	140.339.751,00	-		(43,38)
Piutang Pajak	5.1.1.1.6	1.055.706.242,60	45.759.063.104,96	57.596.891.572,71	64.959.330.836,00	70.282.952.447,00	78.178.452.071,00	86.064.185.001,00	717,10
Penyisihan Piutang Pajak			-	(27.042.260.968,96)	(31.305.108.412,00)	(35.379.485.325,00)	(42.770.966.052,00)	(47.739.812.563,00)	15,32
Piutang Pajak netto		1.055.706.242,60	45.759.063.104,96	30.554.630.603,75	33.654.222.424,00	34.903.467.122,00	35.407.486.019,00	38.324.372.438,00	704,13
Piutang Retribusi	5.1.1.1.7	1.913.782.000,00	1.850.191.050,00	786.363.250,00	1.995.012.101,00	1.844.837.865,00	3.597.262.165,00	3.509.330.165,00	29,65
Penyisihan Piutang Retribusi			-	(786.363.250,00)	(504.561.726,00)	(1.092.194.847,00)	(1.711.231.738,00)	(1.993.864.705,00)	38,46
Piutang Retribusi netto		1.913.782.000,00	1.850.191.050,00	-	1.490.450.375,00	752.643.018,00	1.886.030.427,00	1.515.465.460,00	(4,38)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat								25.965.807.343,00	
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat								(129.829.036,00)	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat netto								25.835.978.307,00	
Belanja Dibayar di Muka (Uang muka)	5.1.1.1.8	33.333.333,33	237.708.333,33	338.358.334,00	187.366.620,00	37.500.000,00	195.652.233,00	131.862.750,00	153,33

URAIAN	Reff	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata Pertumbuh an (%)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran									
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.1.9	640.359.800,00	661.674.500,00	129.350.000,00	179.800.000,00	20.300.000,00	178.100.000,00	163.000.000,00	107,01
Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi			-	(12.935.000,00)	(4.841.500,00)	(909.000,00)	(17.810.000,00)	(16.300.000,00)	426,76
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		640.359.800,00	661.674.500,00	116.415.000,00	174.958.500,00	19.391.000,00	160.290.000,00	146.700.000,00	100,07
Piutang Lainnya	5.1.1.1.1 0	27.975.547.074,98	6.234.037.975,00	11.179.617.071,06	39.132.987.634,00	34.062.741.472,00	40.734.303.042,00	46.030.545.629,00	45,21
Penyisihan Piutang Lainnya			-	(2.026.218.884,87)	(2.594.179.744,00)	(3.440.472.151,00)	(3.631.194.055,00)	(4.376.038.893,00)	21,68
Piutang Lainnya Netto		27.975.547.074,98	6.234.037.975,00	9.153.398.186,19	36.538.807.890,00	30.622.269.321,00	37.103.108.987,00	41.654.506.736,00	47,59
Persediaan	5.1.1.1.1 1	19.311.883.824,70	19.902.781.541,00	64.890.024.725,00	36.445.704.122,00	39.735.187.725,00	32.848.044.381,00	39.920.823.155,00	33,08
JumlahAset Lancar		74.349.854.287,61	139.393.898.165,2 9	118.968.281.095,9 4	127.227.753.784,0 0	122.459.936.410,0 0	262.997.756.900,0 0	186.269.837.990,0 0	26,94
INVESTASI JANGKAPANJANG	5.1.1.2								
Investasi Permanen									
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.2.1	25.530.863.440,39	29.748.397.467,79	29.669.178.930,00	29.609.503.748,00	29.360.015.132,00	47.489.479.372,00	52.779.393.033,00	14,68
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-BJB		12.804.792.750,00	12.804.792.750,00	12.804.792.750,00	12.804.792.750,00	12.804.792.750,00	12.804.792.750,00	12.804.792.750,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-BPR Raharja		10.601.050.492,50	10.523.459.500,00	10.398.079.072,00	10.338.403.890,00	10.100.565.378,00	10.514.152.120,00	15.005.917.172,00	7,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-PDAM		1.297.417.166,40	5.657.834.793,79	5.729.657.004,00	5.729.657.004,00	5.729.657.004,00	23.428.164.276,00	23.444.229.014,00	107,72
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-LKM Mekar Asih		827.603.031,49	762.310.424,00	736.650.104,00	736.650.104,00	725.000.000,00	742.370.226,00	1.524.454.097,00	15,82
Jumlah Investasi Permanen		25.530.863.440,39	29.748.397.467,79	29.669.178.930,00	29.609.503.748,00	29.360.015.132,00	47.489.479.372,00	52.779.393.033,00	14,68
Investasi Non Permanen									
JumlahInvestasi Jangka Panjang		25.530.863.440,39	29.748.397.467,79	29.669.178.930,00	29.609.503.748,00	29.360.015.132,00	47.489.479.372,00	52.779.393.033,00	14,68

URAIAN	Reff	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata Pertumbuh an (%)
ASET TETAP	5.1.1.3								
Tanah	5.1.1.3.1	198.232.666.438,00	199.537.050.905,00	206.598.839.035,00	275.895.489.918,00	269.247.725.940,00	274.903.367.497,00	284.863.397.012,00	6,84
Peralatan dan Mesin	5.1.1.3.2	289.899.086.527,00	412.998.962.970,00	505.729.668.529,00	587.766.133.821,00	655.708.298.935,00	706.761.299.335,00	800.462.427.113,00	18,96
Gedung dan Bangunan	5.1.1.3.3	465.605.754.326,00	560.716.949.712,00	752.759.543.090,00	854.261.166.425,00	979.449.439.577,00	1.072.788.890.191,00	1.159.936.793.406,00	16,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.3.4	669.908.583.653,00	776.783.873.328,00	898.685.854.257,00	1.071.965.508.402,00	1.283.521.888.291,00	1.313.070.432.374,00	1.404.732.800.195,00	13,32
Aset Tetap Lainnya	5.1.1.3.5	57.138.444.066,00	71.274.921.294,00	87.302.126.314,00	106.164.602.811,00	125.108.939.108,00	151.769.647.769,00	176.297.666.152,00	20,69
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.1.1.3.6	6.354.015.250,00	28.492.559.250,00	13.571.710.300,00	45.709.548.647,00	49.837.228.965,00	15.314.873.513,00	20.883.435.584,00	84,83
Akumulasi Penyusutan	5.1.1.3.7		-	(650.068.689.957,00)	(782.800.466.646,00)	(930.438.801.020,00)	(1.109.601.999.536,00)	(1.388.173.719.948,00)	20,91
Jumlah Aset Tetap		1.687.138.550.260,00	2.049.804.317.459,00	1.814.579.051.568,00	2.158.961.983.378,00	2.432.434.719.796,00	2.425.006.511.143,00	2.459.002.799.514,00	7,13
ASET LAINNYA	5.1.1.4								
Tagihan Penjualan Angsuran	5.1.1.4.1		-	74.049.000,00	74.049.000,00	74.049.000,00	74.049.000,00	50.899.000,00	(7,82)
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran			-	(74.049.000,00)	(74.049.000,00)	(74.049.000,00)	-		(33,33)
Tagihan Penjualan Angsuran Netto			-	-	-	-	74.049.000,00	50.899.000,00	(31,26)
Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.4.2	2.990.255.677,00	2.990.255.677,00	3.610.615.477,00	3.867.406.385,00	3.990.022.385,00	3.974.425.385,00	4.148.736.385,00	5,84
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi			-	(597.259.800,00)	(746.755.254,00)	(916.316.708,00)	-		(17,42)
Tuntutan Ganti Rugi Netto		2.990.255.677,00	2.990.255.677,00	3.013.355.677,00	3.120.651.131,00	3.073.705.677,00	3.974.425.385,00	4.148.736.385,00	6,09
Dana Talangan dari BI (Eks BKPD-BBKO)		2.834.414.813,41	834.414.813,41						(85,28)
Dana Talangan dari Kas Daerah (Eks BKPD-BBKO)		6.567.950.000,00	6.567.950.000,00						(50,00)
Kemitraan dengan pihak ketiga	5.1.1.4.3	4.027.049.044,00	4.885.440.732,00	4.885.440.732,00	4.885.440.732,00	4.885.440.732,00	4.507.174.733,00	4.507.174.733,00	2,26
Tanah Sadang Terminal Square		3.625.500.000,00	3.625.500.000,00	3.625.500.000,00	3.625.500.000,00	3.625.500.000,00	3.625.500.000,00	3.625.500.000,00	-
Bangunan Sadang Terminal Square									

URAIAN	Reff	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata Pertumbuhan (%)
Hewan Ternak yang Dikerjasamakan dengan masyarakat		401.549.044,00	378.265.999,00	378.265.999,00	378.265.999,00	378.265.999,00	-		(21,16)
Aset Tanah yang dikerjasamakan dengan PT. SHP			881.674.733,00	881.674.733,00	881.674.733,00	881.674.733,00	881.674.733,00	881.674.733,00	-
Aset Tak Berwujud	5.1.1.4.4	3.167.287.582,00	3.452.917.582,00	-	-	-	-		(45,49)
Amortisasi Aset Tidak berwujud		-	-	-	-	-	-		
Aset Tak Berwujud Netto		3.167.287.582,00	3.452.917.582,00	-	-	-	-		(45,49)
Aset Lain-lain	5.1.1.4.5	836.135.664,00	723.410.664,00	115.660.664,00	115.660.664,00	115.660.664,00	11.714.928.817,00	11.714.928.817,00	1.655,20
BKPD (BBO)		600.000.000,00	600.000.000,00						(50,00)
BKPD Kecamatan Purwakarta		200.000.000,00	200.000.000,00						(50,00)
BKPD Kecamatan Plered		200.000.000,00	200.000.000,00						(50,00)
BKPD Kecamatan Campaka		200.000.000,00	200.000.000,00						(50,00)
Dana Bergulir BPR Raharja (Invest. Non Permanen)		123.410.664,00	123.410.664,00	115.660.664,00	115.660.664,00	115.660.664,00	115.660.664,00	115.660.664,00	(1,05)
Aset lainnya yang dihibahkan kepada masyarakat		112.725.000,00							(100,00)
Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga							9.646.602.000,00	9.646.602.000,00	-
Hewan ternak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga							378.265.999,00	378.265.999,00	-
Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat							1.574.400.154,00	1.574.400.154,00	-
Jumlah Aset Lainnya		20.423.092.780,41	19.454.389.468,41	8.014.457.073,00	8.121.752.527,00	8.074.807.073,00	20.270.577.935,00	20.421.738.935,00	14,83
JUMLAH ASET		1.807.442.360.768,41	2.238.401.002.560,49	1.971.230.968.666,94	2.323.920.993.437,00	2.592.329.478.411,00	2.755.764.325.350,00	2.718.473.769.472,00	7,72
KEWAJIBAN	5.1.2								

URAIAN	Reff	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata Pertumbuh an (%)
KEWAJIBAN JANGKAPEN DEK	5.1.2.1								
Hutang Pajak									
Utang pada Pihak Ketiga		17.367.149,543	4.532.712.261,00						(86,95)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.2.1.1	20.123.449,00	28.668.858,00	14.938.943,00	18.344.109,00	37.664.545,00	51.253.165,00	29.764.772,00	19,47
Utang Bunga	5.1.2.1.2	618.964.346,67	618.964.346,67	-	-	-	-	-	(50,00)
Pendapatan diterima dimuka	5.1.2.1.3		-	4.959.641.780,27	4.710.573.963,00	5.243.056.908,00	5.239.175.181,00	5.772.398.200,00	4,10
Utang Belanja	5.1.2.1.4		-	1.656.304.100,00	15.810.311.670,00	123.395.020.575,00	118.818.808.351,00	83.880.854.240,00	375,48
Utang jangka pendek lainnya	5.1.2.1.5		-	95.119.031.207,00	123.751.472.931,00	44.029.308.461,00	2.799.588.325,00	1.663.319.704,00	(42,14)
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang									
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.006.237.338,67	5.180.345.465,67	101.749.916.030,27	144.290.702.673,00	172.705.050.489,00	126.908.825.022,00	91.346.336.916,00	299,98
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.1.2.2								
Hutang Kepada Lembaga Keuangan		2.834.414.813,41							(100,00)
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.1.2.2.1		834.414.813,41	834.414.813,41	0,41	-	-		(66,67)
Utang Jangka panjang lainnya	5.1.2.2.2		-	608.340.860,00	1.183.101.905,00	1.976.816.723,00	-		20,52
Hutang Kepada Pemerintah Pusat									
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.834.414.813,41	834.414.813,41	1.442.755.673,41	1.183.101.905,41	1.976.816.723,00	-	-	(9,71)
JUMLAH KEWAJIBAN		20.840.652.152,08	6.014.760.279,08	103.192.671.703,68	145.473.804.578,41	174.681.867.212,00	126.908.825.022,00	91.346.336.916,00	258,37
EKUITAS DANA	5.1.3								
EKUITAS DANA LANCAR	5.1.3.1								

URAIAN	Reff	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - rata Pertumbuhan (%)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		22.576.717.640,00	60.656.224.876,00	-					34,33
Pendapatan yang Ditangguhkan		111.716.774,00	3.970.739.127,00	-					1.677,15
Cadangan Piutang		31.585.395.117,58	54.504.966.629,96	-					(13,72)
Cadangan Persediaan		19.311.883.824,70	19.902.781.541,00	-					(48,47)
Cadangan untuk Biaya dibayar dimuka		33.333.333,33	237.708.333,33	-					256,56
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(17.275.429.740,67)	(5.058.867.807,67)	-					(85,36)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		56.343.616.948,94	134.213.552.699,62	-	-	-	-	-	19,10
EKUITAS DANA INVESTASI	5.1.3.2								
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		25.530.863.440,39	29.748.397.467,79	-					(41,74)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		1.687.138.550.260,00	2.049.804.317.459,00	-					(39,25)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya		20.423.092.780,41	19.454.389.468,41	-					(52,37)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya									
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		(2.834.414.813,41)	(834.414.813,41)	-					(85,28)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.730.258.091.667,39	2.098.172.689.581,79	-	-	-	-	-	(39,37)
JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA		1.786.601.708.616,33	2.232.386.242.281,41	-	-	-	-	-	(37,52)
JUMLAH EKUITAS				1.868.038.296.963,26	2.178.447.188.858,59	2.417.647.611.199,00	2.628.855.500.328,00	2.627.127.432.556,00	9,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.807.442.360.768,41	2.238.401.002.560,49	1.971.230.968.666,94	2.323.920.993.437,00	2.592.329.478.411,00	2.755.764.325.350,00	2.718.473.769.472,00	7,72

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup penggunaan anggaran (Belanja Daerah) dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efesiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan di Kabupaten Purwakarta, dilakukan berbagai upaya dan terobosan, antara lain:

- a) Pengkajian dan penyesuaian regulasi (*regulation impact assesment*) terhadap sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- b) Pengkajian terhadap sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- c) Kemudahan dan percepatan proses pelayanan perijinan.
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana pendukungnya.
- e) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak dan retribusi.
- f) Upaya koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat/provinsi guna meningkatkan rasionalisasi, efektivitas dan efisiensi anggaran program/kegiatan.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena memang

sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan layanan jaminan sosial. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola Belanja Daerah, antara lain:

- a) Belanja disertai tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator belanjanya.
- b) Belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan.
- c) Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
- d) Alokasi belanja dilaksanakan secara rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam berbagai jenis belanja. Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sementara untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Dalam menyusun komponen pembiayaan daerah, diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b) Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
- c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran khususnya untuk Belanja Pemenuhan Aparatur di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tujuh tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan pemenuhan belanja kebutuhan aparatur terhadap belanja menurun sebesar 4,68%, dimana untuk tahun 2013 sebesar 55,45%, tahun 2014 sebesar 55,02%, Tahun 2015 mencapai sebesar 52,22%, Tahun 2016 mencapai sebesar 48,54%, Tahun 2017 mencapai sebesar 43,47%, Tahun 2018 mencapai sebesar 50,93% dan Tahun 2019 mencapai sebesar 44,14%. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa alokasi belanja untuk Belanja langsung semakin meningkat. Berikut adalah tabel analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
di Kabupaten Purwakarta

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2013	771.909.724.089	1.392.074.489.621	55.45
2	Tahun Anggaran 2014	858.978.538.406	1.561.311.614.245	55.02
3	Tahun Anggaran 2015	943.610.969.018	1.807.112.738.503	52.22
4	Tahun Anggaran 2016	912.313.343.215	1.879.688.812.607	48.54
5	Tahun Anggaran 2017	935.608.546.767	2.152.132.330.796	43.47
6	Tahun Anggaran 2018	978.173.463.645	1.920.649.979.535	50.93
7	Tahun Anggaran 2019	1.009.252.000.724	2.286.353.372.163	44.14

Sumber: Hasil Analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Transfer dari Dana Cadangan; Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Transfer ke Dana Cadangan; Investasi/Penyertaan Modal Daerah; Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Penghitungan defisit riil anggaran di Kabupaten Purwakarta dihitung melalui Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Total Kebutuhan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan menghitung ini akan terlihat berapa besaran defisit sesuai dengan kemampuan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.371.139.969.587	1.599.303.021.481	1.759.356.611.741	1.883.533.939.269
	Dikurangi Realisasi				
2	Belanja Daerah	1.378.994.209.607	1.541.016.179.823	1.803.281.187.378	1.794.157.784.624
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.080.280.014	20.295.434.422	3.831.551.125	85.531.027.983
Defisit Riil		(20.934.520.034)	37.991.407.236	(47.756.126.762)	3.845.126.662

Sumber: Hasil Analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Lanjutan

No.	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.151.598.579.948	2.060.667.874.221	2.169.865.594.847
	Dikurangi Realisasi			
2	Belanja Daerah	2.023.895.829.777	1.920.109.639.035	2.280.992.249.903
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	128.236.501.019	540.340.500	5.361.122.260
Defisit Riil		(533.750.848)	140.017.894.686	(116.487.777.316)

Sumber: Hasil Analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Dalam upaya mengatasi defisit ini salah satunya adalah melalui pemanfaatan anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) Tahun Sebelumnya. Dimana dalam menghitung komponen penutup defisit riil ini adalah dengan membagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan Total Defisit Riil setiap tahunnya. Berikut adalah tabel komposisi penutup definisi riil anggaran dan realisasi SILPA di Kabupaten Purwakarta:

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
A	Defisit Riil	(20.934.520.034)	37.991.407.236	(47.756.126.762)	3.845.126.662
	ditambah				
B	Penerimaan Pembiayaan :	22.576.717.640	60.656.224.876	12.900.098.114	16.745.224.776
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	22.576.717.640	60.656.224.876	12.900.098.114	16.745.224.776
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
C	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1.642.197.606	98.647.632.112	(34.856.028.648)	20.590.351.438

Sumber: Hasil Analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Lanjutan

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
A	Defisit Riil	(533.750.848)	140.017.894.686	(116.487.777.316)
	ditambah			
B	Penerimaan Pembiayaan :	16.211.473.928	155.345.891.688	38.710.364.372
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	16.211.473.928	155.345.891.688	38.710.364.372
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
C	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	15.677.723.080	295.363.786.374	(77.777.412.944)

Sumber: Hasil Analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Realisasi Tahun							Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Jumlah SILPA	22.576.717.640	60.656.224.876	12.900.098.114	16.745.224.776	16.211.473.928	155.345.891.688	38.710.364.372	149.95
	Bersumber Dari :								
a	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	
b	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	
c	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	
d	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
e	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Sebelum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	
f	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Analisis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir tahun 2020 terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini

merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai tahun anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk perencanaan tahun 2021 ini di dalam penyusunan APBDnya harus sudah menerapkan dan mempedomani pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus pandemi Covid-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi Covid-19 ini.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran pandemi ini, kebijakan social distancing dan anjuran work from home yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi

atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Pandemi Covid-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta pada Triwulan I Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator pembangunan ekonomi makro pada perencanaan awal di RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis,

juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

Oleh karena itu hasil analisis proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purwakarta untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang terdapat penyesuaian/ perubahan jika dibandingkan dengan proyeksi RPJMD sebelumnya, sehingga pertumbuhan rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perubahan RPJMD kali ini diproyeksikan sebesar 3,50%.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Dengan memperhatikan kondisi sekarang dimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah lebih banyak difokuskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19, mulai dari penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial. Oleh karena itu maka tentunya akan mempengaruhi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang lainnya yang sama-sama memerlukan dukungan anggaran untuk mewujudkan program prioritas yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan keuangan daerah harus dilakukan proyeksi ulang guna mengukur kemampuan kapasitas riil dalam membiayai atau mendanai program prioritas pembangunan daerah agar dapat berjalan sesuai target yang telah dilakukan penyesuaian.

Proyeksi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019 dan proyeksi anggaran tahun 2020 – 2023 maka pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah tahun 2019 - 2023 sebesar 4,67%.

Kemudian untuk proyeksi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,

dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019 dan proyeksi anggaran tahun 2020 – 2023 maka pertumbuhan rata-rata kebutuhan belanja daerah tahun 2019 - 2023 sebesar 3,93%.

Sedangkan proyeksi pembiayaan daerah dari pos penerimaan pembiayaan apabila memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019 dan proyeksi anggaran tahun 2020 – 2023 maka pertumbuhan rata-rata pembiayaan daerah tahun 2019 - 2023 yakni sebesar -2,05%.

Dari perhitungan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purwakarta dalam kurun waktu 2019 – 2023 rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,50%

Adapun Realisasi dan Proyeksi APBD Tahun 2019-2023 Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi APBD Tahun 2019-2023
Kabupaten Purwakarta

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	2.169.865.594.847	2.280.710.330.290	5,11
4.1	Pendapatan Asli Daerah	420.353.733.502	469.549.138.158	11,70
4.1.1	Pajak Daerah	244.826.953.244	275.045.388.000	12,34
4.1.2	Retribusi Daerah	21.438.760.660	30.284.312.798	41,26
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.349.792.210	6.655.000.000	24,40
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	148.738.227.388	157.564.437.360	5,93
4.2	Dana Perimbangan	1.254.756.529.989	1.207.447.519.343	-3,77
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	99.635.172.668	121.280.568.343	21,72
4.2.2	Dana Alokasi Umum	889.747.462.000	813.567.867.000	-8,56
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	265.373.895.321	272.599.084.000	2,72
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah	494.755.331.356	603.713.672.789	22,02
4.3.1	Hibah	116.030.301.446	119.970.700.000	3,40
4.3.2	Dana Darurat	-	0	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	174.278.767.841	190.281.034.499	9,18
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	64.934.459.000	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	37.047.507.069	61.058.957.290	64,81
4.3.6	Pendapatan Lainnya	167.398.755.000	167.468.522.000	0,04

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
5	Belanja	2.280.992.249.903	2.314.420.694.662	1,47
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.299.276.559.424	1.348.209.291.463	3,77
5.1.1	Belanja Pegawai	946.283.109.940	936.601.760.956	-1,02
5.1.2	Belanja Bunga	-	0	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	0	
5.1.4	Belanja Hibah	34.902.023.800	31.725.100.000	-9,10
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.088.787.422	28.295.000.000	2.498,76
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	48.663.409.140	29.927.822.558	-38,50
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	268.159.229.122	283.279.186.449	5,64
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	180.000.000	38.380.421.500	21.222,46
5.2	Belanja Langsung	981.715.690.479	966.211.403.199	-1,58
5.2.1	Belanja Pegawai	62.968.890.784	89.696.015.841	42,44
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	589.458.089.594	636.289.184.343	7,94
5.2.3	Belanja Modal	329.288.710.101	240.226.203.015	-27,05
6	Pembiayaan	149.837.019.428	33.710.364.372	-77,50
6.1	Penerimaan Pembiayaan	155.198.141.688	38.710.364.372	-75,06
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.361.122.260	5.000.000.000	-6,74

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, BKAD dan Bappelitbangda

Lanjutan

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi			Rata - rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.339.138.975.670	2.468.468.669.348	2.604.199.019.743	5,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576.547.911.171	606.701.366.925	638.013.834.651	5,20
4.1.01	Pajak Daerah	357.522.567.311	376.220.997.581	396.913.152.448	5,37
4.1.02	Retribusi Daerah	35.997.895.786	37.880.585.735	39.774.615.022	5,11
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.043.299.120	7.411.663.664	7.804.481.838	5,27
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	175.984.148.955	185.188.119.945	193.521.585.343	4,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.644.094.564.499	1.737.073.435.472	1.834.009.686.125	5,62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.453.813.530.000	1.536.840.702.869	1.622.764.153.228	5,65
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	190.281.034.499	200.232.732.603	211.245.532.896	5,37
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	118.496.500.000	124.693.866.950	132.175.498.967	5,62
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	118.496.500.000	124.693.866.950	132.175.498.967	5,62
5	BELANJA DAERAH	2.402.606.475.670	2.528.262.794.347	2.660.490.938.492	5,23
5.1	BELANJA OPERASI	1.821.004.963.090	1.915.534.917.353	2.014.981.424.023	5,19
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.486.222.935	1.059.960.534.081	1.112.958.560.785	5,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.486.298.432	630.348.044.846	665.017.187.313	5,50
5.1.05	Belanja Hibah	210.018.324.647	221.002.283.026	232.560.702.428	5,23
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.014.117.076	4.224.055.399	4.444.973.496	5,23
5.2	BELANJA MODAL	236.566.549.189	250.379.785.018	264.942.817.283	5,83
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.308.117.319	2.428.831.854	2.555.859.760	5,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.638.575.434	64.884.833.915	68.282.679.873	5,25

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi			Rata - rata Pertumbuhan (%)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.856.053.969	108.461.708.910	114.372.872.046	5,45
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.709.221.192	64.023.974.464	68.597.612.932	7,18
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.054.581.275	10.580.435.875	11.133.792.672	5,23
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	331.034.963.391	348.348.091.976	366.566.697.187	5,23
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.033.445.893	31.604.195.113	33.257.094.517	5,23
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	301.001.517.498	316.743.896.863	333.309.602.669	5,23
Total Surplus/(Defisit)		(63.467.500.000)	(59.794.125.000)	(56.291.918.750)	-5,82
6	PEMBIAYAAN DAERAH	63.467.500.000	59.794.125.000	56.291.918.750	-5,82
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.467.500.000	65.044.125.000	61.791.918.750	-5,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.467.500.000	65.044.125.000	61.791.918.750	-5,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.250.000.000	5.500.000.000	4,88
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.250.000.000	5.500.000.000	4,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)		0	0	0	
TOTAL APBD		2.407.606.475.670	2.533.512.794.348	2.665.990.938.493	

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, BKAD dan Bappelitbangda

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk mengetahui besaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Dalam menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terdapat penentuan Proyeksi SILPA, Proyeksi SiLPA berdasarkan analisis pertumbuhan realisasi besaran SiLPA pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2013–2019. Pada periode tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diproyeksikan menurun sebesar 5%. Penurunan SiLPA tersebut diharapkan penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah.

Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja Tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berikut adalah realisasi dan proyeksi tabel SiLPA, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Uraian	Realisasi	Proyeksi			
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	38.710.364.372	38.710.364.372	68.467.500.000	65.044.125.000	61.791.918.750

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, BKAD dan Bappelitbangda

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
1	2	4	4
1	PENDAPATAN DAERAH	2.169.865.594.847	2.280.710.330.290
3.1	Penerimaan Pembiayaan	155.198.141.688	38.710.364.372
	JUMLAH	2.325.063.736.535	2.319.420.694.662
	dikurangi		
2	BELANJA		
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.299.276.559.424	1.348.209.291.463
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.361.122.260	5.000.000.000
	Silpa Tahun 2019 (realisasi)	38.710.364.372	
	JUMLAH	1.343.348.046.056	1.353.209.291.463
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	981.715.690.479	966.211.403.199

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, BKAD dan Bappelitbangda

Lanjutan:

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.402.606.475.670	2.528.262.794.347	2.660.490.938.492
5.1	BELANJA OPERASI	1.821.004.963.090	1.915.534.917.353	2.014.981.424.023
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.486.222.935	1.059.960.534.081	1.112.958.560.785
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.486.298.432	630.348.044.846	665.017.187.313
5.1.05	Belanja Hibah	210.018.324.647	221.002.283.026	232.560.702.428
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.014.117.076	4.224.055.399	4.444.973.496
5.2	BELANJA MODAL	236.566.549.189	250.379.785.018	264.942.817.283
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.308.117.319	2.428.831.854	2.555.859.760
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.638.575.434	64.884.833.915	68.282.679.873
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.856.053.969	108.461.708.910	114.372.872.046
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.709.221.192	64.023.974.464	68.597.612.932
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.054.581.275	10.580.435.875	11.133.792.672
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	331.034.963.391	348.348.091.976	366.566.697.187
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.033.445.893	31.604.195.113	33.257.094.517
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	301.001.517.498	316.743.896.863	333.309.602.669
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.402.606.475.670	2.528.262.794.347	2.660.490.938.492

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, BKAD dan Bappelitbangda

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, pada proyeksi tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 1,58% dari realisasi tahun 2019, hal ini disebabkan karena meluasnya dampak pandemi Covid-19 terhadap capaian perekonomian daerah, namun demikian untuk tahun 2021-2023 proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Purwakarta relatif cenderung meningkat karena ada kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan operasional Perangkat Daerah yang baru. Selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*).

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Adapun penjelasan masing-masing prioritas, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja (langsung) wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, termasuk belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Realisasi dan Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Realisasi	Proyeksi			
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	981.715.690.479	966.211.403.199	2.402.606.475.670	2.528.262.794.347	2.660.490.938.492
1	Prioritas I (Belanja Langsung Wajib dan Mengikat)	63.811.519.881	62.803.741.208	149.922.644.082	157.763.598.367	166.014.634.562
2	Prioritas II (Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah, termasuk serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar)	437.845.197.954	441.558.611.262	1.107.841.845.931	1.165.781.974.474	1.226.752.371.738
3	Prioritas III (Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya)	480.058.972.644	461.849.050.729	1.144.841.985.657	1.204.717.221.506	1.267.723.932.191

Sumber: Hasil proyeksi Bapenda, BKAD dan Bappelitbangda

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Secara umum dengan adanya pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD ini dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat dan Berkontraksi Akibat Pandemi COVID-19

Secara umum dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian, baik pada lapangan usaha maupun pengeluaran. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Purwakarta untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,96 persen dari capaian realisasi tahun 2019 yakni 4,38 persen, sehingga proyeksi tahun 2020 menjadi 2,42 persen. Namun untuk tahun 2021 – 2023 diproyeksikan LPE Kabupaten Purwakarta meningkat karena program pemulihan ekonomi akan terus diprioritaskan dengan harapan agar perekonomian Kabupaten Purwakarta tumbuh dan berkembang sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

2. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Cenderung Meningkat

Pada periode Tahun 2017 sampai 2019, Kabupaten Purwakarta berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,04 persen menjadi 7,56 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih belum cukup optimal keadaan diperburuk oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta cenderung meningkat yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat. Tahun 2020 proyeksi angka kemiskinan Kabupaten Purwakarta meningkat dari 7,56 persen di tahun 2019 menjadi 7,91 persen, hal ini diakibatkan oleh turunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah penduduk miskin merangkak naik.

3. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 sebesar 70,67 mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 69,98. Namun pada tahun 2020 proyeksi IPM Kabupaten Purwakarta menurun menjadi 69,28 persen. Hal ini diakibatkan karena munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga memberi pengaruh yang cukup signifikan pada aspek pembangunan SDM dan menyebabkan seluruh target pembangunan daerah terkoreksi menurun, termasuk Indeks Pembangunan Manusia.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

1. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Permasalahan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah terdiri atas beberapa hal, sebagai berikut:

❖ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Pertumbuhan antar bagian wilayah masih belum berimbang.
2. Migrasi penduduk desa ke kawasan perkotaan masih tinggi.
3. Fasilitas sosial ekonomi masih cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten.
4. Kawasan rawan bencana belum terkelola dengan baik.
5. Layanan jaringan irigasi masih belum optimal.
6. Masih banyak daerah rawan air bersih terutama pada musim kemarau.
7. Kapasitas air baku dan pelayanan air bersih perpipaan masih terbatas.
8. Masih belum optimalnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sistem irigasi.

❖ **Perhubungan:**

1. Masih ada desa yang sulit/tidak bisa dilalui kendaraan roda 4.
2. Titik rawan kemacetan masih belum sepenuhnya terkendali.
3. Belum seluruh bagian wilayah dilayani oleh angkutan umum.
4. Sebagian terminal tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Belum terpasang rambu-rambu jalan secara menyeluruh terutama di daerah rawan macet dan rawan kecelakaan.

❖ **Lingkungan Hidup:**

1. Belum terinventarisasinya potensi sumber daya alam daerah.
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan SDA. (pencemaran dan kerusakan lingkungan)
3. Jumlah penduduk yang belum dapat menggunakan listrik masih besar.
4. Pemanfaatan potensi sumber energi alternatif dan terbarukan belum maksimal.
5. Masih banyak pelaku usaha yang belum mentaati peraturan lingkungan.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman:**

1. Masih tingginya harga rumah/tempat tinggal.
2. Relatif kurangnya ketersediaan ruang publik dan pelayanannya belum optimal.

❖ **Pertanahan:**

1. Masih banyaknya asset tanah pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atas tanah, karena penanganan masalah pertanahan ini

mebutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN

2. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam terdiri atas beberapa hal, sebagai berikut:

❖ Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. Kinerja koperasi masih relatif rendah, meliputi:
 - a. Rendahnya tingkat pemahaman anggota tentang perkoperasian.
 - b. Kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi masih rendah.
 - c. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan koperasi.
2. Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi:
 - a. Masih terbatasnya akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar.
 - b. Era perdagangan bebas, menyebabkan lemahnya daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan produk-produk impor.

❖ Penanaman Modal:

1. Belum optimalnya pelayanan perijinan/non perijinan.
2. Belum optimalnya realisasi investasi sehingga nilai realisasi investasi belum meningkat sesuai target yang diharapkan.

Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

❖ **Pangan:**

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap pangan beras.
2. Ketahanan pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, namun saat ini masih terfokus pada penanganan aspek ketersediaan pangan.

❖ **Pertanian:**

1. Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan industri dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, perindustrian dan perdagangan.
2. Minat generasi muda terhadap bidang pertanian sangat kurang sehingga regenerasi petani berjalan lambat.
3. Tenaga penyuluhan semakin berkurang.
4. Penerapan teknologi pertanian on farm dan off farm di tingkat petani masih rendah dan kurang merata.
5. Masih terbatasnya penyediaan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
6. Belum berkembangnya sentra pembibitan ternak pedesaan.
7. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dan pengelolaan usaha peternakan.
8. Sarana dan prasarana peternakan perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang usaha dan pemasaran hasil produksi peternakan.

❖ **Kelautan dan Perikanan:**

1. Potensi dan sumberdaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi perikanan.

2. Masih terbatasnya penyediaan benih ikan untuk memenuhi kebutuhan usaha budidaya perikanan.
3. Sarana dan prasarana peternakan perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan usaha perikanan.

❖ **Perdagangan:**

1. Perdagangan skala mikro dan desa belum sepenuhnya berjalan dan mampu mencerminkan ekonomi masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan pelabelan kemasan produk, terutama untuk barang-barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
3. Rendahnya kualitas produk perdagangan (barang yang beredar), terutama masih beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi standar, kadaluwarsa dan masih ada yang mengandung zat-zat berbahaya.
4. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam kewajibannya menera dan menera ulang alat UTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya), serta mengukur ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

❖ **Perindustrian:**

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan yang terkait dengan produktivitas industri kecil.
2. Rendahnya kualitas produk industri kecil, terutama dalam hal desain, ragam produk, kehalusan dan citra rasa.
3. Terbatasnya akses industri kecil terhadap sumber daya produktif (pasar, permodalan, teknologi dan informasi).

4. Sebagian besar perusahaan industri besar belum memiliki standar mutu yang mengacu kepada ISO-9000/seri 2000 *dan Quality System – 9000*.

❖ **Pariwisata:**

1. Belum optimalnya pengelolaan Sektor Pariwisata Unggulan, baik pariwisata berbasis alam, buatan dan budaya yang berwawasan lingkungan.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola pariwisata (Kompepar) yang tersedia.

❖ **Tenaga Kerja:**

1. Rendahnya kesempatan dan lapangan kerja.
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
3. Tingginya pengangguran terbuka.
4. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja.

❖ **Kebudayaan:**

1. Relatif rendahnya Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.
2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya daerah.
3. Optimalisasi obyek dan destinasi wisata budaya.

❖ **Transmigrasi:**

Semakin berkurangnya daerah tujuan transmigrasi seiring dengan berjalannya alih fungsi lahan dan telah ditetapkannya RTRW sesuai rencana masing-masing daerah.

3. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Permasalahan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

❖ **Pendidikan:**

1. Belum meratanya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat khususnya pendidikan menengah.
2. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan serta masih rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.
3. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua jenjang.
4. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan serta kompetensi yang masih perlu ditingkatkan pada semua jenjang pendidikan.
5. Makin maraknya tawuran di kalangan pelajar.

❖ **Kesehatan:**

1. Belum meratanya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun di tingkat rujukan.
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk bisa berobat secara gratis baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
4. Masih tingginya kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.
5. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan dan relatif kurangnya ketersediaan dokter spesialis di RSUD Bayu Asih.
6. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah guna penurunan prevalensi stunting.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.

2. Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan belum optimal.
3. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:**

1. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi.
2. Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah.
3. Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan.
4. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga di tengah masyarakat.

❖ **Sosial:**

1. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih.
3. Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal.
4. Pergeseran sistem nilai dan berkurangnya kultur sistem gotong royong.

❖ **Kepemudaan dan Olahraga:**

1. Makin sempitnya lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat.
2. Prestasi olahraga masih rendah khususnya di tingkat provinsi dan nasional.

3. Belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan.
4. Makin besarnya dampak negatif dan ancaman globalisasi bagi pemuda.

❖ **Komunikasi dan Informatika:**

1. Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet yang memadai.
2. Rendahnya tingkat pemanfaatan layanan data.

❖ **Statistik:**

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time.

❖ **Persandian:**

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil:**

1. Masih ditemukan permasalahan dalam akurasi data kependudukan, yang disebabkan oleh data ganda, data invalid dan data kependudukan yang belum diupdate.
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:**

1. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan.

2. Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya Pendapatan Asli Desa.
3. Relatif masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.

❖ **Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:**

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat.
2. Belum berjalannya penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui mitigasi (pengurangan dampak) bencana dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terpadu.

❖ **Kearsipan:**

1. Optimalisasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
2. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana kearsipan.
3. Peningkatan pengembangan kapasitas penyimpanan arsip daerah.
4. Peningkatan pelayanan arsip khususnya kepada OPD lingkup pemerintah Kabupaten Purwakarta.

❖ **Perpustakaan:**

1. Relatif masih rendahnya minat baca masyarakat.
2. Relatif rendahnya koleksi bahan, referensi dan sumber bacaan.

3. Belum optimalnya aksesibilitas sumber bacaan ke khalayak.

❖ **Administrasi Pemerintahan:**

1. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
3. Belum optimalnya mekanisme *meritocracy* dalam birokrasi.
4. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional.
5. Menurunnya kewibawaan pemerintah akibat krisis kepercayaan.

❖ **Perencanaan:**

1. Belum optimalnya ketersediaan basis dan validasi data capaian pembangunan.
2. Koordinasi dan monitoring yang relatif masih belum optimal.
3. Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif, demokratis dan akuntabel.

❖ **Pengawasan:**

1. Masih adanya praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

❖ **Keuangan:**

1. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;

2. Relatif masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Purwakarta.

❖ **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan:**

1. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan mekanisme *reward and punishment* yang adil.

❖ **Pendidikan dan Pelatihan:**

1. Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.

❖ **Penelitian dan Pengembangan:**

1. Masih belum optimalnya penerapan produk penelitian dan Inovasi Daerah.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kabupaten Purwakarta yang diukur dengan capaian indikator-indikator makro pembangunan ekonomi yang mayoritas yang mengalami perbaikan dari sejak periode awal RPJMD Tahun 2018-2023. Namun pada saat memasuki pertengahan tahun 2020 indikator makro pembangunan ekonomi menunjukkan penurunan capaian sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. Sehingga target capaian untuk tahun 2021-2023 perlu dilakukan penyesuaian dan proyeksi ulang dari target sebelumnya pada dokumen RPJMD 2018-2023.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional dan lokal. Isu Strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta masih dirasakan cukup banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu-Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta antara lain:

1) Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala/ Internet Of Things (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan

internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambilalih oleh mesin, sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi dan robotik.

2) *Society 5.0*

Society 5.0, didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Di Society 5.0, itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung.

3) Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *Green Economic Global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Lokal Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya. Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari

berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait baik dari kalangan akademisi maupun pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat.

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat kedepan.

4) Penerapan Sumber Energi Alternatif Sebagai Antisipasi Sumber Energi Tak Terbaharukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun an-organik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global. Menanggapi isu energi baru terbarukan ini, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan energi baru terbarukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada panas bumi (*geothermal*), energi biomass, surya (solar) dan Bahan Bakar Nabati (BBN).
2. Penyediaan dana khusus untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan guna menurunkan biaya produksi.

3. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.
4. Peningkatan pengembangan industri peralatan produksi energi terbarukan dalam negeri (peralatan penyulingan BBN, *solar cell* dan panel harus menggunakan produksi dalam negeri).
5. Pengalokasian dana dengan skema khusus (*smart funding*) untuk pengembangan energi terbarukan diluar BBN, khususnya untuk skala kecil.
6. Pemerintah melakukan pengaturan dan pengalokasian dana dari program *Clean Development Mechanism* (CDM), sehingga insentif karbon kredit dapat memberi manfaat pada publik.

5) Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/ Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk degan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Visi RPJMN Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa

menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
- Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Wilayah pinggiran;
- Luar Jawa; dan
- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
 - a. Kepastian dan penegakan hukum;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Politik dan demokrasi; dan
 - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.2.2.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar IV.1

Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



4.2.2.3 Pandemi Covid-19

Sejak mulai masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Indonesia, dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Purwakarta, maka pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kesehatan, perekonomian dan sosial masyarakat. Berbagai cara

dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat dan para pelaku usaha agar pandemi covid-19 tidak menyebar luas dan segera hilang.

Penanganan terhadap dampak pandemi covid-19 dilakukan pemerintah dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diberbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta, sosialisasi penggunaan masker dan jaga jarak, serta pengaturan jam kerja kantor.

Dari sisi penganggaran untuk penanganan covid-19, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran dan memfokuskan target kinerja pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengamanan sosial. Namun demikian beberapa pelaku usaha, bisnis dan perusahaan-perusahaan banyak yang hancur bahkan bangkrut karena tidak bisa bertahan dari sisi kemampuan keuangan selama karena tidak bisa menjalankan usahanya selama beberapa bulan akibat pandemi covid-19.

Dampak pandemi covid-19 telah mempengaruhi terhadap capaian target pembangunan daerah secara nasional, akibatnya pelaksanaan pembangunan daerah diberbagai wilayah menjadi terhambat bahkan menurun. Mudah-mudahan setelah diberlakukannya tatanan kehidupan baru (new normal) dapat memberikan angin segar terhadap pemulihan perekonomian masyarakat, daerah dan nasional serta mulai kembalinya aktivitas kehidupan sosial masyarakat dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa**, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif**, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil**, melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**.

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah.

Atas dasar itulah maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan kembali Prioritas Pembangunan Daerahnya dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terdiri dari :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

4.2.3.2. RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 memuat arahan kebijakan penataan ruang yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

A. Rencana Sistem Perkotaan Provinsi

Kota Cikopo-Cikampek ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Purwakarta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan dan Kota Wanayasa serta Plered ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan.

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan atau kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perdesaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.
- d. PKL pedesaan diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

B. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Arahan RTRWP Jawa Barat dalam pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain:

- Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara.
- Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- Pengembangan infrastruktur jalan mencakup peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cikopo/Cikampek-Palimanan (Cikapali).
- Pembangunan *Shortcut* Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa di Kabupaten Purwakarta.
- Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas jalan.

Rencana pengembangan transportasi dan perhubungan yang dilakukan untuk mendukung keberadaan PKN dan PKW di Jawa Barat yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi:

1. Pembangunan Jembatan Timbang untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan, pada beberapa ruas jalan yang telah rusak kondisinya serta memiliki pembebanan jalan yang tinggi pada jalur Subang-Purwakarta.
2. Peningkatan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jaringan jalan arteri dan kolektor primer serta pada ruas-ruas jalan strategis di perbatasan.

C. Arahan Pengembangan Antar Wilayah Pengembangan

Keterkaitan fungsional antar wilayah pengembangan (WP) dan pusat-pusat pengembangan wilayah (PKN dan PKW)

dengan Kabupaten Purwakarta, yaitu: Segitiga 1, wilayah Bodebekpunjur-Cekungan Bandung-Purwasuka-Ciayumajakuning. Sarana prasarana wilayah pendukung keterkaitan fungsional antar WP dalam segitiga di Kabupaten Purwakarta meliputi:

- Pembangunan jalan bebas hambatan Cikopo/Cikampek-Palimanan.
- Pembangunan jalan Kolektor Primer Lintas Utara Jawa Barat.
- Peningkatan status dan fungsi ruas jalan strategis.
- Pembangunan Jalur Ganda KA Purwakarta-Padalarang.
- Peningkatan kondisi jaringan irigasi di Wilayah Utara Jawa Barat.

D. Arahan Pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka

Arahan Pengembangan WP Purwasuka yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

4.1 Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Purwasuka mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan.

4.2 Fokus pengembangan WP Purwasuka, meliputi:

- a. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*).
- b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam.

4.3 Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Purwasuka, terdiri atas:

- a. Pengembangan infrastruktur jalan, yaitu Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
- b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
 - Pembangunan *Shortcut* Jalur Kereta Api Cibungur (Kabupaten Purwakarta)-Tanjungrasa (Kabupaten Subang); dan
 - Peningkatan fasilitas dan prasarana lalu lintas jalan.
- c. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi:
 - Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan gas kota di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang;
 - Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bioenergi;
 - Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri;
 - Pengembangan desa mandiri energi.
- d. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:
 - Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
 - Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
 - Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
- e. Pengembangan infrastruktur permukiman, meliputi:
 - 1) Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:
 - Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
 - Pengembangan kawasan siap bangun/ lingkungan siap bangun;
 - Penataan permukiman kumuh;

- Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi;
 - Pengembangan pengolahan air limbah;
 - Penataan jaringan drainase perkotaan;
 - Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di PKL;
 - Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - Pembangunan pusat kebudayaan di PKW; dan
 - Pembangunan Pasar Induk Regional di PKW Cikampek-Cikopo.
- 2) Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:
- Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
 - Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;
 - Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan
 - Pembangunan Puskesmas;
- 3) Optimalisasi kawasan industri, meliputi:
- Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
 - Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
 - Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

- Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, terletak di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta; dan
- Kawasan Industri Lion, terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

E. Rencana Kawasan Budidaya

- 1) Mengembangkan permukiman horisontal yang dikendalikan dan diarahkan agar dikembangkan pada PKW Cikampek-Cikopo.
- 2) Mengembangkan kawasan lainnya yang masih memiliki fungsi sebagai kawasan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- 3) Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan kepada tiga jalur wisata unggulan, yaitu kawasan wisata unggulan jalur utara, tengah dan selatan. Kawasan wisata unggulan yang terletak pada jalur utara adalah Kawasan Wisata Agro Purwakarta-Subang.
- 4) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang termasuk dalam kawasan budidaya meliputi: hutan kota; taman kota; taman lingkungan; tempat pemakaman umum; pulau jalan; lapangan olahraga/lapangan terbuka dan taman rekreasi.
- 5) Mengembangkan kawasan permukiman perdesaan masih diarahkan pada pengembangan ruang permukiman yang bersifat horisontal.
- 6) Pengembangan Kawasan Agribisnis melalui: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah

pertumbuhan agribisnis.

- 7) Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata di wilayah perdesaan, dan pariwisata berbasis masyarakat (*community based development*) serta kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional.

F. Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Penetapan KSP Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-masing KSP yang ditetapkan. KSP Jawa Barat ditetapkan sebanyak 24 KSP yang memiliki sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dari 24 KSP tersebut, 2 diantaranya terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- 1) KSP Koridor Bekasi-Cikampek
- 2) KSP Koridor Purwakarta-Padalarang

4.2.3.3. Telaahan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan Perubahan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1
Telaahan RPJMD Daerah Lain

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
1	Kab. Cijur	2016-2021	<p>VISI :</p> <p>“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan; 2. Meningkatkan pembangunan keagamaan; 3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi; 	Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021
2	Kab. Subang	2018-2023	<p>VISI :</p> <p>“KABUPATEN SUBANG YANG BERSIH, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKARAKTER”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat; 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang Berkarakter Kebudayaan Lokal dan Pemerataan Pembangunan Perdesaan; 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Handal dan Berdaya 	Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang 2018-2023

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
			<p>Saing serta Perluasan Lapangan Kerja;</p> <p>4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan Kelautan, serta Penggalan Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;</p> <p>5. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup;</p>	
3.	Kab. Karawang	2016-2021	<p>VISI :</p> <p>“KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR”</p> <p>MISI :</p> <p>1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa;</p> <p>2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing;</p> <p>3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;</p> <p>4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari;</p> <p>5. Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa;</p>	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 2016-2021
4.	Kab. Bogor	2018-2023	<p>VISI :</p> <p>“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN”</p> <p>MISI :</p> <p>1. Mewujudkan Masyarakat</p>	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
			<p>Yang Berkualitas;</p> <p>2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;</p> <p>3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;</p> <p>4. Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Merata, Berkeadilan Dan Berkelanjutan;</p> <p>5. Mewujudkan Kesalehan Sosial;</p>	Kabupaten Bogor 2018-2023
5.	Kab. Bandung Barat	2018-2023	<p>VISI :</p> <p>“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH”</p> <p>MISI :</p> <p>1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Kualitas Birokrasi Dalam Melayani Masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat;</p> <p>3. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, Untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;</p> <p>4. Memantapkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Berkelanjutan;</p>	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan RPJMD	Keterangan
			5. Meningkatkan Kesalehan dan Modal Sosial Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal; 6. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa;	

Sumber : RPJMD Kabupaten terkait

4.2.4 Isu Strategis Lokal

4.2.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD karena tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Purwakarta. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 adalah **“Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah”**.

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun **5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025**, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, **RPJMD tahap ke-4** ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Purwakarta dalam segala bidang dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Purwakarta memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Kabupaten Purwakarta relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain.

Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023 adalah target akselerasi penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya memasuki saat-saat menentukan pada periode ini. Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala regional dan nasional. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum nasional dan internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh. Fokus pembangunan kurun 2018-2023 pada aspek kesehatan diutamakan pada peran serta dan partisipasi masyarakat dan penguatan institusi dalam peningkatan kesehatan, yaitu peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Pembangunan bidang keagamaan pada tahapan ini diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai segi kehidupan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran forum keagamaan sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk perluasan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam lingkungan kerja, ditumbuhkembangkan pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan norma yang berlaku.

Dari segi pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada pemberdayaan keluarga, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui peningkatan kualitas data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan yang terintegarsi. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta pada periode tahapan ini unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, pada aspek pengembangan kesadaran dan peran masyarakat perlu terus dioptimumkan, tidak hanya terbatas kepada kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sedang di hadapi pemerintah daerah. Pada tahapan ini perlu pula dikembangkan kesadaran dan peran masyarakat untuk turut serta memikirkan dan melakukan hal-hal lain dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, pada periode ini perhatian lebih diupayakan melalui penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Purwakarta.

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan daerah, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui meningkatnya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan dengan memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan substitusi pemanfaatan sumber daya alam.

Pada tahap ini, pengembangan agribisnis harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas, terutama pada wilayah regional Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan: (1).Perusahaan induk (*Holding Company*) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2).Kolaborasi bisnis, dan (3).Jejaring bisnis. Pada tahap ini agribisnis Kabupaten Purwakarta sudah berkembang menembus batas-batas wilayah, sehingga sebagai konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global di bidang agribisnis akan semakin kuat.

Berdasarkan potensi yang ada, daerah-daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta secara umum merupakan penghasil produk agro. Pada RPJMD tahap ke-4, komoditi-komoditi agro unggulan spesifik lokal yang dihasilkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Purwakarta harus terus dikembangkan, dikemas dan ditata aspek pemasaran dan distribusinya. Diharapkan Kabupaten Purwakarta memiliki

produk unggulan lokal yang berstandar nasional dan internasional. Pada aspek industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi serta perluasan jaringan perdagangan daerah.

Sementara itu, pada aspek pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata. Pada tahapan ini, pengembangan KUKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUKM. Pada tahap ini KUKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan regional, nasional dan internasional.

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai dengan lebih mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya. Pada tahapan ini, kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta telah

sesuai dengan rencana tata ruang sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.

Hal ini ditandai dengan tercapainya alokasi ruang kawasan lindung dan terjaminnya lahan untuk sawah serta tersedianya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pemantapan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Sedangkan aspek hukum pada tahapan ini diarahkan guna pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan.

Pada tahap ini pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan capaian pada tahap ketiga. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (*check and balances*) antarlembaga di daerah dan masyarakat madani (*civil society*) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji.

4.2.4.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis

wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi:
 - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
 - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten meliputi:
 - 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;

- 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
 - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi:
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
 - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi:

- 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi:
- 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
 - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;

- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

4.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu

pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

a. Dimensi Sosial

Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu

strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi sosial disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.	2.1 Menghilangkan segala bentuk Kekurangan gizi, dan memenuhi kebutuhan gizi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta.	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	
			Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) Bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	
			Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	
	Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Rata-rata pendapatan Produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	
	Menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan	Program Pemetaan Kawasan LP2B	Penetapan kawasan pertanianpangan berkelanjutan.	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
	Mengelola keragaman genetic benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Holtikultura, dan Perikanan	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	
		Program Pengembangan Data Proporsi Hewan Ternak	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menuruttingkat risiko kepunahan: berisiko tidak berisiko, dan risiko yangtidak diketahui.	
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1 Mengurangi Rasio angka kematian ibu	Program Bimbingan Ibu Hamil	Angka Kematian Ibu (AKI).	
		ProgramBimdal Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	
			Persentase Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	
	3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita	ProgramBimdal Kesehatan Bagi Ibu Menyusui	AngkaKematian Balita (AKBa) 1000 kelahiran hidup.	
			AngkaKematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	
			AngkaKematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
		Program Imunisasi Kepada Bayi	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasidasar lengkap pada bayi.	
	3.3 Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	
			Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB	Kejadian TB per 1000 orang.	
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Kejadian Malaria per 1000 orang. Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	
			Persentase Kecamatan yang Melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tropis	Jumlah orang yang memerlukan Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	
			Jumlah Kecamatan denganeliminasi Kusta.	

Tujuan	Target	Rekomendasi		Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD
		Program	Sasaran	
			Jumlah Kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi)	
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.7 Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengarusutaman pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, pendidikan guru, (d) penilaian siswa	

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta, 2018

b. Dimensi Ekonomi

Rekomendasi pada subbab ini disusun dengan harapan dilakukan pengintegrasian ke dalam RPJMD demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta. Program-program yang direkomendasikan ialah program yang dalam targetnya telah terskenariokan untuk ditambahkan. Setelah dilakukan identifikasi, maka diketahui beberapa target yang perlu ditambahkan dalam bentuk program dengan uraian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern unuk Semua	7.2.Meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Program Diversifikasi Energi Dengan Mengoptimalkan Potensi Energi Terbarukan Seperti LimbahKotoran Hewan dan Panas Bumi.	Konsumsi energi terbarukan meningkat	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program Pelatihan Untuk Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia Terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan Yang Lebih Optimal		
	7.a. 7.3. Melakukan perbaikan efisiensi energi sebanyak dua kali lipat.	Program Pengoptimalan Konservasi Energi DalamBerbagai Sektor	Intensitasenergi primer	
	7.b. Memperkuat Kerjasama dan mempromosikan investasi terkait infrastruktur dan teknologi dalam hal energi bersih.	Program Perluasan Jaringan dan Upaya Pemanfaatan Sister City Promosi Secara Aktif Dalam Hal Investasi Infrastruktur dan TeknologiEnergi Bersih	Peningkatan kerjasama dan pendanaan utuk infrastrkturdan teknologi dalam energi bersih	
	7.c. Memperluas infrastruktur dan meningkatkanteknologi untukpenyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan	Program Perluasan Infrastruktur	Dana investasi untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan energi	
		Peningkatan Kerjasama Bidang Energi		
Tujuan 8: Meningkatkan	8.b.Mengoperasionalkan strategiglobal untuk	Program Pelatihan	Tersedianya	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Pertumbuhan Ekonomi ang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	ketenagakerjaan pemuda.	Keterampilan Bagi Pemuda	anggaranuntuk program terkait ketenagakerjaan dan meningkatnya keterampilan pemuda	
		Program Pengoptimalan Sumber Dana UntukPelatihan Keterampilan		
	9.2.Mempromosikan industrialisasiinklusif danberkelanjutan, meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto.	Program Peningkatan Infrastruktur Industri	Peningkatan nilai tambah sektor industri	
		Program Peningkatan Kualitas SDM Dalam Sektor Industri		
Program Peningkatan Daya Saing Industri				
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi untuk diversifikasi industri dan peningkatkatan nilai tambah komoditas	Program Pengembangan Riset Industri	Meningkatnya diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		
	9.c. Secara signifikan meningkatkan akses TIK dan internet untuk semua.	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Peningkatan penduduk yang memanfaatkan internet	
		Program Pelatihan Penggunaan Internet		
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, ke negara-negara yang paling membutuhkan sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik Didalam Maupun Luar Negeri	Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan	
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan	17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan Internasional untuk Meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Total pendapatan pemerintah	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	pajak dan pendapatan lainnya.			
	17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik didalam Maupun Luar Negeri	Bantuan biaya pembangunan	
	17.8. Mengoperasionalkan Secara penuh bank Teknologi dansains, Mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan Penggunaan teknologi Yang memungkinkan, Khususnya teknologi Informasi dan komunikasi.	Program Perluasan Jaringan Akses Internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	
	17.14. Meningkatkan Keterpaduan kebijakan Untuk pembangunan berkelanjutan	Program Fasilitasi Untuk Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Keterpaduan Kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	
	17.17. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Program Fasilitasi Untuk Menunjang Kemitraan Publik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil	Proyek atau kegiatan yang dilaksanakan dengan skema kerjasama	

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

c. Dimensi Lingkungan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi lingkungan didasarkan pada hasil analisis. Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam

RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi lingkungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
Tujuan 6: Menjamin Keterseediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk Semua	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan menghentikan praktik buang air besa di tempat terbuka	Pembangunan dan peningkatan jumlah fasilitas cuci tangan dengan sabun pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum masyarakat	Meningkatnya Proporsi fasilitas umum yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian.
		Program sanitasi berbasis masyarakat melalui penyediaanMCK dan pemipaan IPAL	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	
		Pembangunan Infrastruktur air limbah sistem terpusat	Meningkatnya jumlah Infrastruktur air limbah sistem terpusat skla kota, kawasan, dan komunal.	
		Pemeliharaan Infrastruktur air limbah sistem terpusat		
		Peningkatan saluran rumah (SR) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
			pengelolaan air limbah terpusat	
	6.3.Meningkatkan kualitas air dan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang.	Pembangunan instalasi	Tersedianya instalasi	
		pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	Pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	
		Pemeliharaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		
		Penetapan tata ruang lahan sempadansungai dan waduk	Meningkatnya kualitas air sungai dan waduk	
		Penentuan baku Mutu kelas air sungai dan waduk		
		Penentuan daya tamping beban pencemaran air		
		Pengembangan program pembinaan dan percontohan perikanan ramah lingkungan		
		Peningkatan sanitasi penduduk		
		Pengelolaan limbah peternakan, pertanian, pertambangan, dan industri		
		Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sungai dan waduk		
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dan warisan alam.	Penetapan warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Meningkatnya Jumlah warisan Budaya dan warisan alam yang dilestarikan	
	11.6.Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per	Pembangunan System pemilahan Sampah secara	Meningkatnya persentase sampah yang tertangani	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	terpadu		
		Penerapan sistem pemilahan sampah secara terpadu		
		Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah		
		Peningkatan nilai tambah ekonomi hasil pengolahan sampah		
		Penambahan luasan RTH	Meningkatnya Indeks kualitas udara	
		Penambahan dan peningkatan kualitas transportasi umum massal		
		Pengujian secara Berkala emisi kendaraan		
		Pengujian emisi/polusi aktivitas industri		
	Evaluasi Kualitas Udara perkotaan			
	11.7 Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau	Penetapan kawasan Yang tidak boleh dibangun	Meningkatnya Persentase RTH Terhadap luas wilayah	
Pembangunan lahan hijau baru melalui pembebasan lahan				
Pembangunan koridor ruang hijau kota				
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan	12.2. Mencapai Pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber	Pembuatan dan Updating neraca Sumberdaya alam dan lingkungan	Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan, Pengelolaan dan	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD	
		PROGRAM	SASARAN		
Konsumsi yang Berkelanjutan	Daya alam secara efisien.		pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan		
	12.3.Mengurangi limbah pangan per kapita dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	Penurunan susut Hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan			
		Penanganan pasca Panen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri			
		Peningkatan kapasitas sumberdaya masia dan kelembagaan pascapanen			
	12.4.Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah.	Pembuatan e-manifest dokumen limbah B3, data Base pengawasan dan penataan industri, dan database perizinan dan registrasi B3 online	Meningkatnya Jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh usaha dan/ atau kegiatan		
		Pengawasan kinerja Perusahaan yang ramah lingkungan	Meningkatnya Peserta proper yang mencapai minimal ranking biru		
	12.5.Mengurangi	Sosialisasi	Meningkatnya		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	produksi limbah Melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Pendirian bank sampah	Jumlah bank sampah tiap RW	
		Pembinaan dan Pelatihan SDM Pengelola bank sampah		
		Pemberian insentif Dan penghargaan pada bank sampah yang aktif		
		Pembangunan TPS 3R	Meningkatnya Jumlah sampah yang dikelola secara 3R	
	12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Pembuatan Database dan melakukan updating terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan	Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	
		Peningkatan pelayanan Pembuatan izin lingkungan secara online maupun offline		
		Penerapan sanksi Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan telah beroperasi tanpa memiliki izin lingkungan		
		Pengawasan dan pemantauan	Meningkatnya usaha dan	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
		pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh usah dan/atau kegiatan sesuai dengan pelaporan dokumen pengelolaan lingkungan yang mereka miliki	/atau kegiatan yang melaporkan upaya pengelolaan lingkungan	
	12.8. Menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Pengembangan Kurikulum dan Metode belajar berbasis lingkungan hidup	Terciptanya sekolah adiwiyata yang berwawasan lingkungan	
		Pengelolaan dan Pengembangan sarana pendidikan Untuk pendidikan Lingkungan		
		Penghargaan sekolah adiwiyata terbaik		
		Peningkatan system Pelayan publik Sesuai dengan standar pelayanan	Meningkatnya Fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat	
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan		
	12.a. Memperkuat Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi menuju arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam Pola produksi pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri		

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	Mengembangkan dan menerapkan Perangkat untuk memantau dampak Pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah Pengembangan destinasi wisata Peningkatan promosi pariwisata Peningkatan Kemitraan dengan Pelaku usaha pariwisata	Meningkatnya strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan	
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan	15.3. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai bebas dari lahan terdegradasi.	Pembuatan database lahan kritis	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		Pengadaan bibit pohon		
	15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut.	Penanaman pohon pada lahan kritis yang berpartisipasi dengan masyarakat Pembentukan dan penetapan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika	

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI		Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD
		PROGRAM	SASARAN	
	15.8. Memperkenalkan langkah-langkah Untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasive pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau Memberantas jenis asing invasif prioritas.	<p>Pembuatan dan pengembangan basisdata atau system</p> <p>Dalam rangka menyebarkan informasi tentang jenis asing invasif</p> <p>Yang meliputi penyebaran, pengendalian maupun pencegahannya terutama pada kawasan konservasi</p>	<p>Terkendalinya jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air</p>	
		Penetapan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keanekaragaman hayati hewani dan nabati		

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

d. Dimensi Kelembagaan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi kelembagaan merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi Bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi kelembagaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak criminal	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
			Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
			Kematian disebabkan konflik berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.
			Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
			Penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual
			Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan
	16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penduduk yang merasa aman berjalansendirian di area tempat tinggalnya.
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh
			Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
			fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
		Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Korban perdagangan manusia
			Perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
			Perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
	16.3. Menggalakkan Negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Program Jaminan Sosial	Korban kekerasan yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang dalam mekanisme resolusi konflik.
		Program Kemitraan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan	Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi Kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
			Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan;

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
			pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
			Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.
			Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
	16.9. Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, E28 menurut umur.
			Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
	Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Program Kerjasama Informasi Kriminal	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
		Program Peningkatan Sarana dan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran

TUJUAN	TARGET	REKOMENDASI	
		PROGRAM	SASARAN
		Komunkasi Serta Media Masa	Hak Asasi Manusia (HAM)
			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
			Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
			Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.
			Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	16.a. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	Program pembentukan lembaga hak asasi manusia dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris E6Principles</i> .

Sumber: KLHS RPJMD Kab Purwakarta Tahun 2018-2023

Beberapa rekomendasi bagi program yang akan diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Rekomendasinya adalah:

- 1) Optimalisasi sistem pendidikan 12 tahun dengan kebijakan yang tepat akurat melalui proses kajian yang komprehensif.
- 2) Melaksanakan implementasi sistem hidrologi kawasan berdasarkan hasil kajian.
- 3) Implementasi teknologi pengolahan air sesuai karakteristik air baku dan daya dukung (debit air) sungai.

b. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

c. Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.

- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang pengawasan orang dan barang dari luar daerah.
- 5) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

d. Program peningkatan perekonomian rakyat

Rekomendasinya:

- 1) Menetapkan kebijakan program Kehati.
- 2) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 3) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 4) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.

4.2.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, telah berkembang melalui berbagai interpretasi skema tujuan yang ingin dicapai. Setelah *Millenium Development Goals* menjadi tujuan pembangunan yang dikembangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2015, sekarang ini diterapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tujuan yang lebih komprehensif dan beragam.

Berdasarkan Analisis Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat seperti yang tersaji dalam buku Menyongsong SDGs Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan bersama antara SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dapat digambarkan pencapaian indikator TPB Kabupaten Purwakarta. Hal ini tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1	Penduduk Miskin dengan Garis \$ 1,90 per hari	4	A	Mencapai hampir mencapai target SDGs
1.2	Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional)	4	A	
2.2	Balita Dengan Berat Badan Kurus dan Sangat Kurus	4	A	
3.1	Angka Kematian di bawah 5 Tahun	4	A	
3.2	Angka Kematian Neonatal	4	A	
4.1	Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar	4	A	
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	4	A	
4.6	Angka Melek Huruf Usia 15-24	4	A	

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.2	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	4	A	
7.1	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	4	A	
8.1	PDRB per Kapita (Harga Konstan 2000)	4	A	
8.5	Tingkat Pengangguran dengan Kriteria Jam Kerja < 35	4	A	
16.3	Anak Dibawah 5 Tahun Yang Sudah Memiliki Akte Kelahiran	4	A	
3.4	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	3	B	Mendekati target SDGs
4.5	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 dengan Pendidikan Tersier	3	B	
4.5	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	3	B	
4.6	Gap T10B40 Partisipasi Murni SMA	3	B	
8.6	Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Tidak Sekolah dan Tidak Pelatihan	3	B	
8.7	Penduduk Usia 5-14 tahun Yang Termasuk Kedalam Kateggori Pekerja Anak	3	B	
9.1	Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang	3	B	
9.2	Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir	3	B	
15.1	Proporsi Luas Area Hutan Terhadap Luas Daratan	3	B	Masih Seperempat jalan lagi menuju target SDGs
2.1	Balita Dengan Tinggi Badan Pendek dan Sangat Pendek	2	C	
2.3	Produktivitas Tanaman Pangan	2	C	
4.1	Rata-rata Lama Sekolah	2	C	
11.1	Rumah Tangga Yang Memenuhi Spesifikasi Rumah Sederhana Sehat	2	C	
3.5	Penduduk dengan Kebiasaan merokok diatas usia 15 tahun	1	D	Baru Setengah Jalan Menuju Target SDGs
4.1	Penduduk Usia 25-64 tahun dengan Pendidikan Menengah Atas	1	D	
4.5	Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tersier	1	D	
4.7	Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA	1	D	
5.2	Tingkat partisipsi angkatan Kerja Wanita	1	D	
6.1	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	1	D	
10.1	Rasio Gini	1	D	
10.2	Rasio Palma	1	D	
10.3	Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% Terbawah	1	D	
15.2	Area Konservasi yang Dilindungi	1	D	
3.6	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas	0	E	Masih Cukup Jauh Mencapai
5.1	Tingkat Kesuburan wanita	0	E	

TARGET	INDIKATOR	SKOR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.3	Proporsi perempuan dalam parlemen	0	E	target SDGs
11.2	Rumah Tangga Kota Dengan Jaringan Air Ledeng	0	E	
12.1	Rumah Tangga Dengan Perilaku Memilah Sampah	0	E	
13.1	Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga	0	E	
15.3	Persentase Lahan Kritis (Kriteria+Sangat Kritis) terhadap Luas Wilayah	0	E	
16.1	Kejadian Pembunuhan	0	E	
16.2	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana / Crime Rate	0	E	
Rata-Rata		2,16		

Sumber: Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

Kabupaten Purwakarta secara umum mendapatkan skor 2.16 dan dengan demikian mendapatkan nilai C dalam pencapaian SDGs tahun 2030. Meskipun artinya masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Purwakarta, angka ini sama dengan angka skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang bernilai 2.16 (C).

Tantangan paling besar diantaranya adalah indikator jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas (tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera) dan rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Jumlah kematian akibat kecelakaan diproyeksikan akan mencapai 117 atau 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan targetnya sebanyak 41 untuk setiap 100.000 penduduk dan dengan demikian mendapatkan nilai E. Sedangkan untuk rumah tangga dengan jaringan air ledeng Kabupaten Purwakarta diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target dan karena mendapatkan nilai E.

Meskipun demikian, banyak indikator akan mengalami kemajuan, diantaranya indikator balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (tujuan 2 tanpa kelaparan) dan rumah tangga dengan sanitasi layak (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Keduanya diproyeksikan

akan mencapai target SDGs pada tahun 2030 dimana keduanya bernilai tinggi dan memperoleh nilai A. Indikator lainnya yang juga akan mengalami kemajuan pesat adalah tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen dan, PDRB perkapita (tujuan ke 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi). Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen diproyeksikan menurun ke angka 2,2 persen melampaui target SDGs yang berada pada angka 3,9 persen yang artinya untuk indikator tersebut kabupaten Purwakarta memperoleh nilai A. PDRB perkapita (harga konstan 2016) juga mendapatkan nilai A yang diproyeksikan akan mencapai angka \$9891 per tahun jauh melampaui target SDGs sebesar \$3956 per tahun.

Indikator pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purwakarta secara umum memiliki progress yang baik bernilai rata-rata A. Artinya, secara keseluruhan indikator pendidikan dan kesehatan Kabupaten Purwakarta memiliki arah yang baik untuk mencapai target SDGs. Indikator pendidikan yang bernilai baik atau A adalah angka partisipasi murni tingkat SD, angka partisipasi kasar perguruan tinggi, dan angka melek huruf usia muda 15- 24 tahun. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah masih perlu untuk mendapat perhatian khusus karena diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target SDGs. Indikator kesehatan yang bernilai A adalah angka kematian balita dan angka kematian neonatal, keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs tahun 2030.

4.2.7 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kualitas layanan pendidikan di semua jenjang masih belum optimal dan belum secara merata dapat memenuhi standar pelayanan nasional pendidikan. Oleh karenanya kedepan perlu di prioritaskan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan pada semua jenjang yang sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada mulai dari ruang kelas dan ruang penunjang lain seperti perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, ketersediaan MCK/sanitasi belum bisa sesuai dengan ratio jumlah siswa. Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan langkah-langkah untuk memenuhi ketersediaan ruang kelas yang mampu menampung anak usia sekolah pada semua jenjang yang sesuai dengan standar pelayanan.

Akibat adanya pandemi Covid-19, maka proses belajar dan mengajar untuk sementara dihentikan terlebih dahulu guna mengurangi penyebaran virus Covid-19, akibatnya kualitas mutu pendidikan menjadi turun, hal ini harus diantisipasi dengan mengedepankan inovasi dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukan secara jarak jauh tanpa tatap muka, atau daring.

Inovasi dalam pembelajaran pada era New Normal saat pandemi Covid-19 ini, sangat diperlukan guna tetap menjaga kualitas mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan. Revitalisasi Posyandu, Pengembangan Pukesmas Pembantu dan Puskesmas Rawat Inap kedepan masih perlu dilakukan disamping penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Peningkatan pelayanan kesehatan ditingkat rujukan juga akan menjadi prioritas melalui pemenuhan ruang perawatan yang baik dan layak, penyediaan peralatan kesehatan yang memadai di rumah sakit, ketersediaan obat-obatan yang cukup, serta kesiapan tenaga kesehatan yang cukup dan memiliki kompetensi.

Hal yang paling mendesak dalam penanganan kesehatan masyarakat saat ini yakni terutama saat pandemi covid-19 melanda yakni penanganan bagi masyarakat yang terdampak, yaitu dengan penyediaan ruang khusus bagi penderita covid-19, penyediaan alat medis yang dibutuhkan, alat perlindungan diri bagi petugas medis, serta penyediaan dan distribusi vaksin bagi masyarakat Purwakarta.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan prioritas adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat agar terbiasa dengan memakai masker dan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus covid-19 serta tetap menjaga kualitas pola hidup bersih dan sehat.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta perkembangan jumlah pengangguran (pencari kerja yang terdaftar) di Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi. Kondisi ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Upaya penanggulangan kemiskinan kedepan perlu dilakukan secara sistemik mulai

dari pembenahan mental dan karakter masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar mereka mulai dari kesehatan, pendidikan dan tempat tinggalnya serta pemenuhan akses ekonomi serta ketersediaan infrastruktur yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi semua masyarakat.

Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kemiskinan tahun 2020 meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Sedangkan Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak yang terkena gelombang PHK, keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran menjadi meningkat.

4. Penataan Infrastruktur di Perkotaan dan Perdesaan

Penataan insfrastruktur di perdesaan sampai dengan saat ini belum memadai dan merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Purwakarta, termasuk dalam hal ini tingkat kemantapan jaringan dan kualitas jalan, kurangnya saluran drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan

air limbah, infrastruktur air bersih dan infrastruktur irigasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

5. Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan potensi wisata perlu menjadi perhatian dan posisi yang strategis dalam kerangka penggalan potensi pendapatan asli daerah. Adapun kebijakan pengembangan potensi wisata terdiri dari penggalan potensi obyek, daya tarik dan atraksi wisata beserta pengembangan obyek, daya tarik dan atraksi wisata yang telah ada, disamping itu yang juga perlu mendapat perhatian adalah aspek promosi dan pemasaran, pasar wisata (masyarakat pengirim wisata), transportasi dan masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).

Akibat pandemi covid-19 sektor pariwisata merupakan salah satu yang terkena dampak dan sempat terpuruk karena banyak tempat-tempat wisata yang harus ditutup guna menghindari penularan virus covid-19. Oleh karena itu, guna memulihkan kembali perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata, perlu kiranya membuka kembali akses pariwisata daerah dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat, untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran virus covid-19.

6. Pengembangan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa

Pengembangan perekonomian rakyat berbasis desa dapat dilakukan melalui beberapa agenda kebijakan lintas perangkat daerah yaitu peningkatan pemilikan asset produksi khususnya tanah dan modal, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan teknologi, bantuan pemasaran dan bahan baku (penataan sistem bapak angkat, mendirikan pusat-pusat pemasaran, menyelenggarakan pameran produk, mendirikan atau menetapkan perusahaan

pengolah dan pemakai produk yang bersangkutan, meningkatkan kerjasama dengan badan usaha atau koperasi, adanya kebijaksanaan yang berupa aturan atau himbauan untuk menggunakan produk yang bersangkutan dan mencari pasar baru termasuk memasarkan keluar negeri dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dipedesaan (dengan cara mendirikan pusat-pusat perdagangan, terminal ataupun perusahaan dapat dipandang sebagai sarana pusat pertumbuhan).

Disamping itu, penggunaan dan pengalokasian dana desa harus lebih dioptimalkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa, seperti pembangunan desa yang lebih mengedepankan tenaga kerja local serta penggunaan potensi sumber daya alam local, guna menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis desa.

Perlu juga dilakukan penguatan dan revitalisasi Sektor-Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebagai potensi domestik yang menjanjikan untuk menyerap tenaga kerja, sehingga intervensi pemerintah pada Sektor Peternakan, Pertanian dan Perikanan mutlak diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya penyiapan tenaga kerja terampil dan kompeten untuk menjawab kebutuhan Sektor Industri serta Perdagangan Barang dan Jasa.

7. Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Menuju *Good Governance*

Kunci keberhasilan reformasi birokrasi berada pada kesediaan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dan terlibat dalam mekanisme pengawasan eksternal setiap jenjang.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19. Sejak kemunculannya di Indonesia, pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak hanya terkait kesehatan dan kematian, namun telah merambat pada timbulnya permasalahan lain, diantaranya sosial, ekonomi, keuangan daerah, dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan sebagian besar sumber daya untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural, serta reformasi birokrasi.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diuraikan pada Bab IV dan mengacu pada arah pembangunan tahap keempat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-

problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan keteringgalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

5.2 MISI

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya,

bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian

masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara

berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengefektifkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai

dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

MISI : **MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN,**
PERTAMA **KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**
SOSIAL

Tujuan 1 : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya**
Manusia Yang Profesional dan Berbudaya

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan 2 : **Mewujudkan Kesejahteraan Sosial**
Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan
Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

MISI : MENGEKEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT KEEMPAT YANG KOKOH BERBASIS DESA

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Sasaran 2 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan

Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai

upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu refocusing dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Memburuknya berbagai indikator makro ekonomi sampai dengan kuartal II Tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia, juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta.

Target-target pembangunan Tahun 2020 pada umumnya tidak dapat tercapai. Menyikapi kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati

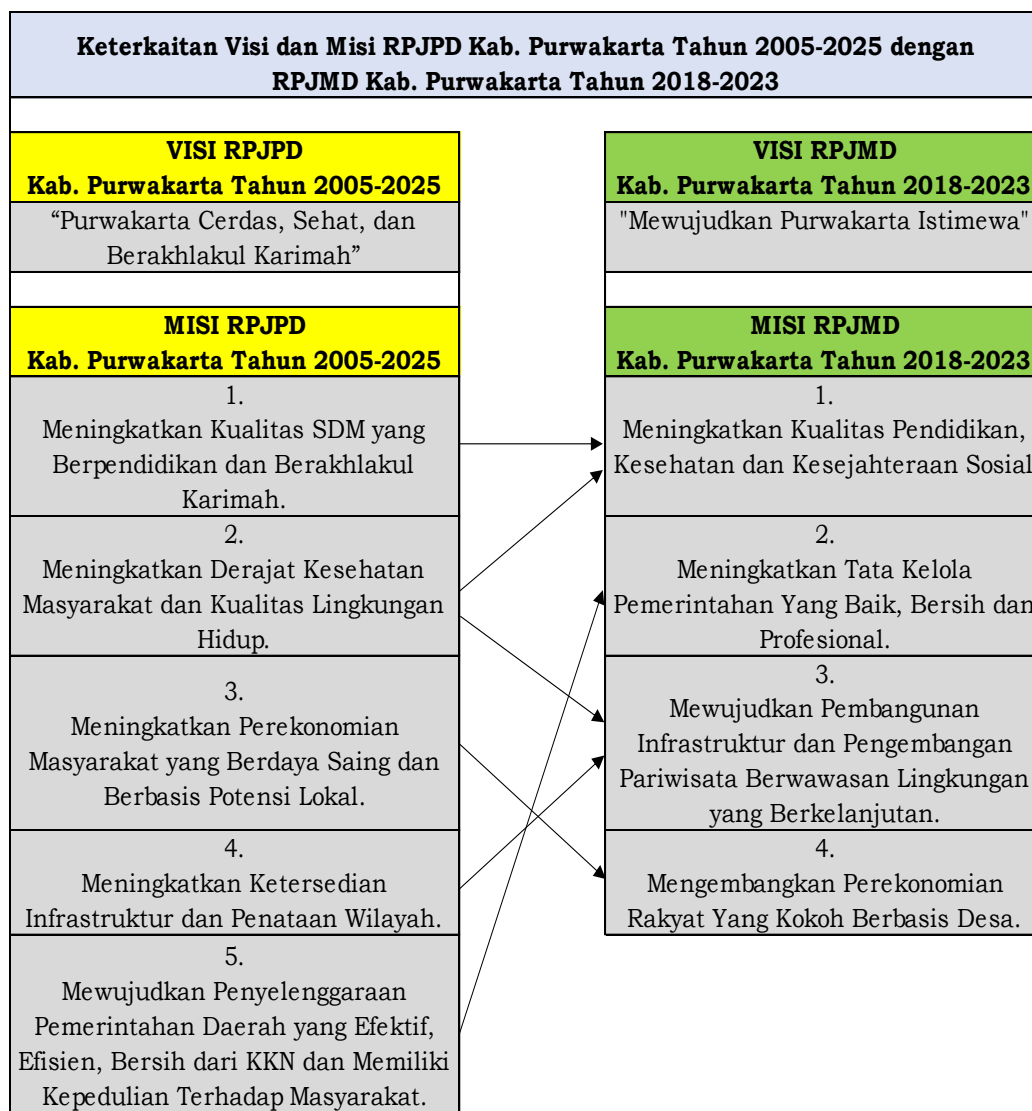
Kabupaten Purwakarta. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian.

Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional, indikator makro Provinsi Jawa Barat dan kemampuan Kabupaten Purwakarta dengan adanya pandemi Covid-19. Penentuan dan perhitungan proyeksi indikator makro Kabupaten Purwakarta dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mempertimbangkan data historis capaian pembangunan Kabupaten Purwakarta.

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana Visi dan Misi RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJPD, sebagaimana terlihat dalam Tabel dibawah ini :

Gambar. 5.1

Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023



Sumber : Bappelitbangda

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang telah disesuaikan.

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,28	69,84	70,67	69,28	69,56	69,92	70,35	349,78
2	Angka Kemiskinan	Persen	9,06	8,88	7,48	7,91	7,77	7,63	7,48	38,27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,11	8,93	9,65	10,69	10,27	10,08	9,91	50,6
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,22	4,38	2,42	3,18	3,66	4,16	17,8
5	Indeks Gini	Poin	0,39	0,38	0,3	0,50	0,39	0,36	0,34	1,89
6	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	10.941.000	11.056.000	11.819.000	12.200.500	12.700.000	13.000.500	13.150.500	62.870.500
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,23	1,19	1,48	1,45	0,64	0,5	0,47	4,54
8	Inflasi	Persen	4,74	2,65	3,19	3,16	3,06	2,96	2,89	15,26
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,91	7,92	7,91	7,97	8,04	8,12	39,96
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,89	12,06	12,10	12,36	12,46	12,58	12,73	62,23
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,42	70,54	70,8	70,58	70,63	70,68	70,75	353,44

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Tujuan		Sasaran		Indikator	Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir	
					2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	
VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA													
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial													
1.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya				Indeks Pembangunan Manusia (poin)	69,28	69,84	70,67	69,28	69,56	69,92	70,35	349,78
		1.1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,74	7,91	7,92	7,91	7,97	8,04	8,12	39,96
				2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,89	12,06	12,10	12,36	12,46	12,58	12,73	62,23
				3	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan (%)	70	75	80	85	90	95	100	450
				4	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	70	75	68,5	70	71	72	73	354,5

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
				5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) *indikator baru	1,23	1,19	1,48	1,45	0,64	0,5	0,47	4,54
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	1	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	15	20	25	30	35	40	55	185
		1.1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,42	70,54	70,8	70,58	70,63	70,68	70,75	353,44
1.2	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1	Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	7,48	7,91	7,77	7,63	7,48	38,27
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,11	8,93	9,65	10,69	10,27	10,08	9,91	50,6
		1.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan (%)	9,06	8,88	7,48	7,91	7,77	7,63	7,48	38,27
		1.2.2	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	45,81	46,11	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14	236,73

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,11	8,93	9,65	10,69	10,27	10,08	9,91	50,6
		1.2.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	87,4	87,86	87,19	88,79	89,25	89,71	90,18	445,12
				2	Indeks Perberdayaan Gender (IDG) (poin)	71,51	72,5	72,04	74,48	75,48	76,47	77,46	375,93
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional													
2.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif				Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	45	50	55	55	60	265
		2.1.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	1	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	45	50	55	55	60	265
				2	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta (kategori)	CC	B	B	B	BB	BB	A	A
				3	Nilai LPPD Kab. Purwakarta (poin)	31,3	35	35	35	35	35	35	175

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	C	C	B	B	B	B	B	B
				2	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan (%)	88	98	100	100	100	100	100	500
2.2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas			1	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD)	0	0	0	1	1	2	2	6
		2.2.1	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan	0	0	0	1	1	2	2	6

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
			n		Melayani (WBBM) (PD)								
		2.2.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)
3.1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup			1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	438,15
				2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69,81	70,31	71	71,31	71,81	72,31	72,81	359,24
		3.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka	1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	438,15

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
			Percepatan Pengembangan Wilayah	2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	82,6	84	85,4	85,52	85,66	85,82	86	428,4
				3	Cakupan Layanan Persampahan (%)	46	49	52	55	58	61	64	290
				4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik (%)	2	9	16	20	25	32	40	133
				5	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	15,52	25,52	34	45,52	55,52	65,52	75,52	276,08
		3.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	69,81	70,31	71	71,31	71,81	72,31	72,81	359,24
				2	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan (%)	0	0	18,52	18,52	7,41	11,11	18,52	74,08
3.2	Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (%)	25	30	35	40	45	50	55	225

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
		3.2.1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	Jumlah Wisatawan (Orang)	4.500	5.000	1.955.778	2.260.698	2.260.698	2.515.000	2.515.000	11.507.174
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa													
4.1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,22	4,38	2,42	3,18	3,66	4,16	17,80
				2	Indeks Gini (Poin)	0,39	0,38	0,30	0,50	0,39	0,36	0,34	1,89
				3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	10.941.000	11.056.000	11.819.000	12.200.500	12.700.000	13.000.500	13.150.500	62.870.500
				4	Inflasi (%)* *indikator baru	4,74	2,65	3,19	3,16	3,06	2,96	2,89	15,26
		4.1.1	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	1	Laju UMKM Yang Dibina (%)	100	100	100	100	100	100	100	500
				2	Laju Koperasi Aktif (%)	70	75	80	85	90	95	100	450
		4.1.2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	1	Laju Pertumbuhan IKM (%)	45	50	55	60	65	70	75	325
				2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	5	5	5	5	5	5	5	24

Tujuan		Sasaran		Indikator		Kondisi Awal		2019	Target Capaian Setelah Perubahan				Kondisi Akhir
						2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)
		4.1.3	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	65	70	63	60	65	70	75	333
		4.1.4	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1	Skor Pola pangan Harapan (poin)	86	87	89	90	91	92	93	454
				2	Laju Produksi Pertanian (%)	1,08	1,15	1,22	1,22	1,22	1,08	1,10	5,84
				3	Laju Produksi Peternakan (%)	3	3	3	2	2	2	2	11
				4	Laju Produksi Perikanan (%)	14	14	14	14	14	14	14	70
		4.1.5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Status Indeks Desa Membangun (status)	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber: Bappelitbangda, 2020

5.4 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan ke dalam **“9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**, sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp dan satu sma/smk berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan;
2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya;
3. Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya;
5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum

(PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti *sport center*, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan;

6. Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program atm beras;
7. Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat Diploma dan Srata 1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama;
8. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, bpd, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua; dan
9. Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya serta menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

Keterkaitan antara visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dengan program pembangunan “9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa” diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati

VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA	
MISI	Program Pembangunan 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa
I. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	terdapat pada langkah ke 1+2+7
II. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional	terdapat pada langkah ke 1+2+8+9
III. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	terdapat pada langkah ke 3+5+6
IV. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa	terdapat pada langkah ke 4+6+8+9

Sumber: Bappelitbangda, 2020

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta akan dicapai melalui serangkaian strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategi menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Berikut disajikan tabel uraian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023:

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Purwakarta

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Visi: Mewujudkan Purwakarta Istimewa					
Misi I: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial					
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya	Sasaran 1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Strategi 1.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
				Strategi 1.1.2	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat
				Strategi 1.1.3	Meningkatkan Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
				Strategi 1.1.4	Meningkatkan Kerukunan Serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
		Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Strategi 1.2.1	Meningkatkan Peran Serta Pemuda dan Pemasyarakatan Olah Raga Pada Masyarakat
		Sasaran 1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Strategi 1.3.1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tujuan 2	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sasaran 2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Strategi 2.1.1	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan
		Sasaran 2.2	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	Strategi 2.2.1	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
		Sasaran 2.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	Strategi 2.3.1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berafirmasi Gender

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi II: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional					
Tujuan 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Sasaran 1.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Strategi 1.1.1	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan
		Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Strategi 1.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan 2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	Sasaran 2.1	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Strategi 2.1.1	Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
		Sasaran 2.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Strategi 2.2.1	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Misi III: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan					
Tujuan 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Strategi 3.1.1	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
		Sasaran 3.2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Tujuan 2	Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan	Sasaran 3.2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Strategi 3.2.1	Mengembangkan Pariwisata Unggulan

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi IV: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa					
Tujuan 1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat	Sasaran 4.1	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Strategi 4.1.1	Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Serta Jangkauan Pemasaran
		Sasaran 4.2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan		
		Sasaran 4.3	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Strategi 4.3.1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi
		Sasaran 4.4	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Strategi 4.4.1	Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Sasaran 4.5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Strategi 4.5.1	Mengembangkan Perekonomian Desa

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Rumusan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD telah disesuaikan kembali dan diselaraskan dengan Tema Pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Pada tabel dibawah memuat tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar 6.1
Tema Pembangunan 5 (Lima) Tahunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023



Sumber : Bappelitbangda, 2020

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan									
Tahun 2019		Tahun 2020		Setelah Perubahan					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
1	Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	1	Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	2	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	2	Peningkatan Akses dan Produksi Pangan Masyarakat	2	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup, dan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban	2	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern
3	Peningkatan Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	3	Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Yang Modern	3	Penguatan Peran UMKM dan Kewirausahaan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat	3	Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin	3	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, dan Strategis yang Terintegrasi
4	Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha	4	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	4	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	4	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi Daerah yang Berbasis IPTEK	4	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan									
Tahun 2019		Tahun 2020		Setelah Perubahan					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
5	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	5	Peningkatan Pengelolaan Air Bersih	5	Penataan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	5	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance		
6	Pembangunan, Pengembangan, dan Perbaikan Ruas-Ruas Jalan Strategis	6	Peningkatan dan Penguatan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam, Buatan dan Budaya			6	Peningkatan Insfrastruktur Bagi Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
7	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat	7	Peningkatan Pengelolaan Persampahan			7	Penguatan UMKM dan Peningkatan Produksi Pangan		
8	Meningkatkan dan Memeratakan Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	8	Pengembangan Penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Pelayanan Publik						
9	Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	9	Penataan Sistem Regulasi Perundang-Undangan Secara Tertib dan Efektif						

Arah Kebijakan									
Tahun 2019		Tahun 2020		Setelah Perubahan					
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	10	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan						
		11	Penguatan Kebijakan dan Implementasi Managemen Kinerja Aparatur Sipil Negara						

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Selanjutnya, dalam melaksanakan keempat misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 maka ditetapkan beberapa program prioritas kepala daerah. Program prioritas kepala daerah tersebut dimanifestasikan dalam bentuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung yaitu berupa program perangkat daerah. Keterkaitan antara Program Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan dalam Janji Bupati dan Wakil Bupati yaitu 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa dengan program perangkat daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Keterkaitan Janji Kepala Daerah
Dengan Program Pembangunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023	
LANGKAH 1:							
1	Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp dan satu SMA/SMK berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan	1	Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan (SMA/SMK sudah menjadi kewenangan provinsi)	1	Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan
						2	Program Pengembangan Kurikulum
LANGKAH 2:							
2	Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter	1	Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi	1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2	Jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan				

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023	
	dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya		swasta bagi seluruh warganya				
		3	Penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance	2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		
		4	Satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online	3	Program pengembangan sumber daya kesehatan	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
LANGKAH 3:							
3	Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan	1	Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2	Program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		2	Pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan	1	Program peningkatan kesejahteraan petani	1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				2	Program kesejahteraan peternakan		
LANGKAH 4:							
4	Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya	1	Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan	1	Program penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		2	Pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya	2	Program pemberdayaan ekonomi desa	1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023		
LANGKAH 5:								
5	Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (pju) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan	1	Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika	1	Program pembangunan jalan dan jembatan	1	Program Penyelenggaraa n Jalan	
				2	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan		2	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				3	Program pembangunan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum (PJU)			
				4	Program pembangunan dan pengelolaan lampu hias			
				5	Program pengembangan perumahan			
		2	Pengembangan mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah		Dalam bentuk hibah (belanja tidak langsung)			
			3	Penambahan ruang terbuka hijau	1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang
			4	Pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan	1	Program pembangunan dan/ peningkatan sarana prasarana olahraga	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			5	Penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan (jaringan listrik sudah menjadi kewenangan provinsi)	1	Program penyediaan dan pengolahan air baku	1	Program Pengolahan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
					2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum		
LANGKAH 6:								
6	Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi	1	Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam	1	Program pengembangan kepariwisataan	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				2	Program promosi wisata daerah	2	Program Pemasaran Pariwisata	

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023	
	dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program atm beras			3	Program pengembangan ekonomi kreatif		
		2	Penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat	1	Program peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2	Program pembangunan jaringan irigasi	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3	Jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program ATM beras	1	Program fasilitasi kemasyarakatan dan keagamaan	1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
LANGKAH 7:							
7	Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat diploma dan S1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama	1	Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat diploma dan S1	1	Program pendidikan non formal	1	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama	1	Program fasilitasi kemasyarakatan dan keagamaan		
LANGKAH 8:							
8	Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, BPD, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua	1	Pembiayaannya melalui Belanja Tidak Langsung (belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa)		-		-
LANGKAH 9:							
9	Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan	1	Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan	1	Program pengembangan layanan perizinan terpadu	1	Program Pengembangan Iklim

9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PENJABARAN 9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020		PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2023	
	terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, imb, ktp, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya serta menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan		terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, imb, ktp, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya	2	Program pembangunan dan penataan ruang publik		Penanaman Modal
		2	Menumbuhkembangkan umkm melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan	1	Program peningkatan daya saing UMKM	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				2	Program pengembangan perdagangan dalam negeri	2	Program Pengembangan UMKM

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta, 2020

Dalam rangka menjabarkan sasaran pembangunan, maka telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya, dipilih program pembangunan daerah yang tepat untuk mencapai sasaran sesuai strategi dan arah kebijakan. Program pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Secara lebih jelasnya, program pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial							298.147 .284.62 4		321.429 .499.79 0		357.292 .031.48 8		375.978 .404.73 2		395.642 .075.30 0		1.748.48 9.295.93 4		
Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,28	69,84	70,67	290.334 .850.62 1	69,28	312.263 .407.29 0	69,56	351.290 .121.65 8	69,92	369.662 .595.01 9	70,35	388.995 .948.74 0	349,78	1.712.54 6.923.32 8	
Sasaran 1.1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,91	7,92	183.272 .459.30 7	7,91	178.739 .742.00 0	7,97	198.541 .632.76 0	8,04	208.925 .360.15 2	8,12	219.852 .156.48 8	39,96	989.331. 350.707		
	2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,89	12,06	12,10		12,36		12,46		12,58		12,73		62,23			
	3	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	70,00	75	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		450,00			
	4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	70,00	75	68,50		70,00		71,00		72,00		73,00		354,50			
	5	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,23	1,19	1,48		1,45		0,64		0,50		0,47		4,54			
Progra m:																			
1.01.1. 01.01.1 6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						118.243 .605.34 4		121.185 .700.00 0		0		0		0		239.429. 305.344	Dinas Pendidi kan	
		1	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16		76,96		0,00		0,00		0,00		144,12	Dinas Pendidi kan	
		2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	0,00	57,41	63,89		70,37		0,00		0,00		0,00		134,26	Dinas Pendidi kan	
1.01.1. 01.01.1 5	Program Pendidikan		Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	10,40	24,56	55,43	4.594.2 17.900	46,68	2.225.0 00.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102,11	6.819.21 7.900	Dinas Pendidi kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Anak Usia Dini																	
1.01.1. 01.01.2 0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						6.554.910.783		10.969.950.000		0		0		0		17.524.860.783	Dinas Pendidikan
		1 Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%)	Perse n	93,78	95,32	95,32		96,66		0,00		0,00		0,00		191,98		Dinas Pendidikan
		2 Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Perse n	0,00	0,00	0,45		1,86		0,00		0,00		0,00		2,31		Dinas Pendidikan
1.01.1. 01.01.1 8	Program Pendidikan Non Formal	Pesentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Perse n	0,00	8,14	88,23	909.570.200	24,42	425.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	112,65	1.334.570.200	Dinas Pendidikan
1.01.1. 01.01.2 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan						52.268.707.630		43.509.092.000		0		0		0		95.777.799.630	Dinas Pendidikan
		1 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Perse n	50,07	61,25	59,19		62,46		0,00		0,00		0,00		121,65		Dinas Pendidikan
		2 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	Perse n	99,51	99,52	99,53		99,55		0,00		0,00		0,00		199,08		Dinas Pendidikan
		3 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Perse n	99,72	99,72	99,72		99,76		0,00		0,00		0,00		199,48		Dinas Pendidikan
		4 Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Perse n	18,91	17,25	18,45		19,75		0,00		0,00		0,00		38,20		Dinas Pendidikan
		5 Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Perse n	31,47	32,00	31,91		36,64		0,00		0,00		0,00		68,55		Dinas Pendidikan
2.17.2. 18.01.1 5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaa n						701.447.450		0		0		0		0		701.447.450	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	8.000,00	8.000,00	244.820,00		0,00		0,00		0,00		0,00		244.820,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun	Orang	39.500,00	39.500,00	15.239,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.239,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Titik	103,00	103,00	156,00		0,00		0,00		0,00		0,00		156,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4 Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	215,00	215,00	417,00		0,00		0,00		0,00		0,00		417,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5 Jumlah Buku Perpustakaan	Buah	38.000,00	38.000,00	4.134,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.134,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.16.2.13.01.19	Program Pelestarian Budaya						0		425.000.000		0		0		0		425.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahrag a, Pariwisata dan Kebudayaan
		1 Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Perse n	88,89	88,89	88,89		88,89		0,00		0,00		0,00		177,78		Dinas Kepemudaan, Olahrag a, Pariwisata dan Kebudayaan
		2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Perse n	0,00	0,00	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemudaan, Olahrag a, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan						0		0		193.041 .756.22 7		203.137 .840.07 8		213.761 .949.11 4		609.941. 545.419	Dinas Pendidi kan
		1 APK Pendidikan Anak Usia Dini	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		68,00		69,36		79,87		217,23		Dinas Pendidi kan
		2 Penduduk yang berusia >15 Tahun meleak huruf (tidak buta aksara)	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		99,57		99,58		99,59		298,74		Dinas Pendidi kan
		3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		99,54		99,55		99,56		298,65		Dinas Pendidi kan
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		99,73		99,74		99,75		299,22		Dinas Pendidi kan
		5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidi kan
		6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidi kan
		7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidi kan
		8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidi kan
		9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidi kan
		10 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		86,23		87,09		87,96		261,29		Dinas Pendidi kan
		11 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		88,64		89,53		90,42		268,59		Dinas Pendidi kan
		12 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		57,57		58,72		59,90		176,19		Dinas Pendidi kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini																
		13 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		92,62		93,55		95,42		281,58		Dinas Pendidikan
		14 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		93,41		94,34		96,23		283,99		Dinas Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum						0		0		599.905.698		631.280.766		664.296.750		1.895.483.214	Dinas Pendidikan
		1 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Doku men	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pendidikan
		2 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Doku men	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dokumen Hasil Pengawasan	Doku men	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	449.501.436	1,00	473.010.361	1,00	497.748.803	3,00	1.420.260.600	Dinas Pendidikan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	95,00	469.950.024	95,00	494.528.410	95,00	520.392.246	285,00	1.484.870.680	Dinas Pendidikan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaa n						0		0		1.305.907.006		1.374.205.942		1.446.076.912		4.126.189.860	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		28,00		29,30		30,40		87,70		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		0,15		0,19		0,23		0,57		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		5 Laju Pengunjung Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		4,50		4,30		4,00		12,80		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		6 Laju Anggota Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		15,70		13,50		12,00		41,20		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		10 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		14,50		12,40		11,00		37,90		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		1 1 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		14,00		12,40		11,00		37,40		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		1 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		7,00		17,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	50.488.621	100,00	53.129.175	100,00	55.907.832	300,00	159.525.628	Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
2.22.02	Program Pengembang an Kebudayaan						0		0		2.124.210.919		2.235.307.150		2.352.213.714		6.711.731.783	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		1 Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		55,00		55,00		160,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		2 Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		3 Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		36,00		36,00		36,00		108,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						0		0		200.000.000		210.460.000		221.467.058		631.927.058	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		1 Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
		2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		60,00		60,00		170,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	20,00	299.912.829	20,00	315.598.270	20,00	332.104.059	60,00	947.615.158	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga			Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Perse n	15,00	20	25,00	10.094.726.050	30,00	4.475.820.000	35,00	8.713.715.929	40,00	9.169.443.272	55,00	9.649.005.156	185,00	42.102.710.407	
Program:																			
2.13.2.13.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaa n		Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Perse n	0,00	0,00	10,56	722.641.100	30,00	435.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,56	1.157.641.100	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
2.13.2. 13.01.2 0	Program Pembinaan dan Pemasyarak atan Olah Raga						9.372.0 84.950		3.970.8 20.000		0		0		0		13.342.9 04.950	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		1 Cakupan Pembinaan Olahraga	Perse n	0,00	19,61	19,61		20,00		0,00		0,00		0,00		39,61		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Perse n	0,00	11,00	4,73		11,00		0,00		0,00		0,00		15,73		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
2.13.2. 13.01.2 2	Program Pembinaan Kepemudaa n	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Perse n	0,00	20,00	20,00	0	20,00	70.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	70.000.0 00	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
2.19.02	Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n						0		0		1.196.0 26.679		1.258.5 78.874		1.324.4 02.550		3.779.00 8.103	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		40,00		85,00		60,00		185,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Kebuda yaan
		2 Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		3 Cakupan Wirausaha Muda	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		60,00		70,00		180,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
2.19.03	Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Keolahragaa n						0		0		6.593.3 89.250		6.938.2 23.508		7.301.0 92.597		20.832.7 05.355	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		1 Cakupan Pembinaan Olahraga;	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		19,61		23,53		23,53		66,67		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda;	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		11,00		13,00		15,00		39,00		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		3 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		64,29		64,29		71,43		200,01		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																			ata dan Kebuda yaan
2.19.04	Program Pengembang an Kapasitas Kepramuka an	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	20,00	924.300 .000	20,00	972.640 .890	20,00	1.023.5 10.009	60,00	2.920.45 0.899	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Angka Harapan Hidup	Tahu n	70,42	70,58	70,80	96.967. 665.264	70,58	129.047 .845.29 0	70,63	144.034 .772.96 9	70,68	151.567 .791.59 5	70,75	159.494 .787.09 6	353,44	681.112. 862.214	
Progra m:																			
1.02.1. 02.01.1 6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja		Perse n	58,33	58,33	41,67	16.048. 730.657	66,67	15.427. 727.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	108,33	31.476.4 57.657	Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.2 0	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							1.186.2 23.670		1.510.9 99.000		0		0		0		2.697.22 2.670	Dinas Kesehat an
		1	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Perse n	68,72	70,13	71,35		74,35		0,00		0,00		0,00		145,70		Dinas Kesehat an
		2	Cakupan Pelayanan Bayi	Perse n	98,35	98,43	99,90		98,80		0,00		0,00		0,00		198,70		Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.2 1	Program Pengembang an Lingkungan Sehat							211.345 .500		125.000 .000		0		0		0		336.345. 500	Dinas Kesehat an
		1	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Perse n	75,73	75,79	78,10		75,94		0,00		0,00		0,00		154,04		Dinas Kesehat an
		2	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Perse n	54,43	55,61	58,25		58,28		0,00		0,00		0,00		116,53		Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.2 8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina		Perse n	20,00	24,00	100,00	307.660 .000	43,20	520.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	143,20	827.660. 000	Dinas Kesehat an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
1.02.1. 02.01.3 2	Program Peningkatan Keselamata n Ibu Melahirkan dan Anak						3.266.8 26.800		1.145.3 12.000		0		0		0		4.412.13 8.800	Dinas Kesehat an
		1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Perse n	98,68	99,06	100,53		99,09		0,00		0,00		0,00		199,62		Dinas Kesehat an
		2 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Perse n	94,95	70,13	103,20		72,69		0,00		0,00		0,00		175,89		Dinas Kesehat an
		3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Perse n	98,68	98,66	101,04		99,04		0,00		0,00		0,00		200,08		Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.3 3	Program Promosi Kesehatan	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Perse n	80,00	80,00	76,50	1.765.3 80.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	76,50	1.765.38 0.000	Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.3 4	Program Pencegahan dan Penanggula ngan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Perse n	80,00	80,00	68,84	2.825.2 19.016	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	68,84	2.825.21 9.016	Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.3 5	Program Pengembang an Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya	Perse n	75,00	80,00	90,00	3.017.5 00.591	90,00	1.597.3 85.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00	4.614.88 5.591	Dinas Kesehat an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
1.02.1. 02.01.3 9	Program Pengembang an Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku	Perse n	78,90	80,17	83,54	0	85,23	5.285.0 00.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	168,78	5.285.00 0.000	Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.2 5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik	Perse n	38,46	46,15	61,16	9.752.3 97.056	53,85	11.635. 857.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	115,01	21.388.2 54.056	Dinas Kesehat an
1.02.1. 02.01.2 4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						58.586. 381.974		91.800. 565.290		0		0		0		150.386. 947.264	Dinas Kesehat an
		1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Perse n	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kesehat an
		2 Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Perse n	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kesehat an
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						0		0		117.336 .578.49 8		123.473 .281.55 3		129.930 .934.17 9		370.740. 794.230	Dinas Kesechat an
		1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		230,00		Dinas Kesehat an
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		95,00		280,00		Dinas Kesehat an
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	11.484. 588.257	95,00	12.085. 232.223	100,00	12.717. 289.868	285,00	36.287.1 10.348	Dinas Kesehat an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Daya Manusia Kesehatan																	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	92,21	597.635 .651	94,81	628.891 .996	100,00	661.783 .047	287,01	1.888.31 0.694	Dinas Kesehat an
1.02.05	Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	63,30	224.991 .173	63,89	236.758 .211	65,16	249.140 .666	192,35	710.890. 050	Dinas Kesehat an
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						0		0		14.390. 979.390		15.143. 627.612		15.935. 639.336		45.470.2 46.338	RSUD Bayu Asih
		1 Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		2 Tingkat Mutu Keperawatan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		3 Cakupan Pelayanan Penunjang	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		80,00		85,00		255,00		RSUD Bayu Asih
		5 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		85,00		245,00		RSUD Bayu Asih
		6 Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		perundang undangan																
		7 Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		8 Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		78,00		80,00		85,00		243,00		RSUD Bayu Asih
Tujuan 1.2: Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1	Angka Kemiskinan	Perse n	9,06	8,88	7,48		7,91		7,77	7,63		7,48		38,27		
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perse n	9,11	8,93	9,65		10,69		10,27		10,08		9,91		50,60	
Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan			Angka Kemiskinan	Perse n	9,06	8,88	7,48		7,91		7,77	7,63		7,48		38,27		
Progra m:																		
1.06.1. 06.01.1 5	Program Pemberdaya an Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan	Perse n	0,00	0,00	85,00	125.000 .000	90,00	126.912 .500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	175,00	251.912. 500	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
1.06.1. 06.01.2 1	Program Pemberdaya an Kelembagaa n Kesejahtera an Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lemb aga	0,00	0,00	24,00	249.966 .000	30,00	2.186.7 76.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	54,00	2.436.74 2.000	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
1.06.1. 06.01.1 6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtera an Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perse n	0,00	0,00	93,68	2.124.1 93.772	90,00	1.587.1 61.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	183,68	3.711.35 4.772	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		ungan Anak
1.06.1. 06.01.1 7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang	0,00	0,00	14,00	21.100. 000	20,00	100.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	34,00	121.100. 000	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
1.04.1. 03.02.1 5	Program Pengembang an Perumahan						872.442 .450		1.503.7 67.000		0		0		0		2.376.20 9.450	Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
		1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	987,00	1.345,0 0	1.840,0 0		2.000,0 0		0,00		0,00		0,00		3.840,0 0		Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
		2 Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumla h Mena ra	1,00	1,00	2,00		1,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
1.06.02	Program Pemberdaya an Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lemb aga	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	30,00	281.712 .539	30,00	296.446 .105	30,00	311.950 .236	90,00	890.108. 880	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	85,00	979.964 .935	90,00	1.031.2 17.101	90,00	1.085.1 49.755	265,00	3.096.33 1.791	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak
1.06.05	Program Perlindunga						0		0		1.017.6 02.588		1.070.8 23.203		1.126.8 27.257		3.215.25 3.048	Dinas Sosial

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
	n dan Jaminan Sosial																	Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	
		1 Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	
		2 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayaankan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		100,00		280,00		Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	
Sasaran 1.2.2: Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja		1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perse n	45,81	46,11	46,54	1.409.4 60.585	46,95	1.505.2 81.000	47,35	2.183.3 23.000	47,75	2.297.5 10.792	48,14	2.417.6 70.606	236,73	9.813.24 5.983	
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perse n	9,11	8,93	9,65		10,69		10,27		10,08		9,91		50,60		
Progra m:																			
2.01.2. 01.01.1 6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Perse n	42,56	40,38	50,00	136.195 .685	60,00	50.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	110,00	186.195. 685	Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi	
2.01.2. 01.01.1 9	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Perse n	23,81	52,85	60,00	47.000. 000	70,00	200.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	130,00	247.000. 000	Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi	
2.01.2. 01.01.1 7	Program Perlindungan dan	Persentase Penyelesaian Perselisihan	Perse n	100,00	42,86	50,00	211.504 .900	65,00	300.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	115,00	511.504. 900	Dinas Ketenag akerjaa	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Pengembang an Lembaga Ketenagaker jaan	Hubungan Industrial																n dan Transm igrasi
2.01.2. 01.01.1 5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivita s Tenaga Kerja						1.014.7 60.000		955.281 .000		0		0		0		1.970.04 1.000	Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
		1 Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi	Perse n	41,27	46,66	60,65		75,00		0,00		0,00		0,00		135,65		Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
		2 Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Perse n	34,92	47,15	50,00		60,00		0,00		0,00		0,00		110,00		Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivita s Tenaga Kerja						0		0		1.368.3 23.000		1.439.8 86.292		1.515.1 92.346		4.323.40 1.638	Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
		1 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		85,55		95,00		100,00		280,55		Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
		2 Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		70,00		80,00		90,00		240,00		Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja						0		0		440.000 .000		463.012 .000		487.227 .526		1.390.23 9.526	Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi
		1 Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		70,00		80,00		90,00		240,00		Dinas Ketenag akerjaa n dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
																		Transm igrasi	
		2 Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		85,00		95,00		255,00		Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	375.000 .000	95,00	394.612 .500	100,00	415.250 .734	275,00	1.184.86 3.234	Dinas Ketenag akerjaa n dan Transm igrasi	
Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,40	87,86	87,19	3.010.2 71.196	88,79	2.156.1 95.000	89,25	1.539.3 06.768	89,71	1.619.8 12.512	90,18	1.704.5 28.706	445,12	10.030.1 14.182	
		2	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	71,51	72,50	72,04		74,48		75,48		76,47		77,46		375,93		
Progra m:																			
1.06.1. 06.01.2 3	Program Penguatan Kelembagaa n Pengarusuta maan Gender dan Anak	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perse n	0,00	0,00	63,88	942.194 .000	90,00	1.125.0 00.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	153,88	2.067.19 4.000	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	
1.06.1. 06.01.2 5	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangun an	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Perse n	0,00	0,00	78,00	331.750 .000	85,00	225.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	556.750. 000	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	
1.06.1. 06.01.2 4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindunga n Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Perse n	0,00	0,00	86,82	1.736.3 27.196	85,00	806.195 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	171,82	2.542.52 2.196	Dinas Sosial Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	85,00	319.333.387	85,00	336.034.523	90,00	353.609.128	260,00	1.008.977.038	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	261.071.438	90,00	274.725.474	90,00	289.093.617	270,00	824.890.529	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	557.234.321	90,00	586.377.676	100,00	617.045.228	280,00	1.760.657.225	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Data Gender Anak		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	75,00	99.853.156	75,00	105.075.476	75,00	110.570.923	225,00	315.499.555	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	65,00	268.181.523	66,00	282.207.417	67,00	296.966.865	198,00	847.355.805	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan	Persentase Pemenuhan		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	55,00	33.632.943	60,00	35.391.946	65,00	37.242.945	180,00	106.267.834	Dinas Sosial

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
	n Khusus Anak	Perlindungan Khusus Hak Anak																Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak	
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional							17.305. 189.962		24.440. 659.000		85.078. 668.240		89.528. 282.591		94.210. 611.769		310.563. 411.562		
Tujuan 2.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif			Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0,00	0	45,00	11.079. 911.767	50,00	17.417. 814.000	55,00	69.604. 460.643	55,00	73.244. 773.937	60,00	77.075. 475.612	265,00	248.422. 435.959	
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0,00	0	45,00	4.092.4 95.878	50,00	3.752.4 70.000	55,00	36.681. 942.732	55,00	38.600. 408.337	60,00	40.619. 209.693	265,00	123.746. 526.640	
		2	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Kategori	CC	B	B		B		BB		BB		A		A		
		3	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	31,3	35	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00		175,00		
Progra m:																			
4.01.4. 01.03.3 8	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	0,00	0,00	45,00	0	50,00	700.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,00	700.000. 000	Sekre tariat Daerah
4.01.4. 01.03.0 9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						447.284 .100		0		0		0		0		447.284. 100	Sekre tariat Daerah	
		1	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:															Sekre tariat Daerah	
			- Perda	Perse n	100,00	100,00	88,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88,00		Sekre tariat Daerah
			- Perbup	Perse n	100,00	100,00	74,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74,00		Sekre tariat Daerah
			- Kepbup	Perse n	100,00	100,00	85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Sekre tariat Daerah
		2	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Perse n	100,00	100,00	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Sekre tariat Daerah

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Perse n	100,00	100,00	4,25		0,00		0,00		0,00		0,00		4,25		Sekre tariat Daerah
4.01.4. 01.03.4 3	Program Penyelengga raan Pemerintaha n Umum dan Otonomi Daerah						0		1.127.0 20.000		0		0		0		1.127.02 0.000	Sekre tariat Daerah
		1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,13	3,50	3,50		3,50		0,00		0,00		0,00		7,00		Sekre tariat Daerah
		2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Perse n	100 MOU/P KS/100 %	100 MOU/P KS/100 %	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekre tariat Daerah
		3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah	Perse n	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekre tariat Daerah
		4 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasik an	Perse n	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekre tariat Daerah
4.03.4. 03.01.2 1	Program Perencanaa n Pembangun an Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Perse n	100,00	100,00	100,00	3.645.2 11.778	100,00	1.370.4 50.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	5.015.66 1.778	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah
4.03.4. 03.01.2 7	Program Sinkronisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi	Perse n	80,00	80,00	80,00	0	83,00	80.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	80.000.0 00	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
																		bangun Daerah	
4.03.4. 03.01.2 8	Program Sinkronisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Perse n	80,00	80,00	80,00	0	83,00	200.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	200.000. 000	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah	
4.03.4. 03.01.2 9	Program Sinkronisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Perse n	80,00	80,00	80,00	0	83,00	275.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	275.000. 000	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah	
4.01.02	Program Pemerintaha n dan Kesejahtera an Rakyat						0		0		28.539. 651.000		30.032. 274.747		31.602. 962.717		90.174.8 88.464	Sekre tariat Daerah	
		1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	0,00	0,00	0,00		0,00		3,50		3,50		3,50		10,50		Sekre tariat Daerah	
		2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah	
		3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		95,00		96,00		291,00		Sekre tariat Daerah	
		4 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah	
		5 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:																Sekre tariat Daerah	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		- Perda	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		- Perbup	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		- Kepbup	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		6 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		7 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		8 Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	0,00	0,00	0,00		0,00		55,00		55,00		60,00		170,00		Sekre tariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomi an dan Pembangun an						0		0		4.300.0 00.000		4.524.8 90.000		4.761.5 41.747		13.586.4 31.747	Sekre tariat Daerah
		1 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah
		3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		75,00		100,00		225,00		Sekre tariat Daerah
		4 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		85,71		90,00		96,77		272,48		Sekre tariat Daerah
		5 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekre tariat Daerah

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Yang Selesai Ditenderkan																
		6 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		92,31		96,15		100,00		288,46		Sekreta riat Daerah
5.01.02	Program Perencanaa n, Pengendalia n dan Evaluasi Pembangun an Daerah						0		0		1.677.2 75.484		1.764.9 96.992		1.857.3 06.334		5.299.57 8.810	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah
		1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah
		2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		94,00		95,00		96,00		285,00		Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah
		3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	%	0,00	0,00	0,00		0,00		94,00		95,00		96,00		285,00		Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaa n						0		0		2.165.0 16.248		2.278.2 46.598		2.397.3 98.895		6.840.66 1.741	Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
	Pembangun an Daerah																	an dan Pengem bangan Daerah	
		1 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	0,00	0,00	0,00		0,00		85,00		87,00		89,00		261,00		Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah	
		2 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	0,00	0,00	0,00		0,00		85,00		87,00		89,00		261,00		Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah	
		3 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		85,00		87,00		89,00		261,00		Badan Perenca naan Pemban gunan Peneliti an dan Pengem bangan Daerah	
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Predi kat	C	C	B	6.987.4 15.889	B	13.665. 344.000	B	32.922. 517.911	B	34.644. 365.600	B	36.456. 265.919	B	124.675. 909.319	
		2	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Perse n	88,00	98	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		500,00		
Progra m:																			
2.12.2. 12.01.1 8	Program Peningkatan Mutu						784.803 .750		0		0		0		0		784.803. 750	Dinas Penana man Modal	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Pelayanan Perijinan																	dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Perse n	100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perse n	79,50	80,00	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Perse n	95,00	95,00	95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Perse n	100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database	Perse n	90,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Pelayanan Perjinan																Terpad u Satu Pintu
2.12.2. 12.01.2 1	Program Pengembang an Layanan Perijinan Terpadu	Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Perse n	0,00	61,24	0,00	0	80,00	246.790 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	80,00	246.790. 000	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.17.2. 18.01.1 7	Program Peningkatan Layanan Perpustakaa n						0		225.000 .000		0		0		0		225.000. 000	Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		1 Laju Pengunjung Perpustakaan	Perse n	0,00	81,50	4,90		4,70		0,00		0,00		0,00		9,60		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		2 Laju Anggota Perpustakaan	Perse n	0,00	57,00	22,90		18,60		0,00		0,00		0,00		41,50		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		3 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Perse n	0,00	5,00	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		4 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Perse n	0,00	0,00	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		5 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Perse n	47,00	79,00	49,00		100,00		0,00		0,00		0,00		149,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		6 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Perse n	0,00	100,00	0,00		16,50		0,00		0,00		0,00		16,50		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		7 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	19,80		16,50		0,00		0,00		0,00		36,30		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Digital Yang Dibaca																
		8 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
2.18.2. 18.01.1 9	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembang an Kearsipan						0		270.000 .000		0		0		0		270.000. 000	Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Perse n	100,00	95,70	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Perse n	80,05	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Perse n	1,15	1,75	1,75		1,75		0,00		0,00		0,00		3,50		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		4 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Perse n	0,60	0,05	22,00		27,00		0,00		0,00		0,00		49,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		5 Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	Perse n	59,80	42,70	22,90		4,20		0,00		0,00		0,00		27,10		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
2.10.2. 10.01.2 5	Program Pengembang an Informasi dan Komunikasi Publik						0		9.926.8 84.000		0		0		0		9.926.88 4.000	Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Perse n	62,00	92,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		2 Persentase Publikasi Program	Perse n	66,00	92,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komuni

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Pembangunan Daerah																kasi dan Informa tika
		3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasika n	Perse n	97,00	98,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Perse n	79,00	93,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Perse n	75,00	85,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
2.06.2. 06.01.1 5	Program Penataan Administras i Kependudu kan						3.270.3 19.419		0		0		0		0		3.270.31 9.419	Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan :																Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Perse n	75,00	80,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	Perse n	75,00	80,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		2 Tingkat Kesadaran Masyarakat	Perse n	20,00	25,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.10.2.10.01.21	Program Pengembangan Aplikasi Telematika	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika	Kegiat an	8,00	8,00	8,00	1.288.090.970	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,00	1.288.090.970	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.29	Program Pengembangan Aplikasi Informatika						0		1.146.670.000		0		0		0		1.146.670.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Perse n	88,00	98,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Perse n	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
		3 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Perse n	54,00	92,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1.05.1.05.03.34	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi						0		450.000.000		0		0		0		450.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebaka

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Sesuai Kompetensi																ran dan Penang gulang an Bencan a
		2 Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulang an Bencan a
1.05.1. 05.03.3 6	Program Pencegahan dan Kesiapsiaga an						0		400.000 .000		0		0		0		400.000. 000	Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulang an Bencan a
		1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulang an Bencan a
		2 Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulang an Bencan a
		3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		9,00		0,00		0,00		0,00		9,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulang

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		n Bencan a
		4 Persentase Tersedianya Layanan PUSDalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
		5 Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
		6 Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
1.05.1. 05.03.3 7	Program Kedaruratan dan Logistik						0		175.000 .000		0		0		0		175.000. 000	Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
		1 Persentase Jumlah SDM Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		2 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
		3 Persentase Kecepatan Response Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
1.05.1. 05.03.3 8	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi						0		0		0		0		0		0	Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
		1 Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
		2 Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
1.05.1. 05.03.2 8	Program Pelayanan Penyelamata	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan	Perse n	0,00	0,00	100,00	1.078.0 66.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.078.06 6.750	Dinas Pemada m

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	n dan Evakuasi Korban Kebakaran	Evakuasi Korban Kebakaran																Kebaka ran dan Penang gulanga n Bencan a
1.05.1. 05.01.2 3	Program Pemeliharaaa n Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah	Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	566.135 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	566.135. 000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1. 05.01.4 2	Program Penegakan Perundang- Undangan Daerah						0		425.000 .000		0		0		0		425.000. 000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Perse n	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	Perse n	80,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1. 05.01.4 3	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentrama n Masyarakat						0		150.000 .000		0		0		0		150.000. 000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Pen ertiban Trantibmas	Kegiat an	33,00	34,00	0,00		34,00		0,00		0,00		0,00		34,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama,	Kegiat an	7,00	7,00	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Satuan Polisi

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah																Pamong Praja
1.05.1. 05.01.4 4	Program Pelayanan Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Perse n	0,00	48,00	0,00	0	48,00	250.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	48,00	250.000. 000	Satuan Polisi Pamong Praja
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal						0		0		349.999 .462		368.304 .434		387.566 .756		1.105.87 0.652	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	81,00		81,50		82,00		244,50		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	484.999 .480	100,00	510.364 .953	100,00	537.057 .040	300,00	1.532.42 1.473	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	95,00	549.999 .755	100,00	578.764 .742	100,00	609.034 .138	295,00	1.737.79 8.635	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaa n						0		0		1.305.9 07.006		1.374.2 05.942		1.446.0 76.912		4.126.18 9.860	Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		28,00		29,30		30,40		87,70		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojoek Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		0,15		0,19		0,23		0,57		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		5 Laju Pengunjung Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		4,50		4,30		4,00		12,80		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		6 Laju Anggota Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		15,70		13,50		12,00		41,20		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		10 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		14,50		12,40		11,00		37,90		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		11 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		14,00		12,40		11,00		37,40		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		12 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		7,00		17,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip						0		0		899.986.611		947.055.911		996.586.935		2.843.629.457	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		1,75		1,75		1,75		5,25		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4 Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		3,20		4,70		3,70		11,60		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	Program Perlindungan						0		0		99.999.745		105.229.732		110.733.247		315.962.724	Dinas Kearsipan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	n Dan Penyelamata n Arsip																	an dan Perpust akaan
		1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		39,10		39,10		43,50		121,70		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		2 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		27,00		27,00		27,00		81,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		3 Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:																Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		- Arsip Aktif	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		- Arsip Inaktif	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		53,30		93,30		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		- Arsip Vital	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		4 Persentase Penyusutan Arsip	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		5 Indek Kepuasan Masyarakat (Ikkm) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		73,00		75,00		78,00		226,00		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
		6 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		19,99		19,99		19,99		59,97		Dinas Kearsip an dan Perpust akaan
2.16.02	Program Informasi dan						0		0		5.989.7 03.839		6.302.9 65.350		6.632.6 10.438		18.925.2 79.627	Dinas Komuni kasi dan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Komunikasi Publik																	Informa tika
		1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasika n	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
2.16.03	Program Aplikasi Informatika						0		0		10.873. 202.015		11.441. 870.480		12.040. 280.306		34.355.3 52.801	Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		5 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		6 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		7 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
2.20.02	Program Penyelengga raan Statistik Sektoral						0		0		449.990 .017		473.524 .495		498.289 .826		1.421.80 4.338	Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika
		2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dhasilkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komuni kasi dan Informa tika

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administras i Kependudu kan						0		0		1.798.8 76.630		1.892.9 57.878		1.991.9 59.575		5.683.79 4.083	Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		3 Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		4 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		5 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
		6 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kepend udukan dan Pencata tan Sipil
1.05.03	Program Penanggula ngan Bencana						0		0		3.761.2 88.423		3.958.0 03.808		4.165.0 07.407		11.884.2 99.638	Badan Penang gulanga n

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Bencan a Daerah
		1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah
		2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhada Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah
		3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggula ngan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	4.308.6 99.733	100,00	4.534.0 44.730	100,00	4.771.1 75.269	300,00	13.613.9 19.732	Dinas Pemada m Kebaka ran dan Penyela matan
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteram an dan Ketertiban Umum						0		0		2.049.8 65.195		2.157.0 73.145		2.269.8 88.070		6.476.82 6.410	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- Perundang-	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani																
		3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas	Kegiat an	0,00	0,00	0,00		0,00		34,00		40,00		40,00		114,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		4 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiat an	0,00	0,00	0,00		0,00		8,00		8,00		8,00		24,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		5 Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		72,00		192,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		6 Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/ Bimtek	Jumla h	0,00	0,00	0,00		0,00		98,00		98,00		98,00		294,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		7 Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS)	%	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		80,00		100,00		240,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		8 Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS)	Kali	0,00	0,00	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		144,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		9 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	%	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		10 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiat an	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab								
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023												
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19								
Tujuan 2.2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	PD	0,00	0	0,00		6.225.2 78.195	1,00		7.022.8 45.000	1,00		15.474. 207.597	2,00		16.283. 508.654	2,00		17.135. 136.157	6,00		62.140.9 75.603		
Sasaran 2.2.1: Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	PD	0,00	0	0,00		2.223.7 59.300	1,00		4.750.0 00.000	1,00		7.588.5 00.000	2,00		7.985.3 78.550	2,00		8.403.0 13.848	6,00		30.950.6 51.698		
Progra m:																										
4.02.4. 02.01.0 7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan KDH		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	Kegiat an	43,00	43,00	43,00		2.223.7 59.300	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	43,00		2.223.75 9.300	Inspekt orat	
4.02.4. 02.01.1 8	Program Peningkatan Akuntabilita s Penyelengga raan Urusan Pemerintah an								0			4.750.0 00.000			0			0			0			4.750.00 0.000	Inspekt orat	
		1	Oponi Penilaian SAKIP Kabupaten	Opini	CC	B	B		BB			-			-			-			B			Inspekt orat		
		2	Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP	WTP	WTP		WTP			-			-			-			WTP			Inspekt orat		
		3	Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD	Perse n	80,00	90,00	100,00		100,00			0,00			0,00			0,00			200,00			Inspekt orat		
6.01.02	Program Penyelengga raan Pengawasan								0			0			7.588.5 00.000			7.985.3 78.550			8.403.0 13.848			23.976.8 92.398	Inspekt orat	
		1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD	OPD	0,00	0,00	0,00		0,00			24,00			24,00			24,00			24,00			72,00		Inspekt orat

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
		Yang Telah Dilaksanakan																	
		2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	-	-	-		-		WTP		WTP		WTP		WTP		Inspekt orat	
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		90,00		245,00		Inspekt orat	
		4 Capaian SAKIP Kabupaten	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		Inspekt orat	
Sasaran 2.2.2: Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)	Sangat Renda h (50)	4.001.5 18.895	Sangat Renda h (0-60)	2.272.8 45.000	Sangat Renda h (0-60)	7.885.7 07.597	Rendah (61-70)	8.298.1 30.104	Renda h (61-70)	8.732.1 22.309	Rendah (61-70)	31.190.3 23.905	
Progra m:																			
4.05.4. 05.01.1 7	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah						3.744.7 92.950		1.779.7 70.000		0		0		0		5.524.56 2.950	Badan Kepega waan dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a	
		1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Perse n	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Kepega waan dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a	
		2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/S eminar/Lokakary a dan Tugas Belajar	Perse n	0,12	0,12	0,00		1,53		0,00		0,00		0,00		1,53		Badan Kepega waan dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a	
		3 Persentase ASN Yang Telah	Perse n	6,49	12,52	0,00		12,15		0,00		0,00		0,00		12,15		Badan Kepega	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural																waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi a
4.05.4.05.01.18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						256.725.945		493.075.000		0		0		0		749.800.945	Badan Kepega waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi a
		1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Perse n	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00		6,19		Badan Kepega waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi a
		2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Perse n	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Badan Kepega waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi a
		3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Perse n	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Kepega waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi a
5.03.02	Program Kepegawaia n Daerah						0		0		4.485.707.802		4.720.310.320		4.967.182.550		14.173.200.672	Badan Kepega waian dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Pengem banan Sumber Daya Manusi a
		1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		3,33		3,33		3,33		9,99		Badan Kepega waian dan Pengem banan Sumber Daya Manusi a
		2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem banan Sumber Daya Manusi a
		3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem banan Sumber Daya Manusi a
		4 Persentase ASN Berprestasi/Berin ovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		1,28		1,28		1,28		3,84		Badan Kepega waian dan Pengem banan Sumber Daya Manusi a
		5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		4,23		4,23		4,23		12,69		Badan Kepega waian dan Pengem banan Sumber

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Daya Manusi a
		6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		0,35		0,35		0,35		1,05		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		10 Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		11 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
5.04.02	Program Pengembang an Sumber Daya Manusia						0		0		3.399.9 99.795		3.577.8 19.784		3.764.9 39.759		10.742.7 59.338	Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Tekni s/Bimtek/Semina r/ Lokakarya dan Tugas Belajar	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		1,53		1,53		1,53		4,59		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
		3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		12,15		12,15		12,15		36,45		Badan Kepega waian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusi a
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan							116.444		56.545. 909.050		167.281		161.349		169.788		671.410. 623.710	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
				2.017	2018	Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
						Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
							.815.93 3				.823.82 5		.741.70 0		.333.20 2			
Tujuan 3.1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Perse n	83,63	84,63	85,63	112.895 .730.48 3	86,63	52.611. 859.050	87,63	164.261 .837.62 7	88,63	158.171 .810.22 4	89,63	166.444 .195.91 0	438,15	654.385. 433.294	
	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,81	70,31	71,00		71,31		71,81		72,31		72,81		359,24		
Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Perse n	83,63	84,63	85,63	109.825 .075.87 3	86,63	48.666. 475.150	87,63	157.905 .838.61 3	88,63	151.483 .392.46 2	89,63	159.405 .973.89 7	438,15	627.286. 755.995	
	2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Perse n	82,6	84	85,40		85,52		85,66		85,82		86,00		428,40		
	3	Cakupan Layanan Persampahan	Perse n	46,00	49	52,00		55,00		58,00		61,00		64,00		290,00		
	4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Perse n	2,00	9	16,00		20,00		25,00		32,00		40,00		133,00		
	5	Cakupan Layanan Air Bersih	Perse n	15,52	25,52	34,00		45,52		55,52		65,52		75,52		276,08		
Progra m:																		
1.03.1. 03.01.3 4	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan						46.629. 696.448		0		0		0		0		46.629.6 96.448	Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	19,74		0,00		0,00		0,00		0,00		19,74		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Pengair an
1.03.1. 03.01.1 5	Program pembangun an jalan dan jembatan						16.862. 454.000		15.294. 277.900		0		0		0		32.156.7 31.900	Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,50	0,50	1,00		0,50		0,00		0,00		0,00		1,50		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Perse n	13,00	15,89	0,00		15,69		0,00		0,00		0,00		15,69		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Perse n	13,00	15,89	0,00		11,66		0,00		0,00		0,00		11,66		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
		5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Perse n	46,35	46,35	0,00		1,43		0,00		0,00		0,00		1,43		Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
1.03.1. 03.01.1 6	Program pembangun an saluran	Persentase Saluran Drainase /Gorong-	Perse n	0,00	0,00	10,00	0	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	35,00	0	Dinas Pekerja an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	drainase/go rong-gorong	Gorong yang berfungsi																Umum, Binama rga dan Pengair an
1.03.1. 03.01.1 7	Program pembangun an turap/talud /bronjong	Persentase Turap/Talud/Bro njong yang berfungsi	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	6,25	700.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,25	700.000. 000	Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
1.03.1. 03.01.1 8	Program rehabilitasi/ pemeliharaa n jalan dan jembatan	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/peme liharaan Jalan dan Jembatan)	Perse n	83,66	84,10	87,80	16.119. 876.000	85,52	10.528. 187.250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	173,32	26.648.0 63.250	Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
1.03.1. 03.01.2 4	Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Perse n	24,10	30,06	34,22	12.328. 959.625	32,56	9.134.0 02.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	66,78	21.462.9 61.625	Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
1.04.1. 03.02.2 5	Program Pembangun an dan Pemeliharaa n Jalan Lingkungan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperb aiki	Km	47,81	55,61	15,79	9.425.1 47.600	4,00	3.850.0 00.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19,79	13.275.1 47.600	Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
2.05.2. 05.01.1 5	Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n	Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah	Unit	12,00	57 Unit kendara an operasio nal pengang kut sampah	63,00	4.792.2 24.860	69,00	2.986.8 25.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	132,00	7.779.04 9.860	Dinas Lingku ngan Hidup
1.03.1. 03.02.3 9	Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum						92.024. 900		4.723.1 83.000		0		0		0		4.815.20 7.900	Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
		1 Jumlah Sarana Prasarana Air	Unit	6,00	13,00	1,00		4,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Tata

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Bersih Komunal Yang Dibangun																Ruang dan Permuk iman
		2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	11,09	7,80	1,59		2,00		0,00		0,00		0,00		3,59		Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
1.03.1. 03.02.4 7	Program Pembangun an Saluran Drainase/G orong- Gorong Lingkungan	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	123,00	136,00	987,50	3.574.6 92.440	150,00	1.000.0 00.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.137,5 0	4.574.69 2.440	Dinas Tata Ruang dan Permuk iman
1.03.1. 03.01.5 0	Program Pembangun an Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	3,10	450.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,10	450.000. 000	Dinas Pekerja an Umum, Binama rga dan Pengair an
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						0		0		12.137. 750.000		12.772. 554.325		13.440. 558.916		38.350.8 63.241	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		1 Persentase Turap/Talud/Bro njong yang berfungsi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		6,25		6,25		6,25		18,75		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		35,06		37,56		40,06		112,68		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		3 Persentase Penelitian dan Perancangan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Pekerja an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan																Umum dan Penataa n Ruang
		4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		3,10		3,10		3,10		9,30		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						0		0		2.475.000.000		2.604.442.500		2.740.654.843		7.820.097.343	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
1.03.10	Program Penyelengga raan Jalan						0		0		45.362.271.060		47.734.717.836		50.231.243.579		143.328.232.475	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		1,50		1,30		1,00		3,80		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		15,48		15,30		15,16		45,94		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		10,15		8,78		7,54		26,47		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		1,43		1,43		1,43		4,29		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		85,66		85,52		86,82		258,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		18,20		18,20		18,20		54,60		Dinas Pekerja an Umum dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Penataa n Ruang
		8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		95,00		95,00		95,00		285,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		10 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		5,55		5,55		5,55		16,65		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		11 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		1,50		1,30		1,00		3,80		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		12 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		13 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
		14 Persentase Pengawasan dan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		35,06		37,56		40,06		112,68		Dinas Pekerja

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik																an Umum dan Penataa n Ruang
		15 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa n Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						0		0		20.494.227.748		5.566.075.859		5.857.181.626		31.917.485.233	Dinas Perumahan dan Kawasa n Permukiman
		1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		12,00		Dinas Perumahan dan Kawasa n Permukiman
		2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perumahan dan Kawasa n Permukiman
		3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Perumahan dan Kawasa n Permukiman
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	19.019.344.682	2,00	4.050.000.000	2,00	4.261.815.000	6,00	27.331.159.682	Dinas Perumahan dan Kawasa n

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Permuk iman
2.11.11	Program Pengelolaan Persampaha n	Persentase Layanan Persampahan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	9.503.8 38.769	100,00	9.942.5 52.790	100,00	10.462. 548.301	300,00	29.908.9 39.860	Dinas Lingku ngan Hidup
1.03.04	Program Pengembang an Sistem Dan Pengelolaan Persampaha n Regional	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	128.206 .400	2,00	300.000 .000	2,00	315.690 .000	6,00	743.896. 400	Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman
1.03.07	Program Pengembang an Permukima n	Jumlah Sarana dan Peasaran Permukiman Yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	15,00	5.876.7 02.048	15,00	22.240. 000.000	15,00	23.403. 152.000	45,00	51.519.8 54.048	Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman
1.04.02	Program Pengembang an Perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000,0 0	0	2.000,0 0	0	4.000,0 0		Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman
1.04.03	Program Kawasan Permukima n	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	1.533.2 41.906	2,00	1.913.4 30.458	4,00	2.013.5 02.881	8,00	5.460.17 5.245	Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	10,00	835.848 .328	10,00	1.700.0 00.000	10,00	1.788.9 10.000	30,00	4.324.75 8.328	Dinas Peruma han dan Kawasa n Permuk iman
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Ber- IMB Per satuan Bangunan	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.000,0 0	31.972. 937.946	2.000,0 0	33.645. 122.601	2.200,0 0	35.404. 762.513	6.200,0 0	101.022. 823.060	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					2017	2018	Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
																		n Ruang	
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan nya	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	15,00	8.566.4 69.726	15,00	9.014.4 96.093	15,00	9.485.9 54.238	45,00	27.066.9 20.057	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang	
Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,81	70,31	71,00	3.070.6 54.610	71,31	3.945.3 83.900	71,81	6.355.9 99.014	72,31	6.688.4 17.762	72,81	7.038.2 22.013	359,24	27.098.6 77.299	
		2	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Perse n	0,00	0	18,52		18,52		7,41		11,11		18,52		74,08		
Progra m:																			
2.05.2. 05.01.2 5	Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan						880.964 .143		100.000 .000		0		0		0		980.964. 143	Dinas Lingku ngan Hidup	
		1	Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA)	perus ahaan	24,00	24,00	24,00		24,00		0,00		0,00		0,00		48,00	Dinas Lingku ngan Hidup	
		2	Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum	Lokas i	2 titik	2,00	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		4,00	Dinas Lingku ngan Hidup	
		3	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air	Titik	67 titik	20,00	20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		40,00	Dinas Lingku ngan Hidup	
		4	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	Titik	10 titik	2,00	23,00		2,00		0,00		0,00		0,00		25,00	Dinas Lingku ngan Hidup	
2.05.2. 05.01.3 8	Program Pengendalia n Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA	Perus ahaan	24,00	24,00	0,00	0	24,00	325.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,00	325.000. 000	Dinas Lingku ngan Hidup	
1.03.1. 03.02.3 1	Program Perencanaa	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan	Perse n	0,00	0,00	0,00	857.030 .000	18,50	2.471.5 36.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18,50	3.328.56 6.500	Dinas Tata Ruang	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	n Tata Ruang	Menjadi Peraturan Daerah (%)																dan Permukiman
1.03.1. 03.02.3 2	Program Pemanfaatan Ruang						234.060.000		446.847.400		0		0		0		680.907.400	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		1 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Peran gkat Lunak	0,00	0,00	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Laporan	0,00	0,00	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		3 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)	Perse n	0,00	0,00	100,00		80,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		4 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau	Perse n	0,00	0,00	80,00		100,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2.05.2. 05.01.1 6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						813.875.200		152.000.000		0		0		0		965.875.200	Dinas Lingkungan Hidup
		1 Jumlah Target Pembinaan	perusahaan	30,00	30,00	30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Lingkungan Hidup
		2 Jumlah Dokumen Amdal	dokumen	16,00	16,00	16,00		16,00		0,00		0,00		0,00		32,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2. 05.01.1 7	Program Perlindungan dan Konservasi	Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air)	Perse n	0,00	25,00	25,00	143.868.467	25,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50,00	243.868.467	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Sumber Daya Alam	Yang Terjaga dan Terlindungi																
2.05.2. 05.01.2 6	Program Penyadaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan						140.856 .800		250.000 .000		0		0		0		390.856. 800	Dinas Lingku ngan Hidup
		1 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Kali	0,00	6,00	6,00		6,00		0,00		0,00		0,00		12,00		Dinas Lingku ngan Hidup
		2 Penerimaan Pengaduan	Kasus	4,00	0,00	4,00		1,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Lingku ngan Hidup
		3 Aplikasi SIPP	Buah	0,00	0,00	1,00		3,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Dinas Lingku ngan Hidup
		4 Adipura	Titik panta u (Keca mata n)	3,00	0,00	3,00		5,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Lingku ngan Hidup
		5 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	lokasi (sekol ah)	11,00	0,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Lingku ngan Hidup
2.05.2. 05.01.3 7	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	25,00	100.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	100.000. 000	Dinas Lingku ngan Hidup
2.11.02	Program Perencanaa n Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	250.000 .000	100,00	263.075 .000	100,00	276.833 .823	300,00	789.908. 823	Dinas Lingku ngan Hidup
2.11.03	Program Pengendalia n Pencemaran dan /atau	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	2.431.0 00.000	100,00	2.558.1 41.300	100,00	2.691.9 32.090	300,00	7.681.07 3.390	Dinas Lingku ngan Hidup

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Kerusakan Lingkungan Hidup																	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekarag aman Hayati (Kehati)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Doku men	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	100.000 .000	1,00	105.230 .000	1,00	110.733 .529	3,00	315.963. 529	Dinas Lingku ngan Hidup
2.11.05	Program Pengendalia n Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Target Pembinaan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	1.275.0 00.000	100,00	1.341.6 82.500	100,00	1.411.8 52.495	300,00	4.028.53 4.995	Dinas Lingku ngan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Lokas i	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	6,00	250.000 .000	6,00	263.075 .000	6,00	276.833 .823	18,00	789.908. 823	Dinas Lingku ngan Hidup
1.03.12	Program Penyelengga raan Penataan Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	11,10	2.049.9 99.014	11,10	2.157.2 13.962	7,40	2.270.0 36.253	29,60	6.477.24 9.229	Dinas Pekerja an Umum dan Penataa n Ruang
Tujuan 3.2: Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan		Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Perse n	25,00	30	35,00	3.549.0 85.450	40,00	3.934.0 50.000	45,00	3.019.9 86.198	50,00	3.177.9 31.476	55,00	3.344.1 37.292	225,00	17.025.1 90.416	
Sasaran 3.2.1: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		Jumlah Wisatawan	Orang	4.500,0 0	5.000	1.955. 778,00	3.549.0 85.450	2.260. 698,00	3.934.0 50.000	2.260. 698,00	3.019.9 86.198	2.515.0 00,00	3.177.9 31.476	2.515. 000,00	3.344.1 37.292	11.507. 174,00	17.025.1 90.416	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
Progra m:																			
3.02.2. 13.01.1 5	Program Pengembang an Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan		Event	8,00	8,00	8,00	2.073.2 97.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,00	2.073.29 7.500	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
3.02.2. 13.01.1 6	Program Pengembang an Destinasi Pariwisata	Jumlah ODTW Yang Ditata		ODT W	4,00	4,00	4,00	1.475.7 87.950	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	1.475.78 7.950	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
3.02.2. 13.01.1 8	Program Pengembang an Kepariwisat aan							0		680.000 .000		0		0		0		680.000. 000	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		1	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan	Perse n	11,11	11,11	0,00		11,11		0,00		0,00		0,00		11,11		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		2	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ tTersertifikasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		2,22		0,00		0,00		0,00		2,22		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
		3	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi	Perse n	0,00	0,00	0,00		2,22		0,00		0,00		0,00		2,22		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
																		ata dan Kebuda yaan	
3.02.2. 13.01.1 9	Program Promosi Wisata Daerah	Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselengg arakan		Perse n	20,00	20,00	0,00	0	30,00	2.304.0 50.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,00	2.304.05 0.000	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
3.02.2. 13.01.2 0	Program Pengembang an Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina		Perse n	0,00	0,00	0,00	0	40,00	950.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	950.000. 000	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						0		0		1.644.9 93.853		1.731.0 27.032		1.821.5 59.745		5.197.58 0.630	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
		1	Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00		13,33		15,56		17,78		46,67		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
		2	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44		4,44		6,67		15,55		Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
		3	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata	Perse n	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44		4,44		6,67		15,55		Dinas Kepem udaan, Olahrag	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
		Meningkat/ Tersertifikasi																a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40,00	479.994 .081	40,00	505.097 .771	50,00	531.514 .385	130,00	1.516.60 6.237	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
3.26.04	Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaata n dan Perlindunga n Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40,00	199.999 .872	40,00	210.459 .865	60,00	221.466 .916	140,00	631.926. 653	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
3.26.05	Program Pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40,00	694.998 .392	40,00	731.346 .808	40,00	769.596 .246	120,00	2.195.94 1.446	Dinas Kepem udaan, Olahrag a, Pariwis ata dan Kebuda yaan	
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa							21.298. 062.019		16.378. 408.500		26.762. 094.625		28.463. 119.337		30.152. 720.087		123.054. 404.568		
Tujuan 4.1: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Perse n	5,12	5,22	4,38	21.298. 062.019	2,42	16.378. 408.500	3,18	26.762. 094.625	3,66	28.463. 119.337	4,16	30.152. 720.087	17,80	123.054. 404.568	
		2	Indeks Gini	Poin	0,389	0,368	0,30		0,50		0,36		0,36		0,34		1,85		
		3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	10.941. 000	11.056. 000	11.819 .000,0 0		12.200 .500,0 0		13.000 .500,0 0		13.000. 500,00		13.150 .500,0 0		63.171. 000,00		
		4	Inflasi	Perse n	4,74	2,65	3,19		3,16		2,96		2,96		2,89		15,16		
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi		1	Laju UMKM Yang Dibina	Perse n	100,00	100	100,00	2.575.6 35.494	100,00	2.767.3 58.000	100,00	2.957.5 56.449	100,00	3.112.2 36.652	100,00	3.275.0 06.628	500,00	14.687.7 93.223	
		2	Laju Koperasi Aktif	Perse n	70,00	75	80,00				85,00				90,00				95,00
Progra m:																			

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
2.11.3. 06.01.1 9	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	750,00	800,00	8.454,0 0	497.460 .400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.454,0 0	497.460. 400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.11.3. 06.01.2 0	Program Pengembang an Kewirausah aan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	25,00	25,00	20,00	454.285 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	454.285. 000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.11.3. 06.01.2 1	Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						457.568 .880		0		0		0		0		457.568. 880	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	Unit	360,00	380,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15,00	15,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	Unit	100,00	105,00	105,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.11.3. 06.01.2 2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi	Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Perse n	20,00	25,00	5,00	753.745 .814	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	753.745. 814	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.11.3. 06.01.2 3	Program Pengembang an Kewirausah aan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi	Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan	Perse n	24,00	30,00	25,00	412.575 .400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	412.575. 400	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.11.3. 06.01.2 0	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi						0		25.000. 000		0		0		0		25.000.0 00	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Perindu strian
		1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi	Even	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	0,00	15,00	0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah Koperasi Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	0,00	30,00	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	0,00	50,00	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.11.3. 06.01.2 1	Program Penguatan						0		517.358 .000		0		0		0		517.358. 000	Dinas Koperas i Usaha

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
	Kelembagaa n Koperasi																	Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Laju Peningkatan Koperasi Sehat	Perse n	0,00	20,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Laju Peningkatan Koperasi Aktif	Perse n	0,00	40,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat	Perse n	0,00	0,00	0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik	Perse n	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		ngan dan Perindu strian
		5 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT	Perse n	0,00	20,00	0,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian
2.11.3.06.01.22	Program Peningkatan Daya Saing UMKM						0		2.175.000.000		0		0		0		2.175.000.000	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian
		1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	Even	0,00	10,00	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian
		2 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	0,00	20,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		3 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	0,00	15,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		4 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	0,00	30,00	0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.11.3.06.01.23	Program Pengembangan Kewirausahaan						0		50.000.000		0		0		0		50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Persentase UMKM Yang Terbina	Perse n	0,00	0,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	Unit	0,00	0,00	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	Unit	0,00	0,00	0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaa n Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	188.697 .797	150,00	198.566 .692	150,00	208.951 .730	450,00	596.216. 219	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	251.170 .188	150,00	264.306 .389	150,00	278.129 .613	450,00	793.606. 190	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	390.303 .821	150,00	410.716 .711	150,00	432.197 .195	450,00	1.233.21 7.727	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		dan Perindu strian
2.17.06	Program Pemberdaya an dan Perlindunga n Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	613.255 .421	150,00	645.328 .680	150,00	679.079 .369	450,00	1.937.66 3.470	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.17.07	Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)						0		0		915.179 .222		963.043 .095		1.013.4 10.249		2.891.63 2.566	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		180,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		40,00		50,00		120,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah UMKM Yang	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		150,00		150,00		400,00		Dinas Koperas

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan																i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Persentase UMKM Yang Terbina	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		180,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		5 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		40,00		50,00		120,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
2.17.08	Program Pengembang an UMKM						0		0		598.950 .000		630.275 .085		663.238 .472		1.892.46 3.557	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		5 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	UMK M	0,00	0,00	0,00		0,00		15,00		15,00		15,00		45,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
		6 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		7 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
Sasaran 4.1.2: Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan		1	Laju Pertumbuhan IKM	Perse	45,00	50	55,00	5.306.164.500	60,00	2.725.000.000	65,00	5.120.629.689	70,00	5.388.438.622	75,00	5.670.253.962	325,00	24.210.486.773	
		2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Perse	4,51	4,6	4,69		4,74		4,83		4,92		5,00		24,18		
Progr m:																			
3.06.3.06.01.23	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri						0		2.275.000.000		0		0		0		2.275.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	
		1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi	Pasar	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdag	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		ngan dan Perindu strian
		2 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar	Perse n	0,00	70,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional	Orang	0,00	0,00	0,00		200,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kawa san	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.06.3. 06.01.2 1	Program Peningkatan Efisiensi Perdaganga n Dalam Negeri	Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regul asi	1,00	1,00	1,00	194.860 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	194.860. 000	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
3.06.3. 06.01.2 1	Program Peningkatan Perdaganga n Luar Negeri						0		0		0		0		0		0	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor.	Even	0,00	0,00	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah Pelayanan Ekspor	Doku men SKA	0,00	0,00	0,00		13.000, 00		0,00		0,00		0,00		13.000, 00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.06.3. 06.01.2 2	Program Penataan Infrastruktu r Perdaganga n dan Usaha Serta Lembaga Perdaganga n						3.171.4 45.750		0		0		0		0		3.171.44 5.750	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem	Pasar	7,00	9,00	9,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Pengelolaan Konsep Modern																Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative	Unit	5,00	6,00	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	5,00	6,00	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.07.3. 06.01.1 7	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi						150.000 .000		0		0		0		0		150.000. 000	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Perindu strian
		1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	80,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	96,00	120,00	120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.07.3. 06.01.1 8	Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah						811.790 .000		0		0		0		0		811.790. 000	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	96,00	120,00	180,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	8,00	10,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Koperas i Usaha

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	4,00	5,00	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian
3.07.3.06.01.21	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial						555.730.000		0		0		0		0		555.730.000	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian
		1 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindu strian
		2 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desai n	80,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		ngan dan Perindu strian
3.07.3. 06.01.2 2	Program Pengembang an Teknologi dan Kebijakan Industri						422.338 .750		0		0		0		0		422.338. 750	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan	IKM	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM	IKM	0,00	0,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM	Unit	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
3.07.3. 06.01.2 1	Program Penumbuha n dan Pengembang an Industri Kecil dan Menengah						0		450.000 .000		0		0		0		450.000. 000	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Jumlah P2WKSS Terbina	Desa	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah	Kegiat an	0,00	0,00	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah GKM Industri Yang Terbina	Unit	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Jumlah lokasi Sarana/Prasaran a Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		5 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Desai n	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		6 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik	Desai n	0,00	0,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		7 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri	Buku	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		8 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Keramik Yang Terbina	Pengr ajin	0,00	0,00	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
																		Perindu strian	
		9 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah	Orang	0,00	0,00	0,00		8.000,0 0		0,00		0,00		0,00		8.000,0 0		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Doku men	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	300,00	314.337 .240	300,00	330.777 .078	300,00	348.076 .719	900,00	993.191. 037	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaganga n	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	354.000 .000	3,00	372.514 .200	3,00	391.996 .693	9,00	1.118.51 0.893	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	Pelak u Usah a	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	50,00	435.331 .747	50,00	458.099 .597	50,00	482.058 .206	150,00	1.375.48 9.550	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
3.30.05	Program Pengembang an Ekspor	Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta	Pelak u Usah a	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	403.596 .896	80,00	424.705 .014	80,00	446.917 .086	240,00	1.275.21 8.996	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindunga n Konsumen	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	Pelak u Usah a	0,00	0,00	11.111, 00	0	0,00	0	80,00	689.967 .648	80,00	726.052 .956	80,00	764.025 .526	11.351, 00	2.180.04 6.130	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Even	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	249.892 .029	2,00	262.961 .382	2,00	276.714 .262	6,00	789.567. 673	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.31.02	Program Perencanaa n dan Pembangun an Industri						0		0		2.473.5 16.535		2.602.8 81.450		2.739.0 12.150		7.815.41 0.135	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		2 Jumlah Desiminsasi	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	Buah	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
		4 Jumlah Perda	Buah	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian
3.31.03	Program Pengendalia n Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota						0		0		99.987. 609		105.216 .961		110.719 .808		315.924. 378	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
																		Perindu strian	
		1 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	Unit Usah a	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	
		2 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	Unit Usah a	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		90,00		Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	Buah	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	5,00	99.999. 985	5,00	105.229 .984	5,00	110.733 .512	15,00	315.963. 481	Dinas Koperas i Usaha Kecil dan Meneng ah Perdaga ngan dan Perindu strian	
Sasaran 4.1.3: Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif			Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trily un	65,00	70	62,70	1.216.4 34.803	60,00	322.000 .000	65,00	1.809.9 39.270	70,00	1.904.5 99.093	75,00	2.004.2 09.627	332,70	7.257.18 2.793	
Progra m:																			
2.12.2. 12.01.1 5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1,00	1,00	1,00	798.129 .709	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	798.129. 709	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		u Satu Pintu
		2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	4,00	4,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.12.2. 12.01.1 6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						418.305 .094		0		0		0		0		418.305. 094	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Perse n	80,00	90,00	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumla h	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Perse n	3,00	3,00	11,01		0,00		0,00		0,00		0,00		11,01		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.12.2. 12.01.1 9	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal						0		42.000. 000		0		0		0		42.000.0 00	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		1 Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	2,00	2,00	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	4,00	5,00	0,00		11,00		0,00		0,00		0,00		11,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.12.2. 12.01.2 0	Program Perbaikan Iklim Investasi						0		280.000 .000		0		0		0		280.000. 000	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang	Perse n	64,98	58,36	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penana man

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Dapat Dimonitoring Secara Berkala																Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Perse n	0,00	80,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		3 Persentase Pengaduan Perizinan	Perse n	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		4 Peningkatan Nilai IKM	Perse n	0,00	80,00	0,00		80,75		0,00		0,00		0,00		80,75		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembang an Iklim Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Invest or	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	360,00	124.996 .760	380,00	131.534 .090	390,00	138.413 .323	1.130,0 0	394.944. 173	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Event	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7,00	299.943 .813	7,00	315.630 .874	8,00	332.138 .370	22,00	947.713. 057	Dinas Penana man Modal dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal						0		0		349.999 .462		368.304 .434		387.566 .756		1.105.87 0.652	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
		2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	81,00		81,50		82,00		244,50		Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	484.999 .480	100,00	510.364 .953	100,00	537.057 .040	300,00	1.532.42 1.473	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad u Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	95,00	549.999 .755	100,00	578.764 .742	100,00	609.034 .138	295,00	1.737.79 8.635	Dinas Penana man Modal dan Pelayan an Terpad

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		u Satu Pintu
Sasaran 4.1.4: Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1	Skor Pola pangan Harapan	Poin	86,25	87,4	88,55	12.199. 827.222	89,70	10.028. 050.500	90,85	9.081.1 27.227	92,00	9.857.4 37.344	93,15	10.573. 960.925	454,25	51.740.4 03.218	
	2	Laju Produksi Pertanian (%)	Perse n	1,08	1,15	1,22		1,22		1,22		1,08		1,10		5,84		
	3	Laju Produksi Peternakan (%)	Perse n	3,00	3	3,00		2,00		2,00		2,00		2,00		11,00		
	4	Laju Produksi Perikanan (%)	Perse n	14,00	14	14,00		14,00		14,00		14,00		14,00		70,00		
Progra m:																		
3.01.3. 01.01.4 0	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						310.036 .000		0		0		0		0		310.036. 000	Dinas Perikan an dan Peterna kan
		1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0 0		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.000, 00	75.000, 00	75.000, 00	0,00		0,00		0,00		0,00		75.000, 00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		3	Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiat an	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
2.03.3. 03.01.2 1	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani						0		1.360.0 00.000		0		0		0		1.360.00 0.000	Dinas Perikan an dan Peterna kan
		1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor)	Ekor	50,00	50,00	640,00	300,00		0,00		0,00		0,00		940,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor)	Ekor	200.000 ,00	200.000 ,00	120.00 0,00	200.00 0,00		0,00		0,00		0,00		320.000 ,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		3	Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat :															Dinas Perikan an dan Peterna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		Daging (Ton)	Ton	2,00	2,00	65.093. 059,00		2,00		0,00		0,00		0,00		65.093. 061,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		Telur (Ton)	Ton	5,00	5,00	14.898. 638,00		5,00		0,00		0,00		0,00		14.898. 643,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		Susu (Liter)	Liter	1.100,0 0	1.100,0 0	1.100,0 0		1.100,0 0		0,00		0,00		0,00		2.200,0 0		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		Susu (Liter)	Liter	1.100,0 0	1.100,0 0	1.100,0 0		1.100,0 0		0,00		0,00		0,00		2.200,0 0		Dinas Perikan an dan Paterna kan
3.01.3. 01.01.2 1	Program Pengembang an Perikanan Tangkap						442.813 .150		315.905 .500		0		0		0		758.718. 650	Dinas Perikan an dan Paterna kan
		1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton)	Ton	1.023,7 4	1.100,8 1	1.183,5 9		1.272,0 0		0,00		0,00		0,00		2.455,5 9		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	225.000 ,00	375.000 ,00	350.00 0,00		450.00 0,00		0,00		0,00		0,00		800.000 ,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		3 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Kelom pok	14,00	18,00	52,00		48,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
3.01.3. 01.01.2 4	Program Pengembang an Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar						47.732. 000		50.000. 000		0		0		0		97.732.0 00	Dinas Perikan an dan Paterna kan
		1 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola	Jenis	3,00	3,00	3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		2 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola	Keca mata n	17,00	17,00	17,00		17,00		0,00		0,00		0,00		34,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		3 Jumlah KJA	Petak	21.000,00	21.000,00	45.073,00		4.000,00		0,00		0,00		0,00		49.073,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		4 Produksi Ikan KJA	Ton	0,00	0,00	91.529,63		12.000,00		0,00		0,00		0,00		103.529,63		Dinas Perikan an dan Paterna kan
3.01.3.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						62.337.500		240.000.000		0		0		0		302.337.500	Dinas Perikan an dan Paterna kan
		1 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	50,00	94,00	100,00		105,00		0,00		0,00		0,00		205,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		2 Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	Ton	0,00	0,00	1.037,15		90,00		0,00		0,00		0,00		1.127,15		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok)	kelom pok	11,00	12,00	19,00		14,00		0,00		0,00		0,00		33,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		4 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit)	Unit	1.160,00	1.161,00	1.170,00		1.172,00		0,00		0,00		0,00		2.342,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
3.01.3.01.01.20	Program Pengembang an Budidaya Perikanan						1.416.140.753		2.310.290.000		0		0		0		3.726.430.753	Dinas Perikan an dan Paterna kan
		1 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelom pok	109,00	115,00	118,00		121,00		0,00		0,00		0,00		239,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		2 Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	514.740 .000,00	555.958 .000,00	582.55 0.000,0 0		741.22 5.600,0 0		0,00		0,00		0,00		1.323.7 75.600, 00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		3 Produksi Ikan Konsumsi	Ton	92.501, 21	84.230, 00	93.286, 70		1.899,0 0		0,00		0,00		0,00		95.185, 70		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		4 Produksi Ikan Hias	Ekor	94.000, 00	117.010 ,00	95.880, 00		135.36 0,00		0,00		0,00		0,00		231.240 ,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		5 Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	5.000.0 00,00	5.075.0 00,00	6.323.4 94,00		5.880.0 00,00		0,00		0,00		0,00		12.203. 494,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		6 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	9.635,0 0	9.190,0 0	11.668, 00		9.190,0 0		0,00		0,00		0,00		20.858, 00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		7 Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Hekta r	4,00	4,00	8,70		4,00		0,00		0,00		0,00		12,70		Dinas Perikan an dan Paterna kan
3.03.3. 01.01.2 3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan						178.472 .650		330.845 .000		0		0		0		509.317. 650	Dinas Perikan an dan Paterna kan
		1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Orang	610,00	615,00	645,00		650,00		0,00		0,00		0,00		1.295,0 0		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan	Ekor	33.060, 00	34.060, 00	67.908, 00		36.817, 00		0,00		0,00		0,00		104.725 ,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		3 Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan	Kegiat an	5,00	5,00	3,00		5,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
3.03.3. 01.01.2 4	Program Peningkatan Produksi Peternakan						198.993 .000		475.000 .000		0		0		0		673.993. 000	Dinas Perikan an dan Paterna kan
		1 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi)	Lokas i	2,00	1,00	5,00		1,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		2 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	2,00	1,00	5,00		1,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		3 Budidaya Ternak Unggas	Lokas i	1,00	1,00	25,00		2,00		0,00		0,00		0,00		27,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		4 Produksi Hasil Ternak	Perse n	3	3	7,24		3,00		0,00		0,00		0,00		10,24		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		5 Jumlah Akseptor IB (Ekor)	Ekor	0,00	1.500,0 0	4.891,0 0		1.575,0 0		0,00		0,00		0,00		6.466,0 0		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		6 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan	Jenis	3,00	3,00	3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		7 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor)	Ekor	736,00	1.197,0 0	1.363,0 0		1.224,0 0		0,00		0,00		0,00		2.587,0 0		Dinas Perikan an dan Paterna kan
		8 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi)	Lokas i	1,00	1,00	2,00		1,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
2.03.3. 03.01.1 8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						1.505.9 92.000		0		0		0		0		1.505.99 2.000	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun	Unit	12,00	12,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pangan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Pertani an
		2 Terpenuhi Kebutuhan Beras	Ton	100.496 ,00	103.008 ,00	130.97 0,06		0,00		0,00		0,00		0,00		130.970 ,06		Dinas Pangan dan Pertani an
		3 Terpenuhi Kebutuhan Pangan Umbi- Umbian	Ton	36.544, 00	37.457, 00	23.568, 00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.568, 00		Dinas Pangan dan Pertani an
		4 Terpenuhi Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	91.360, 00	93.644, 00	182.63 2,80		0,00		0,00		0,00		0,00		182.632 ,80		Dinas Pangan dan Pertani an
2.03.3. 03.01.1 9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						0		1.375.0 00.000		0		0		0		1.375.00 0.000	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Perse n	150,86	152,00	0,00		151,64		0,00		0,00		0,00		151,64		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Perse n	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertani an
2.03.3. 03.01.2 0	Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Perse n	53,48	53,48	0,00	0	100,00	75.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	75.000.0 00	Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.2 8	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan						0		250.000 .000		0		0		0		250.000. 000	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Laju Produksi Padi	Perse n	2,63	2,66	0,00		2,50		0,00		0,00		0,00		2,50		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Laju Produksi Kacang-kacangan	Perse n	55,66	346,35	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		dan Pertani an
		3 Laju Produksi Umbi-umbian	Perse n	34,39	18,55	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		4 Persentase Kehilangan Hasil	Perse n	18,00	18,00	0,00		16,50		0,00		0,00		0,00		16,50		Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.1 9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/P erkebunan						6.048.2 99.169		0		0		0		0		6.048.29 9.169	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Produksi Padi	Ton	226.424 ,00	226.424 ,00	251.62 7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		251.627 ,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Produksi Palawija	Ton	133.294 ,00	133.294 ,00	30.484, 00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.484, 00		Dinas Pangan dan Pertani an
		3 Produksi Teh	Ton	5.164,0 0	5.164,0 0	4.955,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		4.955,0 0		Dinas Pangan dan Pertani an
		4 Produksi Cengkeh	Ton	337,00	337,00	483,00		0,00		0,00		0,00		0,00		483,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		5 Produksi Sayuran	Ton	45.459, 00	45.459, 00	182.63 2,80		0,00		0,00		0,00		0,00		182.632 ,80		Dinas Pangan dan Pertani an
		6 Produksi Buah-Buahan	Ton	115.468 ,00	115.468 ,00	145.14 9,20		0,00		0,00		0,00		0,00		145.149 ,20		Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.1 5	Program Peningkatan Kesejahtera an Petani						178.064 .900		25.000. 000		0		0		0		203.064. 900	Dinas Pangan dan Pertani an

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Perse n	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan	Perse n	0,00	30,92	30,92		25,00		0,00		0,00		0,00		55,92		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/P erkebunan	Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan	Kegiat an	2,00	2,00	2,00	55.471.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	55.471.100	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdaya an Penyuluh Pertanian/P erkebunan Lapangan						1.098.326.000		0		0		0		0		1.098.326.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh	Kegiat an	25,00	30,00	30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelom pok	430,00	450,00	450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		450,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.25	Program Pengembang an Agribisnis						593.226.500		0		0		0		0		593.226.500	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Penanaman Manggis	Pohon	1.075,00	1.155,00	4.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	27,00	30,00	4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Penanaman Cengkeh	Ha	1,70	1,75	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		4 Penanaman Ubi Kayu	Ha	1.460,00	1.610,00	1.087,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.087,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Penanaman Pala	Ha	1,50	1,50	350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		6 Penerapan Pertanian Organik	Ha	45,00	50,00	60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.29	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/P erkebunan						63.922.500		0		0		0		0		63.922.500	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	63,06	63,85	64,88		0,00		0,00		0,00		0,00		64,88		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Produktivitas Padi Ladang	Ton	37,18	37,64	32,57		0,00		0,00		0,00		0,00		32,57		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Produktivitas Jagung	Ku/Ha	52,75	53,02	56,20		0,00		0,00		0,00		0,00		56,20		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Produktivitas Ubi Kayu	Ku/Ha	198,57	199,16	193,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Produktivitas Cengkeh	Kg/Ha	250,79	253,29	456,00		0,00		0,00		0,00		0,00		456,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		6 Produktivitas Teh	Kg/Ha	1.106,16	1.117,22	1.507,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.507,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		7 Produktivitas Pala	Kg/Ha	319,47	322,66	546,00		0,00		0,00		0,00		0,00		546,00		Dinas Pangan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		dan Pertani an
3.03.3. 03.01.2 9	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perse n	25,00	25,00	0,00	0	25,00	2.193.5 50.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	2.193.55 0.000	Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.3 0	Program Pengembang an Perbenihan Pertanian	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	100,00	75.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	75.000.0 00	Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.3 1	Program Perlindunga n Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						0		100.000 .000		0		0		0		100.000. 000	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Persentase Pengendalian Serangan OPT	Perse n	5,00	5,00	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Perse n	5,00	5,00	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.3 2	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian						0		135.460 .000		0		0		0		135.460. 000	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan	Perse n	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Perse n	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertani an
3.03.3. 03.01.3 3	Program Produksi dan Mutu Hasil	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,23	717.000 .000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,23	717.000. 000	Dinas Pangan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)		Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
					2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
	Perkebunan dan Holtikultura																	Pertani an	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandiria n Pangan	Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	250.000 .000	100,00	263.075 .000	100,00	276.833 .823	300,00	789.908. 823	Dinas Pangan dan Pertani an	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						0		0		1.544.4 24.464		1.625.1 97.863		1.710.1 95.710		4.879.81 8.037	Dinas Pangan dan Pertani an	
		1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		151,47		151,47		151,11		454,04		Dinas Pangan dan Pertani an	
		2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		103,02		103,02		105,12		311,16		Dinas Pangan dan Pertani an	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	49.955. 366	100,00	52.568. 032	100,00	55.317. 340	300,00	157.840. 738	Dinas Pangan dan Pertani an	
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembang an Sarana Pertanian						0		0		1.324.9 88.311		1.394.2 85.200		1.467.2 06.316		4.186.47 9.827	Dinas Pangan dan Pertani an	
		1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pangan dan Pertani an	
		2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertani an	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		3 Produksi Padi	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		282.89 9,17		282.899 ,17		282.89 9,17		848.697 ,51		Dinas Pangan dan Pertani an
		4 Produksi Jagung	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		5.400,0 0		5.400,0 0		5.400,0 0		16.200, 00		Dinas Pangan dan Pertani an
		5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	Hekta r	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		6 Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya	kegiat an	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Hekta r	0,00	0,00	0,00		0,00		225,00		225,00		225,00		675,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		11,00		12,00		33,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	Hekta r	0,00	0,00	0,00		0,00		4,50		4,50		4,50		13,50		Dinas Pangan dan Pertani an
		10 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Pesert a	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		90,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		11 Peningkatan Luas Tanaman Durian	Hekta r	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		12 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Hekta r	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		13 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Pertani an
3.27.05	Program Pengendalia n dan Penanggula ngan Bencana Pertanian						0		0		150.000 .000		157.845 .000		166.100 .294		473.945. 294	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Persentase Pengendalian Serangan OPT	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertani an
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,23	100.000 .000	0,23	105.230 .000	0,24	110.733 .529	0,70	315.963. 529	Dinas Pangan dan Pertani an
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian						0		0		474.250 .000		499.053 .275		525.153 .761		1.498.45 7.036	Dinas Pangan dan Pertani an
		1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertani an
		2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertani an
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						0		0		771.623 .502		764.762 .154		778.063 .317		2.314.44 8.973	Dinas Perikan an dan PETERNA KAN
		1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		1.272,0 0		1.367,0 0		1.470,0 0		4.109,0 0		Dinas Perikan an dan PETERNA KAN
		2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking)	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		500.00 0,00		550.000 ,00		600.00 0,00		1.650.0 00,00		Dinas Perikan an dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Peterna kan
		3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	Kelompok	0,00	0,00	0,00		0,00		51,00		53,00		56,00		160,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						0		0		1.538.186.918		1.891.091.444		1.925.940.872		5.355.219.234	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		14.279,00		14.735,00		15.282,00		44.296,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		2 Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		889.470.720,00		1.067.364.864,00		190.837.837,00		2.147.673.421,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		3 Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		6.320.000,00		6.740.000,00		7.200.000,00		20.260.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		4 Produksi Ikan Hias	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		162.432,00		194.918,00		233.903,00		591.253,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		5 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Kelompok	0,00	0,00	0,00		0,00		124,00		127,00		130,00		381,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	17,00	50.000.000	17,00	155.272.500	17,00	258.377.950	51,00	463.650.450	Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						0		0		314.999.253		335.496.625		340.206.558		990.702.436	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Angka Konsumsi Ikan	kg/kep/th	0,00	0,00	0,00		0,00		28,76		28,76		28,76		86,28		Dinas Perikanan dan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		Peterna kan
		2 Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		95,00		100,00		105,00		300,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelom pok	0,00	0,00	0,00		0,00		15,00		16,00		17,00		48,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		4 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		110,00		115,00		120,00		345,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian						0		0		993.529 .320		1.078.2 16.750		1.097.7 81.085		3.169.52 7.155	Dinas Perikan an dan Peterna kan
		1 Produksi Hasil Ternak	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		2 Jumlah Akseptor IB	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		1.622,0 0		1.704,0 0		1.788,0 0		5.114,0 0		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		1.248,0 0		1.273,0 0		1.299,0 0		3.820,0 0		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul	Lokas i	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		5 Budidaya Ternak Unggas Unggul	Lokas i	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Lokas i	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		90,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina:	Produ sen	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		- Daging (Ton)	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		- Telur (Ton)	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		- Susu (Liter)	Liter	0,00	0,00	0,00		0,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		3.300,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	79.999.732	1,00	310.000.000	1,00	420.000.000	3,00	809.999.732	Dinas Perikan an dan Peterna kan
3.27.04	Program Pengendalia n Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						0		0		1.339.431.936		681.889.750		787.727.545		2.809.049.231	Dinas Perikan an dan Peterna kan
		1 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		70,00		70,00		70,00		210,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		2 Persentase Ternak Yang Diobati (Non Zoonosis) Dari Populasi Ternak	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan
		3 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Kasus	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikan an dan Peterna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
		4 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Keca mata n	0,00	0,00	0,00		0,00		17,00		17,00		17,00		51,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		5 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		38.195, 00		39.574, 00		40.952, 00		118.721 ,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		6 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Keca mata n	0,00	0,00	0,00		0,00		17,00		17,00		17,00		51,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		7 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) :																Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		- Daging	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		- Telur	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		- Susu	Liter	0,00	0,00	0,00		0,00		1.100,0 0		1.100,0 0		1.100,0 0		3.300,0 0		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian						0		0		99.738. 425		543.453 .751		654.322 .825		1.297.51 5.001	Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	Kelom pok	0,00	0,00	0,00		0,00		98,00		99,00		100,00		297,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan
		2 Jumlah Peternak Yang Terlatih	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Perikan an dan Petrerna kan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023					
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19	
		3	Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	Pengh argaa n	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		1,00		2,00		5,00		Dinas Perikan an dan Paterna kan
Sasaran 4.1.5: Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Status Indeks Desa Membangun	Statu s	Berkem bang	Berkem bang	Berke mbang	-	Berke mbang	536.000 .000	Berke mbang	7.792.8 41.990	Berkem bang	8.200.4 07.626	Berke mbang	8.629.2 88.945	Berkem bang	25.158.5 38.561	
Progra m:																			
2.07.2. 07.01.2 0	Program Pembangun an Kawasan Perdesaan		Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina	Perse n	28,00	28,00	42,00	0	57,00	75.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,00	75.000.0 00	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
2.07.2. 07.01.1 7	Program Pengembang an Kelembagaa n dan Potensi Desa							0		461.000 .000		0		0		0		461.000. 000	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
		1	Jumlah Bumdes Yang Dibina	Bumdes	172,00	172,00	175,00		177		0,00		0,00		0,00		352,00		Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
		2	Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan	Jenis	50,00	50,00	230,00		410		0,00		0,00		0,00		640,00		Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa		Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa	Perse n	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	2.844.5 00.000	100,00	2.993.2 67.350	100,00	3.149.8 15.232	300,00	8.987.58 2.582	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
2.13.04	Program Adminstras i Pemerintaha n Desa							0		0		3.349.1 76.620		3.524.3 38.557		3.708.6 61.464		10.582.1 76.641	Dinas Pember dayaan Masyar akat

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangun an Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satua n	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Realisasi 2019		2020		2021		2022		2023				
				2.017	2018	Kinerj a	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (7+9+11 +13+15)	18 = (8+10+12 +14+16)	19
																		dan Desa
		1 . Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
		2 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						0		0		1.599.165.370		1.682.801.719		1.770.812.249		5.052.779.338	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
		1 . Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
		2 . Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa	Perse n	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
JUMLAH							453.195.352.538		418.794.476.340		636.414.618.178		655.319.548.360		689.793.740.358		2.853.517.735.774	

Sumber: Bappelitbangda, 2020

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka pelaksanaan urusan bidang pemerintahan, telah mengalokasikan anggaran belanja daerahnya guna membiayai program Prioritas Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2019 dan 2020 menggunakan struktur anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Tahun 2021-2023 menggunakan struktur anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 7.1.

Pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, proyeksi tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 4,49% dari realisasi tahun 2019, hal ini disebabkan karena meluasnya dampak pandemi Covid-19 terhadap capaian perekonomian daerah, namun demikian untuk tahun 2021-2023 proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Purwakarta relatif cenderung meningkat.

Sedangkan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahannya, yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, telah diterapkan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai dasar dari Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan pagu indikatif dan target kinerja terukur, akan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Selanjutnya, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019 - 2023
Kabupaten Purwakarta

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4
5	BELANJA	2.280.992.249.903	2.314.420.694.662
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.299.276.559.424	1.348.209.291.463
5.1.1	Belanja Pegawai	946.283.109.940	936.601.760.956
5.1.2	Belanja Bunga	-	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	34.902.023.800	31.725.100.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.088.787.422	28.295.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	48.663.409.140	29.927.822.558
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	268.159.229.122	283.279.186.449
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	180.000.000	38.380.421.500
5.2	Belanja Langsung	981.715.690.479	966.211.403.199
5.2.1	Belanja Pegawai	62.968.890.784	89.696.015.841
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	589.458.089.594	636.289.184.343
5.2.3	Belanja Modal	329.288.710.101	240.226.203.015
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	981.715.690.479	966.211.403.199

Sumber: hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappelitbangda

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.402.606.475.670	2.528.262.794.347	2.660.490.938.492
5.1	BELANJA OPERASI	1.821.004.963.090	1.915.534.917.353	2.014.981.424.023
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.486.222.935	1.059.960.534.081	1.112.958.560.785
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.486.298.432	630.348.044.846	665.017.187.313
5.1.05	Belanja Hibah	210.018.324.647	221.002.283.026	232.560.702.428
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.014.117.076	4.224.055.399	4.444.973.496
5.2	BELANJA MODAL	236.566.549.189	250.379.785.018	264.942.817.283
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.308.117.319	2.428.831.854	2.555.859.760
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.638.575.434	64.884.833.915	68.282.679.873
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.856.053.969	108.461.708.910	114.372.872.046
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.709.221.192	64.023.974.464	68.597.612.932
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.054.581.275	10.580.435.875	11.133.792.672
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
5.4	BELANJA TRANSFER	331.034.963.391	348.348.091.976	366.566.697.187
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.033.445.893	31.604.195.113	33.257.094.517
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	301.001.517.498	316.743.896.863	333.309.602.669
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.402.606.475.670	2.528.262.794.347	2.660.490.938.492

Sumber: hasil proyeksi Bapenda, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappelitbangda

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
							981.715. 690.479		966.211. 403.199		2.394.025 .175.234		2.402.606 .475.670		2.528.262 .794.347		2.660.490 .938.492		9.539.287 .302.187	
1	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						634.063. 143.543		603.323. 328.878		1.330.801 .952.688		1.335.383 .254.536		1.405.223 .798.749		1.478.717 .003.423		5.456.710 .529.129	
2	URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						138.238. 615.704		150.366. 488.593		251.074.4 17.068		255.074.4 15.656		268.414.8 07.592		282.452.9 02.031		1.094.547 .229.576	
3	URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN						27.785.1 81.488		25.284.9 75.500		32.583.90 0.154		32.583.90 0.154		34.288.03 8.132		36.081.30 2.528		156.023.3 97.802	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTA HAN						118.474. 025.384		115.493. 474.786		184.645.6 63.567		184.645.6 63.567		194.302.6 31.772		204.464.6 59.414		817.380.4 54.923	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN						34.962.4 89.681		34.470.1 16.045		477.511.3 78.964		477.511.3 78.964		502.485.2 24.084		528.765.2 01.303		1.578.194 .410.077	
6	UNSUR PENGAWASA N URUSAN PEMERINTA HAN						4.703.48 5.374		6.509.91 6.000		23.346.90 8.550		23.346.90 8.550		24.567.95 1.867		25.852.85 5.750		84.981.11 7.541	
7	UNSUR KEWILAYAH AN						18.805.2 81.338		26.735.4 38.397		82.107.43 3.935		82.107.43 3.935		86.401.65 2.731		90.920.45 9.166		304.970.2 65.567	
8	UNSUR PEMERINTA HAN UMUM						4.683.46 7.967		4.027.66 5.000		11.953.52 0.308		11.953.52 0.308		12.578.68 9.420		13.236.55 4.877		46.479.89 7.572	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.01.0.00.0. 00.01.00	Dinas Pendidikan						193.733. 835.430		192.911. 983.620		715.783.4 46.648		715.783.4 46.648		753.218.9 20.908		792.612.2 70.471		2.648.260 .457.077	Dinas Pendidik an
1.01	Pendidikan						193.733. 835.430		192.911. 983.620		715.783.4 46.648		715.783.4 46.648		753.218.9 20.908		792.612.2 70.471		2.648.260 .457.077	Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	5.488.64 7.823	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.488.647. 823	Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.117.25 5.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.117.255. 750	Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	132.970. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	132.970.0 00	Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		9.899.42 8.420		0		0		0		0		9.899.428. 420	Dinas Pendidik an
		1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pendidik an
		2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pendidik an
		3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pendidik an
		4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pendidik an
		5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pendidik an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan																		
		6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	10,40	24,56	55,43	4.594.21 7.900	46,68	2.225.00 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102,11	6.819.217. 900	Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						118.243. 605.344		121.185. 700.000				0		0		0		239.429.3 05.344	Dinas Pendidik an
		1 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16		76,96						0,00		0,00		144,12		Dinas Pendidik an
		2 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	0,00	57,41	63,89		70,37		0,00		0,00		0,00		0,00		134,26		Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 18	Program Pendidikan Non Formal	Pesentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Persen	0,00	8,14	88,23	909.570. 200	24,42	425.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	112,65	1.334.570. 200	Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						6.554.91 0.783		10.969.9 50.000		0		0		0		0		17.524.86 0.783	Dinas Pendidik an
		1 Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%)	Persen	93,78	95,32	95,32		96,66		0,00		0,00		0,00		0,00		191,98		Dinas Pendidik an
		2 Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Persen	0,00	0,00	0,45		1,86		0,00		0,00		0,00		0,00		2,31		Dinas Pendidik an
1.01.1.01.01. 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan						52.268.7 07.630		43.509.0 92.000		0		0		0		0		95.777.79 9.630	Dinas Pendidik an
		1 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Persen	50,07	61,25	59,19		62,46		0,00		0,00		0,00		0,00		121,65		Dinas Pendidik an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	Persen	99,51	99,52	99,53		99,55		0,00		0,00		0,00		0,00		199,08		Dinas Pendidikan
		3 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Persen	99,72	99,72	99,72		99,76		0,00		0,00		0,00		0,00		199,48		Dinas Pendidikan
		4 Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Persen	18,91	17,25	18,45		19,75		0,00		0,00		0,00		0,00		38,20		Dinas Pendidikan
		5 Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik	Persen	31,47	32,00	31,91		36,64		0,00		0,00		0,00		0,00		68,55		Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%)	Persen	57,35	97,01	100,00	4.423.950.000	100,00	4.697.813.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	9.121.763.200	Dinas Pendidikan
																				Dinas Pendidikan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		521.222.333.263		521.222.333.263		548.482.261.293		577.167.883.558		1.646.872.478.114	Dinas Pendidikan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Pendidikan
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan						0		0		193.041.756.227		193.041.756.227		203.137.840.078		213.761.949.114		609.941.545.419	Dinas Pendidikan
		1 APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		68,00		68,00		69,36		79,87		217,23		Dinas Pendidikan
		2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		99,57		99,57		99,58		99,59		298,74		Dinas Pendidikan
		3 Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		99,54		99,54		99,55		99,56		298,65		Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		SD/MI/ Paket A Sederajat																		
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		99,73		99,73		99,74		99,75		299,22		Dinas Pendidikan
		5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan
		6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan
		7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidikan
		8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidikan
		9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pendidikan
		10 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		86,23		86,23		87,09		87,96		261,29		Dinas Pendidikan
		11 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		88,64		88,64		89,53		90,42		268,59		Dinas Pendidikan
		12 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		57,57		57,57		58,72		59,90		176,19		Dinas Pendidikan
		13 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		92,62		92,62		93,55		95,42		281,58		Dinas Pendidikan
		14 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		93,41		93,41		94,34		96,23		283,99		Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik																		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum						0		0		599.905.698		599.905.698		631.280.766		664.296.750		1.895.483.214	Dinas Pendidikan
		1 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pendidikan
		2 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dokumen Hasil Pengawasan	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	449.501.436	1,00	449.501.436	1,00	473.010.361	1,00	497.748.803	3,00	1.420.260.600	Dinas Pendidikan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	95,00	469.950.024	95,00	469.950.024	95,00	494.528.410	95,00	520.392.246	285,00	1.484.870.680	Dinas Pendidikan
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan						114.427.574.136		156.516.033.190		181.934.305.321		181.934.305.321		191.449.469.489		201.462.276.744		845.789.658.880	Dinas Kesehatan
1.02	Kesehatan						114.427.574.136		156.516.033.190		181.934.305.321		181.934.305.321		191.449.469.489		201.462.276.744		845.789.658.880	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	11.414.224.931	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	11.414.224.931	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.236.673.938	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.236.673.938	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	34,00	106.468.675	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	34,00	106.468.675	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	88.145.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	88.145.000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		13.522.292.900		0		0		0		0		13.522.292.900	Dinas Kesehatan
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	70,90	70,90	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kesehatan
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	97,34	97,34	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kesehatan
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	93,04	93,04	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kesehatan
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	97,34	97,34	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kesehatan
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kesehatan
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	85,00	88,33	100,00	4.439.396.328	90,00	3.616.092.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	190,00	8.055.488.328	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja	Persen	58,33	58,33	41,67	16.048.730.657	66,67	15.427.727.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	108,33	31.476.457.657	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.02.1.02.01. 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	77,92	80,52	76,67	175.000. 000	100,00	281.391. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	176,67	456.391.0 00	Dinas Kesehata n
1.02.1.02.01. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat						0		225.000. 000		0		0		0		0		225.000.0 00	Dinas Kesehata n
		1 Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	Persen	60,94	61,63	62,02		62,71		0,00		0,00		0,00		0,00		124,73		Dinas Kesehata n
		2 Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	Persen	64,87	65,25	65,80		65,84		0,00		0,00		0,00		0,00		131,64		Dinas Kesehata n
1.02.1.02.01. 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						1.186.22 3.670		1.510.99 9.000		0		0		0		0		2.697.222. 670	Dinas Kesehata n
		1 Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	68,72	70,13	71,35		74,35		0,00		0,00		0,00		0,00		145,70		Dinas Kesehata n
		2 Cakupan Pelayanan Bayi	Persen	98,35	98,43	99,90		98,80		0,00		0,00		0,00		0,00		198,70		Dinas Kesehata n
1.02.1.02.01. 21	Program Pengembanga n Lingkungan Sehat						211.345. 500		125.000. 000		0		0		0		0		336.345.5 00	Dinas Kesehata n
		1 Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Persen	75,73	75,79	78,10		75,94		0,00		0,00		0,00		0,00		154,04		Dinas Kesehata n
		2 Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Persen	54,43	55,61	58,25		58,28		0,00		0,00		0,00		0,00		116,53		Dinas Kesehata n
1.02.1.02.01. 34	Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	80,00	80,00	68,84	2.825.21 9.016	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	68,84	2.825.219. 016	Dinas Kesehata n
1.02.1.02.01. 22	Program Pencegahan dan						0		8.665.59 5.000		0		0		0		0		8.665.595. 000	Dinas Kesehata n

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Penanggulang an Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
		1 Persentase Bayi Dengan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	84,18	84,64	95,70		85,02		0,00		0,00		0,00		0,00		180,72		Dinas Kesechata n
		2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyakit Menular (TB paru, HIV)	Persen	81,99	82,48	68,84		83,92		0,00		0,00		0,00		0,00		152,76		Dinas Kesechata n
		3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	1,19	1,07	61,10		1,26		0,00		0,00		0,00		0,00		62,36		Dinas Kesechata n
1.02.1.02.01. 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						58.586.3 81.974		91.800.5 65.290		0		0		0		0		150.386.9 47.264	Dinas Kesechata n
		1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kesechata n
		2 Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kesechata n
1.02.1.02.01. 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskemas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskemas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik	Persen	38,46	46,15	61,16	9.752.39 7.056	53,85	11.635.8 57.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	115,01	21.388.25 4.056	Dinas Kesechata n
1.02.1.02.01. 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina	Persen	20,00	24,00	100,00	307.660. 000	43,20	520.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	143,20	827.660.0 00	Dinas Kesechata n
1.02.1.02.01. 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu						3.266.82 6.800		1.145.31 2.000		0		0		0		0		4.412.138. 800	Dinas Kesechata n

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Melahirkan dan Anak																			
		1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	98,68	99,06	100,53		99,09		0,00		0,00		0,00		0,00		199,62		Dinas Kesehatan
		2 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	94,95	70,13	103,20		72,69		0,00		0,00		0,00		0,00		175,89		Dinas Kesehatan
		3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	98,68	98,66	101,04		99,04		0,00		0,00		0,00		0,00		200,08		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.33	Program Promosi Kesehatan	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Persen	80,00	80,00	76,50	1.765.380.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	76,50	1.765.380.000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.35	Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya	Persen	75,00	80,00	90,00	3.017.500.591	90,00	1.597.385.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00	4.614.885.591	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.38	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan						0		1.157.817.000		0		0		0		0		1.157.817.000	Dinas Kesehatan
		1 Persentase Kunjungan Pemeriksaan Labkesda	Persen	70,00	75,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		165,00		Dinas Kesehatan
		2 Persentase Parameter Pemeriksaan Labkesda	Persen	76,70	80,58	84,47		88,35		0,00		0,00		0,00		0,00		172,82		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.39	Program Pengembangan Sumber	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku	Persen	78,90	80,17	83,54	0	85,23	5.285.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	168,78	5.285.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Daya Kesehatan																			
																				Dinas Kesehata n
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		52.290.51 1.742		52.290.51 1.742		55.025.30 5.506		57.903.12 8.984		165.218.9 46.232	Dinas Kesehata n
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Kesehata n
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		85,00		240,00		Dinas Kesehata n
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						0		0		117.336.5 78.498		117.336.5 78.498		123.473.2 81.553		129.930.9 34.179		370.740.7 94.230	Dinas Kesehata n
		1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75		75		80		230,00		Dinas Kesehata n
		2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90		95		95		280,00		Dinas Kesehata n
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	11.484.58 8.257	90	11.484.58 8.257	95	12.085.23 2.223	100	12.717.28 9.868	285,00	36.287.11 0.348	Dinas Kesehata n
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	92,21	597.635.6 51	92,21	597.635.6 51	94,81	628.891.9 96	100	661.783.0 47	287,01	1.888.310. 694	Dinas Kesehata n
1.02.05	Program Pemberdayaa n Masyarakat	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	63,30	224.991.1 73	63,30	224.991.1 73	63,89	236.758.2 11	65,16	249.140.6 66	192,35	710.890.0 50	Dinas Kesehata n

Kode	Bidang Urutan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Bidang Kesehatan																			
1.02.0.00.0. 00.02.00	RSUD Bayu Asih						125.918. 715.325		132.784. 684.000		176.301.5 00.207		176.301.5 00.207		185.522.0 68.668		195.224.8 72.859		815.751.8 41.059	RSUD Bayu Asih
1.02	Kesehatan						125.918. 715.325		132.784. 684.000		176.301.5 00.207		176.301.5 00.207		185.522.0 68.668		195.224.8 72.859		815.751.8 41.059	RSUD Bayu Asih
1.02.1.02.02. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	2.673.47 1.832	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.673.471. 832	RSUD Bayu Asih
1.02.1.02.02. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan dukungan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	0	100,00	3.033.02 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	3.033.020. 000	RSUD Bayu Asih
1.02.1.02.02. 33	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit						123.245. 243.493		129.751. 664.000		0		0		0		0		252.996.9 07.493	RSUD Bayu Asih
		1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60,00	60,00	69,94		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		139,94		RSUD Bayu Asih
		2 Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60,00	60,00	68,53		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		138,53		RSUD Bayu Asih
		3 Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60,00	60,00	65,88		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,88		RSUD Bayu Asih
1.02.1.02.02. 34	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD						0		0		0		0		0		0		0	RSUD Bayu Asih
		1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60,00	60,00	60,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130,00		RSUD Bayu Asih
		2 Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60,00	60,00	60,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130,00		RSUD Bayu Asih
		3 Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60,00	60,00	60,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130,00		RSUD Bayu Asih

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.02.1.02.02. 35	Program Penguatan Penunjang Pelayanan BLUD						0		0		0		0		0		0			RSUD Bayu Asih
		1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	70,00	75,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		165,00		RSUD Bayu Asih
		2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/ prasarana rumah sakit	Persen	60,00	60,00	70,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145,00		RSUD Bayu Asih
		3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		RSUD Bayu Asih
		4 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		RSUD Bayu Asih
		5 Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		RSUD Bayu Asih
		6 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	Persen	90,00	90,00	90,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		RSUD Bayu Asih
																				RSUD Bayu Asih
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		161.910.5 20.817		161.910.5 20.817		170.378.4 41.056		179.289.2 33.523		511.578.1 95.396	RSUD Bayu Asih
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		RSUD Bayu Asih
		2 Persentase pemenuhan penunjang	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		RSUD Bayu Asih

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		pelayanan perkantoran																		
		3 Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Opini	-	-	-		-		Madya		Madya		paripurn a		Paripur na		Paripurn a		RSUD Bayu Asih
		4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		78,00		78,00		80,00		85,00		243,00		RSUD Bayu Asih
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						0		0		14.390.97 9.390		14.390.97 9.390		15.143.62 7.612		15.935.63 9.336		45.470.24 6.338	RSUD Bayu Asih
		1 Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		2 Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		3 Cakupan Pelyanan Penunjang	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		80,00		85,00		255,00		RSUD Bayu Asih
		5 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		85,00		245,00		RSUD Bayu Asih
		6 Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		7 Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		85,00		240,00		RSUD Bayu Asih
		8 Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		78,00		78,00		80,00		85,00		243,00		RSUD Bayu Asih

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.03.0.00.0. 00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan						101.767. 085.299		48.792.2 94.350		90.246.67 3.979		0		0		0		240.806.0 53.628	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						101.767. 085.299		48.792.2 94.350		90.246.67 3.979		0		0		0		240.806.0 53.628	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.160.59 2.276	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.160.592. 276	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.524.53 0.300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.524.530. 300	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	34,00	94.444.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	34,00	94.444.00 0	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	36.680.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.680.00 0	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		4.115.82 7.200		0		0		0		0		4.115.827. 200	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
		1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan						16.862.454.000		15.294.277.900		0		0		0		0		32.156.731.900	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
		1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,50	0,50	1,00		0,50		0,00		0,00		0,00		0,00		1,50		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	13,00	15,89	0,00		15,69		0,00		0,00		0,00		0,00		15,69		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	13,00	15,89	0,00		11,66		0,00		0,00		0,00		0,00		11,66		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	46,35	46,35	0,00		1,43		0,00		0,00		0,00		0,00		1,43		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	10,00	0	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	35,00	0	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00	0	6,25	700.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,25	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	83,66	84,10	87,80	16.119.876.000	85,52	10.528.187.250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	173,32	26.648.063.250	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	72,85	379.813.300	18,20	200.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	91,05	579.813.300	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95,00	95,00	100,00	2.348.638.000	95,00	3.200.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	195,00	5.548.638.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	25,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	27,77	27,77	44,40	3.182.186.850	5,55	945.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	49,95	4.127.186.850	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,10	30,06	34,22	12.328.959.625	32,56	9.134.002.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	66,78	21.462.961.625	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.34	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan						46.629.696.448		0		0		0		0		0		46.629.696.448	Dinas Pekerjaan Umum, Binamar

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				ga dan Pengaira n
		1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	19,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19,74		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
		2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 35	Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	97,11	509.813. 000	20,00	1.750.00 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	117,11	2.259.813. 000	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 37	Program Penelitian dan Perancangan Pengembanga n Jaringan Irigasi	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	0,00	0,00	20,00	589.401. 500	20,00	700.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	1.289.401. 500	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 49	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gor ong-Gorong	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen	0,00	0,00	0,00	0	25,00	1.075.00 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	1.075.000. 000	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 50	Program Pembanguna n Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	0,00	0,00	0,00	0	3,10	450.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,10	450.000.0 00	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengaira n
1.03.1.03.01. 51	Program Pembanguna n Sistem Informasi/Da ta Base Irigasi	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	25,00	100.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	100.000.0 00	Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
1.03.1.03.01.52	Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00	0	32,56	200.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	32,56	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.03.01.53	Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00	0	25,00	300.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
																				Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		25.452.958.809		0		0		0	25.452.958.809		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		-		-		-		B		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		0,00		0,00		0,00		80,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						0		0		12.735.592.903		0		0		0	12.735.592.903		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
		1 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		6,25		0,00		0,00		0,00		6,25		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		35,06		0,00		0,00		0,00		35,06		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,10		0,00		0,00		0,00		3,10		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						0		0	2.474.997.364		0		0		0		2.474.997.364		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
		2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan						0		0		49.583.124.903		0		0		0		49.583.124.903	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		15,48		0,00		0,00		0,00		15,48		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		10,15		0,00		0,00		0,00		10,15		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
		5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,43		0,00		0,00		0,00		1,43		Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairaa n
		6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeli haraan Jalan dan Jembatan)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		85,66		0,00		0,00		0,00		85,66		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairaa n
		7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		18,20		0,00		0,00		0,00		18,20		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairaa n
		8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		95,00		0,00		0,00		0,00		95,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairaa n
		9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairaa n
		10 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		5,55		0,00		0,00		0,00		5,55		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairaa n
		11 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairaa n
		12 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengairan
		1 Tingkat Pemenuhan 3 Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairan
		1 Persentase 4 Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		35,06		0,00		0,00		0,00		35,06		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairan
		1 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Pekerjaa n Umum, Binamar ga dan Pengairan
1.03.1.04.2.10.02.00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						84.849.402.669		56.299.708.060		117.041.587.869		0		0		0		258.190.698.598	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						13.813.345.492		17.331.270.900		114.201.357.720		0		0		0		145.345.974.112	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	5.809.482.477	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.809.482.477	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	2.029.973.575	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.029.973.575	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.03.1.03.02. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	147.535. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	147.535.0 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	119.475. 400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	119.475.4 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		8.638.80 4.000		0		0		0		0		8.638.804. 000	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Sesuai Peraturan Perundang- undangan																		
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit)	Unit	1,00	1,00	0,00	904.854. 200	1,00	49.900.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	954.754.2 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (%)	Persen	0,00	0,00	0,00	857.030. 000	18,50	2.471.53 6.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18,50	3.328.566. 500	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 32	Program Pemanfaatan Ruang						234.060. 000		446.847. 400		0		0		0		0		680.907.4 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumla h Perang kat Lunak	0,00	0,00	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Lapora n	0,00	0,00	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		3 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)	Persen	0,00	0,00	100,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		4 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang	Persen	0,00	0,00	80,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Dinas Tata Ruang dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		yang dibina/ ditinjau																		Permuki man
1.03.1.03.02. 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji	Dokum en	60,00	77,00	60,00	44.217.5 00	60,00	1.000.00 0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	120,00	45.217.50 0	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 39	Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum						92.024.9 00		4.723.18 3.000		0		0		0		0		4.815.207. 900	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	6,00	13,00	1,00		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	11,09	7,80	1,59		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,59		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02. 47	Program Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong-Gorong Lingkungan	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	123,00	136,00	987,50	3.574.69 2.440	150,00	1.000.00 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.137,50	4.574.692. 440	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
																				Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		19.228.52 8.636		0		0		0		19.228.52 8.636	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		A		-		-		-		A		Dinas Tata Ruang dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Permuki man
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						0		0		20.479.061.977		0		0		0		20.479.061.977	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	10.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	18.769.340.537	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	18.769.340.537	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang	Meter	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	1.309.515.365	0,00	0	0,00	0	0,00	0	150,00	1.309.515.365	Dinas Tata Ruang dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	n Sistem Drainase	Dibangun / Diperbaiki																		Permuki man
1.03.07	Program Pengembang an Permukiman	Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	15,00	5.431.983. 938	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	5.431.983. 938	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2.000,0 0	38.263.55 4.784		0		0		0	2.000,00	38.263.55 4.784	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	15,00	8.361.462. 137		0		0		0	15,00	8.361.462. 137	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.11	Program Pengembang an Jasa Konstruksi	Persentase Peserta Pembinaan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	297.911.7 50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	297.911.7 50	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.12	Program Penyelenggar aan Penataan Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	11,10	2.049.998. 596		0		0		0	11,10	2.049.998. 596	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman						62.689.1 95.962		29.775.9 37.160		2.465.230 .038		0		0		0		92.465.13 3.122	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02. 15	Program Pengembang an Perumahan						872.442. 450		1.503.76 7.000		0		0		0		0		2.376.209. 450	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	987,00	1.345,00	1.840,0 0		2.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		3.840,00		Dinas Tata Ruang dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Permuki man
		2 Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumla h Menar a	1,00	1,00	2,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit)	Unit	0,00	3,00	1,00	616.241.317	2,00	656.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	1.272.241.317	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02.17	Program Pemberdayaa n Komunitas Perumahan/P ermukiman	Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina	BKM	192,00	192,00	48,00	185.445.000	100,00	112.955.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	148,00	298.400.000	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemd	Ha	1,80	2,10	4,20	495.071.600	4,20	400.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,40	895.071.600	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02.24	Program Keselamatan Gedung dan Bangunan						1.239.067.058		387.297.500		0		0		0		0		1.626.364.558	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Persen	19,60	20,00	20,73		20,80		0,00		0,00		0,00		0,00		41,53		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari)	Hari	5,00	5,00	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02.25	Program Pembanguna n dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperbai ki	Km	47,81	55,61	15,79	9.425.147.600	4,00	3.850.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19,79	13.275.147.600	Dinas Tata Ruang dan Permuki man

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.04.1.03.02. 26	Program Pembanguna n dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik	Unit	2.041,00	3.241,00	3.801,0 0	1.779.98 1.600	3.110,0 0	574.396. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.911,00	2.354.377. 600	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02. 26	Program Pemeliharaan Ornamen Kota	Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	489.737. 400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	489.737.4 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02. 28	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Yang Dibangun/ Dipelihara (Lokasi)	Lokasi	50,00	68,00	68,00	10.122.3 40.202	68,00	10.204.9 00.270	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	136,00	20.327.24 0.472	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02. 30	Program Pembanguna n dan Penataan Ruang Publik	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun.	Unit	16,00	10,00	15,00	36.556.9 07.760	15,00	11.436.6 21.390	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,00	47.993.52 9.150	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02. 31	Program Pengelolaan Ornamen Kota dan Reklame	Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Dikelola dan Dipelihara	Persen	100,00	100,00	0,00	0	100,00	125.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	125.000.0 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.1.03.02. 32	Program Pembanguna n dan Pengelolaan Lampu Hias						906.813. 975		525.000. 000		0		0		0		0		1.431.813. 975	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		1 Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik	Unit	2.050,00	1.822,00	1.500,0 0		811,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.311,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis	Unit	0,00	0,00	0,00		1.810,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		1.810,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	1.583.229. 932		0		0		0	2,00	1.583.229. 932	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	300.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	300.000.0 00	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	10,00	582.000.1 06	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,00	582.000.1 06	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
																				Dinas Tata Ruang dan Permuki man
2.10	Pertanahan						8.346.86 1.215		9.192.50 0.000		375.000.1 11		0		0		0		17.539.36 1.215	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
2.04.1.03.02. 17	Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan	Persen	0,00	0,00	100,00	0	100,00	500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	500.000	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
2.04.1.03.02. 19	Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						0		9.192.00 0.000		0		0		0		0		9.192.000. 000	Dinas Tata Ruang dan Permuki man

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	0,00	3,00	3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
		2 Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.1.03.02.41	Program Fasilitas Administrasi Umum Pertanahan	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	1,00	1,00	3,00	8.346.861.215	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	8.346.861.215	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
																				Dinas Tata Ruang dan Permuki man
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	75.000.111	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,00	75.000.111	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna n	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	300.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,00	300.000.000	Dinas Tata Ruang dan Permuki man
1.03.2.10.0.00.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						0		0		0		138.141.099.114		145.365.878.598		152.968.514.048		436.475.491.760	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						0		0		0		133.766.100.415		140.762.067.467		148.123.923.595		422.652.091.477	Dinas Pekerjaa n Umum dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Penataa n Ruang
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		0		30.896.65 2.919		32.512.54 7.867		34.212.95 4.120		97.622.15 4.906	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		-		B		B		B		B		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		80,00		85,00		90,00		255,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						0		0		0		12.137.75 0.000		12.772.55 4.325		13.440.55 8.916		38.350.86 3.241	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Persentase Turap/Talud/Bronj ong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		6,25		6,25		6,25		18,75		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		35,06		37,56		40,06		112,68		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		3,10		3,10		3,10		9,30		Dinas Pekerjaa n Umum dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Penataan Ruang
		5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						0		0		0		2.475.000.000		2.604.442.500		2.740.654.843		7.820.097.343	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0	2.000,00	31.972.937.946	2.000,00	33.645.122.601	2.200,00	35.404.762.513	6.200,00	101.022.823.060	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0	15,00	8.566.469.726	15,00	9.014.496.093	15,00	9.485.954.238	45,00	27.066.920.057	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan						0		0		0		45.362.271.060		47.734.717.836		50.231.243.579		143.328.232.475	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1,50		1,30		1,00		3,80		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Jumlah Jembatan Baru	Titik	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		15,48		15,30		15,16		45,94		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		4 Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		10,15		8,78		7,54		26,47		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1,43		1,43		1,43		4,29		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		85,66		85,52		86,82		258,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		18,20		18,20		18,20		54,60		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		95,00		95,00		95,00		285,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
		10 Persentase Sarana dan Prasarana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		5,55		5,55		5,55		16,65		Dinas Pekerjaa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kebinaamargaan yang berfungsi																		n Umum dan Penataan Ruang
		1 Panjang Jalan 1 Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1,50		1,30		1,00		3,80		Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Jumlah Jembatan 2 Yang Ditingkatkan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Tingkat Pemenuhan 3 Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Persentase 4 Pengawasan dan Pengendalian Kebinaamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		35,06		37,56		40,06		112,68		Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
		1 Persentase Bahan dan Alat 5 Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan n Jasa Konstruksi	Persentase Peserta Pembinaan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	305.019.750	100,00	320.972.283	100,00	337.759.133	300,00	963.751.166	Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0	11,10	2.049.999.014	11,10	2.157.213.962	7,40	2.270.036.253	29,60	6.477.249.229	Dinas Pekerjaaa n Umum dan Penataan Ruang
																				Dinas Pekerjaaa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				n Umum dan Penataan Ruang
2.10	Pertanahan						0		0		0		4.374.998 .699		4.603.811 .131		4.844.590 .453		13.823.40 0.283	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	0	2,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	74.999.55 9	100,00	78.922.03 6	100,00	83.049.65 8	300,00	236.971.2 53	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna n	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	4.299.999. 140	3,00	4.524.889. 095	3,00	4.761.540. 795	9,00	13.586.42 9.030	Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	0	1,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Penetapan Tanah Ulayat	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	0	1,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang di	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	0	1,00		Dinas Pekerjaa n Umum

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kelola Oleh Pemerintah Daerah																		dan Penataan Ruang
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
2.10.10	Program Penatagunaa n Tanah	Persentase Konflik Perpenatagunaan Yang Terfasilitasi	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00		Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan Ruang
1.04.1.03.0. 00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						0		0		0		69.314.27 9.494		72.939.41 6.312		76.754.14 7.785		219.007.8 43.591	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman						0		0		0		22.206.52 7.958		24.981.35 9.829		26.287.88 4.958		73.475.77 2.745	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		0		19.337.44 7.724		20.048.79 6.240		21.097.34 8.283		60.483.59 2.247	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		A		A		A		A		A		Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.04.02	Program Pengembanga n Perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.000,00	0	2.000,0 0	0	4.000,00		Dinas Perumah an dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Kawasan Permuki man
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	1.533.241. 906	2,00	1.913.430. 458	4,00	2.013.502. 881	8,00	5.460.175. 245	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	499.990.0 00	2,00	1.000.000. 000	4,00	1.052.300. 000	8,00	2.552.290. 000	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,00	835.848.3 28	10,00	1.700.000. 000	10,00	1.788.910. 000	30,00	4.324.758. 328	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokum en	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	319.133.1 31	5,00	335.823.7 94	5,00	654.956.9 25	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
																				Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						0		0		0		47.107.75 1.536		47.958.05 6.483		50.466.26 2.827		145.532.0 70.846	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem						0		0		0		20.494.22 7.748		5.566.075. 859		5.857.181. 626		31.917.48 5.233	Dinas Perumah an dan Kawasan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Penyediaan Air Minum																			Permuki man
		1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		12,00		Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
		2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun	Km	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
		3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.03.04	Program Pengembang an Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	128.206.4 00	2,00	300.000.0 00	2,00	315.690.0 00	6,00	743.896.4 00	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	19.019.34 4.682	2,00	4.050.000. 000	2,00	4.261.815. 000	6,00	27.331.15 9.682	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	150,00	1.589.270. 658	150,00	15.801.98 0.624	150,00	16.628.42 4.201	450,00	34.019.67 5.483	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.03.07	Program Pengembang an Permukiman	Jumlah Sarana dan Peasarana Permukiman Yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	5.876.702. 048	15,00	22.240.00 0.000	15,00	23.403.15 2.000	45,00	51.519.85 4.048	Dinas Perumah an dan Kawasan Permuki man
1.05.0.00.0. 00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan						8.653.61 1.430		10.925.8 70.000		18.223.83 6.317		0		0		0		37.803.31 7.747	Dinas Pemadam Kebakar an dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangk ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Penanggulan gan Bencana																			Penangg ulangan Bencana
1.05	Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						8.653.61 1.430		10.925.8 70.000		18.223.83 6.317		0		0		0		37.803.31 7.747	Dinas Pemada m Kebakar an dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	4.851.41 0.330	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.851.410. 330	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	2.343.32 9.350	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.343.329. 350	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	173.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	173.000.0 00	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	168.375. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	168.375.0 00	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	39.430.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	39.430.00 0	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.05.1.05.03. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		6.250.87 0.000		0		0		0		0		6.250.870. 000	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penanggg ulangan Bencana
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	41,00	56,00	0,00		71,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penanggg ulangan Bencana
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	30,00	50,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penanggg ulangan Bencana
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	70,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penanggg ulangan Bencana
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	80,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penanggg ulangan Bencana
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	80,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penanggg ulangan Bencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	80,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05.1.05.03.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat						0		90.000.000		0		0		0		0		90.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1 Persentase Gedung/Bangunan Yang Memiliki Proteksi Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		2 Persentase Sosialisasi dan Pelatihan / Simulasi Yang Akan Dilaksanakan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05.1.05.03.31	Program Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana DPKPB						0		744.580.000		0		0		0		0		744.580.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pemadam

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana																		Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		3 Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Asset Sarana dan Prasarana	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03.33	Program Penanggulang an Kebakaran dan Penyelamatan						0		2.815.420.000		0		0		0		0		2.815.420.000	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		3 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran dan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Penyelamatan Dalam Kondisi Baik																		ulangan Bencana
		4 Persentase Ketersediaan Data Kejadian Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 34	Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia dan Informasi						0		450.000. 000		0		0		0		0		450.000.0 00	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		1 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		2 Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 36	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan						0		400.000. 000		0		0		0		0		400.000.0 00	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		9,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		4 Persentase Tersedianya Layanan Puskalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		5 Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		6 Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05.1.05.03.37	Program Kedaruratan dan Logistik						0		175.000.000		0		0		0		0		175.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		1 Persentase Jumlah SDM Yang Aktif	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Dalam Penanganan Darurat Bencana																		Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		2 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		3 Persentase Kecepatan Response Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 38	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi						0		0		0		0		0		0		0	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		1 Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		2 Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.1.05.03. 28	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	0,00	0,00	100,00	1.078.06 6.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.078.066. 750	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				ulangan Bencana
																				Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		14.118.93 8.944		0		0		0		14.118.93 8.944	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		-		-		-		B		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
1.05.03	Program Penanggulang an Bencana						0		0		1.609.910. 558		0		0		0		1.609.910. 558	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana
		1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penangg ulangan Bencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	2.494.986.815	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.494.986.815	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja						9.653.722.406		9.183.036.000		20.909.093.862		20.909.093.862		22.002.639.470		23.153.377.515		84.901.869.253	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						9.653.722.406		9.183.036.000		20.909.093.862		20.909.093.862		22.002.639.470		23.153.377.515		84.901.869.253	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	5.022.872.006	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.022.872.006	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.226.742.050	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.226.742.050	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	956.868.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	956.868.500	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	403.015.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	403.015.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	45.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		8.208.036.000		0		0		0		0		8.208.036.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	64,00	64,00	0,00		65,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	80,00	0,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.05.1.05.01. 23	Program Pemeliharaan Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah	Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	566.135. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	566.135.0 00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01. 24	Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Trantibmas	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas	Jenis	4 Jenis dan 1 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	1.433.08 9.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 Jenis dan 2 Jenis	1.433.089. 850	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01. 42	Program Penegakan Perundang- Undangan Daerah						0		425.000. 000		0		0		0		0		425.000.0 00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	Persen	80,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01. 43	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat						0		150.000. 000		0		0		0		0		150.000.0 00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Pener tiban Trantibmas	Kegiata n	33,00	34,00	0,00		34,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan,	Kegiata n	7,00	7,00	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah																		
1.05.1.05.01.44	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	0,00	48,00	0,00	0	48,00	250.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	48,00	250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.45	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibmas						0		75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Diklat/ Bimtek Satpol PP Yang Diselenggarakan	Persen	70,00	80,00	0,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Persentase Anggota Satpol PP Yang Dibina	Persen	100,00	80,00	0,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.46	Program Perlindungan Masyarakat						0		75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	Persen	10,00	20,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	5,00	5,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Satuan Polisi Pamong Praja
																				Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		18.859.228.667		18.859.228.667		19.845.566.325		20.883.489.445		59.588.284.437	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0		0		2.049.865. 195		2.049.865. 195		2.157.073. 145		2.269.888. 070		6.476.826. 410	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas	Kegiata n	0,00	0,00	0,00		0,00		34,00		34,00		40,00		40,00		114,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		4 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiata n	0,00	0,00	0,00		0,00		8,00		8,00		8,00		8,00		24,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		5 Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh	%	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		72,00		192,00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada																		
		6 Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/ Bimtek	Jumla h	0,00	0,00	0,00		0,00		98,00		98,00		98,00		98,00		294,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		7 Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS)	%	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		80,00		100,00		240,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		8 Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS)	Kali	0,00	0,00	0,00		0,00		48,00		48,00		48,00		48,00		144,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		9 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	%	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Satuan Polisi Pamong Praja
		10 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiata n	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.0.00.0. 00.03.0000	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah						0		0		0		9.403.221 .058		9.895.009 .519		10.412.51 8.517		29.710.74 9.094	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
1.05	Ketenterama n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						0		0		0		9.403.221 .058		9.895.009 .519		10.412.51 8.517		29.710.74 9.094	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		0		5.641.932. 635		5.937.005. 711		6.247.511. 110		17.826.44 9.456	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		-		B		B		B		B		Badan Penangg ulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulang an Bencana						0		0		0		3.761.288.423		3.958.003.808		4.165.007.407		11.884.299.638	Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
		1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
		2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
		3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Penangg ulangan Bencana Daerah
1.05.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						0		0		0		17.234.798.935		18.136.178.920		19.084.701.077		54.455.678.932	Dinas Pemadama n Kebakar an dan Penyelamatan
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						0		0		0		17.234.798.935		18.136.178.920		19.084.701.077		54.455.678.932	Dinas Pemadama n Kebakar an dan Penyelamatan
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		0		12.926.099.202		13.602.134.190		14.313.525.808		40.841.759.200	Dinas Pemadama n Kebakara n dan Penyelamatan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		-		B		B		B		B		Dinas Pemadama n

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Kebakara n dan Penyelam atan
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemada m Kebakara n dan Penyelam atan
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	4.308.699.733	100,00	4.534.044.730	100,00	4.771.175.269	300,00	13.613.919.732	Dinas Pemada m Kebakara n dan Penyelam atan
1.06.2.08.0.00.01.00	Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak						6.416.329.259		7.258.414.658		12.275.815.364		12.275.815.364		12.917.840.508		13.593.443.566		52.461.843.355	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06	Sosial						3.406.058.063		5.102.219.658		10.736.508.596		10.736.508.596		11.298.027.996		11.888.914.860		42.431.729.173	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	547.032.291	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	547.032.291	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.06.1.06.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	285.001.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	285.001.000	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	53.765.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	53.765.000	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.101.370.158		0		0		0		0		1.101.370.158	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perlindu ngan Anak
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan	Persen	0,00	0,00	85,00	125.000.000	90,00	126.912.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	175,00	251.912.500	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	0,00	0,00	93,68	2.124.193.772	90,00	1.587.161.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	183,68	3.711.354.772	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				ngan Anak
1.06.1.06.01. 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang	0,00	0,00	14,00	21.100.0 00	20,00	100.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	34,00	121.100.0 00	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01. 21	Program Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lemba ga	0,00	0,00	24,00	249.966. 000	30,00	2.186.77 6.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	54,00	2.436.742. 000	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
																				Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		7.955.440. 776		7.955.440. 776		8.371.510. 330		8.809.340. 319		25.136.29 1.425	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Pelayanan Perkantoran																		Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.02	Program Pemberdayaa n Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lemba ga	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	30,00	281.712.5 39	30,00	281.712.5 39	30,00	296.446.1 05	30,00	311.950.2 36	90,00	890.108.8 80	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah migran yang terfasilitasi	Orang	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	10,00	12.294.01 8	10,00	12.294.01 8	10,00	12.936.99 5	10,00	13.613.60 0	30,00	38.844.61 3	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	85,00	979.964.9 35	85,00	979.964.9 35	90,00	1.031.217. 101	90,00	1.085.149. 755	265,00	3.096.331. 791	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						0		0		1.017.602. 588		1.017.602. 588		1.070.823. 203		1.126.827. 257		3.215.253. 048	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
		1 Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		100,00		280,00		Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	190,00	215.818.990	90,00	215.818.990	90,00	227.106.323	90,00	238.983.984	270,00	681.909.297	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	85,00	273.674.750	85,00	273.674.750	85,00	287.987.939	85,00	303.049.709	255,00	864.712.398	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
																				Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08	Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak						3.010.271.196		2.156.195.000		1.539.306.768		1.539.306.768		1.619.812.512		1.704.528.706		10.030.114.182	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01.23	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	0,00	0,00	63,88	942.194.000	90,00	1.125.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	153,88	2.067.194.000	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01. 24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	0,00	0,00	86,82	1.736.32 7.196	85,00	806.195. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	171,82	2.542.522. 196	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
1.06.1.06.01. 25	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembanguna n	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen	0,00	0,00	78,00	331.750. 000	85,00	225.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	556.750.0 00	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
																				Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08.02	Program Pengarusuta maan Gender dan Pemberdayaa n Perempuan	Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	85,00	319.333.3 87	85,00	319.333.3 87	85,00	336.034.5 23	90,00	353.609.1 28	260,00	1.008.977. 038	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	261.071.4 38	90,00	261.071.4 38	90,00	274.725.4 74	90,00	289.093.6 17	270,00	824.890.5 29	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08.04	Program Peningkatan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	557.234.3 21	90,00	557.234.3 21	90,00	586.377.6 76	100,00	617.045.2 28	280,00	1.760.657. 225	Dinas Sosial Pemberd

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kualitas Keluarga	Perlindungan Perempuan																		ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Data Gender Anak	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	75,00	99.853.15 6	75,00	99.853.15 6	75,00	105.075.4 76	75,00	110.570.9 23	225,00	315.499.5 55	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	65,00	268.181.5 23	65,00	268.181.5 23	66,00	282.207.4 17	67,00	296.966.8 65	198,00	847.355.8 05	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	55,00	33.632.94 3	55,00	33.632.94 3	60,00	35.391.94 6	65,00	37.242.94 5	180,00	106.267.8 34	Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak
2.07.3.32.0. 00.01.00	Dinas Ketenagakerj aan dan Transmigrasi						3.908.52 6.931		3.527.42 2.000		13.828.40 7.898		13.828.40 7.898		14.551.63 3.630		15.312.68 4.070		51.128.67 4.529	Dinas Ketenag akerjaan dan Transmi grasi
2.07	Tenaga Kerja						3.658.52 6.931		3.452.42 2.000		13.598.40 7.898		13.598.40 7.898		14.309.60 4.630		15.057.99 6.952		50.076.95 8.411	Dinas Ketenag akerjaan dan Transmi grasi
2.01.2.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.245.74 0.906	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.245.740. 906	Dinas Ketenaga kerjaan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Transmig rasi
2.01.2.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	940.540. 440	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	940.540.4 40	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.01.2.01.01. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	62.785.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	62.785.00 0	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.01.2.01.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.947.14 1.000		0		0		0		0		1.947.141. 000	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan																		Transmig rasi
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.01.2.01.01. 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						1.014.76 0.000		955.281. 000		0		0		0		0		1.970.041. 000	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		1 Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	41,27	46,66	60,65		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,65		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		2 Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	34,92	47,15	50,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		110,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.01.2.01.01. 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	42,56	40,38	50,00	136.195. 685	60,00	50.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	110,00	186.195.6 85	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.01.2.01.01. 17	Program Perlindungan dan Pengembanga n Lembaga Ketenagakerja an	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00	42,86	50,00	211.504. 900	65,00	300.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	115,00	511.504.9 00	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.01.2.01.01. 19	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	23,81	52,85	60,00	47.000.0 00	70,00	200.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	130,00	247.000.0 00	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
																				Dinas Ketenaga

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				kerjaan dan Transmig rasi
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		11.415.08 4.898		11.415.08 4.898		12.012.09 3.838		12.640.32 6.346		36.067.50 5.082	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja						0		0		1.368.323. 000		1.368.323. 000		1.439.886. 292		1.515.192. 346		4.323.401. 638	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		1 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		85,55		85,55		95,00		100,00		280,55		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		2 Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		70,00		70,00		80,00		90,00		240,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja						0		0		440.000.0 00		440.000.0 00		463.012.0 00		487.227.5 26		1.390.239. 526	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
		1 Persentase Calon Tenaga Kerja Yang	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		70,00		70,00		80,00		90,00		240,00		Dinas Ketenaga kerjaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Terdaftar Yang Ditempatkan																		dan Transmig rasi
		2 Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		85,00		95,00		255,00		Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	375.000.000	80,00	375.000.000	95,00	394.612.500	100,00	415.250.734	275,00	1.184.863.234	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
																				Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
3.32	Transmigrasi						250.000.000		75.000.000		230.000.000		230.000.000		242.029.000		254.687.118		1.051.716.118	Dinas Ketenag akerjaan dan Transmi grasi
3.08.2.01.01.18	Program Transmigrasi Regional	Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan	Persen	0,00	100,00	100,00	250.000.000	100,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	325.000.000	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
																				Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	52.615.000	100,00	55.366.765	300,00	157.981.765	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
3.32.03	Program Pembanguna n Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	31.569.000	100,00	33.220.059	300,00	94.789.059	Dinas Ketenaga kerjaan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Transmig rasi
3.32.04	Program Pengembang an Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	150.000.0 00	100,00	150.000.0 00	100,00	157.845.0 00	100,00	166.100.2 94	300,00	473.945.2 94	Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmig rasi
2.09.3.27.0. 00.01.00	Dinas Pangan dan Pertanian						11.040.0 41.810		6.581.28 6.000		21.868.88 5.723		21.868.88 5.723		23.012.62 8.446		24.216.18 8.914		86.719.03 0.893	Dinas Pangan dan Pertania n
2.09	Pangan						1.505.99 2.000		1.450.00 0.000		15.439.64 7.412		15.439.64 7.412		16.247.14 0.971		17.096.86 6.444		51.739.64 6.827	Dinas Pangan dan Pertania n
2.03.3.03.01. 18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						1.505.99 2.000		0		0		0		0		0		1.505.992. 000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun	Unit	12,00	12,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Terpenuhiya Kebutuhan Beras	Ton	100.496, 00	103.008, 00	130.970 ,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130.970, 06		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Terpenuhiya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian	Ton	36.544,0 0	37.457,0 0	23.568, 00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.568,0 0		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Terpenuhiya Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	91.360,0 0	93.644,0 0	182.632 ,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		182.632, 80		Dinas Pangan dan Pertanian
2.03.3.03.01. 19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						0		1.375.00 0.000		0		0		0		0		1.375.000. 000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap	Persen	150,86	152,00	0,00		151,64		0,00		0,00		0,00		0,00		151,64		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kebutuhan Beras Daerah																		dan Pertanian
		2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
2.03.3.03.01.20	Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Persen	53,48	53,48	0,00	0	100,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	75.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
																				Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		13.645.267.582		13.595.267.582		14.306.300.076		15.054.519.571		42.956.087.229	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		BB		BB		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	250.000.000	100,00	263.075.000	100,00	276.833.823	300,00	789.908.823	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						0		0		1.744.424.464		1.544.424.464		1.625.197.863		1.710.195.710		4.879.818.037	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		151,47		151,47		151,47		151,11		454,04		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kebutuhan Beras Daerah																		dan Pertanian
		2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		103,02		103,02		103,02		105,12		311,16		Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	49.955.366	100,00	49.955.366	100,00	52.568.032	100,00	55.317.340	300,00	157.840.738	Dinas Pangan dan Pertanian
																				Dinas Pangan dan Pertanian
3.27	Pertanian						9.534.049.810		5.131.286.000		6.429.238.311		6.429.238.311		6.765.487.475		7.119.322.470		34.979.384.066	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	937.971.025	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	937.971.025	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	522.317.616	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	522.317.616	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	36.451.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.451.000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.635.276.000		0		0		0		0		1.635.276.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	40,46	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	37,50	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75,00	80,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	69,74	81,59	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	5,75	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						178.064.900		25.000.000		0		0		0		0		203.064.900	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan	Persen	0,00	30,92	30,92		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55,92		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	2,00	2,00	2,00	55.471.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	55.471.100	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan						6.048.299.169		0		0		0		0		0		6.048.299.169	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Produksi Padi	Ton	226.424,00	226.424,00	251.627,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		251.627,00		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				dan Pertanian
		2 Produksi Palawija	Ton	133.294,00	133.294,00	30.484,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.484,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Produksi Teh	Ton	5.164,00	5.164,00	4.955,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.955,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Produksi Cengkeh	Ton	337,00	337,00	483,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		483,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Produksi Sayuran	Ton	45.459,00	45.459,00	182.632,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		182.632,80		Dinas Pangan dan Pertanian
		6 Produksi Buah-Buahan	Ton	115.468,00	115.468,00	145.149,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.149,20		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan						1.098.326.000		0		0		0		0		0		1.098.326.000	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh	Kegiatan	25,00	30,00	30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelompok	430,00	450,00	450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		450,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01.25	Program Pengembangan Agribisnis						593.226.500		0		0		0		0		0		593.226.500	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Penanaman Manggis	Pohon	1.075,00	1.155,00	4.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	27,00	30,00	4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Penanaman Cengkeh	Ha	1,70	1,75	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Penanaman Ubi Kayu	Ha	1.460,00	1.610,00	1.087,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.087,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Penanaman Pala	Ha	1,50	1,50	350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		6 Penerapan Pertanian Organik	Ha	45,00	50,00	60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01. 29	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan						63.922.5 00		0		0		0		0		0		63.922.50 0	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	63,06	63,85	64,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64,88		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Produktivitas Padi Ladang	Ton	37,18	37,64	32,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32,57		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Produktivitas Jagung	Ku/Ha	52,75	53,02	56,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56,20		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Produktivitas Ubi Kayu	Ku/Ha	198,57	199,16	193,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		193,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Produktivitas Cengkeh	Kg/Ha	250,79	253,29	456,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		456,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		6 Produktivitas Teh	Kg/Ha	1.106,16	1.117,22	1.507,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.507,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		7 Produktivitas Pala	Kg/Ha	319,47	322,66	546,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		546,00		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				dan Pertanian
3.03.3.03.01. 28	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan						0		250.000. 000		0		0		0		0		250.000.0 00	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Laju Produksi Padi	Persen	2,63	2,66	0,00		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		2,50		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Laju Produksi Kacang-kacangan	Persen	55,66	346,35	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Laju Produksi Umbi- umbian	Persen	34,39	18,55	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Persentase Kehilangan Hasil	Persen	18,00	18,00	0,00		16,50		0,00		0,00		0,00		0,00		16,50		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01. 29	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	25,00	25,00	0,00	0	25,00	2.193.55 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	2.193.550. 000	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01. 30	Program Pengembang an Perbenihan Pertanian	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	0,00	0,00	0,00	0	100,00	75.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	75.000.00 0	Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01. 31	Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						0		100.000. 000		0		0		0		0		100.000.0 00	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	5,00	5,00	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Perlindungan Lahan	Persen	5,00	5,00	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Dari Dampak Perubahan Iklim																		dan Pertanian
3.03.3.03.01. 32	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian						0		135.460. 000		0		0		0		0		135.460.0 00	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.03.3.03.01. 33	Program Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Hortikultura	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,23	717.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,23	717.000.0 00	Dinas Pangan dan Pertanian
																				Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembang an Sarana Pertanian						0		0		1.424.988. 397		1.324.988. 311		1.394.285. 200		1.467.206. 316		4.186.479. 827	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		3 Produksi Padi	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		282.899 ,17		282.899 ,17		282.899, 17		282.899 ,17		848.697, 51		Dinas Pangan dan Pertanian
		4 Produksi Jagung	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		5.400,0 0		5.400,0 0		5.400,00		5.400,0 0		16.200,0 0		Dinas Pangan dan Pertanian
		5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan	Hektar	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Produksi Padi Bebas Residu																		dan Pertanian
		6 Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya	kegiata n	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Hektar	0,00	0,00	0,00		0,00		225,00		225,00		225,00		225,00		675,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		11,00		12,00		33,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	Hektar	0,00	0,00	0,00		0,00		4,50		4,50		4,50		4,50		13,50		Dinas Pangan dan Pertanian
		10 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Peserta	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		30,00		90,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		11 Peningkatan Luas Tanaman Durian	Hektar	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		12 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Hektar	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		13 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	4.379.999. 914	100,00	4.380.000. 000	100,00	4.609.074. 000	100,00	4.850.128. 570	300,00	13.839.20 2.570	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian						0		0		150.000.0 00		150.000.0 00		157.845.0 00		166.100.2 94		473.945.2 94	Dinas Pangan dan Pertanian
		14 Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				dan Pertanian
		2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,23	0	0,23	100.000.000	0,23	105.230.000	0,24	110.733.529	0,70	315.963.529	Dinas Pangan dan Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian						0		0		474.250.000		474.250.000		499.053.275		525.153.761		1.498.457.036	Dinas Pangan dan Pertanian
		1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pangan dan Pertanian
2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup						25.069.370.445		24.419.141.200		42.833.851.316		42.833.851.316		45.074.061.740		47.431.435.169		184.827.859.870	Dinas Lingkun gan Hidup
2.11	Lingkungan Hidup						25.069.370.445		24.419.141.200		42.833.851.316		42.833.851.316		45.074.061.740		47.431.435.169		184.827.859.870	Dinas Lingkun gan Hidup
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	10.926.615.771	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	10.926.615.771	Dinas Lingkun an Hidup
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	6.619.766.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	6.619.766.700	Dinas Lingkun an Hidup
2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	399.046.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	399.046.800	Dinas Lingkun an Hidup
2.05.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persen	100,00	100,00	100,00	41.138.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	41.138.000	Dinas Lingkun an Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangk ang Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keuangan Secara Tepat dan Benar																		
2.05.2.05.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		19.800.3 16.200		0		0		0		0		19.800.31 6.200	Dinas Lingkung an Hidup
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Lingkung an Hidup
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Lingkung an Hidup
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Lingkung an Hidup
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Lingkung an Hidup
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Lingkung an Hidup
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 15	Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah	Unit	12,00	57,00	63,00	4.792.22 4.860	69,00	2.986.82 5.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	132,00	7.779.049. 860	Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						813.875. 200		152.000. 000		0		0		0		0		965.875.2 00	Dinas Lingkung an Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Jumlah Target Pembinaan	perusa haan	30,00	30,00	30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Lingkung an Hidup
		2 Jumlah Dokumen Amdal	dokum en	16,00	16,00	16,00		16,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32,00		Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Yang Terjaga dan Terlindungi	Persen	0,00	25,00	25,00	143.868. 467	25,00	100.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50,00	243.868.4 67	Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 25	Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan						880.964. 143		100.000. 000		0		0		0		0		980.964.1 43	Dinas Lingkung an Hidup
		1 Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA)	perusa haan	24,00	24,00	24,00		24,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48,00		Dinas Lingkung an Hidup
		2 Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum	Lokasi	2 titik	2,00	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Dinas Lingkung an Hidup
		3 Jumlah Titik Pantau Kualitas Air	Titik	67 titik	20,00	20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00		Dinas Lingkung an Hidup
		4 Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	Titik	10 titik	2,00	23,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 26	Program Penyadaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan						140.856. 800		250.000. 000		0		0		0		0		390.856.8 00	Dinas Lingkung an Hidup
		1 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Kali	0,00	6,00	6,00		6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,00		Dinas Lingkung an Hidup
		2 Penerimaan Pengaduan	Kasus	4,00	0,00	4,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Lingkung an Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Aplikasi SIPP	Buah	0,00	0,00	1,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Dinas Lingkung an Hidup
		4 Adipura	Titik pantau (Kecam atan)	3,00	0,00	3,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Lingkung an Hidup
		5 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	lokasi (sekola h)	11,00	0,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 27	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	jenis	5 jenis	0,00	4,00	214.025. 004	5,00	475.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9,00	689.025.0 04	Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 30	Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja	Adipura	Titik pantau	3,00	0,00	3,00	96.988.7 00	1,00	130.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	226.988.7 00	Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 37	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	0,00	0,00	0,00	0	25,00	100.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	100.000.0 00	Dinas Lingkung an Hidup
2.05.2.05.01. 38	Program Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA	Perusa haan	24,00	24,00	0,00	0	24,00	325.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,00	325.000.0 00	Dinas Lingkung an Hidup
																				Dinas Lingkung an Hidup
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		28.479.44 9.919		28.424.01 2.547		29.968.92 5.150		31.536.29 9.933		89.929.23 7.630	Dinas Lingkung an Hidup
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Lingkung an Hidup
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Lingkung an Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	250.000.0 00	100,00	250.000.0 00	100,00	263.075.0 00	100,00	276.833.8 23	300,00	789.908.8 23	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	2.431.000. 000	100,00	2.431.000. 000	100,00	2.558.141. 300	100,00	2.691.932. 090	300,00	7.681.073. 390	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokum en	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	100.000.0 00	1,00	100.000.0 00	1,00	105.230.0 00	1,00	110.733.5 29	3,00	315.963.5 29	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Target Pembinaan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	1.275.000. 000	100,00	1.275.000. 000	100,00	1.341.682. 500	100,00	1.411.852. 495	300,00	4.028.534. 995	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Lokasi	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	6,00	250.000.0 00	6,00	250.000.0 00	6,00	263.075.0 00	6,00	276.833.8 23	18,00	789.908.8 23	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	450.000.0 00	100,00	450.000.0 00	100,00	473.535.0 00	100,00	498.300.8 81	300,00	1.421.835. 881	Dinas Lingkung an Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan	Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	100.000.0 00	100,00	100.000.0 00	100,00	105.230.0 00	100,00	110.733.5 29	300,00	315.963.5 29	Dinas Lingkung an Hidup

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangk ang Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Hidup Untuk Masyarakat																			
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang ditangani	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	52.615.000	100,00	55.366.765	300,00	157.981.765	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	9.448.401.397	100,00	9.503.838.769	100,00	9.942.552.790	100,00	10.462.548.301	300,00	29.908.939.860	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						4.788.341.677		6.204.791.700		18.280.394.053		18.280.394.053		19.236.458.662		20.242.525.450		68.752.511.542	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						4.788.341.677		6.204.791.700		18.280.394.053		18.280.394.053		19.236.458.662		20.242.525.450		68.752.511.542	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	912.597.926	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	912.597.926	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	548.989.332	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	548.989.332	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	56.435.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	56.435.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.685.762.700		0		0		0		0		1.685.762.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependuduka n						3.270.319.419		0		0		0		0		0		3.270.319.419	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan :																		Dinas Kependu dukan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	75,00	80,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	75,00	80,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Tingkat Kesadaran Masyarakat	Persen	20,00	25,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.06.2.06.01. 17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n						0		4.257.65 4.000		0		0		0		0		4.257.654. 000	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan	Persen	80,00	80,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	Persen	0,00	75,00	85,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		185,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		3 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	0,00	50,00	75,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.06.2.06.01. 18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan						0		261.375. 000		0		0		0		0		261.375.0 00	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kependuduka n																			
		1 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	Persen	0,00	25,00	50,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	Persen	0,00	15,00	50,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		3 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	Persen	0,00	25,00	50,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
																				Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		16.165.753.204		16.165.753.204		17.011.222.096		17.900.909.012		51.077.884.312	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk						0		0		256.040.263		256.040.263		269.431.169		283.522.419		808.993.851	Dinas Kependu dukan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pencatat an Sipil
		1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:																		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan KIA	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Tingkat Kesadaran Masyarakat	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil						0		0		59.723.95 6		59.723.95 6		62.847.51 9		66.134.44 4		188.705.9 19	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :																		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		- Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		- Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n						0		0		1.798.876. 630		1.798.876. 630		1.892.957. 878		1.991.959. 575		5.683.794. 083	Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		3 Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		4 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
		5 Persentase Pemanfaatan Data	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Oleh Instansi/ Lembaga Pengguna																		dukan dan Pencatat an Sipil
		6 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil
2.13.0.00.0. 00.01.00	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa						6.684.05 8.257		2.858.02 4.000		17.891.65 0.042		17.891.65 0.042		18.827.38 3.339		19.812.05 5.488		66.073.17 1.126	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.13	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa						6.684.05 8.257		2.858.02 4.000		17.891.65 0.042		17.891.65 0.042		18.827.38 3.339		19.812.05 5.488		66.073.17 1.126	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	518.398. 789	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	518.398.7 89	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	150.717. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	150.717.0 00	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	16.590.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	16.590.00 0	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.447.02 4.000		0		0		0		0		1.447.024. 000	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	0,00	81,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	0,00	90,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	83,00	87,00	0,00		93,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina	Buah	192,00	192,00	192,00	189.586.150	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	192,00	189.586.150	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01.16	Program Pemberdayaa n Ekonomi Desa						162.966.700		300.000.000		0		0		0		0		462.966.700	Dinas Pemberd ayaan Masyara

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				kat dan Desa
		1 Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM	Desa	11,00	11,00	28,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM	Desa	118,00	118,00	132,00		134,00		0,00		0,00		0,00		0,00		266,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		3 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM	Desa	54,00	54,00	23,00		34,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		4 Persentase Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas)	Persen	0,00	20,00	20,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		5 Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Tiap Desa	Kegiata n	20,00	20,00	20,00		45,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		6 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina (LPM)	Persen	0,00	20,00	20,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		7 Jumlah Posyandu Yang Dibina	Unit	1.018,00	1.018,00	1.031,0 0		406,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.437,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Persen	6,00	7,00	7,00	5.125.51 4.393	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7,00	5.125.514. 393	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Membangun Desa																			
2.07.2.07.01. 17	Program Pengembang an Kelembagaan dan Potensi Desa						0		461.000. 000		0		0		0		0		461.000.0 00	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		1 Jumlah Bumdes Yang Dibina	Bumde s	172,00	172,00	175,00		177		0,00		0,00		0,00		0,00		352,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan	Jenis	50,00	50,00	230,00		410		0,00		0,00		0,00		0,00		640,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	520.285. 225	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	520.285.2 25	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 18	Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa						0		575.000. 000		0		0		0		0		575.000.0 00	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		1 Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa	Orang	183	183	183,00		183		0,00		0,00		0,00		0,00		366,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes	Orang	0,00	0,00	300,00		600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		900,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.07.2.07.01. 20	Program Pembanguna n Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina	Persen	28,00	28,00	42,00	0	57,00	75.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,00	75.000.00 0	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		9.798.808. 052		9.798.808. 052		10.311.28 5.713		10.850.56 5.956		30.960.65 9.721	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	2.844.500. 000	100,00	2.844.500. 000	100,00	2.993.267. 350	100,00	3.149.815. 232	300,00	8.987.582. 582	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa						0		0		300.000.0 00		300.000.0 00		315.690.0 00		332.200.5 87		947.890.5 87	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		1 Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa						0		0		3.349.176. 620		3.349.176. 620		3.524.338. 557		3.708.661. 464		10.582.17 6.641	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		1 Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						0		0		1.599.165. 370		1.599.165. 370		1.682.801. 719		1.770.812. 249		5.052.779. 338	Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		1 Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
		2 Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa
2.14.0.00.0. 00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						9.671.10 6.649		9.837.59 6.093		18.845.94 4.971		18.845.94 4.971		19.831.58 7.893		20.868.77 9.940		79.055.01 5.546	Dinas Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na
2.14	Pengendalian Penduduk						9.671.10 6.649		9.837.59 6.093		18.845.94 4.971		18.845.94 4.971		19.831.58 7.893		20.868.77 9.940		79.055.01 5.546	Dinas Pengend alian

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	dan Keluarga Berencana																			Pendudu k dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	732.391.704	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	732.391.704	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.056.293.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.056.293.400	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	84.840.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	84.840.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	36.550.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.550.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		2.404.239.093		0		0		0		0		2.404.239.093	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Berencana
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana						3.807.800.000		4.316.880.000		0		0		0		0		8.124.680.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Ratio Akseptor KB	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		2 Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	0,00	79,45	81,04		82,66		0,00		0,00		0,00		0,00		163,70		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		3 Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif)	Persen	0,00	45,00	45,01		45,02		0,00		0,00		0,00		0,00		90,03		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		4 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Orang	0,00	0,00	7.095,00		7.090,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.185,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		5 Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani	Persen	0,00	30,00	31,00		32,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		6 Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu Tahun	Persen	0,00	10,00	9,99		9,98		0,00		0,00		0,00		0,00		19,97		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		7 Persentase PUS Muda Usia Rendah	Persen	0,00	2,00	1,99		1,98		0,00		0,00		0,00		0,00		3,97		Dinas Pengenda lian

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th																		Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.08.2.08.01. 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja						235.000. 000		175.000. 000		0		0		0		0		410.000.0 00	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		1 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	Persen	0,00	35,00	40,00		45,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		2 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	Poin	0,00	35,00	33,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		3 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	0,00	35,00	40,00		45,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		4 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	0,00	35,00	33,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.08.2.08.01. 17	Program pelayanan kontrasepsi						94.300.0 00		150.000. 000		0		0		0		0		244.300.0 00	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Berengka
		1 Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	0,00	35,00	35,00		35,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3 Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekon)	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri						3.413.948.545		1.566.477.000		0		0		0		0		4.980.425.545	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1 Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500)	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan	Rasio	0,00	1 : 1	1 : 1		1 : 1		-		-		-		-		1 : 1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD)	Rasio	0,00	1 : 1	1 : 1		1 : 1		-		-		-		-		1 : 1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4 Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.21	Program Peningkatan Penanggulang an Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Jumlah Remaja Yang Dibina	Orang	125,00	150,00	150,00	59.983.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	150,00	59.983.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kader	384,00	576,00	576,00	150.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	576,00	150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.28	Program Ketahanan dan Pemberdayaa n Keluarga						0		100.000.000		0		0		0		0		100.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Kampung KB	Persen	0,00	30,00	45,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105,00		Dinas Pengendalian

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Persen	0,00	37,50	37,5		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77,50		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		3 Persentase Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS	Persen	0,00	60,00	60,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.08.2.08.01. 29	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil						0		150.000. 000		0		0		0		0		150.000.0 00	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		1 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang	0,00	536,00	562,80		590,94		0,00		0,00		0,00		0,00		1.153,74		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	Orang	0,00	541,00	568,05		596,45		0,00		0,00		0,00		0,00		1.164,50		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Orang	0,00	536,00	562,80		590,94		0,00		0,00		0,00		0,00		1.153,74		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Berencana
		4 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB	PUS	0,00	536,00	562,80		590,94		0,00		0,00		0,00		0,00		1.153,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Kelompok	0,00	536,00	562,80		590,94		0,00		0,00		0,00		0,00		1.153,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Keluarga	0,00	536,00	562,80		590,94		0,00		0,00		0,00		0,00		1.153,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.01.30	Program Pengendalian Penduduk						0		975.000.000		0		0		0		0		975.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Persen	0,00	60,00	65,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		135,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	0,00	65,00	70,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		8.133.774. 173		8.133.774. 173		8.559.170. 563		9.006.815. 183		25.699.75 9.919	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk						0		0		791.021.5 58		791.021.5 58		832.391.9 85		875.926.0 86		2.499.339. 629	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
		2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan	persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Pengenda lian

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE																		Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	84,00	9.358.098. 097	84,00	9.358.098. 097	86,00	9.847.526. 627	87,00	10.362.55 2.270	257,00	29.568.17 6.994	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.14.04	Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase partisipi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	563.051.1 43	100,00	563.051.1 43	100,00	592.498.7 18	100,00	623.486.4 01	300,00	1.779.036. 262	Dinas Pengenda lian Pendudu k dan Keluarga Berencan a
2.15.0.00.0. 00.01.00	Dinas Perhubungan						10.185.2 98.506		12.260.7 74.000		23.629.99 7.152		23.629.99 7.152		24.865.84 6.003		26.166.32 9.749		97.108.24 5.410	Dinas Perhubu ngan
2.15	Perhubungan						10.185.2 98.506		12.260.7 74.000		23.629.99 7.152		23.629.99 7.152		24.865.84 6.003		26.166.32 9.749		97.108.24 5.410	Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	5.146.94 8.356	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.146.948. 356	Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	865.390. 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	865.390.8 00	Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	199.184. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	199.184.0 00	Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	42.615.5 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	42.615.50 0	Dinas Perhubu ngan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kinerja dan Keuangan																			
2.09.2.09.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		7.730.77 4.000		0		0		0		0		7.730.774. 000	Dinas Perhubu ngan
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan						224.483. 350		0		0		0		0		0		224.483.3 50	Dinas Perhubu ngan
		1 Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	39,00	50,00	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		Dinas Perhubu ngan
		2 Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	1.363,00	1.378,00	1.378,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.378,00		Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 18	Program Pembanguna n Sarana dan						932.692. 350		1.600.00 0.000		0		0		0		0		2.532.692. 350	Dinas Perhubu ngan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Prasarana Perhubungan																			
		1 Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	100,00	100,00	4,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104,00		Dinas Perhubu ngan
		2 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrill) Pada Jalan Kabupaten	Jumla h	415,00	415,00	451,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		551,00		Dinas Perhubu ngan
		3 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Persen	0,00	0,00	2,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102,00		Dinas Perhubu ngan
		4 Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan Penyebrangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasia n Kendaraan Bermotor						1.014.63 9.150		400.000. 000		0		0		0		0		1.414.639. 150	Dinas Perhubu ngan
		1 Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR	Persen	59,00	91,00	105,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		205,00		Dinas Perhubu ngan
		2 Jumlah Dokumen Lalu Lintas	Jumla h	0,00	0,00	1,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		101,00		Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 21	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas						1.759.34 5.000		0		0		0		0		0		1.759.345. 000	Dinas Perhubu ngan
		1 Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	Unit	1.448,00	3.466,00	243,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		243,00		Dinas Perhubu ngan
		2 Panjang Marka Jalan	Meter	2.600,00	2.800,00	428,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		428,45		Dinas Perhubu ngan
		3 Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas	Hari/T ahun	22,00	22,00	28,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28,00		Dinas Perhubu ngan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.09.2.09.01. 23	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan						0		175.000. 000		0		0		0		0			Dinas Perhubu ngan
		1 Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
		2 Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 25	Program Pengembanga n dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumla h	29,00	29,00	0,00	0	100,00	2.180.00 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.180.000. 000	Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 26	Program Pengembanga n Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	100,00	25.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	25.000.00 0	Dinas Perhubu ngan
2.09.2.09.01. 27	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumla h	4,00	4,00	0,00	0	100,00	150.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	150.000.0 00	Dinas Perhubu ngan
																				Dinas Perhubu ngan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		18.340.17 0.115		18.340.17 0.115		19.299.36 1.012		20.308.71 7.593		57.948.24 8.720	Dinas Perhubu ngan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Perhubu ngan
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Dinas Perhubu ngan
2.15.02	Program Penyelenggara an Lalu	Presentase Prasarana Perlengkapan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	5.163.698. 194	90,00	5.163.698. 194	90,00	5.433.759. 610	90,00	5.717.945. 237	270,00	16.315.40 3.041	Dinas Perhubu ngan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang k at Daerah Penang g Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	lalulintas dan Angkutan jalan																		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	75,00	126.128.843	75,00	126.128.843	85,00	132.725.381	95,00	139.666.919	255,00	398.521.143	Dinas Perhubu ngan
2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika						27.170.700.553		19.723.866.000		26.811.510.231		26.811.510.231		28.213.752.216		29.689.331.457		131.609.160.457	Dinas Komuni kasi dan Informat ika
2.16	Komunikasi dan Informatika						25.822.658.553		18.985.756.000		25.912.110.576		25.912.110.576		27.267.313.959		28.693.394.479		126.681.233.567	Dinas Komuni kasi dan Informat ika
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	562.154.941	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	562.154.941	Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.117.220.100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.117.220.100	Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	74.120.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	74.120.000	Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.937.332.000		0		0		0		0		1.937.332.000	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor																		asi dan Informati ka
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01. 15	Program Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa						14.626.8 68.095		0		0		0		0		0		14.626.86 8.095	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan	Persen	90,00	95,00	95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	90,00	90,00	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Persentase Layanan Informasi Publik	Persen	90,00	90,00	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		4 Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah	Persen	90,00	95,00	95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.21	Program Pengembangan Aplikasi Telematika	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika	Kegiata n	8,00	8,00	8,00	1.288.090.970	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,00	1.288.090.970	Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.22	Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi	Kegiata n	8,00	8,00	8,00	8.154.204.447	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,00	8.154.204.447	Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.25	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik						0		9.926.884.000		0		0		0		0		9.926.884.000	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	62,00	92,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	66,00	92,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	97,00	98,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	79,00	93,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	75,00	85,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01.28	Program Pengembangan						0		5.974.870.000		0		0		0		0		5.974.870.000	Dinas Komunik asi dan Informati ka

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	n Teknologi Informatika																			asi dan Informati ka
		1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	50,00	95,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	50,00	95,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	77,00	90,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	46,00	99,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01. 29	Program Pengembang an Aplikasi Informatika						0		1.146.67 0.000		0		0		0		0		1.146.670. 000	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	88,00	98,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	54,00	92,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
																				Dinas Komunik asi dan Informati ka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		9.049.204. 722		9.049.204. 722		9.522.478. 129		10.020.50 3.735		28.592.18 6.586	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		BB		BB		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik						0		0		5.989.703. 839		5.989.703. 839		6.302.965. 350		6.632.610. 438		18.925.27 9.627	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.16.03	Program Aplikasi Informatika						0		0		10.873.20 2.015		10.873.20 2.015		11.441.87 0.480		12.040.28 0.306		34.355.35 2.801	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		5 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		6 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		7 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
																				Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.20	Statistik						1.348.04 2.000		299.510. 000		449.990.0 17		449.990.0 17		473.524.4 95		498.289.8 26		3.069.356 .338	Dinas Komuni kasi dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Informat ika
2.10.2.10.01. 19	Program Persandian dan Statistik	Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun	Dokum en	0,00	5,00	5,00	1.348.04 2.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	1.348.042. 000	Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.10.2.10.01. 26	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik						0		299.510. 000		0		0		0		0		299.510.0 00	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Dokum en	0,00	33,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Dokum en	68	90,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
																				Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.20.02	Program Penyelenggar aan Statistik Sektoral						0		0		449.990.0 17		449.990.0 17		473.524.4 95		498.289.8 26		1.421.804. 338	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
																				Dinas Komunik asi dan Informati ka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.21	Persandian						0		438.600.000		449.409.638		449.409.638		472.913.762		497.647.152		1.858.570.552	Dinas Komuni kasi dan Informat ika
2.10.2.10.01.27	Program Pengembang an Persandian Daerah						0		438.600.000		0		0		0		0		438.600.000	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	69,00	95,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informansi (PR)	Persen	65,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infromasi (PP)	Persen	78,00	98,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
																				Dinas Komunik asi dan Informati ka
2.21.02	Program Penyelenggar aan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						0		0		449.409.638		449.409.638		472.913.762		497.647.152		1.419.970.552	Dinas Komunik asi dan Informati ka
		1 Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan Informati ka
		3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Komunik asi dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Insiden Keamanan Informasi (PP)																		Informati ka
2.17.3.30.3. 31.01.00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustria n						11.455.9 78.633		9.568.87 6.000		22.025.41 0.757		22.025.41 0.757		23.177.33 9.740		24.389.51 4.608		90.617.11 9.738	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindus trian
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						2.575.63 5.494		2.767.35 8.000		16.904.78 1.068		16.904.78 1.068		17.788.90 1.118		18.719.26 0.646		58.755.93 6.326	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindus trian
2.11.3.06.01. 19	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	750,00	800,00	8.454,0 0	497.460. 400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.454,00	497.460.4 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindus trian
2.11.3.06.01. 20	Program Pengembang an Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	25,00	25,00	20,00	454.285. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	454.285.0 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindus trian
2.11.3.06.01. 21	Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro						457.568. 880		0		0		0		0		0		457.568.8 80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kecil Menengah																			Perdagangan dan Perindustrian
		1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	Unit	360,00	380,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15,00	15,00	15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	Unit	100,00	105,00	105,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.11.3.06.01.22	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Persen	20,00	25,00	5,00	753.745.814	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	753.745.814	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.11.3.06.01.23	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan	Persen	24,00	30,00	25,00	412.575.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,00	412.575.400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kompetitif Koperasi																			gan dan Perindust rian
2.11.3.06.01. 20	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi						0		25.000.0 00		0		0		0		0		25.000.00 0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi	Even	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		2 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	0,00	15,00	0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		3 Jumlah Koperasi Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	0,00	30,00	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		4 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	0,00	50,00	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
2.11.3.06.01. 21	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi						0		517.358. 000		0		0		0		0		517.358.0 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Laju Peningkatan Koperasi Sehat	Persen	0,00	20,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		2 Laju Peningkatan Koperasi Aktif	Persen	0,00	40,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		3 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat	Persen	0,00	0,00	0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		4 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik	Persen	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		5 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	0,00	20,00	0,00		7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
2.11.3.06.01.22	Program Peningkatan Daya Saing UMKM						0		2.175.000.000		0		0		0		0		2.175.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	Even	0,00	10,00	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		2 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	0,00	20,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		3 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	0,00	15,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		4 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	0,00	30,00	0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.11.3.06.01.23	Program Pengembangan Kewirausahaan						0		50.000.000		0		0		0		0		50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Persentase UMKM Yang Terbina	Persen	0,00	0,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	Unit	0,00	0,00	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	Unit	0,00	0,00	0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
																				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindust rian
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		13.947.22 4.619		13.947.22 4.619		14.676.66 4.466		15.444.25 4.018		44.068.14 3.103	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindust rian
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindust rian
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan Perindust rian
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	188.697.7 97	150,00	188.697.7 97	150,00	198.566.6 92	150,00	208.951.7 30	450,00	596.216.2 19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	251.170.1 88	150,00	251.170.1 88	150,00	264.306.3 89	150,00	278.129.6 13	450,00	793.606.1 90	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	390.303.8 21	150,00	390.303.8 21	150,00	410.716.7 11	150,00	432.197.1 95	450,00	1.233.217. 727	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
2.17.06	Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	150,00	613.255.4 21	150,00	613.255.4 21	150,00	645.328.6 80	150,00	679.079.3 69	450,00	1.937.663. 470	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
2.17.07	Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)						0		0		915.179.2 22		915.179.2 22		963.043.0 95		1.013.410. 249		2.891.632. 566	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		60,00		180,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		40,00		50,00		120,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		3 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		150,00		150,00		400,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		4 Persentase UMKM Yang Terbina	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		60,00		60,00		60,00		60,00		180,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		5 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		40,00		50,00		120,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
2.17.08	Program Pengembanga n UMKM						0		0		598.950.0 00		598.950.0 00		630.275.0 85		663.238.4 72		1.892.463. 557	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		1 Terasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Terasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Terasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		4 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		5 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		45,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		6 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindust rian
		7 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindust rian
																				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindust rian
3.30	Perdagangan						6.697.11 4.389		6.351.51 8.000		2.447.125 .560		2.447.125 .560		2.575.110 .227		2.709.788 .492		20.780.65 6.668	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan Perindust rian
3.06.3.06.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.743.65 7.539	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.743.657. 539	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Meneng ah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
3.06.3.06.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	796.336. 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	796.336.8 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.06.3.06.01. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	344.116. 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	344.116.5 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.06.3.06.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.596.51 8.000		0		0		0		0		3.596.518. 000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	40,46	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	37,50	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	25,50	50,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	45,50	60,00	0,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	50,00	75,00	0,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	75,00	75,00	0,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
3.06.3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						446.697.800		0		0		0		0		0		446.697.800	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		1 Jumlah Konsumen Yang Dibina	Orang	630,00	780,00	780,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Persentase Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK)	Persen	100,00	100,00	69,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	UTTP/ Tahun	600,00	600,00	780,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		4 Jumlah Pengukuran BDKT	BDKT/ Tahun	40,00	40,00	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		5 Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan Barang / Jasa	Pelaku Usaha	300,00	300,00	300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		6 Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa	Komoditi	50,00	60,00	60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		7 Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertama	Komoditi	25,00	25,00	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.06.3.06.01.21	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regulasi	1,00	1,00	1,00	194.860.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	194.860.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.06.3.06.01.21	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri						0		0		0		0		0		0		0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor.	Even	0,00	0,00	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		2 Jumlah Pelayanan Ekspor	Dokumen SKA	0,00	0,00	0,00		13.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.06.3.06.01.22	Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan						3.171.445.750		0		0		0		0		0		3.171.445.750	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern	Pasar	7,00	9,00	9,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative	Unit	5,00	6,00	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		4 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	5,00	6,00	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.06.3.06.01.22	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen						0		480.000.000		0		0		0		0		480.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pembinaan	Orang	0,00	200,00	0,00		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Jumlah Fasilitas Pengaduan Konsumen	Kasus	0,00	0,00	0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah Pelayanan Kemetrolagian	Unit	0,00	2.000,00	0,00		1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		4 Jumlah Pengawasan Alat UTTP dan BDKT	Unit	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		5 Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Kegiatan	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.06.3.06.01.23	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri						0		2.275.000.000		0		0		0		0		2.275.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi	Pasar	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar	Persen	0,00	70,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		3 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional	Orang	0,00	0,00	0,00		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa ngan dan Perindust rian
		4 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kawas an	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa ngan dan Perindust rian
																				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa ngan dan Perindust rian
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tersedianya Sarana Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dokum en	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	300,00	314.337.2 40	300,00	314.337.2 40	300,00	330.777.0 78	300,00	348.076.7 19	900,00	993.191.0 37	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa ngan dan Perindust rian
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	354.000.0 00	3,00	354.000.0 00	3,00	372.514.2 00	3,00	391.996.6 93	9,00	1.118.510. 893	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagaa ngan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	50,00	435.331.7 47	50,00	435.331.7 47	50,00	458.099.5 97	50,00	482.058.2 06	150,00	1.375.489. 550	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.30.05	Program Pengembanga n Ekspor	Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta	Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	403.596.8 96	80,00	403.596.8 96	80,00	424.705.0 14	80,00	446.917.0 86	240,00	1.275.218. 996	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	Pelaku Usaha	0,00	0,00	11.111, 00	0	0,00	0	80,00	689.967.6 48	80,00	689.967.6 48	80,00	726.052.9 56	80,00	764.025.5 26	11.351,0 0	2.180.046. 130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Even	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	2,00	249.892.0 29	2,00	249.892.0 29	2,00	262.961.3 82	2,00	276.714.2 62	6,00	789.567.6 73	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
																				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
3.31	Perindustria n						2.183.22 8.750		450.000. 000		2.673.504 .129		2.673.504 .129		2.813.328 .395		2.960.465 .470		11.080.52 6.744	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
3.07.3.06.01. 17	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi						150.000. 000		0		0		0		0		0		150.000.0 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	80,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
		2 Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	96,00	120,00	120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan Perindust rian
3.07.3.06.01. 18	Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah						811.790. 000		0		0		0		0		0		811.790.0 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		1 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	96,00	120,00	180,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		2 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	8,00	10,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		3 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	4,00	5,00	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.07.3.06.01. 19	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						75.000.0 00		0		0		0		0		0		75.000.00 0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Jumlah Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang	Jenis	8,00	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		2 Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG)	Unit	1,00	1,00	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan	Unit	1,00	1,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.07.3.06.01.20	Program Penataan Struktur Industri						168.370.000		0		0		0		0		0		168.370.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Lahan Kawasan IKM	Ha	4,80	6,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		2 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date	Jenis	8,00	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
3.07.3.06.01. 21	Program Pengembanga n Sentra- Sentra Industri Potensial						555.730. 000		0		0		0		0		0		555.730.0 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		2 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desain	80,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.07.3.06.01. 21	Program Penumbuhan dan Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah						0		450.000. 000		0		0		0		0		450.000.0 00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Jumlah P2WKSS Terbina	Desa	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		2 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah	Kegiatan	0,00	0,00	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah GKM Industri Yang Terbina	Unit	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		4 Jumlah lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		5 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Desain	0,00	0,00	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		6 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik	Desain	0,00	0,00	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		7 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri	Buku	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		8 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Keramik Yang Terbina	Pengra jin	0,00	0,00	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		9 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah	Orang	0,00	0,00	0,00		8.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
3.07.3.06.01. 22	Program Pengembanga n Teknologi dan Kebijakan Industri						422.338. 750		0		0		0		0		0		422.338.7 50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan Perindust rian
		1 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan	IKM	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenga h Perdagan gan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		2 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM	IKM	0,00	0,00	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM	Unit	0,00	0,00	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
																				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						0		0		2.473.516.535		2.473.516.535		2.602.881.450		2.739.012.150		7.815.410.135	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindustrian
		2 Jumlah Desiminsasi	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	Buah	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		4 Jumlah Perda	Buah	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota						0		0	99.987.609		99.987.609		105.216.961		110.719.808		315.924.378		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	Unit Usaha	0,00	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perindust rian
		2 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	Unit Usaha	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		30,00		90,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	Buah	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	5,00	99.999.985	5,00	99.999.985	5,00	105.229.984	5,00	110.733.512	15,00	315.963.481	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						3.790.441.312		9.585.216.000		14.917.647.829		14.917.647.829		15.697.840.810		16.518.837.885		60.509.983.836	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.18	Penanaman Modal						3.790.441.312		9.585.216.000		14.917.647.829		14.917.647.829		15.697.840.810		16.518.837.885		60.509.983.836	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.023.162.379	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.023.162.379	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	524.201.180	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	524.201.180	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	185.430.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	185.430.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	56.409.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	56.409.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		8.711.426.000		0		0		0		0		8.711.426.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	11,60	92,02	0,00		93		0,00		0,00		0,00		0,00		93,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	83,57	88,45	0,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Terpadu Satu Pintu
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75,00	80,00	0,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	84,10	83,46	0,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	85,79	64,87	0,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1,00	1,00	1,00	798.129.709	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	798.129.709	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Penanam an Moda

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	4,00	4,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01. 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						418.305. 094		0		0		0		0		0		418.305.0 94	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	80,00	90,00	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumla h	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	3,00	3,00	10,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,16		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penang g Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.12.2.12.01.18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan						784.803.750		0		0		0		0		0		784.803.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	79,50	80,00	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95,00	95,00	95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	90,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01. 19	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal						0		42.000.0 00		0		0		0		0		42.000.00 0	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		1 Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	2,00	2,00	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	4,00	5,00	0,00		11,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01. 20	Program Perbaikan Iklim Investasi						0		280.000. 000		0		0		0		0		280.000.0 00	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	64,98	58,36	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat	Persen	0,00	80,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Moda

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan																		dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		3 Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		4 Peningkatan Nilai IKM	Persen	0,00	80,00	0,00		80,75		0,00		0,00		0,00		0,00		80,75		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01. 21	Program Pengembanga n Layanan Perijinan Terpadu	Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	0,00	61,24	0,00	0	80,00	246.790. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	80,00	246.790.0 00	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01. 22	Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi	Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	0,00	80,00	0,00	0	100,00	305.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	305.000.0 00	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
																				Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		13.107.70 8.559		13.107.70 8.559		13.793.24 1.717		14.514.62 8.258		41.415.57 8.534	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		BB		BB		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		95,00		95,00		100,00		100,00		295,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembanga n Iklim Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	Investo r	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	360,00	124.996.7 60	360,00	124.996.7 60	380,00	131.534.0 90	390,00	138.413.3 23	1.130,00	394.944.1 73	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Event	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7,00	299.943.8 13	7,00	299.943.8 13	7,00	315.630.8 74	8,00	332.138.3 70	22,00	947.713.0 57	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal						0		0		349.999.4 62		349.999.4 62		368.304.4 34		387.566.7 56		1.105.870. 652	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Terpadu Satu Pintu
		1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00		90,00		95,00		100,00		285,00		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
		2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	81,00		81,00		81,50		82,00		244,50		Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	484.999.480	100,00	484.999.480	100,00	510.364.953	100,00	537.057.040	300,00	1.532.421.473	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	95,00	549.999.755	95,00	549.999.755	100,00	578.764.742	100,00	609.034.138	295,00	1.737.798.635	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu
2.19.2.22.3. 26.01.00	Dinas Kepemudaan , Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan						30.885.397.440		46.443.550.600		30.224.577.141		30.224.577.141		31.805.322.525		33.468.740.894		172.827.588.600	Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.19	Kepemudaan dan Olahraga						21.369.8 64.490		39.093.8 40.600		24.005.46 7.195		24.005.46 7.195		25.260.95 3.129		26.582.10 0.979			Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	3.207.92 9.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	3.207.929. 600	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	825.610. 600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	825.610.6 00	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	198.960. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	198.960.0 00	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	50.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	50.000.00 0	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	59.084.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	59.084.00 0	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kinerja dan Keuangan																			a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		5.346.90 9.000		0		0		0		0		5.346.909. 000	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan,

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan																		Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,00	0,00	10,56	722.641. 100	30,00	435.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,56	1.157.641. 100	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga						9.372.08 4.950		3.970.82 0.000		0		0		0		0		13.342.90 4.950	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	0,00	19,61	19,61		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39,61		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	0,00	11,00	4,73		11,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,73		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.13.2.13.01. 22	Program Pembinaan Kepemudaan	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,00	20,00	20,00	0	20,00	70.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	70.000.00 0	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 23	Program Pembanguna n dan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan	Persen	0,00	0,00	0,00	6.933.55 4.240	20,00	400.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	7.333.554. 240	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 24	Program pembanguna n dan / Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	0,00	0,00	20,00	0	20,00	75.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	75.000.00 0	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 26	Program Pengembanga n Kemitraan	Cakupan Wirausaha Muda	Persen	0,00	0,00	20,00	0	40,00	25.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	60,00	25.000.00 0	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 27	Program Pembanguna n dan/Peningka tan Sarana dan Prasaran Olahraga	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	50,00	57,14	64,29	0	64,29	28.771.1 11.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	128,57	28.771.11 1.600	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
																				Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang k at Daerah Penang g Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				a dan Kebuday aan
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		15.291.75 1.266		15.291.75 1.266		16.091.50 9.857		16.933.09 5.823		48.316.35 6.946	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.19.02	Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						0		0		1.196.026. 679		1.196.026. 679		1.258.578. 874		1.324.402. 550		3.779.008. 103	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		40,00		40,00		85,00		60,00		185,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kepemud aan,

Kode	Bidang Urutan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Cakupan Wirausaha Muda	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		60,00		70,00		180,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.19.03	Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						0		0		7.517.689. 250		6.593.389. 250		6.938.223. 508		7.301.092. 597		20.832.70 5.355	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Cakupan Pembinaan Olahraga;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		19,61		19,61		23,53		23,53		66,67		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		11,00		11,00		13,00		15,00		39,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		64,29		64,29		64,29		71,43		200,01		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.19.04	Program Pengembanga n Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	20,00	0	20,00	924.300.000	20,00	972.640.890	20,00	1.023.510.009	60,00	2.920.450.899	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
																				Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.22	Kebudayaan						5.966.447.500		2.260.660.000		3.199.123.748		3.199.123.748		3.366.437.920		3.542.502.623		18.335.171.791	Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan
2.16.2.13.01.17	Program Pengembanga n Nilai Budaya	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	Kelom pok	6,00	6,00	3,00	5.966.447.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	5.966.447.500	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.16.2.13.01.19	Program Pelestarian Budaya						0		425.000.000		0		0		0		0		425.000.000	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	88,89	88,89	88,89		88,89		0,00		0,00		0,00		0,00		177,78		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				a dan Kebuday aan
		2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Persen	0,00	0,00	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.16.2.13.01.20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						0		1.835.660.000		0		0		0		0		1.835.660.000	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	0,00	50,00	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	0,00	50,00	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Persentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	0,00	36,00	36,00		36,00		0,00		0,00		0,00		0,00		72,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
																				Dinas Kepemud aan,

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Olahraga , Pariwisat a dan Kebudaya aan
2.22.02	Program Pengembanga n Kebudayaan						0		0		2.124.210. 919		2.124.210. 919		2.235.307. 150		2.352.213. 714		6.711.731. 783	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		55,00		55,00		160,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		36,00		36,00		36,00		36,00		108,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.22.03	Program Pengembanga n Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	kelomp ok	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	75.000.00 0	3,00	75.000.00 0	3,00	78.922.50 0	3,00	83.050.14 7	9,00	236.972.6 47	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	50,00	500.000.0 00	50,00	500.000.0 00	50,00	526.150.0 00	50,00	553.667.6 45	150,00	1.579.817. 645	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						0		0		200.000.0 00		200.000.0 00		210.460.0 00		221.467.0 58		631.927.0 58	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		60,00		60,00		170,00		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuma n	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	20,00	299.912.8 29	20,00	299.912.8 29	20,00	315.598.2 70	20,00	332.104.0 59	60,00	947.615.1 58	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
																				Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				a dan Kebuday aan
3.26	Pariwisata						3.549.08 5.450		5.089.05 0.000		3.019.986 .198		3.019.986 .198		3.177.931 .476		3.344.137 .292		18.180.19 0.416	Dinas Kepemu daan, Olahraga , Pariwisa ta dan Kebuday aan
3.02.2.13.01. 15	Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan	Event	8,00	8,00	8,00	2.073.29 7.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8,00	2.073.297. 500	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
3.02.2.13.01. 16	Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata	Jumlah ODTW Yang Ditata	ODTW	4,00	4,00	4,00	1.475.78 7.950	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	1.475.787. 950	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
3.02.2.13.01. 18	Program Pengembanga n Kepariwisataa n						0		680.000. 000		0		0		0		0		680.000.0 00	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan	Persen	11,11	11,11	0,00		11,11		0,00		0,00		0,00		0,00		11,11		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata	Persen	0,00	0,00	0,00		2,22		0,00		0,00		0,00		0,00		2,22		Dinas Kepemud aan,

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Berstandar Baik/ tTersertifikasi																		Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi	Persen	0,00	0,00	0,00		2,22		0,00		0,00		0,00		0,00		2,22		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
3.02.2.13.01. 19	Program Promosi Wisata Daerah	Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggar akan	Persen	20,00	20,00	0,00	0	30,00	2.304.05 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,00	2.304.050. 000	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
3.02.2.13.01. 20	Program Pengembang an Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	0,00	0,00	0,00	0	40,00	950.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	950.000.0 00	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.13.2.13.01. 25	Program pembanguna n dan / Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	0,00	0,00	0,00	0	20,00	1.155.00 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	1.155.000. 000	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
																				Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						0		0		1.644.993. 853		1.644.993. 853		1.731.027. 032		1.821.559. 745		5.197.580. 630	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		1 Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		13,33		13,33		15,56		17,78		46,67		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		4,44		4,44		4,44		6,67		15,55		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
		3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		4,44		4,44		4,44		6,67		15,55		Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40,00	479.994.0 81	40,00	479.994.0 81	40,00	505.097.7 71	50,00	531.514.3 85	130,00	1.516.606. 237	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
3.26.04	Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40,00	199.999.8 72	40,00	199.999.8 72	40,00	210.459.8 65	60,00	221.466.9 16	140,00	631.926.6 53	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual																			a dan Kebuday aan
3.26.05	Program Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	40,00	694.998.3 92	40,00	694.998.3 92	40,00	731.346.8 08	40,00	769.596.2 46	120,00	2.195.941. 446	Dinas Kepemud aan, Olahraga , Pariwisat a dan Kebuday aan
2.23.2.24.0. 00.01.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n						4.445.69 9.479		5.104.10 4.000		12.801.68 7.274		12.801.68 7.274		13.471.21 5.518		14.175.76 0.090		49.998.46 6.361	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.23	Perpustakaa n						701.447. 450		1.418.46 0.000		11.801.70 0.918		11.801.70 0.918		12.418.92 9.875		13.068.43 9.908		39.408.97 8.151	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.17.2.18.01. 15	Program Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						701.447. 450		0		0		0		0		0		701.447.4 50	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	8.000,00	8.000,00	244.820 ,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		244.820, 00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun	Orang	39.500,0 0	39.500,0 0	15.239, 00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.239,0 0		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Titik	103,00	103,00	156,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		156,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		4 Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	215,00	215,00	417,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		417,00		Dinas Kearsipa n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perpusta kaan
		5 Jumlah Buku Perpustakaan	Buah	38.000,0 0	38.000,0 0	4.134,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.134,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.17.2.18.01. 16	Program Pengembanga n dan Pelestarian Perpustakaan						0		1.193.46 0.000		0		0		0		0		1.193.460. 000	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		2 Persentase Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		3 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum dan Sekolah	Persen	24,06	25,30	26,00		27,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		4 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca di Ruang Publik	Persen	0,00	20,00	20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		5 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,06		0,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,17		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.17.2.18.01. 17	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan						0		225.000. 000		0		0		0		0		225.000.0 00	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	0,00	81,50	4,90		4,70		0,00		0,00		0,00		0,00		9,60		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,00	57,00	22,90		18,60		0,00		0,00		0,00		0,00		41,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	0,00	5,00	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	0,00	0,00	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	47,00	79,00	49,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		149,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		6 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	0,00	100,00	0,00		16,50		0,00		0,00		0,00		0,00		16,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		7 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	0,00	0,00	19,80		16,50		0,00		0,00		0,00		0,00		36,30		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		8 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
																				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		10.445.305.291		10.445.305.291		10.991.594.758		11.566.455.164		33.003.355.213	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Kearsipan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Perpusta kaan
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan						0		0		1.305.907.006		1.305.907.006		1.374.205.942		1.446.076.912		4.126.189.860	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		28,00		28,00		29,30		30,40		87,70		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,15		0,15		0,19		0,23		0,57		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		5 Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		4,50		4,50		4,30		4,00		12,80		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		6 Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		15,70		15,70		13,50		12,00		41,20		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		10 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		14,50		14,50		12,40		11,00		37,90		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		11 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		14,00		14,00		12,40		11,00		37,40		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		12 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		7,00		17,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	50.488.621	100,00	50.488.621	100,00	53.129.175	100,00	55.907.832	300,00	159.525.628	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
																				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	Kearsipan						3.744.252.029		3.685.644.000		999.986.356		999.986.356		1.052.285.643		1.107.320.182		10.589.488.210	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18.2.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.301.997.373	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.301.997.373	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18.2.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.583.780.856	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.583.780.856	Dinas Kearsipan dan

Kode	Bidang Urutan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Prasarana Aparatur																			Perpusta kaan
2.18.2.18.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	59.900.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	59.900.000	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	11.087.300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	11.087.300	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01.06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	44.523.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	44.523.000	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		2.986.764.000		0		0		0		0		2.986.764.000	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	0,00	42,00	42,00		45,00		0,00		0,00		0,00		0,00		87,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	0,00	60,00	63,00		63,00		0,00		0,00		0,00		0,00		126,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	70,00	75,00	75,00		73,00		0,00		0,00		0,00		0,00		148,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persen	0,00	80,00	80,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00		Dinas Kearsipa n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan																		Perpusta kaan
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	80,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		165,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01. 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah						415.458. 500		0		0		0		0		0		415.458.5 00	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Perang kat Daerah	43,00	43,00	43,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		2 Persentase Akuisisi Arsip Daerah	Persen	25,00	25,00	96,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		96,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01. 17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkal a Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Depo Arsip Yang Mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap	Unit	4,00	4,00	4,00	144.908. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	144.908.0 00	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01. 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah	Kegiata n	2,00	2,00	2,00	182.597. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	182.597.0 00	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.18.2.18.01. 19	Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembanga n Kearsipan						0		270.000. 000		0		0		0		0		270.000.0 00	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	100,00	95,70	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	80,05	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,15	1,75	1,75		1,75		0,00		0,00		0,00		0,00		3,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	0,60	0,05	22,00		27,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5 Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	59,80	42,70	22,90		4,20		0,00		0,00		0,00		0,00		27,10		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18.2.18.01.20	Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan						0		428.880.000		0		0		0		0		428.880.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	15,20	21,70	26,10		30,40		0,00		0,00		0,00		0,00		56,50		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2 Persentase Arsip Aktif, In Aktif dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:																		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		- Arsip Aktif	Persen	50,00	60,00	20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		- Arsip In Aktif	Persen	50,00	46,7	20,00		37,80		0,00		0,00		0,00		0,00		57,80		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		- Arsip Vital	Persen	67,00	75,00	20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Persentase Penyusutan Arsip	Persen	0,00	0,00	20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	0,00	0,00	70,00		72,00		0,00		0,00		0,00		0,00		142,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		5 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	1,83	1,83	19,99		19,99		0,00		0,00		0,00		0,00		39,98		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
																				Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip						0		0		899.986.611		899.986.611		947.055.911		996.586.935		2.843.629.457	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,75		1,75		1,75		1,75		5,25		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
		4 Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,20		3,20		4,70		3,70		11,60		Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip						0		0		99.999.745		99.999.745		105.229.732		110.733.247		315.962.724	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		39,10		39,10		39,10		43,50		121,70		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		27,00		27,00		27,00		27,00		81,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3 Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:																		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		- Arsip Aktif	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		- Arsip Inaktif	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		53,30		93,30		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		- Arsip Vital	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4 Persentase Penyusutan Arsip	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		60,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5 Indek Kepuasan Masyarakat (Ikkm) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		73,00		73,00		75,00		78,00		226,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		6 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		19,99		19,99		19,99		19,99		59,97		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25.3.27.0.00.01.00	Dinas Perikanan						5.571.703.089		8.188.121.500		17.784.045.956		17.784.045.956		18.714.151.559		19.692.901.686		69.950.923.790	Dinas Perikanan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	dan Peternakan																			Peternak an
3.25	Kelautan dan Perikanan						4.297.80 0.179		5.497.27 6.500		15.271.34 6.543		15.271.34 6.543		16.100.59 1.308		16.733.07 0.231		57.900.08 4.761	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.321.78 0.876	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.321.780. 876	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	567.132. 700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	567.132.7 00	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	99.667.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	99.667.00 0	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	30.160.2 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	30.160.20 0	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		2.581.08 1.000		0		0		0		0		2.581.081. 000	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	40,46	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	37,50	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75,00	80,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Peternak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	69,74	81,59	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	5,75	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.01.3.01.01.40	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						310.036.000		0		0		0		0		0		310.036.000	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.000,00	75.000,00	75.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.000,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		3 Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiata n	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						1.416.140.753		2.310.290.000		0		0		0		0		3.726.430.753	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelom pok	109,00	115,00	118,00		121,00		0,00		0,00		0,00		0,00		239,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	514.740. 000,00	555.958. 000,00	582.550 .000,00		741.225 .600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.323.77 5.600,00		Dinas Perikana n dan Pernak an
		3 Produksi Ikan Konsumsi	Ton	92.501,2 1	84.230,0 0	93.286, 70		1.899,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		95.185,7 0		Dinas Perikana n dan Pernak an
		4 Produksi Ikan Hias	Ekor	94.000,0 0	117.010, 00	95.880, 00		135.360 ,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231.240, 00		Dinas Perikana n dan Pernak an
		5 Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	5.000.00 0,00	5.075.00 0,00	6.323.4 94,00		5.880.0 00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.203.4 94,00		Dinas Perikana n dan Pernak an
		6 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	9.635,00	9.190,00	11.668, 00		9.190,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		20.858,0 0		Dinas Perikana n dan Pernak an
		7 Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi	Hektar	4,00	4,00	8,70		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,70		Dinas Perikana n dan Pernak an
3.01.3.01.01. 21	Program Pengembang an Perikana n Tangkap						442.813. 150		315.905. 500		0		0		0		0		758.718.6 50	Dinas Perikana n dan Pernak an
		1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton)	Ton	1.023,74	1.100,81	1.183,5 9		1.272,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		2.455,59		Dinas Perikana n dan Pernak an
		2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	225.000, 00	375.000, 00	350.000 ,00		450.000 ,00		0,00		0,00		0,00		0,00		800.000, 00		Dinas Perikana n dan Pernak an
		3 Jumlah Kelompok Usaha Perikana n Tangkap	Kelom pok	14,00	18,00	52,00		48,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Dinas Perikana n dan Pernak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
3.01.3.01.01. 24	Program Pengembanga n Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar						47.732.0 00		50.000.0 00		0		0		0		0		97.732.00 0	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola	Jenis	3,00	3,00	3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola	Kecam atan	17,00	17,00	17,00		17,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Jumlah KJA	Petak	21.000,0 0	21.000,0 0	45.073, 00		4.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		49.073,0 0		Dinas Perikana n dan Peternak an
		4 Produksi Ikan KJA	Ton	0,00	0,00	91.529, 63		12.000, 00		0,00		0,00		0,00		0,00		103.529, 63		Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01. 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						62.337.5 00		240.000. 000		0		0		0		0		302.337.5 00	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	50,00	94,00	100,00		105,00		0,00		0,00		0,00		0,00		205,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	Ton	0,00	0,00	1.037,1 5		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.127,15		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok)	kelomp ok	11,00	12,00	19,00		14,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33,00		Dinas Perikana n dan Peternak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		4 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit)	Unit	1.160,00	1.161,00	1.170,00		1.172,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.342,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
																				Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		12.596.536.870		12.596.536.870		12.953.968.585		13.430.481.534		38.980.986.989	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Dinas Perikanan dan Peternakan
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						0		0		771.623.502		771.623.502		764.762.154		778.063.317		2.314.448.973	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		1.272,00		1.272,00		1.367,00		1.470,00		4.109,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking)	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		500.000,00		500.000,00		550.000,00		600.000,00		1.650.000,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
		3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	Kelompok	0,00	0,00	0,00		0,00		51,00		51,00		53,00		56,00		160,00		Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25.04	Program Pengelolaan						0		0		1.538.186.918		1.538.186.918		1.891.091.444		1.925.940.872		5.355.219.234	Dinas Perikanan dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Perikanan Budidaya																			Peternak an
		1 Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		14.279, 00		14.279, 00		14.735,0 0		15.282, 00		44.296,0 0		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		889.470 .720,00		889.470 .720,00		1.067.36 4.864,00		190.837 .837,00		2.147.67 3.421,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		6.320.0 00,00		6.320.0 00,00		6.740.00 0,00		7.200.0 00,00		20.260.0 00,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		4 Produksi Ikan Hias	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		162.432 ,00		162.432 ,00		194.918, 00		233.903 ,00		591.253, 00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		5 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Kelom pok	0,00	0,00	0,00		0,00		124,00		124,00		127,00		130,00		381,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	Kecam atan	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	17,00	50.000.00 0	17,00	50.000.00 0	17,00	155.272.5 00	17,00	258.377.9 50	51,00	463.650.4 50	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						0		0		314.999.2 53		314.999.2 53		335.496.6 25		340.206.5 58		990.702.4 36	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Angka Konsumsi Ikan	kg/kap /th	0,00	0,00	0,00		0,00		28,76		28,76		28,76		28,76		86,28		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		95,00		95,00		100,00		105,00		300,00		Dinas Perikana n dan Peternak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelom pok	0,00	0,00	0,00		0,00		15,00		15,00		16,00		17,00		48,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		4 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	0,00	0,00	0,00		0,00		110,00		110,00		115,00		120,00		345,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
																				Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.27	Pertanian						1.273.90 2.910		2.690.84 5.000		2.512.699 .413		2.512.699 .413		2.613.560 .251		2.959.831 .455		12.050.83 9.029	Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.03.3.01.01. 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan						178.472. 650		330.845. 000		0		0		0		0		509.317.6 50	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Orang	610,00	615,00	645,00		650,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.295,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan	Ekor	33.060,0 0	34.060,0 0	67.908, 00		36.817, 00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.725, 00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		3 Keikutsertaan Dalam Pameran /Expo Produk Hasil Peternakan	Kegiata n	5,00	5,00	3,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.03.3.01.01. 24	Program Peningkatan Produksi Peternakan						198.993. 000		475.000. 000		0		0		0		0		673.993.0 00	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi)	Lokasi	2,00	1,00	5,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikana n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Peternak an
		2 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	2,00	1,00	5,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	1,00	1,00	25,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		4 Produksi Hasil Ternak	Persen	3	3	7,24		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,24		Dinas Perikana n dan Peternak an
		5 Jumlah Akseptor IB (Ekor)	Ekor	0,00	1.500,00	4.891,00		1.575,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.466,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		6 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan	Jenis	3,00	3,00	3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		7 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor)	Ekor	736,00	1.197,00	1.363,00		1.224,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.587,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		8 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi)	Lokasi	1,00	1,00	2,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01.26	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan						261.930.000		0		0		0		0		0		261.930.000	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Jumlah Akseptor IB	Ekor	3.000,00	3.000,00	4.891,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.891,00		Dinas Perikana n dan Peternak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang k at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan	Paket	2,00	2,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
3.01.3.01.01.27	Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Ternak						634.507.260		0		0		0		0		0		634.507.260	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin	Persen	80,00	80,00	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Presentase Populasi Ternak Yang Diobati	Persen	20,00	20,00	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Sarana Kesehatan Hewan	Kegiata n	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
3.03.3.01.01.34	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						0		500.000.000		0		0		0		0		500.000.000	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Kasus Penyakit Hewan Menular	PHMS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Terjaminya Keamanan PAH/HPAH	kecam atan	17,00	17,00	0,00		17,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan Yang Ditangani	ekor	117,00	389,00	0,00		408,45		0,00		0,00		0,00		0,00		408,45		Dinas Perikana n dan Peternak an
		4 Jumlah Ternak Ruminansia Yang	ekor	5.396,00	6.753,00	0,00		7.699,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.699,00		Dinas Perikana

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Diperiksa Kesehatanya Sebelum Dipotong																		n dan Petrnak an
3.03.3.01.01. 35	Program Peningkatan Kesejahteraan Peternakan						0		25.000.0 00		0		0		0		0		25.000.00 0	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	kelomp ok	70,00	95,00	0,00		97,00		0,00		0,00		0,00		0,00		97,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		2 Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok)	kelomp ok	1,00	1,00	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		3 Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pe latihan (Orang)	Orang	12,00	8,00	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
2.03.3.03.01. 21	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani						0		1.360.00 0.000		0		0		0		0		1.360.000. 000	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor)	Ekor	50,00	50,00	640,00		300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		940,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor)	Ekor	200.000, 00	200.000, 00	120.000 ,00		200.000 ,00		0,00		0,00		0,00		0,00		320.000, 00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		3 Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat :																		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		Daging (Ton)	Ton	2,00	2,00	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Telur (Ton)	Ton	5,00	5,00	5,52		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,52		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		Susu (Liter)	Liter	1.100,00	1.100,00	1.104,0 0		1.100,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		2.204,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
																				Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian						0		0		993.529.3 20		993.529.3 20		1.078.216. 750		1.097.781. 085		3.169.527. 155	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Produksi Hasil Ternak	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		2 Jumlah Akseptor IB	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		1.622,0 0		1.622,0 0		1.704,00		1.788,0 0		5.114,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		1.248,0 0		1.248,0 0		1.273,00		1.299,0 0		3.820,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul	Lokasi	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		5 Budidaya Ternak Unggas Unggul	Lokasi	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Lokasi	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Dinas Perikana n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Peternak an
		7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		30,00		90,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina	Produsen	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	1,00	79.999.73 2	1,00	79.999.73 2	1,00	310.000.0 00	1,00	420.000.0 00	3,00	809.999.7 32	Dinas Perikana n dan Peternak an
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						0		0		1.339.431. 936		1.339.431. 936		681.889.7 50		787.727.5 45		2.809.049. 231	Dinas Perikana n dan Peternak an
		1 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		70,00		70,00		70,00		70,00		210,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		2 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		3 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Kecamatan	0,00	0,00	0,00		0,00		17,00		17,00		17,00		17,00		51,00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		4 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	0,00	0,00	0,00		0,00		38.195, 00		38.195, 00		39.574,0 0		40.952, 00		118.721, 00		Dinas Perikana n dan Peternak an
		5 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil	Kecamatan	0,00	0,00	0,00		0,00		17,00		17,00		17,00		17,00		51,00		Dinas Perikana n dan Peternak an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)																		
		6 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) :																		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		- Daging	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		- Telur	Ton	0,00	0,00	0,00		0,00		5,00		5,00		5,00		5,00		15,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		- Susu	Liter	0,00	0,00	0,00		0,00		1.100,0 0		1.100,0 0		1.100,00		1.100,0 0		3.300,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian						0		0		99.738.42 5		99.738.42 5		543.453.7 51		654.322.8 25		1.297.515. 001	Dinas Perikana n dan Petrnak an
		1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	Kelom pok	0,00	0,00	0,00		0,00		98,00		98,00		99,00		100,00		297,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		2 Jumlah Peternak Yang Terlatih	Orang	0,00	0,00	0,00		0,00		25,00		25,00		25,00		25,00		75,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
		3 Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	Pengha rgaan	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		1,00		2,00		5,00		Dinas Perikana n dan Petrnak an
4.01.5.06.5. 07.01.00	Sekretariat Daerah						78.595.3 71.669		66.230.2 12.626		104.660.1 65.233		104.660.1 65.233		110.133.8 91.875		115.893.8 94.420		475.513.5 35.823	Sekretar iat Daerah
4.01	Sekretariat Daerah						78.595.3 71.669		66.230.2 12.626		104.335.1 65.233		104.335.1 65.233		109.791.8 94.375		115.534.0 10.451		474.486.6 54.354	Sekretar iat Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.03. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	28.488.9 46.186	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	28.488.94 6.186	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	36.986.9 60.035	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.986.96 0.035	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	573.300. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	573.300.0 00	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	494.995. 150	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	494.995.1 50	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	796.112. 079	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	796.112.0 79	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		52.517.9 42.626		0		0		0		0		52.517.94 2.626	Sekretari at Daerah
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	80,00	81,00	85,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		175,00		Sekretari at Daerah
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	80,00	81,70	85,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		175,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	81,70	85,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		175,00		Sekretari at Daerah
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	90,00	91,20	95,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		185,00		Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.09	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						447.284.100		0		0		0		0		0		447.284.100	Sekretari at Daerah
		1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:																		Sekretari at Daerah
		- Perda	Persen	100,00	100,00	88,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88,00		Sekretari at Daerah
		- Perbup	Persen	100,00	100,00	74,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		74,00		Sekretari at Daerah
		- Kepbup	Persen	100,00	100,00	85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85,00		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Persen	100,00	100,00	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	100,00	100,00	4,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,25		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.21	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						0		880.000.000		0		0		0		0		880.000.000	Sekretari at Daerah
		1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:																		Sekretari at Daerah
		- Perda	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		- Perbup	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at Daerah
		- Kepbup	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Ffasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	Bulan	12,00	12,00	12,00	480.551. 350	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,00	480.551.3 50	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembanguna n						744.431. 800		0		0		0		0		0		744.431.8 00	Sekretari at Daerah
		1 Paket Pelelangan Pertahun	Paket	250,00	250,00	250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250,00		Sekretari at Daerah
		2 Dokumen Juknis Pengelolaan APBD	Dokum en	1,00	1,00	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Sekretari at Daerah
		3 Tambahan Aparat Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Orang	25,00	25,00	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 12	Program Koordinasi Implementasi Pembanguna n Ekonomi Daerah	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	345.894. 582	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	345.894.5 82	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03. 16	Program Koordinasi Implementasi Pembanguna n Ekonomi Daerah	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	0,00	0	100,00	490.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	490.000.0 00	Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang k at Daerah Penang g Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.03.14	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan	Persen	100,00	100,00	100,00	120.736.850	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	120.736.850	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.15	Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kajian/ Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiata n	2,00	2,00	5,00	135.295.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	135.295.000	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiata n	2,00	3,00	1,00	79.749.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	79.749.000	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.17	Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya	Persen	100,00	100,00	100,00	426.785.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	426.785.000	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.18	Program Pengembangn Wilayah Perbatasan	Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan	Kegiata n	1,00	2,00	2,00	489.890.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	489.890.800	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.27	Program Fasilitasi Kemasyarakatan dan Keagamaan	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	100,00	100,00	95,00	6.141.759.800	100,00	6.710.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	195,00	12.852.509.800	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.19	Program Penataan Administrasi Pembangunan Daerah						0		1.475.000.000		0		0		0		0		1.475.000.000	Sekretari at Daerah
		1 Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	75,00	88,00	90,00		93,00		0,00		0,00		0,00		0,00		183,00		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	50,00	50,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	0,00	0,00	25,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.21	Program Fasilitas Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0,00	10,00	10,00	1.842.679.937	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,00	1.842.679.937	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.37	Program Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa						0		1.559.500.000		0		0		0		0		1.559.500.000	Sekretari at Daerah
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	44,44	60,00	75,00		81,82		0,00		0,00		0,00		0,00		156,82		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	32,59	37,24	61,54		76,92		0,00		0,00		0,00		0,00		138,46		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.38	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	0,00	0,00	45,00	0	50,00	700.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	95,00	700.000.000	Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.40	Program Penatausahaan Keuangan						0		770.000.000		0		0		0		0		770.000.000	Sekretari at Daerah
		1 Peresentase Penyusunan Perencanaan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Data Keuangan Yang Diverifikasi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urutan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
4.01.4.01.03.43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah						0		1.127.020.000		0		0		0		0		1.127.020.000	Sekretari at Daerah
		1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,13	3,50	3,50		3,50		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	100 MOU/PKS/100%	100 MOU/PKS/100%	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Fasilitas Naskah Kerjasama Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
		4 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Sekretari at Daerah
																				Sekretari at Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		71.495.514.233		71.495.514.233		75.234.729.628		79.169.505.987		225.899.749.848	Sekretari at Daerah
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		BB		BB		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang k at Daerah Penang g Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						0		0		28.539.65 1.000		28.539.65 1.000		30.032.27 4.747		31.602.96 2.717		90.174.88 8.464	Sekretari at Daerah
		1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	0,00	0,00	0,00		0,00		3,50		3,50		3,50		3,50		10,50		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Fasilitas Naskah Kerjasama Daerah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		95,00		96,00		291,00		Sekretari at Daerah
		4 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		5 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:																		Sekretari at Daerah
		- Perda	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		- Perbup	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		- Kepbup	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		6 Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		7 Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		8 Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	0,00	0,00	0,00		0,00		55,00		55,00		55,00		60,00		170,00		Sekretari at Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembanguna n						0		0		4.300.000. 000		4.300.000. 000		4.524.890. 000		4.761.541. 747		13.586.43 1.747	Sekretari at Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		75,00		100,00		225,00		Sekretari at Daerah
		4 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		85,71		85,71		90,00		96,77		272,48		Sekretari at Daerah
		5 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at Daerah
		6 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		92,31		92,31		96,15		100,00		288,46		Sekretari at Daerah
5.06	Pengelolaan Perbatasan						0		0		325.000.000		325.000.000		341.997.500		359.883.969		1.026.881.469	Sekretar iat Daerah
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	325.000.000	100,00	325.000.000	100,00	341.997.500	100,00	359.883.969	300,00	1.026.881.469	Sekretari at Daerah
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD						39.878.653.715		49.263.262.160		80.310.498.334		80.310.498.334		84.510.737.397		88.930.648.963		342.893.800.569	Sekretar iat DPRD
4.02	Sekretariat DPRD						39.878.653.715		49.263.262.160		80.310.498.334		80.310.498.334		84.510.737.397		88.930.648.963		342.893.800.569	Sekretar iat DPRD
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan	Tersedianya Pendukung	Persen	100,00	100,00	100,00	6.529.231.238	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	6.529.231.238	Sekretari at DPRD

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran																		
4.01.4.01.04. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	5.953.78 3.107	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.953.783. 107	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	522.385. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	522.385.0 00	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 06	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	510.348. 650	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	510.348.6 50	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 08	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda	Kegiata n	10,00	10,00	10,00	26.362.9 05.720	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10,00	26.362.90 5.720	Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		15.149.0 13.200		0		0		0		0		15.149.01 3.200	Sekretari at DPRD
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 42	Program Fasilitasi Rapat DPRD						0		10.994.8 12.283		0		0		0		0		10.994.81 2.283	Sekretari at DPRD
		1 Persentase pemuhan referensi perundang- undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		3 Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 44	Program Perencanaan dan Penatausahaa n Keuangan						0		227.990. 000		0		0		0		0		227.990.0 00	Sekretari at DPRD
		1 Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		2 Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		3 Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
4.01.4.01.04. 45	Program Peningkatan Hubungan						0		22.891.4 46.677		0		0		0		0		22.891.44 6.677	Sekretari at DPRD

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Masyarakat dan Protokol																			
		1 Persentase fasilitas hubungan antar lembaga	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		2 Persentase publikasi kegiatan DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
		3 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Sekretari at DPRD
																				Sekretari at DPRD
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		48.885.679.331		48.885.679.331		51.442.400.360		54.132.837.899		154.460.917.590	Sekretari at DPRD
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Sekretari at DPRD
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Sekretari at DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD						0		0		31.424.819.003		31.424.819.003		33.068.337.037		34.797.811.064		99.290.967.104	Sekretari at DPRD
		1 Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at DPRD
		2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at DPRD
		3 Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Sekretari at DPRD
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan						6.083.169.049		5.491.092.000		15.364.085.132		15.364.085.132		16.167.626.784		17.013.193.665		60.119.166.630	Badan Perenca naan Pembang unan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pengembang an Daerah																			Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
5.01	Perencanaan						6.083.16 9.049		5.216.09 2.000		14.599.50 8.203		14.599.50 8.203		15.363.06 2.482		16.166.55 0.650		57.428.38 2.384	Badan Perencana an Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	648.720. 725	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	648.720.7 25	Badan Perencana an Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	828.461. 975	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	828.461.9 75	Badan Perencana an Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	0	Badan Perencana an Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	179.030. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	179.030.0 00	Badan Perencana an Pembang unan Peneliti

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	51.535.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	51.535.00 0	Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		2.590.64 2.000		0		0		0		0		2.590.642. 000	Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	80,00	80,00	80,00		83,00		0,00		0,00		0,00		0,00		163,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	82,00	82,00	82,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		167,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85,00	85,00	85,00		87,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Pengemb angan Daerah
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persen	100,00	100,00	100,00	3.645.211.778	100,00	1.370.450.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	5.015.661.778	Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01.26	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	Persen	85,00	86,00	87,00	389.254.112	93,00	700.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00	1.089.254.112	Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				angan Daerah
4.03.4.03.01. 27	Program Pengembang an Data/Informa si	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokum en	7,00	7,00	6,00	340.955. 459	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,00	340.955.4 59	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 27	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80,00	80,00	80,00	0	83,00	80.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	80.000.00 0	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 28	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	80,00	80,00	80,00	0	83,00	200.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	200.000.0 00	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 29	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persen	80,00	80,00	80,00	0	83,00	275.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	275.000.0 00	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 30	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan	Persen	80,00	80,00	80,00	0	83,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	163,00	0	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pemberdayaa n Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat																		angan Daerah
																				Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		10.757.21 6.471		10.757.21 6.471		11.319.81 8.892		11.911.84 5.421		33.988.88 0.784	Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb angan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah						0		0		1.677.275. 484		1.677.275. 484		1.764.996. 992		1.857.306. 334		5.299.578. 810	Badan Perencan aan Pembang unan Penelitia n dan Pengemb

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				angan Daerah
		1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
		2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		94,00		94,00		95,00		96,00		285,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
		3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	%	0,00	0,00	0,00		0,00		94,00		94,00		95,00		96,00		285,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah						0		0		2.165.016. 248		2.165.016. 248		2.278.246. 598		2.397.398. 895		6.840.661. 741	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti n dan Pengemb angan Daerah
		1 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		85,00		85,00		87,00		89,00		261,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti n dan Pengemb

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Pembangunan Manusia																		angan Daerah
		2 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	0,00	0,00	0,00		0,00		85,00		85,00		87,00		89,00		261,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pembemb angan Daerah
		3 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		85,00		85,00		87,00		89,00		261,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pembemb angan Daerah
																				Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pembemb angan Daerah
5.05	Penelitian dan Pengembang an						0		275.000. 000		764.576.9 29		764.576.9 29		804.564.3 02		846.643.0 15		2.690.784 .246	Badan Perenca naan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01. 33	Program Penelitian, Pen guasaan, Dan Pemanfaatan IPTEK						0		200.000. 000		0		0		0		0		200.000.0 00	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				angan Daerah
		1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	80,00	85,00	0,00		93,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb angan Daerah
		2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	Persen	80,00	85,00	0,00		93,00		0,00		0,00		0,00		0,00		93,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb angan Daerah
4.03.4.03.01.31	Program Pengembangan Data dan Pelaporan Informasi Pembangunan	Tingkat ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persen	80,00	85,00	0,00	0	93,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	93,00	75.000.000	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb angan Daerah
																				Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb angan Daerah
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						0		0		764.576.929		764.576.929		804.564.302		846.643.015		2.415.784.246	Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti a n dan Pengemb

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				angan Daerah
		1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	%	0,00	0,00	0,00		0,00		94,00		94,00		95,00		96,00		285,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb angan Daerah
		2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	%	0,00	0,00	0,00		0,00		94,00		94,00		95,00		96,00		285,00		Badan Perencan aan Pembang unan Peneliti an dan Pengemb angan Daerah
5.02.0.00.0.00.01.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah						9.587.631.979		10.056.18.045		396.600.629.113		396.600.629.113		417.342.842.016		439.169.872.653		1.272.757.093.806	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
5.02	Keuangan						9.587.631.979		10.056.18.045		396.600.629.113		396.600.629.113		417.342.842.016		439.169.872.653		1.272.757.093.806	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.797.153.482	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.797.153.482	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.811.479.250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.811.479.250	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	246.529.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	246.529.000	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06.06	Program Peningkatan	Tersedianya Pelaporan Capaian	Persen	100,00	100,00	100,00	93.208.335	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	93.208.335	Badan Keuanga

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar																		n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		4.863.62 0.000		0		0		0		0		4.863.620. 000	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	52,38	52,38	0,00		55,56		0,00		0,00		0,00		0,00		55,56		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	90,56	90,56	0,00		91,00		0,00		0,00		0,00		0,00		91,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	97,00	97,00	0,00		97,15		0,00		0,00		0,00		0,00		97,15		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persen	90,00	90,00	0,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06. 16	Program Peningkatan dan Pengembanga						4.272.78 6.920		770.430. 000		0		0		0		0		5.043.216. 920	Badan Keuanga n dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	n Pengelolaan Keuangan Daerah																			Aset Daerah
		1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06. 18	Program Pengelolaan Aset Daerah						1.366.47 4.992		1.356.39 0.000		0		0		0		0		2.722.864. 992	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		1 Persentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Persen	71,24	71,24	50,00		78,57		0,00		0,00		0,00		0,00		128,57		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Persentase Inventarisasi Asset Daerah	Persen	60,24	60,24	60,24		61,00		0,00		0,00		0,00		0,00		121,24		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		3 Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina	Persen	75,00	75,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
4.04.4.04.06. 19	Program Pengelolaan Anggaran Daerah						0		3.065.67 8.045		0		0		0		0		3.065.678. 045	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		1 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		3 Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	82,48	89,97	0,00		92,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
																				Badan Keuanga n dan Aset Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		43.294.10 2.576		43.294.10 2.576		45.558.38 4.141		47.941.08 7.631		136.793.5 74.348	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						0		0		351.336.4 63.060		351.336.4 63.060		369.711.3 60.078		389.047.2 64.210		1.110.095. 087.348	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		3 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		4 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		5 Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		93,00		93,00		94,00		95,00		282,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	1.970.063.477	100,00	1.970.063.477	100,00	2.073.097.797	100,00	2.181.520.812	300,00	6.224.682.086	Badan Keuanga n dan Aset Daerah
		2 Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Keuanga n dan Aset Daerah
5.02.0.00.0.00.02.00	Badan Pendapatan Daerah						10.265.416.199		10.008.790.000		34.099.917.210		34.099.917.210		35.883.342.880		37.760.041.713		128.017.508.002	Badan Pendapa tan Daerah
5.02	Keuangan						10.265.416.199		10.008.790.000		34.099.917.210		34.099.917.210		35.883.342.880		37.760.041.713		128.017.508.002	Badan Pendapa tan Daerah
4.04.4.04.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	60,24	60,24	100,00	2.097.044.357	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.097.044.357	Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75,00	75,00	75,00	3.048.372.131	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75,00	3.048.372.131	Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	0,00	0,00	100,00	197.450.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	197.450.000	Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	114.674.900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	114.674.900	Badan Pendapat an Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kinerja dan Keuangan																			
4.04.4.04.07. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		5.127.74 0.000		0		0		0		0		5.127.740. 000	Badan Pendapat an Daerah
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	40,46	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Pendapat an Daerah
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	37,50	76,29	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Pendapat an Daerah
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75,00	80,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Pendapat an Daerah
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	69,74	81,59	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Pendapat an Daerah
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	5,75	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Pendapat an Daerah
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07. 17	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14,50	15,00	15,00	4.807.87 4.811	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,00	4.807.874. 811	Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07. 20	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB						0		1.440.00 0.000		0		0		0		0		1.440.000. 000	Badan Pendapat an Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00		36,25		0,00		0,00		0,00		0,00		36,25		Badan Pendapat an Daerah
		2 Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00		36,26		0,00		0,00		0,00		0,00		36,26		Badan Pendapat an Daerah
		3 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00		36,27		0,00		0,00		0,00		0,00		36,27		Badan Pendapat an Daerah
		4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00		36,28		0,00		0,00		0,00		0,00		36,28		Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07. 21	Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB						0		1.339.800.000		0		0		0		0		1.339.800.000	Badan Pendapat an Daerah
		1 Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	Persen	0,00	1,19	0,00		1,19		0,00		0,00		0,00		0,00		1,19		Badan Pendapat an Daerah
		2 Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam	Persen	0,00	0,52	0,00		0,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,52		Badan Pendapat an Daerah
		3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	Persen	0,00	2,94	0,00		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		2,50		Badan Pendapat an Daerah
		4 Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	Persen	0,00	8,60	0,00		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		2,50		Badan Pendapat an Daerah
		5 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	Persen	0,00	80,00	0,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00		Badan Pendapat an Daerah
4.04.4.04.07. 22	Program Intensifikasi Penagihan						0		2.101.250.000		0		0		0		0		2.101.250.000	Badan Pendapat

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pendapatan Daerah																			an Daerah
		1 Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen	0,00	102,00	0,00		115,00		0,00		0,00		0,00		0,00		115,00		Badan Pendapat an Daerah
		2 Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen	0,00	5,00	0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Badan Pendapat an Daerah
		3 Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa	Persen	0,00	10,00	0,00		35,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35,00		Badan Pendapat an Daerah
		4 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya	Persen	0,00	95,00	0,00		95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		95,00		Badan Pendapat an Daerah
		5 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,00	3,5	0,00		3,50		0,00		0,00		0,00		0,00		3,50		Badan Pendapat an Daerah
																				Badan Pendapat an Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		25.758.90 5.970		25.758.90 5.970		27.106.09 6.752		28.523.74 5.613		81.388.74 8.335	Badan Pendapat an Daerah
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		BB		BB		Badan Pendapat an Daerah
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Pendapat an Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						0		0		8.341.011. 240		8.341.011. 240		8.777.246. 128		9.236.296. 100		26.354.55 3.468	Badan Pendapat an Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);	%	0,00	0,00	0,00		0,00		67,50		67,50		70,00		72,50		210,00		Badan Pendapat an Daerah
		2 Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	0,00	0,00	0,00		0,00		6,00		6,00		6,50		7,00		19,50		Badan Pendapat an Daerah
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						9.026.27 2.454		8.914.11 6.000		31.121.74 7.509		31.121.74 7.509		32.749.41 4.904		34.462.20 9.303		116.273.7 60.170	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
5.03	Kepegawaian						5.281.47 9.504		7.134.34 6.000		27.721.74 7.714		27.721.74 7.714		29.171.59 5.120		30.697.26 9.544		100.006.4 37.882	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.305.88 8.928	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.305.888. 928	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	1.476.10 2.304	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.476.102. 304	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	254.741. 550	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	254.741.5 50	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.05.4.05.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	248.431. 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	248.431.5 00	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	66.682.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	66.682.00 0	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		3.842.62 1.000		0		0		0		0		3.842.621. 000	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Pelayanan Administrasi Perkantoran																		Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01. 18	Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah						256.725. 945		493.075. 000		0		0		0		0		749.800.9 45	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86		3,33		0,00		0,00		0,00		0,00		6,19		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Daya Manusia
4.05.4.05.01. 19	Program Penyelenggar aan Manajemen Kepegawaian Negara						1.480.79 9.500		2.475.50 0.000		0		0		0		0		3.956.299. 500	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00		0,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,35		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		2 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator,dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		166,59		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103,62		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		4 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	20,34		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120,34		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		5 Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		6 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah						192.107.777		323.150.000		0		0		0		0		515.257.777	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2 Persentase ASN Berprestasi/Teladan /Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26		1,28		0,00		0,00		0,00		0,00		2,54		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30		4,23		0,00		0,00		0,00		0,00		8,53		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
																				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	Program Penunjang Urusan						0		0		23.236.039.912		23.236.039.912		24.451.284.800		25.730.086.994		73.417.411.706	Badan Kepegawaian dan

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota																			Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		BB		BB		BB		A		A		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah						0		0		4.485.707. 802		4.485.707. 802		4.720.310. 320		4.967.182. 550		14.173.20 0.672	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		3,33		3,33		3,33		3,33		9,99		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		2 Persentase Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Daya Manusia
		4 Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,28		1,28		1,28		1,28		3,84		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		4,23		4,23		4,23		4,23		12,69		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,35		0,35		0,35		0,35		1,05		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		10 Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		11 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
																				Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
5.04	Pendidikan dan Pelatihan						3.744.79 2.950		1.779.77 0.000		3.399.999 .795		3.399.999 .795		3.577.819 .784		3.764.939 .759		16.267.32 2.288	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01. 17	Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah						3.744.79 2.950		1.779.77 0.000		0		0		0		0		5.524.562. 950	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		11 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		22 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Manajemen	Persen	0,12	0,12	0,00		1,53		0,00		0,00		0,00		0,00		1,53		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar																		Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00		12,15		0,00		0,00		0,00		0,00		12,15		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
																				Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
5.04.02	Program Pengembang an Sumber Daya Manusia						0		0		3.399.999. 795		3.399.999. 795		3.577.819. 784		3.764.939. 759		10.742.75 9.338	Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/ Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		1,53		1,53		1,53		1,53		4,59		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber Daya Manusia
		3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		12,15		12,15		12,15		12,15		36,45		Badan Kepegaw aian dan Pengemb angan Sumber

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
																				Daya Manusia
6.01.0.00.0. 00.01.00	Inspektorat						4.703.48 5.374		6.509.91 6.000		23.346.90 8.550		23.346.90 8.550		24.567.95 1.867		25.852.85 5.750		84.981.11 7.541	Inspekto rat
6.01	Inspektorat Daerah						4.703.48 5.374		6.509.91 6.000		23.346.90 8.550		23.346.90 8.550		24.567.95 1.867		25.852.85 5.750		84.981.11 7.541	Inspekto rat
4.02.4.02.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.420.29 1.816	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.420.291. 816	Inspektor at
4.02.4.02.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	648.169. 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	648.169.5 00	Inspektor at
4.02.4.02.01. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	206.740. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	206.740.0 00	Inspektor at
4.02.4.02.01. 07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	Kegiata n	43,00	43,00	43,00	2.223.75 9.300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43,00	2.223.759. 300	Inspektor at
4.02.4.02.01. 08	Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas	Kegiata n	4,00	4,00	4,00	204.524. 758	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	204.524.7 58	Inspektor at
4.02.4.02.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		1.759.91 6.000		0		0		0		0		1.759.916. 000	Inspektor at
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	4,00	60,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		165,00		Inspektor at

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	60,00	80,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Inspektoral
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	70,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Inspektoral
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	80,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Inspektoral
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	80,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Inspektoral
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	80,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Inspektoral
4.02.4.02.01.18	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan						0		4.750.000.000		0		0		0		0		4.750.000.000	Inspektoral
		1 Oponi Penilaian SAKIP Kabupaten	Opini	CC	B	B		BB		-		-		-		-		BB		Inspektoral
		2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP	WTP	WTP		WTP		-		-		-		-		WTP		Inspektoral
		3 Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD	Persen	80,00	90,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Inspektoral
																				Inspektoral
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0		0		14.784.405.870		14.784.405.870		15.557.630.297		16.371.294.362		46.713.330.529	Inspektoral

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kabupaten/K ota																			
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Inspektoral
		2 Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00		Inspektoral
6.01.02	Program Penyelenggara an Pengawasan						0		0		7.588.500. 000		7.588.500. 000		7.985.378. 550		8.403.013. 848		23.976.89 2.398	Inspektoral
		1 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	OPD	0,00	0,00	0,00		0,00		24,00		24,00		24,00		24,00		72,00		Inspektoral
		2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	-	-	-		-		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Inspektoral
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		75,00		75,00		80,00		90,00		245,00		Inspektoral
		4 Capaian SAKIP Kabupaten	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Inspektoral
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						0		0		974.002.6 80		974.002.6 80		1.024.943. 020		1.078.547. 540		3.077.493. 240	Inspektoral
		1 Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level							3,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Inspektoral
		2 Predikat Wilayah . Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD							2,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Inspektoral
		3 Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persen							0,75		0,75		0,80		0,90		2,45		Inspektoral

Kode	Bidang Urutan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.0.00.0. 00.01.00	Kecamatan Jatiluhur						563.630. 137		576.082. 000		3.273.231 .059		3.273.231 .059		3.444.421 .043		3.624.564 .264		11.481.92 8.503	Kecamat an Jatiluhu r
7.01	Kecamatan						563.630. 137		576.082. 000		3.273.231 .059		3.273.231 .059		3.444.421 .043		3.624.564 .264		11.481.92 8.503	Kecamat an Jatiluhu r
4.01.4.01.05. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	258.501. 687	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	258.501.6 87	Kecamat an Jatiluhur
4.01.4.01.05. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	128.213. 450	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	128.213.4 50	Kecamat an Jatiluhur
4.01.4.01.05. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	40.590.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	40.590.00 0	Kecamat an Jatiluhur
4.01.4.01.05. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	136.325. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	136.325.0 00	Kecamat an Jatiluhur
4.01.4.01.05. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		466.602. 000		0		0		0		0		466.602.0 00	Kecamat an Jatiluhur
		1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Jatiluhur
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Jatiluhur
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Jatiluhur

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		4 Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Jatiluhur
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Jatiluhur
4.01.4.01.05.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	109.480.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	109.480.000	Kecamat an Jatiluhur
																				Kecamat an Jatiluhur
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		3.123.792.301		3.123.792.301		3.287.166.638		3.459.085.454		9.870.044.393	Kecamat an Jatiluhur
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Jatiluhur
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Jatiluhur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	43.878.818	Baik	43.878.818	Baik	46.173.680	Baik	48.588.564	Baik	138.641.062	Kecamat an Jatiluhur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	16.996.755	80,00	16.996.755	80,00	17.885.685	80,00	18.821.107	240,00	53.703.547	Kecamat an Jatiluhur

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	8.421.280	80,00	8.421.280	80,00	8.861.714	80,00	9.325.180	240,00	26.608.174	Kecamatan Jatiluhur
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	54.719.741	80,00	54.719.741	80,00	57.581.583	80,00	60.593.100	240,00	172.894.424	Kecamatan Jatiluhur
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	51,00	25.422.164	51,00	25.422.164	51,00	26.751.743	51,00	28.150.859	153,00	80.324.766	Kecamatan Jatiluhur
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Sukasari						712.538.700		898.916.000		3.314.357.621		3.314.357.621		3.487.698.525		3.670.105.157		12.083.616.003	Kecamatan Sukasari
7.01	Kecamatan						712.538.700		898.916.000		3.314.357.621		3.314.357.621		3.487.698.525		3.670.105.157		12.083.616.003	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	418.652.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	418.652.000	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	179.814.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	179.814.200	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	36.122.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.122.500	Kecamatan Sukasari
4.01.4.01.05.07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	77.950.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	77.950.000	Kecamatan Sukasari

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.06. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		808.916. 000		0		0		0		0			Kecamat an Sukasari
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Sukasari
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukasari
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukasari
		4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukasari
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukasari
4.01.4.01.06. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	90.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	90.000.00 0	Kecamat an Sukasari
																				Kecamat an Sukasari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.140.209. 341		3.140.209. 341		3.309.865. 233		3.482.971. 185		9.933.045. 759	Kecamat an Sukasari
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Sukasari

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Sukasari
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	0	Baik	0	Baik	7.505.000	Baik	7.897.511	Baik	15.402.511	Kecamat an Sukasari
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	10.250.000	80,00	10.786.075	240,00	21.036.075	Kecamat an Sukasari
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	15.620.000	80,00	16.436.925	240,00	32.056.925	Kecamat an Sukasari
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	85.778.939	80,00	85.778.939	80,00	76.733.653	80,00	80.746.823	240,00	243.259.415	Kecamat an Sukasari
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	88.369.341	80,00	88.369.341	80,00	67.724.639	80,00	71.266.638	240,00	227.360.618	Kecamat an Sukasari
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Maniis						608.346.700		659.596.300		3.122.032.224		3.122.032.224		3.285.314.509		3.457.136.458		11.132.426.191	Kecamat an Maniis
7.01	Kecamatan						608.346.700		659.596.300		3.122.032.224		3.122.032.224		3.285.314.509		3.457.136.458		11.132.426.191	Kecamat an Maniis
4.01.4.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	289.669.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	289.669.700	Kecamat an Maniis
4.01.4.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	155.127.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	155.127.000	Kecamat an Maniis

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Prasarana Aparatur																			
4.01.4.01.07. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	41.625.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	41.625.00 0	Kecamat an Maniis
4.01.4.01.07. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	121.925. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	121.925.0 00	Kecamat an Maniis
4.01.4.01.07. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		588.096. 300		0		0		0		0		588.096.3 00	Kecamat an Maniis
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Maniis
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Maniis
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Maniis
		4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Maniis
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Maniis
4.01.4.01.07. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	71.500.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	71.500.00 0	Kecamat an Maniis

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan																			
																				Kecamat an Maniis
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		2.934.574. 699		2.934.574. 699		3.088.052. 955		3.249.558. 125		9.272.185. 779	Kecamat an Maniis
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Maniis
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Maniis
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	106.880.0 00	Baik	106.880.0 00	Baik	112.469.8 24	Baik	118.351.9 96	Baik	337.701.8 20	Kecamat an Maniis
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00	0	Kecamat an Maniis
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00	0	Kecamat an Maniis
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	24.697.52 5	100,00	24.697.52 5	100,00	25.989.20 6	100,00	27.348.44 1	300,00	78.035.17 2	Kecamat an Maniis
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	55.880.00 0	100,00	55.880.00 0	100,00	58.802.52 4	100,00	61.877.89 6	300,00	176.560.4 20	Kecamat an Maniis

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pemerintahan Desa																			
7.01.0.00.0. 00.04.00	Kecamatan Tegalwaru						586.989. 235		700.622. 000		3.410.402 .903		3.410.402 .903		3.588.766 .975		3.776.459 .488		12.063.24 0.601	Kecamat an Tegalwar u
7.01	Kecamatan						586.989. 235		700.622. 000		3.410.402 .903		3.410.402 .903		3.588.766 .975		3.776.459 .488		12.063.24 0.601	Kecamat an Tegalwar u
4.01.4.01.08. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	270.639. 235	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	270.639.2 35	Kecamat an Tegalwar u
4.01.4.01.08. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	189.100. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	189.100.0 00	Kecamat an Tegalwar u
4.01.4.01.08. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	24.640.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	24.640.00 0	Kecamat an Tegalwar u
4.01.4.01.08. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	102.610. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	102.610.0 00	Kecamat an Tegalwar u
4.01.4.01.08. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		590.622. 000		0		0		0		0		590.622.0 00	Kecamat an Tegalwar u
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Tegalwar u
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Tangga dan Sarana Prasarana Kantor																		Tegalwar u
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Tegalwar u
		4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Tegalwar u
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Tegalwar u
4.01.4.01.08. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	110.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	110.000.0 00	Kecamat an Tegalwar u
																				Kecamat an Tegalwar u
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.106.032. 175		3.106.032. 175		3.268.477. 658		3.439.419. 040		9.813.928. 873	Kecamat an Tegalwar u
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Tegalwar u
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Tegalwar u
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	105.830.5 44	Baik	105.830.5 44	Baik	111.365.4 81	Baik	117.189.8 96	Baik	334.385.9 21	Kecamat an Tegalwar u

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pelayanan Publik																			
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	29.033.63 0	100,00	29.033.63 0	100,00	30.552.08 9	100,00	32.149.96 3	300,00	91.735.68 2	Kecamat an Tegalwar u
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	15.803.86 2	100,00	15.803.86 2	100,00	16.630.40 4	100,00	17.500.17 4	300,00	49.934.44 0	Kecamat an Tegalwar u
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	99.452.76 7	100,00	99.452.76 7	100,00	104.654.1 47	100,00	110.127.5 59	300,00	314.234.4 73	Kecamat an Tegalwar u
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	54.249.92 5	100,00	54.249.92 5	100,00	57.087.19 6	100,00	60.072.85 6	300,00	171.409.9 77	Kecamat an Tegalwar u
7.01.0.00.0. 00.05.00	Kecamatan Plered						705.331. 195		816.936. 000		3.646.248 .942		3.646.248 .942		3.836.947 .762		4.037.620 .130		13.043.08 4.029	Kecamat an Plered
7.01	Kecamatan						705.331. 195		816.936. 000		3.646.248 .942		3.646.248 .942		3.836.947 .762		4.037.620 .130		13.043.08 4.029	Kecamat an Plered
4.01.4.01.09. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	308.772. 195	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	308.772.1 95	Kecamat an Plered
4.01.4.01.09. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	258.839. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	258.839.0 00	Kecamat an Plered
4.01.4.01.09. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	24.118.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	24.118.00 0	Kecamat an Plered

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.09. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	113.602. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	113.602.0 00	Kecamat an Plered
4.01.4.01.09. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		746.936. 000		0		0		0		0		746.936.0 00	Kecamat an Plered
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Plered
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Plered
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Plered
		4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Plered
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Plered
4.01.4.01.10. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	70.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	70.000.00 0	Kecamat an Plered
																				Kecamat an Plered
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan						0		0		3.646.248. 942		3.646.248. 942		3.836.947. 762		4.037.620. 130		11.520.81 6.834	Kecamat an Plered

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Daerah Kabupaten/K ota																			
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Plered
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Plered
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik		Kecamat an Plered
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00		Kecamat an Plered
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00		Kecamat an Plered
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00		Kecamat an Plered
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00		Kecamat an Plered
7.01.0.00.0. 00.06.00	Kecamatan Sukatani						470.619. 442		466.970. 000		4.227.536 .899		4.227.536 .899		4.448.637 .079		4.681.300 .798		14.295.06 4.218	Kecamat an Sukatani
7.01	Kecamatan						470.619. 442		466.970. 000		4.227.536 .899		4.227.536 .899		4.448.637 .079		4.681.300 .798		14.295.06 4.218	Kecamat an Sukatani
4.01.4.01.10. 01	Program Pelayanan	Tersedianya Pendukung	Persen	100,00	100,00	100,00	216.435. 457	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	216.435.4 57	Kecamat an Sukatani

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran																		
4.01.4.01.10. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	159.498. 985	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	159.498.9 85	Kecamat an Sukatani
4.01.4.01.10. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	8.815.00 0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	8.815.000	Kecamat an Sukatani
4.01.4.01.10. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	85.870.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	85.870.00 0	Kecamat an Sukatani
4.01.4.01.09. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		392.470. 000		0		0		0		0		392.470.0 00	Kecamat an Sukatani
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Sukatani
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukatani
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukatani
		4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukatani
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Sukatani

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.10.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	74.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	74.500.000	Kecamat an Sukatani
																				Kecamat an Sukatani
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		4.024.577.678		4.024.577.678		4.235.063.091		4.456.556.890		12.716.197.659	Kecamat an Sukatani
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Sukatani
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Sukatani
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	53.770.042	Baik	53.770.042	Baik	56.582.215	Baik	59.541.465	Baik	169.893.722	Kecamat an Sukatani
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	14.892.371	80,00	14.892.371	80,00	15.671.242	80,00	16.490.848	240,00	47.054.461	Kecamat an Sukatani
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	240,00	0	Kecamat an Sukatani
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	75.000.000	80,00	75.000.000	80,00	78.922.500	80,00	83.050.147	240,00	236.972.647	Kecamat an Sukatani

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	51,00	59.296.80 8	51,00	59.296.80 8	51,00	62.398.03 1	51,00	65.661.44 8	153,00	187.356.2 87	Kecamat an Sukatani
7.01.0.00.0. 00.07.00	Kecamatan Darangdan						613.575. 080		743.081. 172		3.799.677 .584		3.799.677 .584		3.998.400 .722		4.207.517 .079		13.362.25 1.637	Kecamat an Darangd an
7.01	Kecamatan						613.575. 080		743.081. 172		3.799.677 .584		3.799.677 .584		3.998.400 .722		4.207.517 .079		13.362.25 1.637	Kecamat an Darangd an
4.01.4.01.11. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	306.377. 080	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	306.377.0 80	Kecamat an Darangd an
4.01.4.01.11. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	134.150. 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	134.150.5 00	Kecamat an Darangd an
4.01.4.01.11. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	24.782.5 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	24.782.50 0	Kecamat an Darangd an
4.01.4.01.11. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	148.265. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	148.265.0 00	Kecamat an Darangd an
4.01.4.01.11. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		639.671. 172		0		0		0		0		639.671.1 72	Kecamat an Darangd an
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Darangd an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Darangd an
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Darangd an
		4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Darangd an
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Darangd an
4.01.4.01.11.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	100,00	103.410.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	103.410.000	Kecamat an Darangd an
																				Kecamat an Darangd an
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		3.584.290.053		3.585.347.553		3.772.861.230		3.970.181.872		11.328.390.655	Kecamat an Darangd an
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Darangd an
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Darangd an
7.01.02	Program Penyelenggaraan	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	51.056.653	Baik	72.735.200	Baik	74.562.251	Baik	76.615.607	Baik	223.913.058	Kecamat an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik																			Darangk an
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	4.840.000	100,00	5.093.132	100,00	5.359.503	300,00	15.292.63 5	Kecamat an Darangd an
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	10.000.00 0	100,00	12.500.00 0	100,00	15.000.00 0	300,00	37.500.00 0	Kecamat an Darangd an
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	114.596.6 54	100,00	82.213.84 0	100,00	86.513.62 4	100,00	91.038.28 6	300,00	259.765.7 50	Kecamat an Darangd an
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	49.734.22 4	100,00	44.540.99 1	100,00	46.870.48 5	100,00	49.321.81 1	300,00	140.733.2 87	Kecamat an Darangd an
7.01.0.00.0. 00.08.00	Kecamatan Bojong						537.685. 000		571.838. 000		3.528.777 .528		3.528.777 .528		3.713.332 .593		3.907.539 .887		12.259.17 3.008	Kecamat an Bojong
7.01	Kecamatan						537.685. 000		571.838. 000		3.528.777 .528		3.528.777 .528		3.713.332 .593		3.907.539 .887		12.259.17 3.008	Kecamat an Bojong
4.01.4.01.12. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	264.176. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	264.176.0 00	Kecamat an Bojong
4.01.4.01.12. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	107.579. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	107.579.0 00	Kecamat an Bojong
4.01.4.01.12. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	25.930.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	25.930.00 0	Kecamat an Bojong

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Kinerja dan Keuangan																			
4.01.4.01.12. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	140.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	140.000.0 00	Kecamat an Bojong
4.01.4.01.12. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		471.958. 000		0		0		0		0		471.958.0 00	Kecamat an Bojong
		1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Bojong
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bojong
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bojong
		4 Presntase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bojong
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang- Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bojong
4.01.4.01.12. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	99.880.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	99.880.00 0	Kecamat an Bojong
																				Kecamat an Bojong

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.340.994. 994		3.350.943. 308		3.526.197. 643		3.710.617. 780		10.587.75 8.731	Kecamat an Bojong
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Bojong
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Bojong
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	76.730.00 0	Baik	67.930.00 0	Baik	71.482.74 0	Baik	75.221.28 6	Baik	214.634.0 26	Kecamat an Bojong
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	6.068.715	80,00	5.781.500	80,00	6.083.872	80,00	6.402.059	240,00	18.267.43 1	Kecamat an Bojong
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	5.830.000	80,00	5.830.000	80,00	6.134.909	80,00	6.455.765	240,00	18.420.67 4	Kecamat an Bojong
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	34.397.52 3	80,00	34.397.74 0	80,00	36.196.74 2	80,00	38.089.83 1	240,00	108.684.3 13	Kecamat an Bojong
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	64.756.29 6	80,00	63.894.98 0	80,00	67.236.68 7	80,00	70.753.16 6	240,00	201.884.8 33	Kecamat an Bojong
7.01.0.00.0. 00.09.00	Kecamatan Wanayasa						589.024. 834		632.650. 000		3.882.854 .032		3.882.854 .032		4.085.927 .298		4.299.621 .296		13.490.07 7.460	Kecamat an Wanayas a

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01	Kecamatan						589.024. 834		632.650. 000		3.882.854 .032		3.882.854 .032		4.085.927 .298		4.299.621 .296		13.490.07 7.460	Kecamat an Wanayas a
4.01.4.01.13. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	198.672. 434	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	198.672.4 34	Kecamat an Wanayas a
4.01.4.01.13. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	263.608. 400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	263.608.4 00	Kecamat an Wanayas a
4.01.4.01.13. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	23.841.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	23.841.00 0	Kecamat an Wanayas a
4.01.4.01.13. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	102.903. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	102.903.0 00	Kecamat an Wanayas a
4.01.4.01.13. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		562.650. 000		0		0		0		0		562.650.0 00	Kecamat an Wanayas a
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Wanayas a
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Wanayas a
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Wanayas a
		4 Persentase Pelayanan	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Administrasi Perkantoran																		Wanayas a
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Wanayas a
4.01.4.01.13. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	70.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	70.000.00 0	Kecamat an Wanayas a
																				Kecamat an Wanayas a
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.713.694. 032		3.703.604. 032		3.896.566. 334		4.100.356. 753		11.700.52 7.119	Kecamat an Wanayas a
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Wanayas a
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Wanayas a
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	0	Baik	5.000.000	Baik	6.000.000	Baik	10.000.00 0	Baik	21.000.00 0	Kecamat an Wanayas a
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	16.340.00 0	80,00	16.430.00 0	80,00	15.363.58 0	80,00	16.167.09 5	240,00	47.960.67 5	Kecamat an Wanayas a

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	5.000.000	80,00	10.000.000	80,00	10.000.000	240,00	25.000.000	Kecamat an Wanayas a
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	22.410.000	80,00	22.410.000	80,00	28.054.318	80,00	29.521.560	240,00	79.985.878	Kecamat an Wanayas a
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	130.410.000	80,00	130.410.000	80,00	129.943.066	80,00	133.575.888	240,00	393.928.954	Kecamat an Wanayas a
7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Kiarapedes						661.280.627		924.236.000		3.324.929.725		3.324.929.725		3.498.823.550		3.681.812.021		12.091.081.923	Kecamat an Kiaraped es
7.01	Kecamatan						661.280.627		924.236.000		3.324.929.725		3.324.929.725		3.498.823.550		3.681.812.021		12.091.081.923	Kecamat an Kiaraped es
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	271.394.127	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	271.394.127	Kecamat an Kiaraped es
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	206.906.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	206.906.500	Kecamat an Kiaraped es
4.01.4.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	41.150.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	41.150.000	Kecamat an Kiaraped es
4.01.4.01.14.07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan	Kali	51,00	51,00	51,00	141.830.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	141.830.000	Kecamat an Kiaraped es

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Berbasis Kewilayahan	Tingkat Desa/Kelurahan																		
4.01.4.01.14. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		769.236. 000		0		0		0		0		769.236.0 00	Kecamat an Kiaraped es
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Kiaraped es
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Kiaraped es
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Kiaraped es
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Kiaraped es
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Kiaraped es
4.01.4.01.14. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	155.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	155.000.0 00	Kecamat an Kiaraped es
																				Kecamat an Kiaraped es
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.225.229. 725		3.225.229. 725		3.393.909. 240		3.571.410. 693		10.190.54 9.658	Kecamat an Kiaraped es

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Kiaraped es
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Kiaraped es
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik		Kecamat an Kiaraped es
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	17.100.00 0	80,00	17.100.00 0	80,00	17.994.33 0	80,00	18.935.43 3	240,00	54.029.76 3	Kecamat an Kiaraped es
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	240,00		Kecamat an Kiaraped es
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	22.600.00 0	80,00	22.600.00 0	80,00	23.781.98 0	80,00	25.025.77 8	240,00	71.407.75 8	Kecamat an Kiaraped es
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	60.000.00 0	80,00	60.000.00 0	80,00	63.138.00 0	80,00	66.440.11 7	240,00	189.578.1 17	Kecamat an Kiaraped es
7.01.0.00.0. 00.11.00	Kecamatan Pasawahan						838.950. 709		618.931. 925		3.160.249 .377		3.160.249 .377		3.325.530 .419		3.499.455 .660		11.443.11 8.090	Kecamat an Pasawah an
7.01	Kecamatan						838.950. 709		618.931. 925		3.160.249 .377		3.160.249 .377		3.325.530 .419		3.499.455 .660		11.443.11 8.090	Kecamat an Pasawah an
4.01.4.01.15. 01	Program Pelayanan	Tersedianya Pendukung	Persen	100,00	100,00	100,00	314.822. 909	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	314.822.9 09	Kecamat an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran																		Pasawah an
4.01.4.01.15. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	389.223. 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	389.223.8 00	Kecamat an Pasawah an
4.01.4.01.15. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	21.504.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	21.504.00 0	Kecamat an Pasawah an
4.01.4.01.15. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	113.400. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	113.400.0 00	Kecamat an Pasawah an
4.01.4.01.15. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		488.931. 925		0		0		0		0		488.931.9 25	Kecamat an Pasawah an
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Pasawah an
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pasawah an
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pasawah an
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pasawah an
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pasawah an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Dengan Per Undang-Undangan																		
4.01.4.01.15. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	130.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	130.000.0 00	Kecamat an Pasawah an
																				Kecamat an Pasawah an
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.024.433. 324		3.024.433. 324		3.182.611. 187		3.349.061. 752		9.556.106. 263	Kecamat an Pasawah an
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Pasawah an
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Pasawah an
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik	0	Baik		Kecamat an Pasawah an
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	24.809.76 3	100,00	24.809.76 3	100,00	26.107.31 4	100,00	27.472.72 6	300,00	78.389.80 3	Kecamat an Pasawah an
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00		Kecamat an Pasawah an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	11.600.000	100,00	11.600.000	100,00	12.206.680	100,00	12.845.089	300,00	36.651.769	Kecamat an Pasawah an
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	99.406.290	100,00	99.406.290	100,00	104.605.238	100,00	110.076.093	300,00	314.087.621	Kecamat an Pasawah an
7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Pondoksalam						476.633.015		492.528.000		3.337.695.882		3.337.695.882		3.512.257.377		3.695.948.437		11.515.062.711	Kecamat an Pondoks alam
7.01	Kecamatan						476.633.015		492.528.000		3.337.695.882		3.337.695.882		3.512.257.377		3.695.948.437		11.515.062.711	Kecamat an Pondoks alam
4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	234.835.515	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	234.835.515	Kecamat an Pondoksa lam
4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	124.852.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	124.852.500	Kecamat an Pondoksa lam
4.01.4.01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	20.940.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	20.940.000	Kecamat an Pondoksa lam
4.01.4.01.16.07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	96.005.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	96.005.000	Kecamat an Pondoksa lam
4.01.4.01.16.07	Program Dukungan Manajemen						0		427.528.000		0		0		0		0		427.528.000	Kecamat an Pondoksa lam

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Administrasi Perkantoran																			
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Pondoksa lam
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pondoksa lam
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pondoksa lam
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pondoksa lam
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Pondoksa lam
4.01.4.01.16. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	65.000.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	65.000.00 0	Kecamat an Pondoksa lam
																				Kecamat an Pondoksa lam
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.177.398. 735		3.170.199. 962		3.336.001. 420		3.510.474. 294		10.016.67 5.676	Kecamat an Pondoksa lam
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Pondoksa lam

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Pondoksa lam
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	0	Baik	20.000.00 0	Baik	22.000.00 0	Baik	24.200.00 0	Baik	66.200.00 0	Kecamat an Pondoksa lam
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	4.440.000	100,00	4.800.000	100,00	5.051.040	100,00	5.315.210	300,00	15.166.25 0	Kecamat an Pondoksa lam
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	10.020.00 0	100,00	9.960.000	100,00	10.480.90 8	100,00	11.029.05 9	300,00	31.469.96 7	Kecamat an Pondoksa lam
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	49.932.58 3	100,00	49.768.24 0	100,00	52.371.12 0	100,00	55.110.12 8	300,00	157.249.4 88	Kecamat an Pondoksa lam
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	95.904.56 4	100,00	82.967.68 0	100,00	86.352.88 9	100,00	89.819.74 6	300,00	259.140.3 15	Kecamat an Pondoksa lam
7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Purwakarta						9.285.670.868		15.996.810.000		26.543.636.974		26.543.636.974		27.931.869.188		29.392.705.946		109.150.692.976	Kecamat an Purwaka rta
7.01	Kecamatan						9.285.670.868		15.996.810.000		26.543.636.974		26.543.636.974		27.931.869.188		29.392.705.946		109.150.692.976	Kecamat an Purwaka rta
4.01.4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	1.161.544.972	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	1.161.544.972	Kecamat an Purwakar ta

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.17. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	171.526. 200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	171.526.2 00	Kecamat an Purwakar ta
4.01.4.01.17. 06	Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	18.710.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	18.710.00 0	Kecamat an Purwakar ta
4.01.4.01.17. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	7.933.88 9.696	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	7.933.889. 696	Kecamat an Purwakar ta
4.01.4.01.17. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		2.221.81 0.000		0		0		0		0		2.221.810. 000	Kecamat an Purwakar ta
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Purwakar ta
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Purwakar ta
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Purwakar ta
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Purwakar ta
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Purwakar ta

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.17. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	13.775.0 00.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	13.775.00 0.000	Kecamat an Purwakar ta
																				Kecamat an Purwakar ta
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		15.753.07 4.399		15.753.07 4.399		16.576.96 0.190		17.443.93 5.208		49.773.96 9.797	Kecamat an Purwakar ta
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		CC		CC		CC		CC		CC		Kecamat an Purwakar ta
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Purwakar ta
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	222.587.5 00	Baik	222.587.5 00	Baik	234.228.8 26	Baik	246.478.9 94	Baik	703.295.3 20	Kecamat an Purwakar ta
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	10.360.82 1.934	80,00	10.360.82 1.934	80,00	10.902.69 2.921	80,00	11.472.90 3.761	240,00	32.736.41 8.616	Kecamat an Purwakar ta
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	49.248.00 0	80,00	49.248.00 0	80,00	51.823.67 0	80,00	54.534.04 8	240,00	155.605.7 18	Kecamat an Purwakar ta
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	133.227.1 49	80,00	133.227.1 49	80,00	140.194.9 30	80,00	147.527.1 24	240,00	420.949.2 03	Kecamat an

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangk ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Pemerintahan Umum	Umum yang Dilaksanakan																		Purwakar ta
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	51,00	24.677.99 2	51,00	24.677.99 2	51,00	25.968.65 1	51,00	27.326.81 1	153,00	77.973.45 4	Kecamat an Purwakar ta
7.01.0.00.0. 00.14.00	Kecamatan Babakan Cikao						403.012. 113		527.824. 000		3.447.532 .308		3.447.532 .308		3.627.838 .248		3.817.574 .188		11.823.78 0.857	Kecamat an Babakan Cikao
7.01	Kecamatan						403.012. 113		527.824. 000		3.447.532 .308		3.447.532 .308		3.627.838 .248		3.817.574 .188		11.823.78 0.857	Kecamat an Babakan Cikao
4.01.4.01.18. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	72,05	196.332. 573	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	72,05	196.332.5 73	Kecamat an Babakan Cikao
4.01.4.01.18. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	91,70	113.707. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	91,70	113.707.0 00	Kecamat an Babakan Cikao
4.01.4.01.18. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	43,84	19.290.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43,84	19.290.00 0	Kecamat an Babakan Cikao
4.01.4.01.18. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	73.682.5 40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	73.682.54 0	Kecamat an Babakan Cikao
4.01.4.01.18. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		457.824. 000		0		0		0		0		457.824.0 00	Kecamat an Babakan Cikao

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Babakan Cikao
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Babakan Cikao
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Babakan Cikao
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Babakan Cikao
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Babakan Cikao
4.01.4.01.18.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	60,64	0	100,00	70.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	160,64	70.000.000	Kecamat an Babakan Cikao
																				Kecamat an Babakan Cikao
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		3.301.779.759		3.301.779.759		3.474.462.840		3.656.177.247		10.432.419.846	Kecamat an Babakan Cikao
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Babakan Cikao
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Kecamat an Babakan Cikao

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Pelayanan Perkantoran																		
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	Baik	14.485.03 0	Baik	14.485.03 0	Baik	15.242.59 7	Baik	16.039.78 5	Baik	45.767.41 2	Kecamat an Babakan Cikao
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	16.745.18 9	100,00	16.745.18 9	100,00	17.620.96 2	100,00	18.542.53 9	300,00	52.908.69 0	Kecamat an Babakan Cikao
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	28.431.73 5	100,00	28.431.73 5	100,00	29.918.71 5	100,00	31.483.46 4	300,00	89.833.91 4	Kecamat an Babakan Cikao
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	47.475.00 0	100,00	47.475.00 0	100,00	49.957.94 3	100,00	52.570.74 3	300,00	150.003.6 86	Kecamat an Babakan Cikao
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	38.615.59 5	100,00	38.615.59 5	100,00	40.635.19 1	100,00	42.760.41 0	300,00	122.011.1 96	Kecamat an Babakan Cikao
7.01.0.00.0. 00.15.00	Kecamatan Campaka						483.760. 051		566.400. 000		3.274.421 .639		3.274.421 .639		3.445.673 .890		3.625.882 .635		11.396.13 8.215	Kecamat an Campak a
7.01	Kecamatan						483.760. 051		566.400. 000		3.274.421 .639		3.274.421 .639		3.445.673 .890		3.625.882 .635		11.396.13 8.215	Kecamat an Campak a
4.01.4.01.19. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	245.343. 651	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	245.343.6 51	Kecamat an Campaka
4.01.4.01.19. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	94.161.5 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	94.161.50 0	Kecamat an Campaka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
4.01.4.01.19. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	23.689.9 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	23.689.90 0	Kecamat an Campaka
4.01.4.01.19. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	120.565. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	120.565.0 00	Kecamat an Campaka
4.01.4.01.19. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		441.400. 000		0		0		0		0		441.400.0 00	Kecamat an Campaka
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Campaka
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Campaka
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Campaka
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Campaka
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Campaka
4.01.4.01.19. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	125.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	125.000.0 00	Kecamat an Campaka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	di Wilayah Kecamatan																			
																				Kecamat an Campaka
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.057.068. 145		3.057.068. 145		3.216.952. 809		3.385.199. 441		9.659.220. 395	Kecamat an Campaka
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Campaka
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Campaka
7.01.02	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	65.736.18 4	Baik	65.736.18 4	Baik	69.174.18 6	Baik	72.791.99 6	Baik	207.702.3 66	Kecamat an Campaka
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	15.126.82 1	80,00	15.126.82 1	80,00	15.917.95 4	80,00	16.750.46 3	240,00	47.795.23 8	Kecamat an Campaka
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	11.956.51 8	80,00	11.956.51 8	80,00	12.581.84 4	80,00	13.239.87 4	240,00	37.778.23 6	Kecamat an Campaka
7.01.05	Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	72.431.28 1	80,00	72.431.28 1	80,00	76.219.43 7	80,00	80.205.71 4	240,00	228.856.4 32	Kecamat an Campaka
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	51,00	52.102.69 0	51,00	52.102.69 0	51,00	54.827.66 0	51,00	57.695.14 7	153,00	164.625.4 97	Kecamat an Campaka

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.0.00.0. 00.16.00	Kecamatan Cibatu						583.967. 632		912.585. 000		3.607.871 .401		3.607.871 .401		3.796.563 .075		3.995.123 .324		12.896.11 0.432	Kecamat an Cibatu
7.01	Kecamatan						583.967. 632		912.585. 000		3.607.871 .401		3.607.871 .401		3.796.563 .075		3.995.123 .324		12.896.11 0.432	Kecamat an Cibatu
4.01.4.01.20. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	226.443. 132	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	226.443.1 32	Kecamat an Cibatu
4.01.4.01.20. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	137.822. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	137.822.0 00	Kecamat an Cibatu
4.01.4.01.20. 06	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	35.682.5 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	35.682.50 0	Kecamat an Cibatu
4.01.4.01.20. 07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggar aan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengaw asan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	184.020. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	184.020.0 00	Kecamat an Cibatu
4.01.4.01.20. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		817.585. 000		0		0		0		0		817.585.0 00	Kecamat an Cibatu
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Cibatu
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Cibatu
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Cibatu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Cibatu
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Cibatu
4.01.4.01.20.41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	95.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	95.000.000	Kecamat an Cibatu
																				Kecamat an Cibatu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		3.563.812.834		3.563.812.834		3.750.200.245		3.946.335.718		11.260.348.797	Kecamat an Cibatu
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Cibatu
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Cibatu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	44.058.567	Baik	44.058.567	Baik	46.362.830	Baik	48.787.606	Baik	139.209.003	Kecamat an Cibatu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	240,00		Kecamat an Cibatu

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	240,00		Kecamat an Cibatu
7.01.05	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	80,00	0	240,00		Kecamat an Cibatu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	300,00		Kecamat an Cibatu
7.01.0.00.0.00.17.00	Kecamatan Bungursari						684.266.000		629.432.000		3.205.977.837		3.205.977.837		3.373.650.478		3.550.092.398		11.443.418.713	Kecamat an Bungurs ari
7.01	Kecamatan						684.266.000		629.432.000		3.205.977.837		3.205.977.837		3.373.650.478		3.550.092.398		11.443.418.713	Kecamat an Bungurs ari
4.01.4.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	269.191.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	269.191.400	Kecamat an Bungurs ari
4.01.4.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	199.668.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	199.668.000	Kecamat an Bungurs ari
4.01.4.01.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	36.315.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	36.315.000	Kecamat an Bungurs ari
4.01.4.01.21.07	Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan	Kali	51,00	51,00	51,00	179.091.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	51,00	179.091.600	Kecamat an Bungurs ari

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang k at Daerah Penang g Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Berbasis Kewilayahan	Tingkat Desa/Kelurahan																		
4.01.4.01.21. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		519.432. 000		0		0		0		0		519.432.0 00	Kecamat an Bungurs ari
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	99,97	43,26	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kecamat an Bungurs ari
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor	Persen	0,00	0,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bungurs ari
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	99,93	99,44	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bungurs ari
		4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	86,31	73,12	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bungurs ari
		5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kecamat an Bungurs ari
4.01.4.01.21. 41	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	0	100,00	110.000. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	110.000.0 00	Kecamat an Bungurs ari
																				Kecamat an Bungurs ari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota						0		0		3.076.020. 714		3.076.020. 714		3.236.896. 598		3.406.186. 290		9.719.103. 602	Kecamat an Bungurs ari

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B		Kecamat an Bungurs ari
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		80,00		80,00		80,00		80,00		240,00		Kecamat an Bungurs ari
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Katego ri	-	-	-	0	-	0	Baik	29.987.705	Baik	29.987.705	Baik	31.556.062	Baik	33.206.444	Baik	94.750.211	Kecamat an Bungurs ari
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	9.706.065	100,00	9.706.065	100,00	10.213.692	100,00	10.747.868	300,00	30.667.625	Kecamat an Bungurs ari
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	9.600.000	90,00	9.600.000	90,00	10.102.080	90,00	10.630.419	270,00	30.332.499	Kecamat an Bungurs ari
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	44.010.000	100,00	44.010.000	100,00	46.311.723	100,00	48.733.826	300,00	139.055.549	Kecamat an Bungurs ari
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	36.653.353	100,00	36.653.353	100,00	38.570.323	100,00	40.587.551	300,00	115.811.227	Kecamat an Bungurs ari
8.01.0.00.0.00.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik						4.683.467.967		4.027.665.000		11.953.520.308		0		0		0		20.664.653.275	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik						4.683.467.967		4.027.665.000		11.953.520.308		0		0		0		20.664.653.275	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	427.235.267	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	427.235.267	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	306.152.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	306.152.700	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	29.585.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	29.585.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		797.140.000		0		0		0		0		797.140.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	90,00	90,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Sesuai Peraturan Perundang- undangan																		
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02. 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Jumla h Forum /Tim	4,00	4,00	4,00	22.510.0 00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	22.510.00 0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02. 17	Program Pengembanga n Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:					1.032.79 0.000		0		0		0		0		0		1.032.790. 000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Jumlah LSM	LSM	26,00	27,00	27,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Jumlah Kegiatan	Kegiata n	5,00	5,00	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02. 19	Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina	Jumla h forum	3,00	3,00	3,00	2.698.13 0.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3,00	2.698.130. 000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02. 21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	75,00	76,00	76,00	167.065. 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	76,00	167.065.0 00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02. 39	Program Kesatuan Bangsa						0		745.025. 000		0		0		0		0		745.025.0 00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.40	Program Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta	Persen	100,00	100,00	100,00	0	100,00	2.485.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	2.485.500.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.41	Program Politik Dalam Negeri	Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200,00	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
																				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		3.673.163.501		0		0		0		3.673.163.501	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		-		-		-		B		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	381.556.718	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	381.556.718	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:																		
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembanga n Etika Serta Budaya Politik						0		0		1.664.562. 802		0		0		0		1.664.562. 802	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka tan						0		0		349.999.9 07		0		0		0		349.999.9 07	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						0		0		650.611.4 92		0		0		0		650.611.4 92	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
		1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	5.233.625.888	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.233.625.888	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						0		0		0		11.953.520.308		12.578.689.420		13.236.554.877		37.768.764.605	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik						0		0		0		11.953.520.308		12.578.689.420		13.236.554.877		37.768.764.605	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0		0		3.673.163.501		3.865.269.952		4.067.423.571		11.605.857.024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		-		B		B		B		B		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan	Persentase Pembinaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	381.556.718	100,00	401.512.134	100,00	422.511.219	300,00	1.205.580.071	Badan Kesatuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:																		Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembanga n Etika Serta Budaya Politik						0		0		0		1.664.562. 802		1.751.619. 437		1.843.229. 133		5.259.411. 372	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka tan						0		0		0		349.999.9 07		368.304.9 02		387.567.2 49		1.105.872. 058	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembanga						0		0		0		650.611.4 92		684.638.4 73		720.445.0 65		2.055.695. 030	Badan Kesatuan Bangsa

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/ Parsial 2021		2022		2023				
				2017	2018	Realisa si	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+ 15+17)	20 = (8+10+14+ 16+18)	21
	n Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																			dan Politik
		1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		300,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.233.625. 888	100,00	5.507.344. 522	100,00	5.795.378. 640	300,00	16.536.34 9.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Bappelitbangda, 2020

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023; dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan targetnya selama 5 (lima) tahun sampai akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama IKU Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan pada target yang ditetapkan

oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8.1.

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator kinerja kunci pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator pada tingkat dampak atau *impact*. Indikator tingkat *impact* ini merupakan IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja daerah tingkat hasil (*outcome*). Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator	Satuan	2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	69,28	69,56	69,92	70,35	349,78
2	Angka Kemiskinan	Persen	7,48	7,91	7,77	7,63	7,48	38,27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,65	10,69	10,27	10,08	9,91	50,6
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,38	2,42	3,18	3,66	4,16	17,8
5	Indeks Gini	Poin	0,3	0,50	0,39	0,36	0,34	1,89
6	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	11.819.000	12.200.500	12.700.000	13.000.500	13.150.500	62.870.500
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,48	1,45	0,64	0,5	0,47	4,54
8	Inflasi	Persen	3,19	3,16	3,06	2,96	2,89	15,26
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	7,91	7,97	8,04	8,12	39,96
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,10	12,36	12,46	12,58	12,73	62,23
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	70,58	70,63	70,68	70,75	353,44
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14	236,73
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,19	88,79	89,25	89,71	90,18	445,12
14	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	72,04	74,48	75,48	76,47	77,46	375,93
15	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	438,15
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71	71,31	71,81	72,31	72,81	359,24
17	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	85,4	85,52	85,66	85,82	86	428,4
18	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	52	55	58	61	64	290

No.	Indikator	Satuan	2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)
19	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	16	20	25	32	40	133
20	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	34	45,52	55,52	65,52	75,52	276,08
21	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Persen	18,52	18,52	7,41	11,11	18,52	74,08
22	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	35	40	45	50	55	225
23	Jumlah Wisatawan	Orang	1.955.778	2.260.698	2.260.698	2.515.000	2.515.000	11.507.174
24	Laju UMKM Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100	500
25	Laju Koperasi Aktif	Persen	80	85	90	95	100	450
26	Laju Pertumbuhan IKM	Persen	55	60	65	70	75	325
27	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	4,69	4,74	4,83	4,92	5	24,18
28	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	62,7	60	65	70	75	332,7
29	Skor Pola pangan Harapan	Poin	88,55	89,7	90,85	92	93,15	454,25
30	Laju Produksi Pertanian	Persen	1,22	1,22	1,22	1,08	1,1	5,84
31	Laju Produksi Peternakan	Persen	3	2	2	2	2	11
32	Laju Produksi Perikanan	Persen	14	14	14	14	14	70
33	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	80	85	90	95	100	450
34	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	68,5	70	71	72	73	354,5
35	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	25	30	35	40	55	185
36	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	45	50	55	55	60	265
37	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Predikat	B	B	BB	BB	A	A
38	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	35	35	35	35	35	175
39	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Predikat	B	B	B	B	B	B

No.	Indikator	Satuan	2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)
	Pelayanan Publik							
40	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	100	100	100	100	100	500
41	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	PD	0	1	1	2	2	6
42	Indeks Profesionalitas ASN	Sebutan/ Poin	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)
43	Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber : Bappelitbangda, 2020

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purwakarta

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,28	69,84	70,67	69,28	69,56	69,92	70,35	349,78	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)
2	Angka Kemiskinan	Persen	9,06	8,88	7,48	7,91	7,77	7,63	7,48	38,27	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,11	8,93	9,65	10,69	10,27	10,08	9,91	50,6	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,22	4,38	2,42	3,18	3,66	4,16	17,8	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)
5	Indeks Gini	Poin	0,39	0,38	0,3	0,4961	0,3897	0,3587	0,3407	1,8852	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)
6	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rp	10.941.000	11.056.000	11.819.000	12.200.500	12.700.000	13.000.500	13.150.500	62.870.500	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,23	1,19	1,48	1,45	0,64	0,5	0,47	4,54	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta (Indikator Makro Ekonomi)
8	Inflasi	Persen	4,74	2,65	3,19	3,16	3,06	2,96	2,89	15,26	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,91	7,92	7,91	7,97	8,04	8,12	39,96	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,89	12,06	12,10	12,36	12,46	12,58	12,73	62,23	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,42	70,54	70,8	70,58	70,63	70,68	70,75	353,44	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	45,81	46,11	46,54	46,95	47,35	47,75	48,14	236,73	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,4	87,86	87,19	88,79	89,25	89,71	90,18	445,12	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
14	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	71,51	72,5	72,04	74,48	75,48	76,47	77,46	375,93	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
15	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	83,63	84,63	85,63	86,63	87,63	88,63	89,63	438,15	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,81	70,31	71	71,31	71,81	72,31	72,81	359,24	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
17	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	82,6	84	85,4	85,52	85,66	85,82	86	428,4	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
18	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	46	49	52	55	58	61	64	290	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
19	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	2	9	16	20	25	32	40	133	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
20	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	15,52	25,52	34	45,52	55,52	65,52	75,52	276,08	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Kab Purwakarta
21	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Persen	0	0	18,52	18,52	7,41	11,11	18,52	74,08	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
22	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	25	30	35	40	45	50	55	225	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
23	Jumlah Wisatawan	Orang	4.500	5.000	1.955.778	2.260.698	2.260.698	2.515.000	2.515.000	11.507.174	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
24	Laju UMKM Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	500	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
25	Laju Koperasi Aktif	Persen	70	75	80	85	90	95	100	450	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
26	Laju Pertumbuhan IKM	Persen	45	50	55	60	65	70	75	325	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
27	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	4,51	4,6	4,69	4,74	4,83	4,92	5	24,18	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
28	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	65	70	62,7	60	65	70	75	332,7	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
29	Skor Pola pangan Harapan	Poin	86,25	87,4	88,55	89,7	90,85	92	93,15	454,25	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
30	Laju Produksi Pertanian	Persen	1,08	1,15	1,22	1,22	1,22	1,08	1,1	5,84	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
31	Laju Produksi Peternakan	Persen	3	3	3	2	2	2	2	11	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
32	Laju Produksi Perikanan	Persen	14	14	14	14	14	14	14	70	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,91	8,78	8,25	8,43	8,62	8,80	42,88	IKU Dinas Pendidikan
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,89	12,06	12,10	12,42	12,6	12,78	12,97	62,87	IKU Dinas Pendidikan

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,55	70,71	70,85	70,98	71,11	71,24	354,89	IKU Dinas Kesehatan
2	Persentase kematian ibu	Persen	0,11	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,6	IKU Dinas Kesehatan
3	Persentase kematian bayi	Persen	0,53	0,29	0,5	0,49	0,46	0,44	0,41	2,3	IKU Dinas Kesehatan
1	Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	Persen	60	60	60	65	70	75	80	350	IKU RS Bayu Asih
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	83,66	84,1	87,80	10,58	-	-	-	98,38	IKU Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1	Jumlah Bangunan Gedung milik pemerintah Yang Dibangun/Direvitalisasi	Unit	16	10	15	15	-	-	-	30	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2	Presentase RTH yang terpelihara	Persen	80	100	80	100	-	-	-	180	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3	Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Terpelihara	Persen	100	100	100	100	-	-	-	200	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
4	Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang	Persen	0	0	80	80	-	-	-	160	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
5	Jumlah Lokasi yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki	Titik	13	36	38	8	-	-	-	46	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
6	Jumlah Daerah Genangan Yang Tertangani	Titik	3	1	3	3	-	-	-	6	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
7	Presentase Kawasan Kumuh	Persen	0	0	0	5	-	-	-	5	IKU Dinas Tata Ruang

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan										dan Permukiman
8	Rasio Ketersediaan TPU milik pmda	Persen	1,4	1,79	1,79	3,74	-	-	-	5,53	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
9	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	92,09	92,33	94,66	93,53	-	-	-	188,19	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
10	Presentase Cakupan layanan Air Minum	Persen	70,89	79,12	84,86	86	-	-	-	170,86	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
11	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan	Persen	0	0	0	18,5	-	-	-	18,5	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
12	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang	Persen	100	100	100	100	-	-	-	200	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
13	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB	Hari	9	5	14	5	-	-	-	19	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
14	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan	Persen	0	100	100	100	-	-	-	200	IKU Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	83,66	84,1	87,80	-	11,63	11,75	11,99	35,37	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Presentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan	Persen	0	0	0	-	5	5	5	15	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	92,09	92,33	94,66	-	93,05	93,29	93,53	279,87	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Permukiman
3	Presentase Cakupan layanan Air Minum	Persen	70,89	79,12	84,86	-	83	84,5	86	253,5	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Tingkat keamanan, tentram, dan tertib dari bahaya kebakaran dan kebencanaan	Persen	41	56	60	71	-	-	-	131	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2	Indeks ketahanan daerah	Persen	80	100	100	100	-	-	-	200	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Persen	n/a	10	9	10	10	10	10	49	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	n/a	80	80	80	80	80	80	400	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
3	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban transtibmas	Kegiatan	n/a	33	34	34	34	40	40	182	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
4	Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Kegiatan	n/a	7	7	8	8	8	8	39	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Persen	n/a	n/a	48	48	60	60	72	288	IKU Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Persen	n/a	70	80	85	90	95	100	450	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
7	Persentase anggota satpol pp yang dibina	Persen	n/a	100	80	85	90	95	100	450	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
8	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Persen	n/a	10	20	20	20	20	20	100	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
9	Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Kegiatan	n/a	5	5	10	10	10	10	45	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
1	Indeks ketahanan daerah	Persen	-	-	-	-	100	100	100	300	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Persentase Layanan SPM sub urusan Pemadam Kebakaran	Persen	-	-	-	-	100	100	100	300	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Persen	n/a	n/a	85	100	100	100	100	485	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	n/a	93,68	100	100	100	100	493,68	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	Persen	n/a	n/a	70	100	100	100	100	470	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
4	Tingkat Dukungan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	n/a	80	100	100	100	100	480	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persen	n/a	n/a	63,88	100	100	100	100	463,88	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	n/a	n/a	86,82	100	100	100	100	486,82	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	78	100	100	100	100	478	IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif	Persen	41,27	46,66	99,86	75	85,55	95	100	455,41	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Persentase Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Persen	34,92	47,15	99,85	75	85	95	100	454,85	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	42,56	40,38	100	70	80	90	100	440	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4	Tingkat Kelancaran berusaha/Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan	Persen	n/a	42,86	69,78	70	80	90	100	409,78	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
5	Persentase Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja Yang Dapat Ditangani	Persen	n/a	42,86	72,37	65	80	95	100	412,37	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
6	Persentase Penyebaran Penduduk melalui pengiriman Transmigrasi	Persen	0	60	100	80	90	95	100	465	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
7	Persentase Pengiriman Transmigrasi	Persen	0	100	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1	Persentase kecukupan bahan pangan	Persen	100	100	124,12	100	100	100	100	524,12	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
2	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	-24,9	26,27	3,49	28,27	29,27	30,27	31,27	122,57	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
1	Waktu penyelesaian perijinan perijinan lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase volume sampah yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Lingkungan Hidup
1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK)	Persen	75	75	80	-	-	-	-	80	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran serta Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Kependudukan	Persen	50	50	80	-	-	-	-	80	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran serta Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pencatatan Sipil	Persen	20	25	50	-	-	-	-	50	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	75	75	80	100	-	-	-	180	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	80	80	100	100	-	-	-	200	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Tingkat Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	Persen	80	80	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Tingkat Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	-	-	-	95	95	95	95	380	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi/lembaga lainnya	Persen	-	-	-	95	95	95	95	380	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persen	20	23	25	27	30	33	35	150	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Pembinaan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	TFR	Persen	n/a	2,49	2,49	2,37	2,25	2,23	2,10	11,44	IKU Dinas Pengendalian

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Penduduk dan Keluarga Berencana
2	CPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive Prevalence Rate)	Persen	n/a	79,01	79,01	79,03	79,06	79,07	79,08	395,25	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Tingkat Kualitas pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi (IT)	Persen	59	91	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Perhubungan
2	Rasio kelengkapan pengatur dan pengamanan lalu lintas	Persen	59	91	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Perhubungan
1	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur infomatika	Persen	50	95	96	100	100	100	100	496	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase layanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	88	98	98	100	100	100	100	498	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase ketersediaan data/infromasi statistik sektoral daerah	Persen	-	33	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan infromasi (D)	Persen	69	95	100	100	100	100	100	500	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase peningkatan peran koperasi	Persen	n/a	n/a	50	100	100	100	100	450	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											dan Perindustrian
2	Persentase koperasi yang sehat dan aktif	Persen	n/a	n/a	15	100	100	100	100	415	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh	Persen	n/a	n/a	82	100	100	100	100	482	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Persentase perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, nasional dan global serta menciptakan tertib niaga	Persen	n/a	n/a	81	100	100	100	100	481	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Persentase struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimalnya kinerja UPTD pasar serta terciptanya tertib niaga	Persen	n/a	n/a	81	100	100	100	100	481	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Persentase usaha industri guna menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif terutama bagi industri kecil dan menengah serta memperkuat struktur industri	Persen	n/a	n/a	75	100	100	100	100	475	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Persentase industri kecil dan menengah yang memenuhi standar dan optimalnya kinerja UPTD pengembangan sentra kramik dan grabah	Persen	n/a	n/a	80	100	100	100	100	480	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	OPINI	n/a	n/a	-	-	B	B	B	B	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Persen	n/a	n/a	-	-	80	80	80	240	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Koperasi	n/a	n/a	-	-	150	150	150	450	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	UMKM	n/a	n/a	-	-	150	150	150	450	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Jumlah Alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	UNIT	n/a	n/a	-	-	1500	1700	2000	5200	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	Komoditi	n/a	n/a	-	-	9	9	9	27	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Jumlah IKM produktif	IKM	n/a	n/a	-	-	30	30	30	90	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Persen	3	3	11,01	5	5	5	5	31,01	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2	Nilai Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	Rp Triliun	n/a	n/a	61,3	60	65	70	75	331,3	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	80,31	82,23	84,39	82,35	82,4	82,45	82,5	414,09	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Persentase Pemuda Berprestasi (Pemuda pelopor, PPN, PASKIBRA, KPN)	Persen	n/a	0	7,01	7,14	14,29	14,29	21,43	64,16	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase Cabang Olah raga Berprestasi	Persen	n/a	45,45	50	45,45	45,45	54,55	54,55	250	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga	Persen	n/a	3,69	3	3,69	3,69	3,66	3,69	17,73	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Sarana dan prasarana Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang Dibangun/Direvitalisasi	Persen	n/a	50	12,5	50	50	50	50	212,5	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Jumlah prestasi Seni Budaya tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	2	3	5	5	6	7	8	31	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	0	0	10	20	20	40	40	130	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Persentase Pembangunan/ Revitalisasi Sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Persen	n/a	50	12,5	50	50	50	50	212,5	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
8	Persentase prestasi Seni Budaya	Persen	20	30	40	50	60	70	80	300	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
9	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung	Orang	1.866	14.815	13.611	14.815	14.815	15.000	15.000	73241	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara yang berkunjung	Orang	1.835.249	2.245.883	1.942.167	2.245.883	2.245.883	2.500.000	2.500.000	11.433.933	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
11	Jumlah Destinasi wisata yang menarik dan diminati oleh wisatawan	Buah	45	45	46	46	47	47	48	234	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
12	Persentase nilai ekonomi masyarakat melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	3,11	3,26	3,26	3,56	3,71	3,86	4,01	18,4	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan	Poin	0	0	80,78	75	80	80	85	400,78	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Persen	70	72	77,54	76	77	81	83	394,54	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
1	Persentase kecukupan Pangan Gizi Asal Ternak dan Ikan:										IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Daging (2)	Persen	10	10,2	28,98	10,61	10,82	11,04	11,26	72,72	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Telur (5)	Persen	6,2	6,5	16,85	7,17	7,52	7,90	8,30	47,74	IKU Dinas Perikanan dan

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Peternakan
	- Susu (50)	Persen	0,22	0,25	0,06	0,56	0,84	1,27	1,90	4,63	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Ikan (2)	Persen	27,9	28,2	28,76	29,34	29,93	30,52	31,14	149,69	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Persentase kecukupan bahan pangan	Persen	100	100	124,12	-	-	-	-	124,12	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Laju Produksi Perikanan:										IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Laju produksi perikanan budidaya	Persen	n/a	n/a	9,24	14	14	14	14	65,24	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Laju produksi perikanan tangkap	Persen	n/a	n/a	7,52	7,50	7,50	7,50	7,50	37,52	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
	- Laju produksi ikan KJA	Persen	n/a	n/a	0	-	-	-	-	0,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Laju Produksi Ternak	Persen	n/a	n/a	2,22	2	2	2	2	10,22	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Laju produksi peternakan	Persen	n/a	n/a	5,16	2	2	2	2	13,16	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Laju Populasi Ternak	Persen	n/a	n/a	2,22	2	2	2	2	10,22	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Laju Aktivitas usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Persen	n/a	n/a	2	2	2	2	2	10,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Persentase pelaku usaha pemasaran produk hasil peternakan	Persen	n/a	n/a	2	2	2	2	2	10,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Persentase petani pelaku agribisnis yang meningkat pengetahuan dan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	500,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	ketrampilannya										
10	Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan kawasan budidaya dan perairan umum	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	85,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Laju Produksi Ikan KJA	Persen	0	0	0	-	-	-	-	0,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah kecamatan yang disediakan PAH / HPAH (Produk Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan) yang ASUH	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17	85,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Status kesehatan hewan bebas penyakit hewan menular	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
1	Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya	Persen	n/a	n/a	90	70	80	90	100	430	IKU Sekretariat Daerah
2	Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persen	n/a	n/a	100	80	90	100	100	470	IKU Sekretariat Daerah
3	Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi	Persen	n/a	n/a	25	50	75	100	100	350	IKU Sekretariat Daerah
4	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	n/a	n/a	85,71	100	100	100	100	486	IKU Sekretariat Daerah
5	Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	500	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan	Persen	n/a	n/a	25	50	50	75	100	300	IKU Sekretariat Daerah
7	Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	500	IKU Sekretariat Daerah
8	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	n/a	n/a	90	90	100	100	100	480	IKU Sekretariat Daerah
9	Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	500	IKU Sekretariat Daerah
10	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	500	IKU Sekretariat Daerah
11	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persen	n/a	n/a	76,53	70	80	85	90	402	IKU Sekretariat Daerah
1	Persentase fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD	Persen	66	60	100	100	100	100	100	500	IKU Sekretariat DPRD
1	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persen	80	80	80	80	81	82	83	406	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persen	80	80	80	80	81	82	83	406	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
3	Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah	Persen	50	50	50	60	65	70	75	320	IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Opini Laporan keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Jumlah sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sistem	3	3	3	4	4	4	4	19	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	Persentase capaian PAD	Persen	n/a	95,01	-	-	-	-	-	-	IKU Badan Pendapatan Daerah
2	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	Persen	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	IKU Badan Pendapatan Daerah
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	IKU Badan Pendapatan Daerah
4	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	18,41	17,90	19,37	19,25	19,5	19,75	20	97,87	IKU Badan Pendapatan Daerah
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	-	-	-	78	79	80	237	IKU Badan Pendapatan Daerah
1	Sistem Merit	Kategori	0	0	0	100	KATEGORI III BAIK	KATEGORI III BAIK	KATEGORI III BAIK	KATEGORI III BAIK	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Jumlah sistem pelayanan di bidang kepegawaian yang dapat diaplikasikan dengan baik	Sistem	1	2	0	2	3	3	3	11	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
3	Persentase pemberian penghargaan ASN berprestasi/ Berinovasi/ dan ASN Purna Bhakti / Pensiun	Persen	3,79	3,99	4,38	3,39	3,47	5,42	5,08	22	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik	Sistem	1	2	2	3	3	4	4	16	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Level	2	2	2	3	3	3	3	14,00	IKU Inspektorat
2	Persentase nilai SAKIP katagori Baik (B) pada Perangkat Daerah	Persen	80	100	60	63	65	70	75	333,00	IKU Inspektorat
3	Tingkat Kapabilitas APIP/ Internal Audit Capability Model (IACM)	Persen	80	90	100	-	-	-	-	100,00	IKU Inspektorat
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	89	92	92	93	93	459	IKU Kecamatan Jatiluhur
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	90	100	100	100	100	490	IKU Kecamatan Jatiluhur
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	89	92	92	93	93	459	IKU Kecamatan Sukasari

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	90	100	100	100	100	490	IKU Kecamatan Sukasari
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Maniis
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Maniis
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Tegalwaru
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Tegalwaru
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Plered
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Plered
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	83	92	92	93	93	453	IKU Kecamatan Sukatani
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen	Persen	66,63	76,18	65	100	100	100	100	465	IKU Kecamatan Sukatani

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Perkantoran										
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Darangdan
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Darangdan
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Bojong
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Bojong
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	89	92	92	93	93	459	IKU Kecamatan Wanayasa
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	90	100	100	100	100	490	IKU Kecamatan Wanayasa
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	89	92	92	93	93	459	IKU Kecamatan Kiarapedes
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	90	100	100	100	100	490	IKU Kecamatan Kiarapedes

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	95,19	92	92	93	93	465,19	IKU Kecamatan Pasawahan
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	87,72	100	100	100	100	487,72	IKU Kecamatan Pasawahan
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Pondoksalam
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Pondoksalam
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Purwakarta
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Purwakarta
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Babakancikao
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	74,76	100	100	100	100	474,76	IKU Kecamatan Babakancikao
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap	Persen	90	91	91	92	92	93	93	461	IKU Kecamatan Campaka

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	pelayanan di Kecamatan										
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	100	100	100	100	100	500	IKU Kecamatan Campaka
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	89	92	92	93	93	459	IKU Kecamatan Cibatu
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	90	100	100	100	100	490	IKU Kecamatan Cibatu
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	90	91	89	92	92	93	93	459	IKU Kecamatan Bungursari
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	66,63	76,18	89	100	100	100	100	489	IKU Kecamatan Bungursari
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa	Persen	100	100	98	100	-	-	-	198	IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	100	100	-	-	-	200	IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah	Persen	100	100	90	100	-	-	-	190	IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa	Persen	-	-	-	-	100	100	100	300	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Politik Dalam Negeri	Persen	-	-	-	-	100	100	100	300	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah	Persen	-	-	-	-	100	100	100	300	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	70	75	80	85	90	95	100	450	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	70	75	68,5	70	71	72	73	354,5	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	15	20	25	30	35	40	55	185	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	0	0	45	50	55	55	60	265	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
5	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	A	A	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
6	Nilai LPPD Kab. Purwakarta	Poin	31,3	35	35	35	35	35	35	175	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Predikat	C	C	B	B	B	B	B	B	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
8	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	Persen	88	98	100	100	100	100	100	500	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
9	Predikat Wilayah Bebas	PD	0	0	0	1	1	2	2	6	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)										Kab Purwakarta
10	Indeks Profesionalitas ASN	Sebutan/ Poin	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (0-60)	Sangat Rendah (0-60)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)	Rendah (61-70)	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta
11	Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	IKU Pemerintah Daerah Kab Purwakarta

Sumber : Bappelitbangda, 2020

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
C. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1.01.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Pendidikan										Dinas Pendidikan
1.01	Pendidikan										Dinas Pendidikan
1	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Persen	10,40	24,56	55,43	46,68	-	-	-	102,11	Dinas Pendidikan
2	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persen	0,00	57,35	67,16	76,96	-	-	-	144,12	Dinas Pendidikan
3	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	Persen	0,00	57,41	63,89	70,37	-	-	-	134,26	Dinas Pendidikan
4	Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi	Persen	0,00	8,14	88,23	24,42	-	-	-	112,65	Dinas Pendidikan
5	Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%)	Persen	93,78	95,32	95,32	96,66	-	-	-	191,98	Dinas Pendidikan
6	Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Persen	0,00	0,00	0,45	1,86	-	-	-	2,31	Dinas Pendidikan
7	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Persen	50,07	61,25	59,19	62,46	-	-	-	121,65	Dinas Pendidikan
8	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	Persen	99,51	99,52	99,53	99,55	-	-	-	199,08	Dinas Pendidikan
9	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)	Persen	99,72	99,72	99,72	99,76	-	-	-	199,48	Dinas Pendidikan
10	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik	Persen	18,91	17,25	18,45	19,75	-	-	-	38,20	Dinas Pendidikan
11	Persentase Kondisi Ruang	Persen	31,47	32,00	31,91	36,64	-	-	-	68,55	Dinas Pendidikan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kelas SMP dalam keadaan baik										
12	Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%)	Persen	57,35	97,01	100,00	100	-	-	-	200,00	Dinas Pendidikan
											Dinas Pendidikan
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	-	-	-	-	68,00	69,36	79,87	217,23	Dinas Pendidikan
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	-	-	-	-	99,57	99,58	99,59	298,74	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Persen	-	-	-	-	99,54	99,55	99,56	298,65	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	-	-	-	-	99,73	99,74	99,75	299,22	Dinas Pendidikan
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
7	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pendidikan
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pendidikan
9	Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pendidikan
10	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	-	-	-	-	86,23	87,09	87,96	261,29	Dinas Pendidikan
11	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	-	-	-	-	88,64	89,53	90,42	268,59	Dinas Pendidikan
12	Persentase pendidik PAUD	Persen	-	-	-	-	57,57	58,72	59,90	176,19	Dinas Pendidikan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini										
13	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	-	-	-	-	92,62	93,55	95,42	281,58	Dinas Pendidikan
14	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	-	-	-	-	93,41	94,34	96,23	283,99	Dinas Pendidikan
15	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Pendidikan
16	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Pendidikan
17	Dokumen Hasil Pengawasan	Dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Pendidikan
18	Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	-	-	-	-	95,00	95,00	95,00	285,00	Dinas Pendidikan
1.02.0.00.0.00.0	Dinas Kesehatan										Dinas Kesehatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1.00											
1.02	Kesehatan										Dinas Kesehatan
1	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	85,00	88,33	100,00	90,00	-	-	-	190,00	Dinas Kesehatan
2	Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja	Persen	58,33	58,33	41,67	66,67	-	-	-	108,33	Dinas Kesehatan
3	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	77,92	80,52	76,67	100,00	-	-	-	176,67	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	Persen	60,94	61,63	62,02	62,71	-	-	-	124,73	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	Persen	64,87	65,25	65,80	65,84	-	-	-	131,64	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	68,72	70,13	71,35	74,35	-	-	-	145,70	Dinas Kesehatan
7	Cakupan Pelayanan Bayi	Persen	98,35	98,43	99,90	98,80	-	-	-	198,70	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Persen	75,73	75,79	78,10	75,94	-	-	-	154,04	Dinas Kesehatan
9	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Persen	54,43	55,61	58,25	58,28	-	-	-	116,53	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	80,00	80,00	68,84	0,00	-	-	-	68,84	Dinas Kesehatan
11	Persentase Bayi Dengan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	84,18	84,64	95,70	85,02	-	-	-	180,72	Dinas Kesehatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyakit Menular (TB paru, HIV)	Persen	81,99	82,48	68,84	83,92	-	-	-	152,76	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	1,19	1,07	61,10	1,26	-	-	-	62,36	Dinas Kesehatan
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kesehatan
15	Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kesehatan
16	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik	Persen	38,46	46,15	61,16	53,85	-	-	-	115,01	Dinas Kesehatan
17	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina	Persen	20,00	24,00	100,00	43,20	-	-	-	143,20	Dinas Kesehatan
18	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	98,68	99,06	100,53	99,09	-	-	-	199,62	Dinas Kesehatan
19	Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	94,95	70,13	103,20	72,69	-	-	-	175,89	Dinas Kesehatan
20	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	98,68	98,66	101,04	99,04	-	-	-	200,08	Dinas Kesehatan
21	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam	Persen	80,00	80,00	76,50	0,00	-	-	-	76,50	Dinas Kesehatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat										
22	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya	Persen	75,00	80,00	90,00	90,00	-	-	-	180,00	Dinas Kesehatan
23	Persentase Kunjungan Pemeriksaan Labkesda	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	-	-	-	165,00	Dinas Kesehatan
24	Persentase Parameter Pemeriksaan Labkesda	Persen	76,70	80,58	84,47	88,35	-	-	-	172,82	Dinas Kesehatan
25	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku	Persen	78,90	80,17	83,54	85,23	-	-	-	168,78	Dinas Kesehatan
											Dinas Kesehatan
1	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	-	-	-	-	75	75	80	230,00	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	-	-	-	-	90	95	95	280,00	Dinas Kesehatan
3	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	-	-	-	-	90	95	100	285,00	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	-	-	-	-	92,21	94,81	100	287,01	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	-	-	-	-	63,30	63,89	65,16	192,35	Dinas Kesehatan
1.02.0.00.0.00.0 2.00	RSUD Bayu Asih										RSUD Bayu Asih
1.02	Kesehatan										RSUD Bayu Asih

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis	Persen	60,00	60,00	69,94	70,00	-	-	-	139,94	RSUD Bayu Asih
2	Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	60,00	60,00	68,53	70,00	-	-	-	138,53	RSUD Bayu Asih
3	Cakupan pelayanan penunjang	Persen	60,00	60,00	65,88	70,00	-	-	-	135,88	RSUD Bayu Asih
											RSUD Bayu Asih
1	Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	Persen	-	-	-	-	75,00	80,00	85,00	240,00	RSUD Bayu Asih
2	Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	-	-	-	-	75,00	80,00	85,00	240,00	RSUD Bayu Asih
3	Cakupan Pelyanan Penunjang	Persen	-	-	-	-	75,00	80,00	85,00	240,00	RSUD Bayu Asih
4	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit	Persen	-	-	-	-	90,00	80,00	85,00	255,00	RSUD Bayu Asih
5	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	-	-	-	-	80,00	80,00	85,00	245,00	RSUD Bayu Asih
6	Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan	Persen	-	-	-	-	75,00	80,00	85,00	240,00	RSUD Bayu Asih
7	Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	-	-	-	-	75,00	80,00	85,00	240,00	RSUD Bayu Asih
8	Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional	Persen	-	-	-	-	78,00	80,00	85,00	243,00	RSUD Bayu Asih
1.03.0.00.0.00.0	Dinas Pekerjaan Umum,										Dinas Pekerjaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1.00	Binamarga dan Pengairan										Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	0,50	0,50	1,00	0,50	-	-	-	1,50	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
2	Jumlah Jembatan Baru	Titik	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
3	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	13,00	15,89	0,00	15,69	-	-	-	15,69	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	13,00	15,89	0,00	11,66	-	-	-	11,66	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
5	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	46,35	46,35	0,00	1,43	-	-	-	1,43	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
6	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	10,00	25,00	-	-	-	35,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
7	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	0,00	0,00	0,00	6,25	-	-	-	6,25	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
8	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	83,66	84,10	87,80	85,52	-	-	-	173,32	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
9	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	72,85	18,20	-	-	-	91,05	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
10	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	95,00	95,00	100,00	95,00	-	-	-	195,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
11	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
12	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	27,77	27,77	44,40	5,55	-	-	-	49,95	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
13	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	24,10	30,06	34,22	32,56	-	-	-	66,78	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
14	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	0.40	0.40	19,74	0,00	-	-	-	19,74	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
15	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	1,00	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
16	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	0,00	0,00	97,11	20,00	-	-	-	117,11	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
17	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	0,00	0,00	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
18	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen	0,00	0,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
19	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	0,00	0,00	0,00	3,10	-	-	-	3,10	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											dan Pengairan
20	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
21	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00	32,56	-	-	-	32,56	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
22	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	0,00	0,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan
1.03.1.04.2.10.0 2.00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman										Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit)	Unit	1,00	1,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (%)	Persen	0,00	0,00	0,00	18,50	-	-	-	18,50	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3	Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Perangkat Lunak	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	-	2,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
4	Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan)	Laporan	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-	-	2,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
5	Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%)	Persen	0,00	0,00	100,00	80,00	-	-	-	180,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau	Persen	0,00	0,00	80,00	100,00	-	-	-	180,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
7	Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji	Dokumen	60,00	77,00	60,00	60,00	-	-	-	120,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
8	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	6,00	13,00	1,00	4,00	-	-	-	5,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
9	Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km)	Km	11,09	7,80	1,59	2,00	-	-	-	3,59	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
10	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	123,00	136,00	987,50	150,00	-	-	-	1.137,50	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
											Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman										Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	987,00	1.345,00	1.840,00	2.000,00	-	-	-	3.840,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2	Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi	Jumlah Menara	1,00	1,00	2,00	1,00	-	-	-	3,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit)	Unit	0,00	3,00	1,00	2,00	-	-	-	3,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
4	Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina	BKM	192,00	192,00	48,00	100,00	-	-	-	148,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
5	Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda	Ha	1,80	2,10	4,20	4,20	-	-	-	8,40	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
6	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	Persen	19,60	20,00	20,73	20,80	-	-	-	41,53	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
7	Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari)	Hari	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	10,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
8	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperbaiki	Km	47,81	55,61	15,79	4,00	-	-	-	19,79	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
9	Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik	Unit	2.041,00	3.241,00	3.801,00	3.110,00	-	-	-	6.911,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
10	Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
11	Jumlah RTH Yang Dibangun/ Dipelihara (Lokasi)	Lokasi	50,00	68,00	68,00	68,00	-	-	-	136,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
12	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun.	Unit	16,00	10,00	15,00	15,00	-	-	-	30,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
13	Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Dikelola dan Dipelihara	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
14	Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik	Unit	2.050,00	1.822,00	1.500,00	811,00	-	-	-	2.311,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
15	Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlindungan Strategis	Unit	0,00	0,00	0,00	1.810,00	-	-	-	1.810,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
											Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2.10	Pertanahan										Dinas Tata Ruang

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											dan Permukiman
1	Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
2	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	0,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	6,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
3	Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikasikan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
4	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	1,00	1,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1.03.2.10.0.00.0 2.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	-	-	-	6,25	6,25	6,25	18,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	-	-	-	-	35,06	37,56	40,06	112,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
4	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	-	-	-	3,10	3,10	3,10	9,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.200,00	6.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	-	-	-	-	1,50	1,30	1,00	3,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Jumlah Jembatan Baru	Titik	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	-	-	-	-	15,48	15,30	15,16	45,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	-	-	-	-	10,15	8,78	7,54	26,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	4,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
15	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	-	-	-	-	85,66	85,52	86,82	258,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	-	18,20	18,20	18,20	54,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	-	95,00	95,00	95,00	285,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	-	-	-	-	5,55	5,55	5,55	16,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	-	-	-	-	1,50	1,30	1,00	3,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	-	-	-	-	35,06	37,56	40,06	112,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Persentase Bahan dan Alat	Persen	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Pekerjaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik										Umum dan Penataan Ruang
25	Persentase Peserta Pembinaan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	-	-	-	-	11,10	11,10	7,40	29,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10	Pertanahan										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan	Lokasi	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	2,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun	Lokasi	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Jumlah Penetapan Tanah Ulayat	Lokasi	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Jumlah Tanah Kosong yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah	Lokasi	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan	Persen	-	-	-	-	0,00	0,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase Konflik Perpenatagunaan Yang Terfasilitasi	Persen	-	-	-	-	0,00	0,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.1.03.0.00.0 1.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	-	-	-	-	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	-	-	-	-	2,00	2,00	4,00	8,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	-	-	-	-	2,00	2,00	4,00	8,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan	Unit	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	30,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	-	-	-	-	0,00	0,00	5,00	5,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	12,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Panjang Saluran Air Bersih Perpipa Yang Dibangun	Km	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Persen	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	450,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun	Unit	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1	Persentase Gedung/Bangunan Yang Memiliki Proteksi Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2	Persentase Sosialisasi dan Pelatihan / Simulasi Yang Akan Dilaksanakan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
3	Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
6	Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Asset Sarana dan Prasarana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
7	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
9	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
10	Persentase Ketersediaan Data Kejadian Kebakaran	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
11	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Kompetensi	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
12	Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
13	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
14	Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
15	Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	9,00	-	-	-	9,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
16	Persentase Tersedianya Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
17	Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
18	Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
19	Persentase Jumlah SDM Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
20	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
21	Persentase Kecepatan Response Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
22	Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
23	Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
24	Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1.05.0.00.0.00.0 3.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.0.00.0.00.0 4.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.0.00.0.00.0 2.00	Satuan Polisi Pamong Praja										Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										Satuan Polisi Pamong Praja
1	Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas	Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	0,00	-	-	-	10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas	Jenis	4 Jenis dan 1 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	4 Jenis dan 2 Jenis	0,00	-	-	-	4 Jenis dan 2 Jenis	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	Persen	80,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Penertiban Trantibmas	Kegiatan	33,00	34,00	0,00	34,00	-	-	-	34,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiatan	7,00	7,00	0,00	8,00	-	-	-	8,00	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	0,00	48,00	0,00	48,00	-	-	-	48,00	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Diklat/Bimtek Satpol PP Yang Diselenggarakan	Persen	70,00	80,00	0,00	85,00	-	-	-	85,00	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Persentase Anggota Satpol PP Yang Dibina	Persen	100,00	80,00	0,00	85,00	-	-	-	85,00	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	Persen	10,00	20,00	0,00	20,00	-	-	-	20,00	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	5,00	5,00	0,00	10,00	-	-	-	10,00	Satuan Polisi Pamong Praja
											Satuan Polisi Pamong Praja
1	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas	Kegiatan	-	-	-	-	34,00	40,00	40,00	114,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
4	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiatan	-	-	-	-	8,00	8,00	8,00	24,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	-	-	-	-	60,00	60,00	72,00	192,00	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Jumlah	-	-	-	-	98,00	98,00	98,00	294,00	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS)	%	-	-	-	-	60,00	80,00	100,00	240,00	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS)	Kali	-	-	-	-	48,00	48,00	48,00	144,00	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	%	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	30,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.06.2.08.0.00.0 1.00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1.06	Sosial										Dinas Sosial, Pemberdayaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan	Persen	0,00	0,00	85,00	90,00	-	-	-	175,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	0,00	0,00	93,68	90,00	-	-	-	183,68	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Jumlah Anak terlantar yang dibina	Orang	0,00	0,00	14,00	20,00	-	-	-	34,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lembaga	0,00	0,00	24,00	30,00	-	-	-	54,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lembaga	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	90,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Jumlah migran yang terfasilitasi	Orang	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	30,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi	Persen	-	-	-	-	85,00	90,00	90,00	265,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kesejahteraan Sosial										Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina	Orang	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	Persen	-	-	-	-	90,00	90,00	100,00	280,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Persen	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	270,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen	-	-	-	-	85,00	85,00	85,00	255,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	0,00	0,00	63,88	90,00	-	-	-	153,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	0,00	0,00	86,82	85,00	-	-	-	171,82	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Perlindungan Anak
3	Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan	Persen	0,00	0,00	78,00	85,00	-	-	-	163,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
											Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan	Persen	-	-	-	-	85,00	85,00	90,00	260,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	270,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	-	-	-	-	90,00	90,00	100,00	280,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Data Gender Anak	Persen	-	-	-	-	75,00	75,00	75,00	225,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	-	-	-	-	65,00	66,00	67,00	198,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak	Persen	-	-	-	-	55,00	60,00	65,00	180,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2.07.3.32.0.00.0 1.00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi										Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07	Tenaga Kerja										Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1	Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	41,27	46,66	60,65	75,00	-	-	-	135,65	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	34,92	47,15	50,00	60,00	-	-	-	110,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	42,56	40,38	50,00	60,00	-	-	-	110,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00	42,86	50,00	65,00	-	-	-	115,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	23,81	52,85	60,00	70,00	-	-	-	130,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	Orang	-	-	-	-	85,55	95,00	100,00	280,55	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil	Orang	-	-	-	-	70,00	80,00	90,00	240,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase Calon Tenaga	Persen	-	-	-	-	70,00	80,00	90,00	240,00	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan										Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	-	-	-	-	75,00	85,00	95,00	255,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	-	-	-	-	80,00	95,00	100,00	275,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.32	Transmigrasi										Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1	Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00				200,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
											Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1	Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase transmigran yang dibina	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.09.3.27.0.00.0 1.00	Dinas Pangan dan Pertanian										Dinas Pangan dan Pertanian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2.09	Pangan										Dinas Pangan dan Pertanian
1	Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun	Unit	12,00	12,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Terpenuhinya Kebutuhan Beras	Ton	100.496,00	103.008,00	130.970,06	0,00	-	-	-	130.970,06	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian	Ton	36.544,00	37.457,00	23.568,00	0,00	-	-	-	23.568,00	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah	Ton	91.360,00	93.644,00	182.632,80	0,00	-	-	-	182.632,80	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Persen	150,86	152,00	0,00	151,64	-	-	-	151,64	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Persentase pengisian gudang cadangan pangan	Persen	53,48	53,48	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
											Dinas Pangan dan Pertanian
1	Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Persen	-	-	-	-	151,47	151,47	151,11	454,04	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	-	-	-	-	103,02	103,02	105,12	311,16	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
											Dinas Pangan dan Pertanian
3.27	Pertanian										Dinas Pangan dan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Pertanian
1	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan	Persen	0,00	30,92	30,92	25,00	-	-	-	55,92	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan	Kegiatan	2,00	2,00	2,00	0,00	-	-	-	2,00	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Produksi Padi	Ton	226.424,00	226.424,00	251.627,00	0,00	-	-	-	251.627,00	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Produksi Palawija	Ton	133.294,00	133.294,00	30.484,00	0,00	-	-	-	30.484,00	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Produksi Teh	Ton	5.164,00	5.164,00	4.955,00	0,00	-	-	-	4.955,00	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Produksi Cengkeh	Ton	337,00	337,00	483,00	0,00	-	-	-	483,00	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Produksi Sayuran	Ton	45.459,00	45.459,00	182.632,80	0,00	-	-	-	182.632,80	Dinas Pangan dan Pertanian
9	Produksi Buah-Buahan	Ton	115.468,00	115.468,00	145.149,20	0,00	-	-	-	145.149,20	Dinas Pangan dan Pertanian
10	Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh	Kegiatan	25,00	30,00	30,00	0,00	-	-	-	30,00	Dinas Pangan dan Pertanian
11	Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Kelompok	430,00	450,00	450,00	0,00	-	-	-	450,00	Dinas Pangan dan Pertanian
12	Penanaman Manggis	Pohon	1.075,00	1.155,00	4.500,00	0,00	-	-	-	4.500,00	Dinas Pangan dan Pertanian
13	Penanaman /Rehabilitasi The	Ha	27,00	30,00	4,00	0,00	-	-	-	4,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
14	Penanaman Cengkeh	Ha	1,70	1,75	15,00	0,00	-	-	-	15,00	Dinas Pangan dan Pertanian
15	Penanaman Ubi Kayu	Ha	1.460,00	1.610,00	1.087,00	0,00	-	-	-	1.087,00	Dinas Pangan dan Pertanian
16	Penanaman Pala	Ha	1,50	1,50	350,00	0,00	-	-	-	350,00	Dinas Pangan dan Pertanian
17	Penerapan Pertanian Organik	Ha	45,00	50,00	60,00	0,00	-	-	-	60,00	Dinas Pangan dan Pertanian
18	Produktivitas Padi Sawah	Ku/Ha	63,06	63,85	64,88	0,00	-	-	-	64,88	Dinas Pangan dan Pertanian
19	Produktivitas Padi Ladang	Ton	37,18	37,64	32,57	0,00	-	-	-	32,57	Dinas Pangan dan Pertanian
20	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	52,75	53,02	56,20	0,00	-	-	-	56,20	Dinas Pangan dan Pertanian
21	Produktivitas Ubi Kayu	Ku/Ha	198,57	199,16	193,00	0,00	-	-	-	193,00	Dinas Pangan dan Pertanian
22	Produktivitas Cengkeh	Kg/Ha	250,79	253,29	456,00	0,00	-	-	-	456,00	Dinas Pangan dan Pertanian
23	Produktivitas Teh	Kg/Ha	1.106,16	1.117,22	1.507,00	0,00	-	-	-	1.507,00	Dinas Pangan dan Pertanian
24	Produktivitas Pala	Kg/Ha	319,47	322,66	546,00	0,00	-	-	-	546,00	Dinas Pangan dan Pertanian
25	Laju Produksi Padi	Persen	2,63	2,66	0,00	2,50	-	-	-	2,50	Dinas Pangan dan Pertanian
26	Laju Produksi Kacang-kacangan	Persen	55,66	346,35	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Pangan dan Pertanian
27	Laju Produksi Umbi-umbian	Persen	34,39	18,55	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Pangan dan Pertanian
28	Persentase Kehilangan Hasil	Persen	18,00	18,00	0,00	16,50	-	-	-	16,50	Dinas Pangan dan Pertanian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
29	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	25,00	25,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Pangan dan Pertanian
30	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
31	Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	5,00	5,00	0,00	3,00	-	-	-	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian
32	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	5,00	5,00	0,00	3,00	-	-	-	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian
33	Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
34	Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
35	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Persen	0,00	0,00	0,00	0,23	-	-	-	0,23	Dinas Pangan dan Pertanian
											Dinas Pangan dan Pertanian
1	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Produksi Padi	Ton	-	-	-	-	282.899,17	282.899,17	282.899,17	848.697,51	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Produksi Jagung	Ton	-	-	-	-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	Hektar	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya	kegiatan	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Hektar	-	-	-	-	225,00	225,00	225,00	675,00	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	-	-	-	-	10,00	11,00	12,00	33,00	Dinas Pangan dan Pertanian
9	Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	Hektar	-	-	-	-	4,50	4,50	4,50	13,50	Dinas Pangan dan Pertanian
10	Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Peserta	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	90,00	Dinas Pangan dan Pertanian
11	Peningkatan Luas Tanaman Durian	Hektar	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Pangan dan Pertanian
12	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Hektar	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Pangan dan Pertanian
13	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
14	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
15	Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Pangan dan Pertanian
16	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Pangan dan Pertanian
17	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Persen	-	-	-	-	0,23	0,23	0,24	0,70	Dinas Pangan dan Pertanian
18	Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
19	Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2.11.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Lingkungan Hidup										Dinas Lingkungan Hidup
2.11	Lingkungan Hidup										Dinas Lingkungan Hidup
1	Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah	Unit	12,00	57,00	63,00	69,00	-	-	-	132,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Jumlah Target Pembinaan	perusahaan	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	60,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Jumlah Dokumen Amdal	dokumen	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	32,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Yang Terjaga dan Terlindungi	Persen	0,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	50,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA)	perusahaan	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-	-	48,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum	Lokasi	2 titik	2,00	2,00	2,00	-	-	-	4,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air	Titik	67 titik	20,00	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	Titik	10 titik	2,00	23,00	2,00	-	-	-	25,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Kali	0,00	6,00	6,00	6,00	-	-	-	12,00	Dinas Lingkungan Hidup
10	Penerimaan Pengaduan	Kasus	4,00	0,00	4,00	1,00	-	-	-	5,00	Dinas Lingkungan Hidup

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
11	Aplikasi SIPP	Buah	0,00	0,00	1,00	3,00	-	-	-	4,00	Dinas Lingkungan Hidup
12	Adipura	Titik pantau (Kecamatan)	3,00	0,00	3,00	5,00	-	-	-	8,00	Dinas Lingkungan Hidup
13	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	lokasi (sekolah)	11,00	0,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Lingkungan Hidup
14	Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	jenis	5 jenis	0,00	4,00	5,00	-	-	-	9,00	Dinas Lingkungan Hidup
15	Adipura	Titik pantau	3,00	0,00	3,00	1,00	-	-	-	4,00	Dinas Lingkungan Hidup
16	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	0,00	0,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Lingkungan Hidup
17	Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA	Perusahaan	24,00	24,00	0,00	24,00	-	-	-	24,00	Dinas Lingkungan Hidup
											Dinas Lingkungan Hidup
1	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Target Pembinaan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	Jumlah Sosialisasi	Lokasi	-	-	-	-	6,00	6,00	6,00	18,00	Dinas Lingkungan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta										Hidup
6	Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase pengaduan yang ditangani	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Layanan Persampahan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan :						-	-	-		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	Persen	75,00	80,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan Kartu	Persen	75,00	80,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Keluarga										Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	Persen	20,00	25,00	50,00	100,00	-	-	-	150,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	Persen	80,00	80,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	Persen	0,00	75,00	85,00	100,00	-	-	-	185,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	0,00	50,00	75,00	85,00	-	-	-	160,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	Persen	0,00	25,00	50,00	85,00	-	-	-	135,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	Persen	0,00	15,00	50,00	85,00	-	-	-	135,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	Persen	0,00	25,00	50,00	85,00	-	-	-	135,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
											Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Sipil
1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan:										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan KIA	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan Akta	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Perkawinan										Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Dinas Pemberdayaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Masyarakat dan Desa
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina	Buah	192,00	192,00	192,00	0,00	-	-	-	192,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM	Desa	11,00	11,00	28,00	15,00	-	-	-	43,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM	Desa	118,00	118,00	132,00	134,00	-	-	-	266,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM	Desa	54,00	54,00	23,00	34,00	-	-	-	57,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas)	Persen	0,00	20,00	20,00	40,00	-	-	-	60,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Tiap Desa	Kegiatan	20,00	20,00	20,00	45,00	-	-	-	65,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina (LPM)	Persen	0,00	20,00	20,00	40,00	-	-	-	60,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
8	Jumlah Posyandu Yang Dibina	Unit	1.018,00	1.018,00	1.031,00	406,00	-	-	-	1.437,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Persen	6,00	7,00	7,00	0,00	-	-	-	7,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Jumlah Bumdes Yang Dibina	Bumdes	172,00	172,00	175,00	177	-	-	-	352,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan	Jenis	50,00	50,00	230,00	410	-	-	-	640,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa	Orang	183	183	183,00	183	-	-	-	366,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes	Orang	0,00	0,00	300,00	600,00	-	-	-	900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina	Persen	28,00	28,00	42,00	57,00	-	-	-	99,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga										Dinas Pengendalian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Berencana										Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Ratio Akseptor KB	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	0,00	79,45	81,04	82,66	-	-	-	163,70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif)	Persen	0,00	45,00	45,01	45,02	-	-	-	90,03	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Orang	0,00	0,00	7.095,00	7.090,00	-	-	-	14.185,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani	Persen	0,00	30,00	31,00	32,00	-	-	-	63,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu	Persen	0,00	10,00	9,99	9,98	-	-	-	19,97	Dinas Pengendalian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Tahun										Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Persentase PUS Muda Usia Rendah Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th	Persen	0,00	2,00	1,99	1,98	-	-	-	3,97	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	Persen	0,00	35,00	40,00	45,00	-	-	-	85,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Poin	0,00	35,00	33,00	30,00	-	-	-	63,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	0,00	35,00	40,00	45,00	-	-	-	85,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	0,00	35,00	33,00	30,00	-	-	-	63,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	0,00	35,00	35,00	35,00	-	-	-	70,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pengendalian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun										Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekon)	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500)	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan	Rasio	0,00	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-	-	0,08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD)	Rasio	0,00	1 : 1	1 : 1	1 : 1	-	-	-	0,08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Jumlah Remaja Yang Dibina	Orang	125,00	150,00	150,00	0,00	-	-	-	150,00	Dinas Pengendalian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Kader	384,00	576,00	576,00	0,00	-	-	-	576,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Cakupan Kampung KB	Persen	0,00	30,00	45,00	60,00	-	-	-	105,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Persen	0,00	37,50	37,5	40,00	-	-	-	77,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Persentase Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS	Persen	0,00	60,00	60,00	70,00	-	-	-	130,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang	0,00	536,00	562,80	590,94	-	-	-	1.153,74	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Orang	0,00	541,00	568,05	596,45	-	-	-	1.164,50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-	Orang	0,00	536,00	562,80	590,94	-	-	-	1.153,74	Dinas Pengendalian

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	KB										Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB	PUS	0,00	536,00	562,80	590,94	-	-	-	1.153,74	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Kelompok	0,00	536,00	562,80	590,94	-	-	-	1.153,74	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Keluarga	0,00	536,00	562,80	590,94	-	-	-	1.153,74	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Persen	0,00	60,00	65,00	70,00	-	-	-	135,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	0,00	65,00	70,00	75,00	-	-	-	145,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
											Dinas Pengendalian Penduduk dan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Keluarga Berencana
1	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	persen	-	-	-	-	84,00	86,00	87,00	257,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Perhubungan										Dinas Perhubungan
2.15	Perhubungan										Dinas Perhubungan
1	Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	39,00	50,00	50,00	0,00	-	-	-	50,00	Dinas Perhubungan
2	Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	1.363,00	1.378,00	1.378,00	0,00	-	-	-	1.378,00	Dinas Perhubungan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
3	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	100,00	100,00	4,00	100,00	-	-	-	104,00	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten	Jumlah	415,00	415,00	451,00	100,00	-	-	-	551,00	Dinas Perhubungan
5	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Persen	0,00	0,00	2,00	100,00	-	-	-	102,00	Dinas Perhubungan
6	Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan Penyebrangan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Perhubungan
7	Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR	Persen	59,00	91,00	105,00	100,00	-	-	-	205,00	Dinas Perhubungan
8	Jumlah Dokumen Lalu Lintas	Jumlah	0,00	0,00	1,00	100,00	-	-	-	101,00	Dinas Perhubungan
9	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	Unit	1.448,00	3.466,00	243,00	0,00	-	-	-	243,00	Dinas Perhubungan
10	Panjang Marka Jalan	Meter	2.600,00	2.800,00	428,45	0,00	-	-	-	428,45	Dinas Perhubungan
11	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas	Hari/Tahun	22,00	22,00	28,00	0,00	-	-	-	28,00	Dinas Perhubungan
12	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Perhubungan
13	Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Perhubungan
14	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumlah	29,00	29,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Perhubungan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
15	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Perhubungan
16	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumlah	4,00	4,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Perhubungan
											Dinas Perhubungan
1	Presentase Prasarana Perlengkapan lalulintas dan Angkutan jalan	Persen	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	270,00	Dinas Perhubungan
2	Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan	Persen	-	-	-	-	75,00	85,00	95,00	255,00	Dinas Perhubungan
2.16.2.20.2.21.0 1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika										Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	Komunikasi dan Informatika										Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan	Persen	90,00	95,00	95,00	0,00	-	-	-	95,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	90,00	90,00	90,00	0,00	-	-	-	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Layanan Informasi Publik	Persen	90,00	90,00	90,00	0,00	-	-	-	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah	Persen	90,00	95,00	95,00	0,00	-	-	-	95,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
5	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika	Kegiatan	8,00	8,00	8,00	0,00	-	-	-	8,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi	Kegiatan	8,00	8,00	8,00	0,00	-	-	-	8,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	62,00	92,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	66,00	92,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	97,00	98,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	79,00	93,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	75,00	85,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	50,00	95,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	50,00	95,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan	Persen	77,00	90,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Ruang Publik										
15	Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	46,00	99,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	88,00	98,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	54,00	92,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
											Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Publik										
6	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
											Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20	Statistik										Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun	Dokumen	0,00	5,00	5,00	0,00	-	-	-	5,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Ketersediaan	Dokumen	0,00	33,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Komunikasi

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah										dan Informatika
3	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Dokumen	68	90,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
											Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
											Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	Persandian										Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	69,00	95,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	65,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infomasi (PP)	Persen	78,00	98,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
											Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.3.30.3.31.0 1.00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian										Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	Unit	750,00	800,00	8.454,00	0,00	-	-	-	8.454,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	Unit	25,00	25,00	20,00	0,00	-	-	-	20,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Terfasilitasinya UMKM	Unit	360,00	380,00	15,00	0,00	-	-	-	15,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	Unit	15,00	15,00	15,00	0,00	-	-	-	15,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	Unit	100,00	105,00	105,00	0,00	-	-	-	105,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat	Persen	20,00	25,00	5,00	0,00	-	-	-	5,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan	Persen	24,00	30,00	25,00	0,00	-	-	-	25,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8	Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi	Even	0,00	0,00	0,00	5,00	-	-	-	5,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	0,00	15,00	0,00	15,00	-	-	-	15,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah Koperasi Yang	Unit	0,00	30,00	0,00	30,00	-	-	-	30,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	0,00	50,00	0,00	50,00	-	-	-	50,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Laju Peningkatan Koperasi Sehat	Persen	0,00	20,00	0,00	5,00	-	-	-	5,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Laju Peningkatan Koperasi Aktif	Persen	0,00	40,00	0,00	10,00	-	-	-	10,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat	Persen	0,00	0,00	0,00	15,00	-	-	-	15,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik	Persen	0,00	0,00	0,00	5,00	-	-	-	5,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	0,00	20,00	0,00	7,00	-	-	-	7,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
17	Jumlah Pameran Yang	Even	0,00	10,00	0,00	8,00	-	-	-	8,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Diikuti Oleh UKKM										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	Unit	0,00	20,00	0,00	20,00	-	-	-	20,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19	Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	Unit	0,00	15,00	0,00	20,00	-	-	-	20,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
20	Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	Unit	0,00	30,00	0,00	25,00	-	-	-	25,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
21	Persentase UMKM Yang Terbina	Persen	0,00	0,00	0,00	10,00	-	-	-	10,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
22	Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	Unit	0,00	0,00	0,00	50,00	-	-	-	50,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23	Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	Unit	0,00	0,00	0,00	150,00	-	-	-	150,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
											Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Unit	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	450,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	Unit	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	450,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Unit	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	450,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya	Unit	-	-	-	-	150,00	150,00	150,00	450,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	UMKM	-	-	-	-	60,00	60,00	60,00	180,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	UMKM	-	-	-	-	30,00	40,00	50,00	120,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Jumlah UMKM Yang	UMKM	-	-	-	-	100,00	150,00	150,00	400,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8	Persentase UMKM Yang Terbina	UMKM	-	-	-	-	60,00	60,00	60,00	180,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	UMKM	-	-	-	-	30,00	40,00	50,00	120,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	UMKM	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	UMKM	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	30,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	UMKM	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	UMKM	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Jumlah UMKM Yang	UMKM	-	-	-	-	15,00	15,00	15,00	45,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Mendapat Fasilitas Bantuan										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	UMKM	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.30	Perdagangan										Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Jumlah Konsumen Yang Dibina	Orang	630,00	780,00	780,00	0,00	-	-	-	780,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Persentase Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK)	Persen	100,00	100,00	69,00	0,00	-	-	-	69,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Tera dan Tera	UTTP/Ta	600,00	600,00	780,00	0,00	-	-	-	780,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Ulang Alat UTTP	hun									Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah Pengukuran BDKT	BDKT/Tahun	40,00	40,00	40,00	0,00	-	-	-	40,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan Barang / Jasa	Pelaku Usaha	300,00	300,00	300,00	0,00	-	-	-	300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa	Komoditi	50,00	60,00	60,00	0,00	-	-	-	60,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun	Komoditi	25,00	25,00	25,00	0,00	-	-	-	25,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8	Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern	Regulasi	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor.	Even	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-	-	2,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah Pelayanan Ekspor	Dokumen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
		SKA									Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern	Pasar	7,00	9,00	9,00	0,00	-	-	-	9,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at	Pasar	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative	Unit	5,00	6,00	6,00	0,00	-	-	-	6,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional	Unit	5,00	6,00	6,00	0,00	-	-	-	6,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pembinaan	Orang	0,00	200,00	0,00	200,00	-	-	-	200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Jumlah Fasilitas Pengaduan Konsumen	Kasus	0,00	0,00	0,00	150,00	-	-	-	150,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
17	Jumlah Pelayanan	Unit	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kemetrologian										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Jumlah Pengawasan Alat UTP dan BDKT	Unit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	5,00	-	-	-	5,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
20	Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi	Pasar	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
21	Persentase Capaian Target Retribusi Pasar	Persen	0,00	70,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
22	Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional	Orang	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23	Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kawasan	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
											Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dokumen	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	900,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	Unit	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	Pelaku Usaha	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta	Pelaku Usaha	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	Pelaku Usaha	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Even	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
											Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.31	Perindustrian										Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI	Unit	80,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Desain Kemasan Produksi	Unit	96,00	120,00	120,00	0,00	-	-	-	120,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT	Unit	96,00	120,00	180,00	0,00	-	-	-	180,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk	Unit	8,00	10,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	4,00	5,00	2,00	0,00	-	-	-	2,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Jumlah Bahan Baku Yang	Jenis	8,00	10,00	10,00	0,00	-	-	-	10,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Standard Hasil Litbang										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG)	Unit	1,00	1,00	2,00	0,00	-	-	-	2,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
8	Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan	Unit	1,00	1,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Lahan Kawasan IKM	Ha	4,80	6,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10	Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date	Jenis	8,00	10,00	10,00	0,00	-	-	-	10,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
11	Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik	Paket	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter)	Desain	80,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Jumlah P2WKSS Terbina	Desa	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah	Kegiatan	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-	-	2,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Jumlah GKM Industri Yang Terbina	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Jumlah lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
17	Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Desain	0,00	0,00	0,00	5,00	-	-	-	5,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
18	Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik	Desain	0,00	0,00	0,00	20,00	-	-	-	20,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
19	Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri	Buku	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
20	Jumlah Pengrajin Sentra	Pengrajin	0,00	0,00	0,00	30,00	-	-	-	30,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Industri Keramik Yang Terbina										Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
21	Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah	Orang	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
22	Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan	IKM	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
23	Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM	IKM	0,00	0,00	0,00	10,00	-	-	-	10,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
24	Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	1,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
											Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
1	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	Orang	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Desiminsasi	Orang	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Koperasi,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	Buah	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah Perda	Buah	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	Unit Usaha	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	30,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	Unit Usaha	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	90,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	Buah	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.18.0.00.0.00.0 1.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2.18	Penanaman Modal										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah	Set	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi	Set	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	4,00	4,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	80,00	90,00	90,00	0,00	-	-	-	90,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumlah	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	3,00	3,00	10,16	0,00	-	-	-	10,16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Persentase Pencapaian	Persen	79,50	80,00	80,00	0,00	-	-	-	80,00	Dinas Penanaman

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95,00	95,00	95,00	0,00	-	-	-	95,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	90,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	2,00	2,00	0,00	3,00	-	-	-	3,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	4,00	5,00	0,00	11,00	-	-	-	11,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	64,98	58,36	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	0,00	80,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	0,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Satu Pintu
17	Peningkatan Nilai IKM	Persen	0,00	80,00	0,00	80,75	-	-	-	80,75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	0,00	61,24	0,00	80,00	-	-	-	80,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	0,00	80,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Jumlah Minat Penanaman Modal	Investor	-	-	-	-	360,00	380,00	390,00	1.130,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Event	-	-	-	-	7,00	7,00	8,00	22,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	%	-	-	-	-	90,00	95,00	100,00	285,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	-	-	-	81,00	81,50	82,00	244,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase PMA dan PMDN	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Penanaman

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala										Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	-	-	-	-	95,00	100,00	100,00	295,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.2.22.3.26.0 1.00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan										Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.19	Kepemudaan dan Olahraga										Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,00	0,00	10,56	30,00	-	-	-	40,56	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	0,00	19,61	19,61	20,00	-	-	-	39,61	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	0,00	11,00	4,73	11,00	-	-	-	15,73	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Cakupan Pembinaan	Persen	0,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kepemudaan										Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan	Persen	0,00	0,00	0,00	20,00	-	-	-	20,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persen Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	0,00	0,00	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Cakupan Wirausaha Muda	Persen	0,00	0,00	20,00	40,00	-	-	-	60,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
8	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	50,00	57,14	64,29	64,29	-	-	-	128,57	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
											Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	-	-	-	-	40,00	85,00	60,00	185,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan Pembinaan	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kepemudaan										Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Cakupan Wirausaha Muda	Persen	-	-	-	-	50,00	60,00	70,00	180,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Cakupan Pembinaan Olahraga;	Persen	-	-	-	-	19,61	23,53	23,53	66,67	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda;	Persen	-	-	-	-	11,00	13,00	15,00	39,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	-	-	-	-	64,29	64,29	71,43	200,01	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
											Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.22	Kebudayaan										Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	Kelompok	6,00	6,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	88,89	88,89	88,89	88,89	-	-	-	177,78	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Persen	0,00	0,00	50,00	50,00	-	-	-	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	0,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	0,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	72,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
											Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	-	-	-	-	50,00	55,00	55,00	160,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	-	-	-	-	36,00	36,00	36,00	108,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	kelompok	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	persen	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	150,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Persentase Cagar Budaya	Persen	-	-	-	-	50,00	60,00	60,00	170,00	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Yang Dikelola Secara Terpadu										Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
8	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
											Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3.26	Pariwisata										Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan	Event	8,00	8,00	8,00	0,00	-	-	-	8,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Jumlah ODTW Yang Ditata	ODTW	4,00	4,00	4,00	0,00	-	-	-	4,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan	Persen	11,11	11,11	0,00	11,11	-	-	-	11,11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Jasa Usaha	Persen	0,00	0,00	0,00	2,22	-	-	-	2,22	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Pariwisata Berstandar Baik/ tTersertifikasi										Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi	Persen	0,00	0,00	0,00	2,22	-	-	-	2,22	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggarakan	Persen	20,00	20,00	0,00	30,00	-	-	-	30,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	0,00	0,00	0,00	40,00	-	-	-	40,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
8	Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	0,00	0,00	0,00	20,00	-	-	-	20,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
											Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
1	Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	-	-	-	-	13,33	15,56	17,78	46,67	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase Jasa Usaha	Persen	-	-	-	-	4,44	4,44	6,67	15,55	Dinas

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi										Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi	Persen	-	-	-	-	4,44	4,44	6,67	15,55	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan	Persen	-	-	-	-	40,00	40,00	50,00	130,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	-	-	-	-	40,00	40,00	60,00	140,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	-	-	-	-	40,00	40,00	40,00	120,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2.23.2.24.0.00.0 1.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23	Perpustakaan										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	8.000,00	8.000,00	244.820,00	0,00	-	-	-	244.820,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun	Orang	39.500,00	39.500,00	15.239,00	0,00	-	-	-	15.239,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
3	Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Titik	103,00	103,00	156,00	0,00	-	-	-	156,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	215,00	215,00	417,00	0,00	-	-	-	417,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Jumlah Buku Perpustakaan	Buah	38.000,00	38.000,00	4.134,00	0,00	-	-	-	4.134,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	5,00	5,00	-	-	-	10,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Persentase Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum dan Sekolah	Persen	24,06	25,30	26,00	27,00	-	-	-	53,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca di Ruang Publik	Persen	0,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	0,06	0,11	-	-	-	0,17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	0,00	81,50	4,90	4,70	-	-	-	9,60	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Laju Anggota Perpustakaan	Persen	0,00	57,00	22,90	18,60	-	-	-	41,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	0,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	10,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	0,00	0,00	5,00	5,00	-	-	-	10,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	47,00	79,00	49,00	100,00	-	-	-	149,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
16	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	0,00	100,00	0,00	16,50	-	-	-	16,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	0,00	0,00	19,80	16,50	-	-	-	36,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	0,00	0,00	4,00	4,00	-	-	-	8,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
											Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1	Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	Persen	-	-	-	-	28,00	29,30	30,40	87,70	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	-	-	-	-	0,15	0,19	0,23	0,57	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	-	-	-	-	4,50	4,30	4,00	12,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Laju Anggota Perpustakaan	Persen	-	-	-	-	15,70	13,50	12,00	41,20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
9	Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	-	-	-	-	14,50	12,40	11,00	37,90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	-	-	-	-	14,00	12,40	11,00	37,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	-	-	-	-	5,00	5,00	7,00	17,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
											Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	Kearsipan										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Perangkat Daerah	43,00	43,00	43,00	0,00	-	-	-	43,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Persentase Akuisisi Arsip Daerah	Persen	25,00	25,00	96,00	0,00	-	-	-	96,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Jumlah Depo Arsip Yang Mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap	Unit	4,00	4,00	4,00	0,00	-	-	-	4,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah	Kegiatan	2,00	2,00	2,00	0,00	-	-	-	2,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Persentase Pembinaan	Persen	100,00	95,70	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kearsipan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Kearsipan OPD										dan Perpustakaan
6	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	80,05	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,15	1,75	1,75	1,75	-	-	-	3,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	0,60	0,05	22,00	27,00	-	-	-	49,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	59,80	42,70	22,90	4,20	-	-	-	27,10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	15,20	21,70	26,10	30,40	-	-	-	56,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Persentase Arsip Aktif, In Aktif dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:				20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Arsip Aktif	Persen	50,00	60,00	20,00	37,80	-	-	-	57,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Arsip In Aktif	Persen	50,00	46,7	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Arsip Vital	Persen	67,00	75,00	20,00	20,00	-	-	-	40,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	0,00	0,00	70,00	72,00	-	-	-	142,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	0,00	0,00	19,99	19,99	-	-	-	39,98	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	1,83	1,83	19,99	19,99	-	-	-	39,98	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1	Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	-	-	-	-	1,75	1,75	1,75	5,25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	-	-	-	-	3,20	4,70	3,70	11,60	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			-	-	-	-					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen					39,10	39,10	43,50	121,70	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen					27,00	27,00	27,00	81,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Aktif	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Inaktif	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	53,30	93,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	- Arsip Vital	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	60,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
9	Indek Kepuasan Masyarakat (Ikmm) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	-	-	-	-	73,00	75,00	78,00	226,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	-	-	-	-	19,99	19,99	19,99	59,97	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25.3.27.0.00.0 1.00	Dinas Perikanan dan Peternakan										Dinas Perikanan dan Peternakan
3.25	Kelautan dan Perikanan										Dinas Perikanan dan Peternakan
1	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan	Ekor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	-	1.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	-	-	75.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	109,00	115,00	118,00	121,00	-	-	-	239,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	514.740.000,00	555.958.000,00	582.550.000,00	741.225.600,00	-	-	-	1.323.775.600,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	92.501,21	84.230,00	93.286,70	1.899,00	-	-	-	95.185,70	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Produksi Ikan Hias	Ekor	94.000,00	117.010,00	95.880,00	135.360,00	-	-	-	231.240,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Produksi Benih UPTD BBI	Ekor	5.000.000,00	5.075.000,00	6.323.494,00	5.880.000,00	-	-	-	12.203.494,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan	Orang	9.635,00	9.190,00	11.668,00	9.190,00	-	-	-	20.858,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Luas Lahan Budidaya yang	Hektar	4,00	4,00	8,70	4,00	-	-	-	12,70	Dinas Perikanan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Disertifikasi										dan Peternakan
11	Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton)	Ton	1.023,74	1.100,81	1.183,59	1.272,00	-	-	-	2.455,59	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah Ikan Yang Ditebarkan	Ekor	225.000,00	375.000,00	350.000,00	450.000,00	-	-	-	800.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	14,00	18,00	52,00	48,00	-	-	-	100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
14	Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola	Jenis	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola	Kecamatan	17,00	17,00	17,00	17,00	-	-	-	34,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
16	Jumlah KJA	Petak	21.000,00	21.000,00	45.073,00	4.000,00	-	-	-	49.073,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Produksi Ikan KJA	Ton	0,00	0,00	91.529,63	12.000,00	-	-	-	103.529,63	Dinas Perikanan dan Peternakan
18	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit)	Unit	50,00	94,00	100,00	105,00	-	-	-	205,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
19	Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)	Ton	0,00	0,00	1.037,15	90,00	-	-	-	1.127,15	Dinas Perikanan dan Peternakan
20	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok)	kelompok	11,00	12,00	19,00	14,00	-	-	-	33,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
21	Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit)	Unit	1.160,00	1.161,00	1.170,00	1.172,00	-	-	-	2.342,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
											Dinas Perikanan dan Peternakan
1	Produksi Ikan Hasil Tangkapan	Ton	-	-	-	-	1.272,00	1.367,00	1.470,00	4.109,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking)	Ekor	-	-	-	-	500.000,00	550.000,00	600.000,00	1.650.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
3	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	Kelompok	-	-	-	-	51,00	53,00	56,00	160,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	-	-	-	-	14.279,00	14.735,00	15.282,00	44.296,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	-	-	-	-	889.470.720,00	1.067.364.864,00	190.837.837,00	2.147.673.421,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	-	-	-	-	6.320.000,00	6.740.000,00	7.200.000,00	20.260.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Produksi Ikan Hias	Ekor	-	-	-	-	162.432,00	194.918,00	233.903,00	591.253,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Kelompok	-	-	-	-	124,00	127,00	130,00	381,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	Kecamatan	-	-	-	-	17,00	17,00	17,00	51,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/th	-	-	-	-	28,76	28,76	28,76	86,28	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	-	-	-	-	95,00	100,00	105,00	300,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	-	-	-	-	15,00	16,00	17,00	48,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	-	-	-	-	110,00	115,00	120,00	345,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
											Dinas Perikanan dan Peternakan
3.27	Pertanian										Dinas Perikanan dan Peternakan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Orang	610,00	615,00	645,00	650,00	-	-	-	1.295,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan	Ekor	33.060,00	34.060,00	67.908,00	36.817,00	-	-	-	104.725,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan	Kegiatan	5,00	5,00	3,00	5,00	-	-	-	8,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi)	Lokasi	2,00	1,00	5,00	1,00	-	-	-	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Budidaya Ternak Ruminansia Kecil	lokasi	2,00	1,00	5,00	1,00	-	-	-	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Budidaya Ternak Unggas	Lokasi	1,00	1,00	25,00	2,00	-	-	-	27,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Produksi Hasil Ternak	Persen	3	3	7,24	3,00	-	-	-	10,24	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Jumlah Akseptor IB (Ekor)	Ekor	0,00	1.500,00	4.891,00	1.575,00	-	-	-	6.466,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Jumlah Teknologi Yang Diterapkan	Jenis	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor)	Ekor	736,00	1.197,00	1.363,00	1.224,00	-	-	-	2.587,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi)	Lokasi	1,00	1,00	2,00	1,00	-	-	-	3,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah Akseptor IB	Ekor	3.000,00	3.000,00	4.891,00	0,00	-	-	-	4.891,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan	Paket	2,00	2,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
14	Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin	Persen	80,00	80,00	80,00	0,00	-	-	-	80,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Presentase Populasi Ternak Yang Diobati	Persen	20,00	20,00	20,00	0,00	-	-	-	20,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
16	Sarana Kesehatan Hewan	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Kasus Penyakit Hewan Menular	PHMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
18	Terjaminnya Keamanan PAH/HPAH	kecamatan	17,00	17,00	0,00	17,00	-	-	-	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
19	Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan Yang Ditangani	ekor	117,00	389,00	0,00	408,45	-	-	-	408,45	Dinas Perikanan dan Peternakan
20	Jumlah Ternak Ruminansia Yang Diperiksa kesehatanya Sebelum Dipotong	ekor	5.396,00	6.753,00	0,00	7.699,00	-	-	-	7.699,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
21	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	kelompok	70,00	95,00	0,00	97,00	-	-	-	97,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
22	Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok)	kelompok	1,00	1,00	0,00	2,00	-	-	-	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
23	Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pelatihan (Orang)	Orang	12,00	8,00	0,00	50,00	-	-	-	50,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
24	Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor)	Ekor	50,00	50,00	640,00	300,00	-	-	-	940,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
25	Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor)	Ekor	200.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	-	-	-	320.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
26	Penyediaan Daging, Telur										Dinas Perikanan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat :										dan Peternakan
	Daging (Ton)	Ton	2,00	2,00	0,00	2,00	-	-	-	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Telur (Ton)	Ton	5,00	5,00	5,52	5,00	-	-	-	10,52	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Susu (Liter)	Liter	1.100,00	1.100,00	1.104,00	1.100,00	-	-	-	2.204,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
											Dinas Perikanan dan Peternakan
1	Produksi Hasil Ternak	Persen	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Jumlah Akseptor IB	Ekor	-	-	-	-	1.622,00	1.704,00	1.788,00	5.114,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam	Ekor	-	-	-	-	1.248,00	1.273,00	1.299,00	3.820,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Budidaya Ternak Ruminansia Unggul	Lokasi	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Budidaya Ternak Unggas Unggul	Lokasi	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Lokasi	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina	Orang	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	90,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina	Produsen	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	Unit	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
10	Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	-	-	-	-	70,00	70,00	70,00	210,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Kecamatan	-	-	-	-	17,00	17,00	17,00	51,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	-	-	-	-	38.195,00	39.574,00	40.952,00	118.721,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
14	Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Kecamatan	-	-	-	-	17,00	17,00	17,00	51,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) :										Dinas Perikanan dan Peternakan
	Daging	Ton	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Telur	Ton	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	15,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Susu	Liter	-	-	-	-	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
16	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	Kelompok	-	-	-	-	98,00	99,00	100,00	297,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Jumlah Peternak Yang Terlatih	Orang	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	75,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
18	Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	Penghargaan	-	-	-	-	2,00	1,00	2,00	5,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
4.01.5.06.5.07.01.00	Sekretariat Daerah										Sekretariat Daerah
4.01	Sekretariat Daerah										Sekretariat Daerah
1	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:										Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	100,00	100,00	88,00	0,00	-	-	-	88,00	Sekretariat Daerah
	- Perbup	Persen	100,00	100,00	74,00	0,00	-	-	-	74,00	Sekretariat Daerah
	- Kepbup	Persen	100,00	100,00	85,00	0,00	-	-	-	85,00	Sekretariat Daerah
2	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Persen	100,00	100,00	5,00	0,00	-	-	-	5,00	Sekretariat Daerah
3	Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	100,00	100,00	4,25	0,00	-	-	-	4,25	Sekretariat Daerah
4	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:										Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
	- Perbup	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
	- Kepbup	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
5	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
6	Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
7	Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	Bulan	12,00	12,00	12,00	0,00	-	-	-	12,00	Sekretariat Daerah
8	Paket Pelelangan Pertahun	Paket	250,00	250,00	250,00	0,00	-	-	-	250,00	Sekretariat Daerah
9	Dokumen Juknis Pengelolaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Sekretariat Daerah
10	Tambahan Aparat	Orang	25,00	25,00	25,00	0,00	-	-	-	25,00	Sekretariat Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa										
11	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
12	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00				100,00	Sekretariat Daerah
13	Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
14	Jumlah Kajian/Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	2,00	2,00	5,00	0,00	-	-	-	5,00	Sekretariat Daerah
15	Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	2,00	3,00	1,00	0,00	-	-	-	1,00	Sekretariat Daerah
16	Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-	-	100,00	Sekretariat Daerah
17	Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan	Kegiatan	1,00	2,00	2,00	0,00	-	-	-	2,00	Sekretariat Daerah
18	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	100,00	100,00	95,00	100,00	-	-	-	195,00	Sekretariat Daerah
19	Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	75,00	88,00	90,00	93,00	-	-	-	183,00	Sekretariat Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
20	Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	50,00	50,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
21	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	0,00	0,00	25,00	50,00	-	-	-	75,00	Sekretariat Daerah
22	Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0,00	10,00	10,00	0,00	-	-	-	10,00	Sekretariat Daerah
23	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	44,44	60,00	75,00	81,82	-	-	-	156,82	Sekretariat Daerah
24	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
25	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	32,59	37,24	61,54	76,92	-	-	-	138,46	Sekretariat Daerah
26	Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	0,00	0,00	45,00	50,00	-	-	-	95,00	Sekretariat Daerah
27	Persentase Penyusunan Perencanaan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
28	Persentase Data Keuangan Yang Diverifikasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
29	Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
30	Capaian Nilai Laporan	Poin	3,13	3,50	3,50	3,50	-	-	-	7,00	Sekretariat Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)										
31	Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	100 MOU/PKS/ 100%	100 MOU/PKS/ 100%	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
32	Persentase Fasilitas Naskah Kerjasama Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
33	Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Sekretariat Daerah
											Sekretariat Daerah
1	Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	-	-	-	-	3,50	3,50	3,50	10,5	Sekretariat Daerah
2	Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
3	Persentase Fasilitas Naskah Kerjasama Daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	95,00	96,00	291	Sekretariat Daerah
4	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
5	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:										Sekretariat Daerah
	- Perda	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
	- Perbup	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
	- Kepbup	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
6	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
7	Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	-	-	-	55,00	55,00	60,00	170	Sekretariat Daerah
9	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
10	Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
11	Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	-	-	-	-	50,00	75,00	100,00	225	Sekretariat Daerah
12	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	-	-	-	-	85,71	90,00	96,77	272,48	Sekretariat Daerah
13	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
14	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	-	-	-	-	92,31	96,15	100,00	288,46	Sekretariat Daerah
15	Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Sekretariat Daerah
4.02.0.00.0.00.0	Sekretariat DPRD										Sekretariat DPRD

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1.00											
4.02	Sekretariat DPRD										Sekretariat DPRD
1	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	0,00	-	-	-	10,00	Sekretariat DPRD
2	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
3	Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
4	Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
5	Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
6	Persentase data keuangan yang diverifikasi	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
7	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
8	Persentase fasilitas hubungan antar lembaga	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
9	Persentase publikasi kegiatan DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
10	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Sekretariat DPRD
											Sekretariat DPRD
7	Persentase pemenuhan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Sekretariat DPRD

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	referensi perundang-undangan										
8	Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Sekretariat DPRD
9	Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Sekretariat DPRD
5.01.5.05.0.00.0 1.00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah										Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01	Perencanaan										Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	Persen	85,00	86,00	87,00	93,00	-	-	-	180,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen	7,00	7,00	6,00	0,00	-	-	-	6,00	Badan Perencanaan Pembangunan,

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80,00	80,00	80,00	83,00	-	-	-	163,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persen	80,00	80,00	80,00	83,00	-	-	-	163,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Persen	80,00	80,00	80,00	83,00	-	-	-	163,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	80,00	80,00	80,00	83,00	-	-	-	163,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
											Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	%	-	-	-	-	94,00	95,00	96,00	285,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	%	-	-	-	-	94,00	95,00	96,00	285,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	-	-	-	85,00	87,00	89,00	261,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	-	-	-	-	85,00	87,00	89,00	261,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan	%	-	-	-	-	85,00	87,00	89,00	261,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										Pengembangan Daerah
											Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05	Penelitian dan Pengembangan										Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	80,00	85,00	0,00	93,00	-	-	-	93,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	Persen	80,00	85,00	0,00	93,00	-	-	-	93,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Tingkat ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persen	80,00	85,00	0,00	93,00	-	-	-	93,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
											Badan Perencanaan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	%	-	-	-	-	94,00	95,00	96,00	285,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	%	-	-	-	-	94,00	95,00	96,00	285,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.0.00.0.00.0 1.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah										Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02	Keuangan										Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia	Persen	71,24	71,24	50,00	78,57	-	-	-	128,57	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase Inventarisasi Asset Daerah	Persen	60,24	60,24	60,24	61,00	-	-	-	121,24	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
5	Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina	Persen	75,00	75,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	82,48	89,97	0,00	92,00	-	-	-	92,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
											Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	-	-	-	-	93,00	94,00	95,00	282,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.0.00.0.00.0	Badan Pendapatan										Badan Pendapatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2.00	Daerah										Daerah
5.02	Keuangan										Badan Pendapatan Daerah
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14,50	15,00	15,00	0,00	-	-	-	15,00	Badan Pendapatan Daerah
2	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00	36,25	-	-	-	36,25	Badan Pendapatan Daerah
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00	36,26	-	-	-	36,26	Badan Pendapatan Daerah
4	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00	36,27	-	-	-	36,27	Badan Pendapatan Daerah
5	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB	Persen	0,00	0,00	0,00	36,28	-	-	-	36,28	Badan Pendapatan Daerah
6	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB	Persen	0,00	1,19	0,00	1,19	-	-	-	1,19	Badan Pendapatan Daerah
7	Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam	Persen	0,00	0,52	0,00	0,52	-	-	-	0,52	Badan Pendapatan Daerah
8	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2	Persen	0,00	2,94	0,00	2,50	-	-	-	2,50	Badan Pendapatan Daerah
9	Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB	Persen	0,00	8,60	0,00	2,50	-	-	-	2,50	Badan Pendapatan Daerah
10	Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB	Persen	0,00	80,00	0,00	90,00	-	-	-	90,00	Badan Pendapatan Daerah

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
11	Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen	0,00	102,00	0,00	115,00	-	-	-	115,00	Badan Pendapatan Daerah
12	Persentase Pencapaian Target PBB P2	Persen	0,00	5,00	0,00	15,00	-	-	-	15,00	Badan Pendapatan Daerah
13	Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa	Persen	0,00	10,00	0,00	35,00	-	-	-	35,00	Badan Pendapatan Daerah
14	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya	Persen	0,00	95,00	0,00	95,00	-	-	-	95,00	Badan Pendapatan Daerah
15	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,00	3,5	0,00	3,50	-	-	-	3,50	Badan Pendapatan Daerah
											Badan Pendapatan Daerah
1	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);	%	-	-	-	-	67,50	70,00	72,50	210,00	Badan Pendapatan Daerah
2	Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	6,00	6,50	7,00	19,50	Badan Pendapatan Daerah
5.03.5.04.0.00.0 1.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03	Kepegawaian										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Manusia
1	Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,35	12,12	2,86	3,33	-	-	-	6,19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	100,00	100,00	50,00	100,00	-	-	-	150,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	0,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,98	3,95	0,00	0,35	-	-	-	0,35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan	Persen	99,99	93,95	66,59	100,00	-	-	-	166,59	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	0,00	0,00	3,62	100,00	-	-	-	103,62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	20,34	100,00	-	-	-	120,34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Manusia
8	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	0,69	0,00	1,26	1,28	-	-	-	2,54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	4,30	4,23	-	-	-	8,53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	-	-	-	-	3,33	3,33	3,33	9,99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Manusia
2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	-	-	-	-	1,28	1,28	1,28	3,84	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	-	-	-	-	4,23	4,23	4,23	12,69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	-	-	-	-	0,35	0,35	0,35	1,05	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Manusia
9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	Pendidikan dan Pelatihan										Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas	Persen	0,12	0,12	0,00	1,53	-	-	-	1,53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Belajar										Manusia
3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	6,49	12,52	0,00	12,15	-	-	-	12,15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek /Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	-	-	-	-	1,53	1,53	1,53	4,59	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	-	-	-	-	12,15	12,15	12,15	36,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.01.0.00.0.00.0 1.00	Inspektorat										Inspektorat
6.01	Inspektorat Daerah										Inspektorat
1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	Kegiatan	43,00	43,00	43,00	0,00	-	-	-	43,00	Inspektorat

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
2	Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas	Kegiatan	4,00	4,00	4,00	0,00	-	-	-	4,00	Inspektorat
3	Oponi Penilaian SAKIP Kabupaten	Opini	CC	B	B	BB	-	-	-	BB	Inspektorat
4	Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	WTP	Inspektorat
5	Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD	Persen	80,00	90,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Inspektorat
											Inspektorat
1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	OPD	-	-	-	-	24,00	24,00	24,00	72,00	Inspektorat
2	Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	-	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	Persen	-	-	-	-	75,00	80,00	90,00	245,00	Inspektorat
4	Capaian SAKIP Kabupaten	Opini	-	-	-	-	B	B	B	B	Inspektorat
5	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	9,00	Inspektorat
6	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	6,00	Inspektorat
7	Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan	Persen	-	-	-	-	0,75	0,80	0,90	2,45	Inspektorat

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Pemberantasan Korupsi										
7.01.0.00.0.00.0 1.00	Kecamatan Jatiluhur										Kecamatan Jatiluhur
7.01	Kecamatan										Kecamatan Jatiluhur
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Jatiluhur
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Jatiluhur
											Kecamatan Jatiluhur
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Jatiluhur
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Jatiluhur
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Jatiluhur
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Jatiluhur
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang	%	-	-	-	-	51,00	51,00	51,00	153,00	Kecamatan Jatiluhur

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Dilaksanakan										
7.01.0.00.0.00.0 2.00	Kecamatan Sukasari										Kecamatan Sukasari
7.01	Kecamatan										Kecamatan Sukasari
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Sukasari
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Sukasari
											Kecamatan Sukasari
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Sukasari
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Sukasari
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Sukasari
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Sukasari
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Sukasari

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Dilaksanakan										
7.01.0.00.0.00.0 3.00	Kecamatan Maniis										Kecamatan Maniis
7.01	Kecamatan										Kecamatan Maniis
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Maniis
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Maniis
											Kecamatan Maniis
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Maniis
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Maniis
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Maniis
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Maniis
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Maniis

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Tegalwaru										Kecamatan Tegalwaru
7.01	Kecamatan										Kecamatan Tegalwaru
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Tegalwaru
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Tegalwaru
											Kecamatan Tegalwaru
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Tegalwaru
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Tegalwaru
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Tegalwaru
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Tegalwaru
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Tegalwaru

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
7.01.0.00.0.00.0 5.00	Kecamatan Plered										Kecamatan Plered
7.01	Kecamatan										Kecamatan Plered
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Plered
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Plered
											Kecamatan Plered
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Plered
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Plered
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Plered
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Plered
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Plered
7.01.0.00.0.00.0 6.00	Kecamatan Sukatani										Kecamatan Sukatani

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
7.01	Kecamatan										Kecamatan Sukatani
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Sukatani
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	100,00	Kecamatan Sukatani
											Kecamatan Sukatani
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Sukatani
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Sukatani
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Sukatani
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Sukatani
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Sukatani
7.01.0.00.0.00.0 7.00	Kecamatan Darangdan										Kecamatan Darangdan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
7.01	Kecamatan										Kecamatan Darangdan
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Darangdan
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100	-	-	-	200,00	Kecamatan Darangdan
											Kecamatan Darangdan
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Darangdan
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Darangdan
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Darangdan
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Darangdan
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Darangdan
7.01.0.00.0.00.0 8.00	Kecamatan Bojong										Kecamatan Bojong

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
7.01	Kecamatan										Kecamatan Bojong
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Bojong
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Bojong
											Kecamatan Bojong
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Bojong
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Bojong
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Bojong
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Bojong
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Bojong
7.01.0.00.0.00.0 9.00	Kecamatan Wanayasa										Kecamatan Wanayasa
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Wanayasa
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Wanayasa
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Wanayasa
											Kecamatan Wanayasa
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Wanayasa
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Wanayasa
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Wanayasa
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Wanayasa
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Wanayasa
7.01.0.00.0.00.1 0.00	Kecamatan Kiarapedes										Kecamatan Kiarapedes
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Kiarapedes
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Kiarapedes
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Kiarapedes
											Kecamatan Kiarapedes
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Kiarapedes
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Kiarapedes
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Kiarapedes
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Kiarapedes
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Kiarapedes
7.01.0.00.0.00.1 1.00	Kecamatan Pasawahan										Kecamatan Pasawahan
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Pasawahan
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Pasawahan
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Pasawahan
											Kecamatan Pasawahan
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Pasawahan
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pasawahan
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pasawahan
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pasawahan
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pasawahan
7.01.0.00.0.00.1 2.00	Kecamatan Pondoksalam										Kecamatan Pondoksalam
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Pondoksalam
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Pondoksalam
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Pondoksalam
											Kecamatan Pondoksalam
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Pondoksalam
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pondoksalam
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pondoksalam
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pondoksalam
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Pondoksalam
7.01.0.00.0.00.1 3.00	Kecamatan Purwakarta										Kecamatan Purwakarta
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Purwakarta
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Purwakarta
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Purwakarta
											Kecamatan Purwakarta
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Purwakarta
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Purwakarta
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Purwakarta
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Purwakarta
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	51,00	51,00	51,00	153,00	Kecamatan Purwakarta
7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Babakan Cikao										Kecamatan Babakancikao
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Babakancikao
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Babakancikao
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	60,64	100,00	-	-	-	160,64	Kecamatan Babakancikao
											Kecamatan Babakancikao
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Babakancikao
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Babakancikao
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Babakancikao
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Babakancikao
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Babakancikao
7.01.0.00.0.00.1 5.00	Kecamatan Campaka										Kecamatan Campaka
7.01	Kecamatan										Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
											Campaka
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Campaka
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Campaka
											Kecamatan Campaka
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Campaka
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Campaka
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Campaka
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Campaka
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	51,00	51,00	51,00	153,00	Kecamatan Campaka
7.01.0.00.0.00.1 6.00	Kecamatan Cibatu										Kecamatan Cibatu
7.01	Kecamatan										Kecamatan Cibatu

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan Cibatu
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Cibatu
											Kecamatan Cibatu
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Cibatu
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Cibatu
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Cibatu
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	240,00	Kecamatan Cibatu
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Cibatu
7.01.0.00.0.00.1 7.00	Kecamatan Bungursari										Kecamatan Bungursari
7.01	Kecamatan										Kecamatan Bungursari
1	Frekuensi	Kali	51,00	51,00	51,00	0,00	-	-	-	51,00	Kecamatan

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan										Bungursari
2	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	77,41	73,50	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kecamatan Bungursari
											Kecamatan Bungursari
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	-	-	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Bungursari
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Bungursari
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	90,00	90,00	90,00	270,00	Kecamatan Bungursari
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Bungursari
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	Kecamatan Bungursari
8.01.0.00.0.00.0 1.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
1	Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Jumlah Forum /Tim	4,00	4,00	4,00	0,00	-	-	-	4,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:										Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	- Jumlah LSM	LSM	26,00	27,00	27,00	0,00	-	-	-	27,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	- Jumlah Kegiatan	Kegiatan	5,00	5,00	5,00	0,00	-	-	-	5,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina	Jumlah forum	3,00	3,00	3,00	0,00	-	-	-	3,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	75,00	76,00	76,00	0,00	-	-	-	76,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Persentase jumlah partisipasi aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	200,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6+7+8+9+10)	12
	masyarakat dalam kegiatan politik										
8.01.0.00.0.00.0 2.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar	Persen	-	-	-	-	100	100	100	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor / Kode / Aspek	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		2019	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	Realisasi	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = (6+7+8+9+10)$	12
	Kebangsaan;										
7	Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta	Persen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Bappelitbangda, 2020

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMN.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Adanya pandemik Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap kesehatan, sosial masyarakat dan perekonomian daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, hal ini mengakibatkan capaian target pembangunan daerah tidak dapat tercapai secara optimal. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait penanganan pandemik Covid-19 dan upaya pemulihannya, termasuk penyesuaian target capaian pembangunan daerah dan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta penyelarasan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah diterapkan kedalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Guna mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta RKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seyogyanya harus memperhatikan dan mempedomani Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta mengerahkan semua potensi dan kemampuan daerah guna tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selanjutnya RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan lain-lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar mensukseskan dan mengawal pembangunan daerah guna “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”.

